

WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka terdapat perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan program sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Blitar Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Blitar Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2), diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 21 Juni 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 142-6/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,

Juari

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		vii
DAFTAR GAMBAR		xi
BAB I	PENDAHULUAN	I – 1
1.1	Latar Belakang	I – 1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I – 5
1.3	Hubungan Antar Dokumen.....	I – 9
1.3.1	Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kota Blitar.....	I – 11
1.3.2	Hubungan RPJMD dengan RTRW Kota Blitar.....	I – 15
1.3.3	Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RPJMN Tahun 2015 – 2019	I – 17
1.3.4	Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur.....	I – 21
1.3.5	Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RTRW Provinsi Jawa Timur.....	I – 23
1.3.6	Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis SKPD.....	I – 24
1.3.7	Hubungan RPJMD dengan RKPD.....	I – 25
1.3.8	Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral.....	I – 26
1.3.9	Hubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021.....	I – 26
1.3.10	Hubungan RPJMD dengan Daerah Sekitar	I – 28
1.4	Sistematika	I – 29
1.5	Maksud dan Tujuan.....	I – 30
BAB II	GAMBARAN UMUM	II – 1
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II – 1
2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II – 1
2.1.1.1	Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	II – 2
2.1.1.2	Letak dan Kondisi Geografis.. ..	II – 3
2.1.1.3	Topografi	II – 3
2.1.1.4	Geologi	II – 3
2.1.1.5	Hidrologi	II – 4
2.1.1.6	Klimatologi	II – 6
2.1.1.7	Penggunaan Lahan	II - 7
2.1.2	Potensi Pengembangan Wilayah.....	II – 8
2.1.3	Wilayah Rawan Bencana.....	II – 10
2.1.3.1	Letusan Gunung Berapi.....	II – 10
2.1.3.2	Kebakaran.....	II – 10

2.1.3.3 Dampak Perubahan Iklim	II – 11
2.1.4 Demografi.....	II – 13
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II – 16
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II – 16
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB.....	II – 16
2.2.1.2 PDRB Per Kapita.....	II – 21
2.2.1.3 Indeks Gini.....	II – 22
2.2.1.4 Angka Kemiskinan.....	II – 23
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II – 24
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II – 24
2.2.2.2 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.....	II – 25
2.2.2.3 Angka Partisipasi Murni.....	II – 26
2.2.2.4 Angka Kematian Bayi.....	II – 27
2.2.2.5 Usia Harapan Hidup	II – 28
2.2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	II – 28
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II – 29
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II – 30
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib.....	II – 31
2.3.1.1 Pelayanan Dasar.....	II – 31
a. Pendidikan.....	II – 31
b. Kesehatan.....	II – 32
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II – 35
d. Sosial.....	II – 36
e. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	II – 37
f. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II – 38
2.3.1.2 Non Pelayanan Dasar.....	II – 39
a. Tenaga Kerja.....	II – 39
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II – 41
c. Pangan.....	II – 41
d. Pertanahan.....	II – 42
e. Lingkungan Hidup.....	II – 42
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II – 44
g. Pemberdayaan Masyarakat.....	II – 45
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II – 46
i. Perhubungan.....	II – 46
j. Komunikasi dan Informatika.....	II – 47

	k. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	II – 48
	l. Penanaman Modal Daerah.....	II – 48
	m. Kepemudaan dan Olahraga.....	II – 49
	n. Statistik.....	II – 50
	o. Kebudayaan.....	II – 50
	p. Perpustakaan.....	II – 51
	q. Kearsipan.....	II – 51
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II – 52
2.3.2.1	Kelautan dan Perikanan.....	II – 52
2.3.2.2	Pariwisata.....	II – 52
2.3.2.3	Pertanian.....	II – 54
2.3.2.4	Perdagangan	II – 55
2.3.2.5	Perindustrian	II – 55
2.3.3	Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II – 56
2.3.3.1	Perencanaan.....	II – 56
2.3.3.2	Keuangan	II – 56
2.3.3.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....	II – 61
2.3.3.4	Penelitian dan Pengembangan.....	II – 61
2.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	II – 61
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II – 61
2.4.1.1	Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita.....	II – 61
2.4.1.2	Indeks Daya Beli.....	II – 63
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur.....	II – 63
2.4.2.1	Sarana, Prasarana dan Moda Transportasi.....	II – 63
2.4.2.2	Ketaatan terhadap RTRW.....	II – 64
2.4.2.3	Luas wilayah produktif	II – 65
2.4.2.4	Fasilitas Penunjang.....	II – 65
2.4.2.5	Penggunaan Utilitas.....	II – 66
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi.....	II – 67
2.4.3.1	Angka Kriminalitas.....	II – 67
2.4.3.2	Lama Proses Perijinan.....	II – 69
2.4.3.3	Pajak dan Retribusi Daerah.....	II – 70
2.4.3.4	Peraturan Daerah.....	II – 71
2.4.3.5	Indeks Reformasi Birokrasi.....	II – 74
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II – 75
2.4.4.1	Kualitas Tenaga Kerja.....	II – 75
2.4.4.2	Rasio Ketergantungan.....	II – 76

BAB	III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III – 1
	3.1	Kinerja Masa Lalu	III – 1
	3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD 2012-2016.....	III – 1
	3.1.2	Neraca Daerah	III – 11
	3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III – 17
	3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III – 18
	3.2.2	Analisis Pembiayaan.....	III – 23
	3.3	Kerangka Pendanaan.....	III – 26
	3.3.1	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	III – 27
	3.3.2	Proyeksi Data Masa Lalu	III – 31
	3.3.3	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III – 34
BAB	IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV - 1
	4.1	Permasalahan Pembangunan.....	IV – 2
	4.1.1	Bidang Pemerintahan Umum (urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian).....	IV – 2
	a.	Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.....	IV – 3
	b.	Pengelolaan Perangkat Daerah.....	IV – 4
	c.	Manajemen Kepegawaian dan Penataan Organisasi.....	IV – 4
	d.	Penyusunan, Implementasi dan Penegakan Regulasi Daerah.....	IV – 5
	e.	Keterbukaan Informasi, Akuntabilitas Publik, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan.....	IV – 6
	f.	Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha (Private Sector).....	IV – 7
	g.	Kerjasama Internal Penyelenggara Pemerintah dan DPRD.....	IV – 7
	h.	Permasalahan Manajemen Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan.....	IV – 7
	i.	Permasalahan Perlindungan Masyarakat.....	IV - 8
	4.1.2	Bidang Ekonomi.....	IV – 9
	a.	Koperasi dan UKM.....	IV – 9
	b.	Penanaman Modal.....	IV – 9
	c.	Ketahanan Pangan.....	IV – 10
	d.	Pertanian.....	IV – 10
	e.	Energi dan Sumberdaya Mineral.....	IV – 10
	f.	Perdagangan.....	IV – 11
	g.	Industri.....	IV – 11

4.1.3	Bidang Sosial Budaya.....	IV – 11
	a. Pendidikan.....	IV – 11
	b. Kesehatan.....	IV – 12
	c. Perempuan dan Anak.....	IV – 12
	d. Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.....	IV – 12
	e. Kepemudaan dan Olahraga.....	IV – 13
	f. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).....	IV – 13
	g. Ketenagakerjaan.....	IV – 13
	h. Kearsipan dan Perpustakaan.....	IV – 14
	i. Kebudayaan dan Pariwisata.....	IV – 14
	j. Masalah Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan.....	IV – 15
4.1.4	Bidang Infrastruktur.....	IV – 15
	a. Perhubungan.....	IV – 15
	b. Pekerjaan Umum.....	IV – 16
	c. Komunikasi dan Informatika.....	IV – 16
	d. Perumahan.....	IV – 17
	e. Lingkungan Hidup.....	IV – 17
	f. Penataan Ruang.....	IV – 18
4.2	Isu Strategis.....	IV – 18
4.2.1	Isu Strategis Internal.....	IV – 18
	a. Posisi Geografis dan Geo – Ekonomi Daerah....	IV – 18
	b. Kondisi Demografi.....	IV – 19
	c. Lingkungan Sosial Budaya.....	IV – 19
4.2.2	Isu Strategis Eksternal.....	IV – 20
	a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan.....	IV – 20
	b. Keselarasan Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.....	IV – 20
	c. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).....	IV – 21
	d. Agenda Post 2015.....	IV – 21
4.2.3	Isu Strategis Kota Blitar 2016-2021	IV – 22
	1). Menjaga Keberlanjutan dan Keharmonisan Antar Pemeluk Agama di Kota Blitar	IV – 23
	2). Persaingan SDM secara Global menuntut Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Terutama dari Aspek Pendidikan, Pengetahuan dan Ketrampilan.....	IV – 24
	3). Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Produk Kota Blitar Untuk Menghadapi MEA Dan Ekonomi Global Dengan Tetap Memperhatikan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.....	IV – 24

		4).Tuntutan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Semakin Tinggi dan Didukung oleh Pengarusutamaan Pelayanan Kesehatan dalam Kebijakan Pembangunan di Tingkat Nasional	IV – 30
		5).Menurunnya Nilai-Nilai Sosial yang Berkepribadian Bangsa yang Bersumber dari Kearifan Lokal sebagai Dampak Globalisasi	IV – 31
		6).Tuntutan Masyarakat yang Semakin Tinggi Terhadap Pelaksanaan Good Governance yang Mencakup Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Publik dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan	IV – 32
BAB	V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V – 1
	5.1	Visi.....	V – 1
	5.2	Misi.....	V – 2
	5.3	Tujuan dan Sasaran.....	V – 4
BAB	VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	VI – 1
	6.1	Strategi.....	VI – 1
	6.2	Arah Kebijakan.....	VI – 4
	6.2.1	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2017).....	VI – 4
	6.2.2	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2018).....	VI – 5
	6.2.3	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2019).....	VI – 6
	6.2.4	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2020).....	VI – 7
	6.2.5	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2021).....	VI – 7
BAB	VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VII – 1
BAB	VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN.....	VIII – 1
	8.1	Program Prioritas untuk Pencapaian Visi dan Misi.....	VIII – 1
	8.2	Program Prioritas untuk Pencapaian Visi, Misi dan Layanan Urusan Pemerintah Daerah.....	VIII – 2

BAB	IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....	IX - 1
BAB	X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.....	X - 1
	10.1	Pedoman Transisi.....	X – 2
	10.2	Kaidah Pelaksanaan.....	X – 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nama, Lokasi, Luas dan Debit Sumber Mata Air Kota Blitar	II-4
Tabel 2.2	Perkembangan Rata-Rata Hari Hujan (CH) dan Curah Hujan (CH)*Kota BlitarTahun 2012-2016	II-6
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan Kota Blitar	II-7
Tabel 2.4	Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara Kota Blitar Tahun 2012 - 2016	II-8
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Kota Blitar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016	II-14
Tabel 2.6	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) Kota Blitar Tahun 2012 – 2016	II-17
Tabel 2.7	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp) Kota Blitar Tahun 2012-2016.....	II-18
Tabel 2.8	PDRB Perkapita Kota Blitar Tahun 2011 – 2015.....	II-21
Tabel 2.9	Perkara Kejahatan Dilaporkan dan Diselesaikan 2012-2016 ..	II-23
Tabel 2.10	Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Kota Blitar 2012-2016	II-26
Tabel 2.11	Realisasi Kinerja Indikator Pendidikan Kota Blitar 2012-2016	II-31
Tabel 2.12	Capaian Indikator Kesehatan Kota BlitarTahun 2012-2016.....	II-32
Tabel 2.13	Perkembangan Cakupan Layanan Sanitasi Masyarakat di Kota Blitar Tahun 2012–2016.....	II-34
Tabel 2.14.1	Realisasi Kinerja Penataan Ruang Kota Blitar 2012-2016	II-36
Tabel 2.14.2	Realisasi Pelayanan SPM Bidang Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2012-2016	II-36
Tabel 2.15	Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan	II-38
Tabel 2.16	Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2012-2016	II-38
Tabel 2.17	Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Blitar 2012–2016.....	II-41
Tabel 2.18	Perkembangan Skore PPH Ketersediaan Pangan dan Konsumsi Pangan Kota Blitar Tahun 2012-2016.....	II-41
Tabel 2.19	Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2012-2016	II-43
Tabel 2.20	Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2012-2016.....	II-49
Tabel 2.21	Perkembangan Indikator Urusan Perpustakaan Kota Blitar Tahun 2015-2016.....	II-51
Tabel 2.22	Perkembangan Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2012-2016.....	II-51
Tabel 2.23	Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di KotaBlitar Tahun 2012-2016	II-53
Tabel 2.24	Nama-nama Objek Wisata di Kota Blitar Tahun 2012-2016	II-54
Tabel 2.25	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar Tahun 2012-2016.....	II-59
Tabel 2.26	Realisasi Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2012-2016	II-60
Tabel 2.27	Perkembangan Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Blitar berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2012-2016	II-61
Tabel 2.28	Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dengan RTRW Kota Blitar	II-64
Tabel 2.29	Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Blitar 2016	II-65
Tabel 2.30	Perkembangan Jumlah Bank di Kota Blitar 2012-2016	II-66

Tabel 2.31	Perkembangan Jumlah dan Jenis Hotel/Penginapan Kota Blitar 2012-2016.....	II-66
Tabel 2.32	Perkembangan Jumlah Pelanggan Sambungan Telepon Kota Blitar Tahun 2012-2016	II-67
Tabel 2.33	Perkara Kejahatan yang Dilaporkan dan Diselesaikan 2012-2016	II-68
Tabel 2.34	TindakPidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan 2012-2016	II-68
Tabel 2.35	Kecelakaan Lalu Lintas menurut Kecamatan 2012-2016	II-69
Tabel 2.36	Standar Waktu Pelayanan Perijinan Kota Blitar	II-69
Tabel 2.37	Jenis Pajak Daerah Kota Blitar.....	II-70
Tabel 2.38	Jumlah dan Macam Retribusi Daerah Kota Blitar.....	II-71
Tabel 2.39	Peraturan Daerah yang diterbitkan di Kota Blitar 2012-2016	II-71
Tabel 2.40	.. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2014 - 2016.....	II-75
Tabel 2.41	Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Blitar Tahun 2012-2016	II-75
Tabel 2.42	Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Blitar Tahun 2011-2016.....	II-76
Tabel 2.43	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Blitar Tahun 2011 - 2016.....	II-76
Tabel 3.1	Ringkasan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2012-2016	III-2
Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar 2012-2016	III-6
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Daerah Kota Blitar 2012-2016	III-8
Tabel 3.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Blitar 2012-2016	III-10
Tabel 3.5	Neraca Daerah Kota Blitar 2012-2016	III-12
Tabel 3.6	Rasio Keuangan Daerah Kota Blitar 2012-2016	III-16
Tabel 3.7	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Blitar Tahun 2012 - 2016.....	III-19
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Kota Blitar Tahun 2012-2016.....	III-21
Tabel 3.9	Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Kota Blitar Tahun 2012-2016	III-22
Tabel 3.10	Defisit Riil Anggaran Kota Blitar Tahun 2014-2016	III-24
Tabel 3.11	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Blitar Tahun 2014-2016	III-24
Tabel 3.12	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Blitar Tahun 2014-2016	III-25
Tabel 3.13	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Blitar.....	III-29
Tabel 3.14	Target Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021	III-33
Tabel 3.15	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Blitar Tahun Sebelumnya	III-35
Tabel 3.16	Alokasi Anggaran Untuk Mendanai Pengeluaran Wajib da Mengikat serta Prioritas Utama Kota Blitar 2017-2021	III-35
Tabel 3.17	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Kota Blitar 2017-2021	III-37
Tabel 3.18	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Blitar 2017-2021	III-39

Tabel 3.19	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Blitar	III-41
Tabel 5.1	Tujuan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021	V - 4
Tabel 5.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021	V – 6
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Blitar 2016-2021	VI – 9
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Blitar RPJMD Kota Blitar 2016-2021	VII-3
Tabel 8.1	Program Prioritas Dalam APBD Kota Blitar TA. 2016	VIII-2
Tabel 8.2	Program Prioritas Dalam APBD Kota Blitar TA. 2017	VIII-30
Tabel 8.3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2018-2021	VIII-59
Tabel 9.1	Penetapan Target Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Blitar 2016-2021	IX-2
Tabel 9.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kota Blitar 2016-2021	IX-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan/proses RPJMD.....	I-3
Gambar 1.2	Diagram Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	I-11
Gambar 2.1	Peta Administratif Kota Blitar.....	II-2
Gambar 2.2	Peta Kawasan Strategis Kota Blitar.....	II-9
Gambar 2.3	Peta Rawan Bencana Gunung Kelud Kota Blitar.....	II-10
Gambar 2.4	Angka Kejadian DBD per 1000 Penduduk Kota Blitar Tahun 2012 – 2016.....	II-11
Gambar 2.5	Peta Bahaya Perubahan Iklim di Kota Blitar.....	II-12
Gambar 2.6	Peta Kerentanan Perubahan Iklim di Kota Blitar.....	II-12
Gambar 2.7	Peta Resiko Perubahan Iklim di Kota Blitar.....	II-13
Gambar 2.8	Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 – 2016 (jiwa).....	II-13
Gambar 2.9	Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar Tahun 2012 – 2016(%).....	II-14
Gambar 2.10	Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Blitar (jiwa/km ²).....	II-15
Gambar 2.11	Piramida Penduduk Kota Blitar Tahun 2016	II-15
Gambar 2.12	Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar Tahun 2012 – 2016 (Rp. 000.000).....	II-19
Gambar 2.13	Sebaran Kontribusi PDRB Kota Blitar Tahun 2016 Berdasarkan Sektor (%)	II-20
Gambar 2.14	Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2011 – 2016 (%).....	II-21
Gambar 2.15	Perkembangan Indeks Gini Kota Blitar 2011 – 2015.....	II-22
Gambar 2.16	Persentase Kasus Kriminalitas yang Diselesaikan di Kota Blitar 2012-2016	II-23
Gambar 2.17	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 (%).....	II-24
Gambar 2.18	Perkembangan Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Blitar Tahun 2012 – 2016.....	II-24
Gambar 2.19	Perkembangan Nilai Indeks Pendidikan Kota Blitar Tahun 2011-2015.....	II-25
Gambar 2.20	Perkembangan Nilai Indeks Kesehatan Kota Blitar Tahun 2011-2015.....	II-25
Gambar 2.21	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Blitar 2012 – 2016 (Tahun).....	II-26
Gambar 2.22	Perkembangan Angka Kematian Bayi Kota Blitar 2011 – 2016 (Tahun).....	II-27
Gambar 2.23	Perkembangan Angka Kematian Ibu Kota Blitar 2012- 2016 (%)	II-27
Gambar 2.24	Perkembangan Usia Harapan Hidup Kota Blitar 2011 – 2016 (Tahun).....	II-28
Gambar 2.25	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Blitar Tahun 2013 – 2016	II-28
Gambar 2.26	Persentase warisan Budaya yang Dilestarikan di Kota Blitar Tahun 2012 – 2016.....	II-29

Gambar 2.27	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Blitar Tahun 2012 – 2016 (tahun).....	II-31
Gambar 2.28	Peta Resiko Sanitasi Kota Blitar.....	II-33
Gambar 2.29	Perkembangan Nilai IKM RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar 2012-2016	II-35
Gambar 2.30	Perkembangan Indeks Gini Kota Blitar 2011-2015	II-37
Gambar 2.31	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar Tahun 2012-2016	II-39
Gambar 2.32	Perkembangan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Blitar (ton Co2e).....	II-44
Gambar 2.33	Perkembangan Persentase Cakupan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Kota Blitar Tahun 2012 – 2016	II-45
Gambar 2.34	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar Tahun 2012-2016	II-46
Gambar 2.35	Persentase Penerapan Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis TIK yang Terintegrasi di Kota Blitar Tahun 2012-2016	II-47
Gambar 2.36	Perkembangan Nilai Kontribusi PDRB ADHB Sektor UKM Kota Blitar Tahun 2012-2016 (Rp. 000.000,-) ...	II-48
Gambar 2.37	Perkembangan Nilai Investasi PMDN Kota Blitar Tahun 2012-2016 (Rp.)	II-49
Gambar 2.38	Persentase Warisan Budaya di Kota Blitar yang dilestarikan Tahun 2012-2016	II-50
Gambar 2.39	Perkembangan Nilai Kontribusi PDRB ADHB Sektor Pariwisata Kota Blitar 2012-2016 (Rp. 000.000,-) ...	II-52
Gambar 2.40	Perkembangan Nilai Kontribusi PDRB ADHB Sektor Perdagangan Kota Blitar 2012-2016 (Rp.000.000,-) ...	II-55
Gambar 2.41	Perkembangan Nilai Kontribusi PDRB ADHB Sektor Perindustrian Kota Blitar 2012-2016 (Rp.000.000,-)..	II-56
Gambar 2.42	Pengeluaran Rumah Tangga Perkapita Kota Bitar Tahun 2011 – 2015 (Rp)	II-62
Gambar 2.43	Pengeluaran Non Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kota Bitar Tahun 2011 – 2015 (Rp).....	II-62
Gambar 2.44	Pergeseran Pola Pengeluaran Rumah Tangga Perkapita Kota Bitar Tahun 2011 – 2015 (%).....	II-62
Gambar 2.45	Perkembangan Indeks Daya Beli Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 (Rp.).....	II-63
Gambar 2.46	Jumlah Penumpang yang Dilayani Angkutan Umum di Kota Blitar Tahun 2012 – 2016 (orang).....	II-64
Gambar 2.47	Persentase Kasus Kriminalitas yang Diselesaikan di Kota Blitar Tahun 2011 – 2016	II-68
Gambar 2.48	Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Blitar Yang diterbitkan selama Tahun 2011 – 2016.....	II-73
Gambar 2.49	Keputusan Walikota Blitar Yang diterbitkan selama Tahun 2011 – 2016.....	II-73

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan melihat kembali perkembangan sejarah, bahwa Kota Blitar besar dan terkenal karena nilai historisnya sebagai tempat perjuangan Laskar PETA (Pembela Tanah Air) dibawah kepemimpinan Sudanco Soeprijadi dan tempat disemayamkannya Sang Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Ir. Soekarno. Sebagai kota terkecil kedua setelah Kota Mojokerto, Kota Blitar yang terletak di bagian selatan wilayah Provinsi Jawa Timur menjadi sangat strategis sebagai salah satu pusat Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Blitar Raya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Blitar harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Daerah harus dan/atau wajib menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan dilantiknnya Bapak **MUHAMAD SAMANHUDI ANWAR, SH** sebagai Walikota Blitar dan Bapak **Drs. SANTOSO, MPd.** sebagai Wakil Walikota Blitar sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 131.35-440 tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 untuk masa bakti 2016-2021, maka melekat kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021, paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang berpedoman pada RPJPD Kota Blitar tahun 2005-2025 dan RPJMN tahun 2015-2019, juga memperhatikan rencana tata ruang (Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2011-2030). Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah Kota, program pengembangan wilayah kota, program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

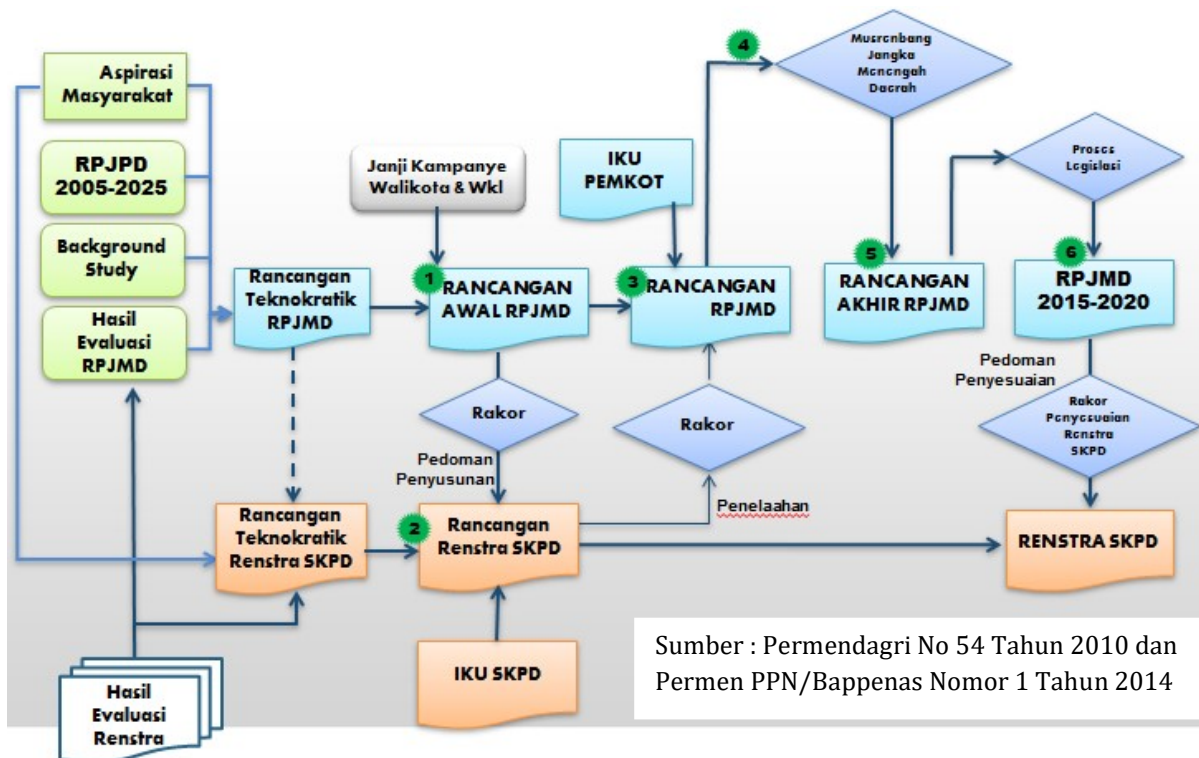
Proses penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 perlu mempertimbangkan hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya. Evaluasi atas RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara umum pelaksanaan RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 dan konsep strategi kebijakan pembangunan daerah di Kota Blitar. Penyusunan konsep strategi kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar tahun 2005–2025. RPJMD tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari tahap III RPJPD Kota Blitar tahun 2005–2025. Pada RPJPD tersebut Visi yang akan dicapai adalah “Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan Dan Jasa Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Lingkungan Hidup”. Visi RPJPD ini mengandung makna bahwa dalam 20 tahun mendatang diharapkan Kota Blitar menjadi kota yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat dan lingkungan hidup yang memadai yang dibangun dengan dasar Kota Pariwisata dan Perdagangan dan Jasa. Pencapaian visi tersebut hanya ini dapat diwujudkan jika pada proses perencanaan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan antara kegiatan pemerintah dan masyarakat.

Tahapan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah ini mengacu pada ketentuan pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RPJMD;
2. Penyusunan rancangan awal RPJMD;
3. Penyusunan rancangan RPJMD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
5. Perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
6. Penetapan Peraturan daerah tentang RPJMD.

Selanjutnya tahapan penyusunan sampai dengan penetapan peraturan daerah tentang RPJMD tersebut, digambarkan lebih detail dalam gambar berikut :

Gambar 1.1
Tahapan/proses RPJMD



Dengan adanya perubahan urusan dan kewenangan terkait pemerintahan daerah yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka menuntut adanya pemetaan urusan pemerintahan konkuren. Hasil pemetaan urusan pemerintahan konkuren akan mempengaruhi kelembagaan/organisasi, perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa muatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan warna baru bagi pelaksanaan urusan pemerintahan, baik di pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan

Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Sebagaimana ketentuan pasal 124 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa “pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan”, maka ada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berubah sebutannya menjadi perangkat daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan program-program dalam RPJMD Kota Blitar 2016-2021. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kota Blitar 2016-2021. Lebih lanjut pada penyusunan rencana tahunan, RPJMD dan Renstra-PD menjadi acuan dan dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Memasuki tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2016-2021, terdapat beberapa kebijakan Pemerintah yang berdampak pada perlunya penyesuaian atau perubahan kelembagaan/organisasi, perencanaan dan penganggaran di Indonesia. Salah satu perubahan kebijakan nasional adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian pembentukan dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja Perangkat Daerah paling lambat akhir Tahun 2016.

Berdasarkan perkembangan kondisi diatas, sangat berpengaruh terhadap substansi dan muatan materi dalam dokumen perencanaan yang sudah disusun. Salah satu diantara perubahan tersebut adalah nomenklatur perangkat daerah telah mengalami perubahan, sementara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2016-2021 masih memakai nomenklatur perangkat daerah lama, sehingga perbedaan struktur perangkat daerah ini berdampak pada penganggaran yang harus menggunakan struktur perangkat daerah baru.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 Perihal Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menginstruksikan kepada Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kab/Kota untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Merespon perubahan kebijakan di atas, maka perlu dilakukan evaluasi RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan bagi Kepentingan Umum;
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
26. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
28. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur Tahun 2011-2031;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
38. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
40. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021.
41. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan RPJMD Kabupaten/Kota dengan dokumen perencanaan lainnya diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai berikut :

- 1) RPJMD Kabupaten/Kota merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.
- 2) RPJMD Kabupaten/Kota memperhatikan Rencana Tata Ruang yang ada/telah disusun dan ditetapkan.
- 3) RPJMD Kabupaten/Kota menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan daerah yang memuat visi dan misi serta program pembangunan selama 5 (lima) tahun, perencanaannya harus berpedoman kepada RPJPD yang memiliki durasi 20 (dua puluh) tahun dan sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD. Dalam mengoperasionalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah menyusun Renstra PD yang berdurasi 5 (lima) tahun. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) sebagai dokumen perencanaan tahunan masing-masing Perangkat Daerah.

Sejalan dengan itu, penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 berpedoman kepada:

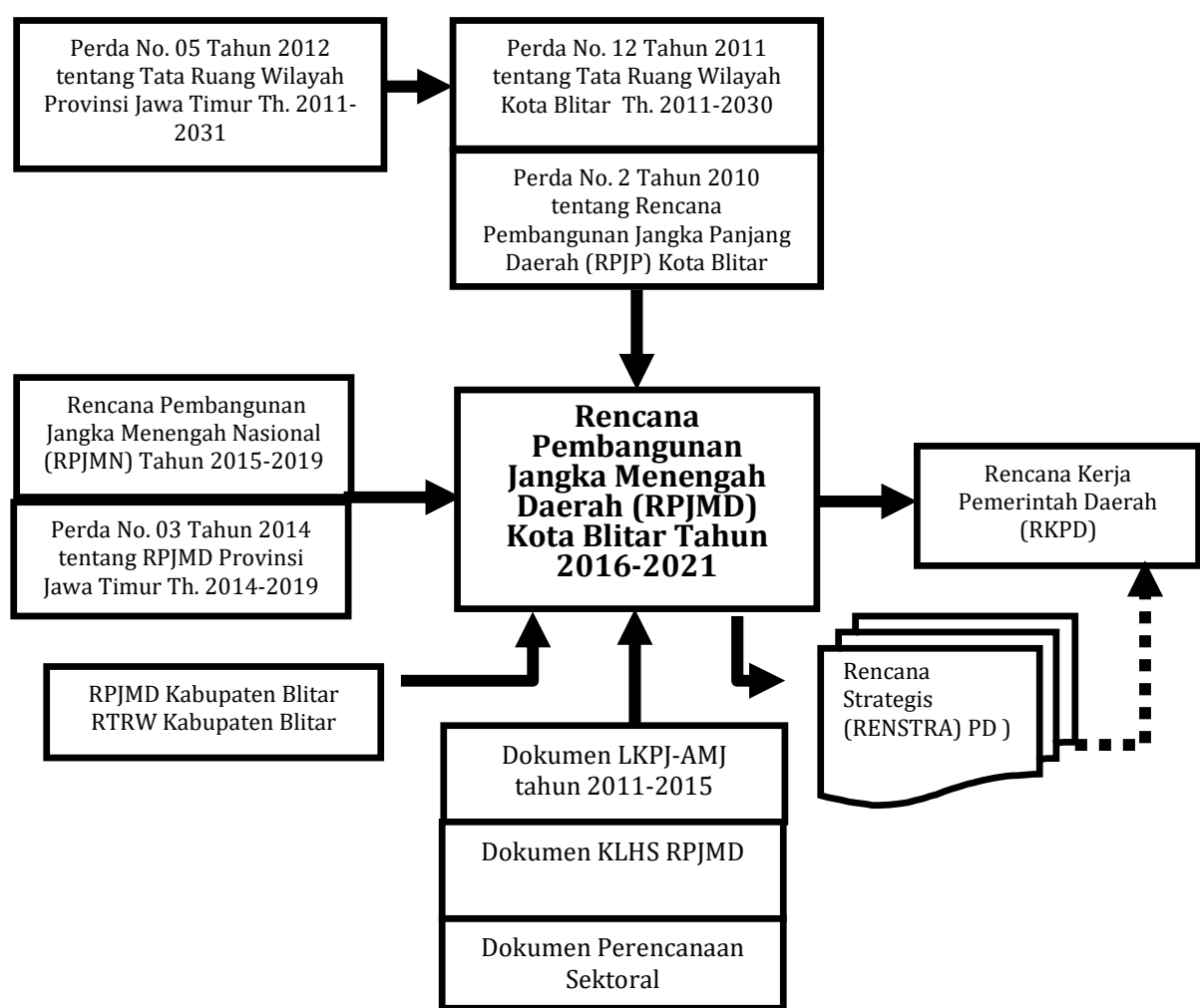
1. RPJPD Kota Blitar Tahun 2005-2025, periode Ketiga (2015-2019);
2. RTRW Kota Blitar Tahun 2011-2031.

Selain itu, penyusun RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 juga memperhatikan beberapa dokumen lain seperti :

1. RPJMN Tahun 2015 – 2019;
2. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
3. RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.
4. LKPJ AMJ Kota Blitar Tahun 2011-2015
5. RPJMD Kabupaten Blitar;
6. Dokumen KLHS Penyusunan RPJMD Kota Blitar 2016-2021.
7. Beberapa dokumen perencanaan pembangunan sektoral

Hubungan Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.2
Diagram Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.3.1 Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kota Blitar.

RPJMD tahun 2016-2021 adalah tahap III dari RPJPD Kota Blitar tahun 2005-2025. Penekanan pada lima tahun ketiga adalah momentum yang sangat menentukan dalam menguatkan identitas dan semangat nasionalisme dan patriotisme warga Kota Blitar yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan. Dengan berasumsi bahwa modalitas pembangunan daerah telah cukup baik dicapai dalam tahapan I dan tahapan II di periode sebelumnya, maka pada periode ketiga ini adalah mengisi dan memperkuat hasil pembangunan melalui penanaman dan proses internalisasi nilai-nilai masyarakat dalam pembangunan.

Pada periode ini dilakukan penguatan terhadap: (1) identitas Kota Blitar sebagai kota yang kental dengan semangat nasionalisme dan patriotisme yang diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan yang tinggi; (2) sistem nilai yang melandasi pelaksanaan pembangunan daerah; (3) arah dan strategi pengembangan kota kedepan dalam periode ini pembangunan diarahkan pada :

- Meningkatkan kualitas obyek wisata utamanya wisata sejarah dan menambah obyek wisata lainnya, akomodasi wisata serta memperluas jaringan wisata untuk semakin meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan;
- Memantapkan penyediaan layanan pendidikan berkualitas yang disertai perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan;
- Memantapkan layanan kesehatan;
- Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi;
- Mewujudkan peningkatan investasi yang mampu menjadi katalisator dalam percepatan pengembangan perdagangan barang dan jasa;
- Terwujudnya pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif;
- Memantapkan karakter dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat, melalui muatan lokal dimasukkan ke semua jenjang pendidikan;
- Semakin mantapnya budaya daerah yang tercermin pada munculnya budaya inovatif yang berorientasi pada iptek dengan tetap memelihara dan mengembangkan budaya lokal.

Keterkaitan hubungan antara kedua dokumen tersebut selanjutnya dapat disajikan sebagai berikut :



MISI RPJMD KOTA BLITAR 2016-2021

1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat

2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi

3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan

4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pada sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif

5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat Rukun Agawe Santoso.

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional

ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN RPJPD KOTA BLITAR 2005-2025

Meningkatkan kualitas obyek wisata utamanya wisata sejarah dan menambah obyek wisata lainnya, akomodasi wisata serta memperluas jaringan wisata untuk semakin meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan

2. Memantapkan penyediaan layanan pendidikan berkualitas yang disertai perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan

3. Memantapkan layanan kesehatan

4. Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi;

5. Mewujudkan peningkatan investasi yang mampu menjadi katalisator dalam percepatan pengembangan perdagangan barang dan jasa;

6. Terwujudnya pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif

7. Memantapkan karakter dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat, melalui muatan lokal dimasukkan ke semua jenjang pendidikan

8. Semakin mantapnya budaya daerah yang tercermin pada munculnya budaya inovatif yang berorientasi pada iptek dengan tetap memelihara dan mengembangkan budaya lokal

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RTRW Kota Blitar.

RTRW Kota Blitar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030. Penataan ruang Daerah bertujuan mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut didasarkan pada potensi dan karakteristik yang ada di wilayah Kota Blitar, diantaranya yaitu Kota Blitar memiliki banyak lokasi pariwisata yang bersifat kebangsaan/ kepahlawanan, salah satunya yaitu adanya makam Sang Proklamator RI Presiden Soekarno serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa terutama di pusat kota. Oleh karena itu, Kota Blitar harus berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut agar dapat *sustain/*berkelanjutan. Jadi, pada dasarnya, terdapat 4 (empat) kunci dalam tujuan di atas, yaitu:

1. Wisata Kebangsaan; Kota Blitar disebut sebagai Kota Patria karena aspek patriotik dan sejarah-sejarah kebangsaan dan kepahlawanan sangatlah kental di kota ini. Peninggalan-peninggalan sejarah dan tapak tilas perjuangan para pahlawan banyak terdapat di Kota Blitar. Hal ini dimanfaatkan Kota Blitar sebagai daerah wisata, selain guna mengenang jasa pahlawan juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepahlawanan dan kebangsaan, cinta tanah air kepada masyarakat luas pada umumnya dan kepada para generasi bangsa terutama pemuda-pemudi Kota Blitar pada khususnya.
2. Pengembangan sektor pertanian; pengembangan sektor pertanian akan mendukung keberlanjutan ketahanan pangan utamanya bagi Kota Blitar;
3. Pengembangan sektor perdagangan dan jasa; adanya pengembangan dan peningkatan pariwisata di Kota Blitar secara langsung akan berimbas pada sektor perdagangan dan jasa, dimana sektor inilah yang akan mendukung pariwisata yang ada.

Banyaknya pengunjung tentu membutuhkan berbagai kebutuhan yang tentunya dapat disediakan melalui adanya perdagangan dan jasa disekitar lokasi wisata tersebut;

4. Aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; Kota Blitar berusaha untuk mewujudkan wilayah kota yang aman dan nyaman untuk ditinggali, serta produktif dalam artian mampu memberikan hasil yang optimal dengan meningkatkan produktifitas pertanian perkotaan maupun kegiatan lain yang mampu memberikan nilai tambah bagi Kota Blitar. Sedangkan berkelanjutan dimaksudkan agar Kota Blitar tidak hanya memperhatikan generasi saat ini dalam tata ruang, namun juga bagaimana kota dapat tetap nyaman bagi generasi di masa yang akan datang dengan memperhatikan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Blitar, selanjutnya tujuan tersebut akan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan strategi pengembangan penataan ruang kota. Kebijakan penataan ruang kota Kota Blitar meliputi:

- a. pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya;
- b. pengembangan fungsi dalam mewujudkan peran regional kota;
- c. pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat hubungan antar kawasan;
- d. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
- e. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- f. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- g. pengembangan kegiatan pertanian perkotaan;
- h. peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota;
- i. pelestarian kawasan cagar budaya;
- j. pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang; dan
- k. penetapan kawasan-kawasan strategis kota.

Keselarasan RPJMD dengan RTRW Kota Blitar 2011-2031 dijelaskan bahwa Tujuan RTRW Kota Blitar 2011-2031 adalah “Mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, **perdagangan dan jasa** yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”. Tujuan ini sudah diselaraskan dalam RPJMD Kota Blitar pada Visi “sejahtera” dan Misi ke 3 yaitu “Meningkatkan **kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan**”

Penataan struktur ruang dan pola ruang di RTRW Kota Blitar sudah diakomodasi dan diperhatikan terutama ke arah pengembangan wisata kebangsaan, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan yang ditunjukkan dengan Pengelolaan Ruang Terbuka hijau (RTH) Kota Blitar (di Misi 3, tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta programnya)

1.3.3 Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RPJMN tahun 2015-2019.

RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2014-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan,
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum,
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim,
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera,

- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing,
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional,
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun agenda prioritas pembangunan yang ditetapkan yaitu Sembilan agenda prioritas dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMN. Sembilan agenda itu disebut sebagai Nawa Cita. Berikut isi Nawa Cita :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.

9. Memperteguh Keb-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.

Agar RPJM Nasional mampu dioperasionalkan secara optimal dan tercipta harmonisasi dalam pembangunan, RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 wajib mengacu pokok-pokok 'Nawa Cita' tersebut. Pada konteks inilah pendekatan atas bawah (*top down*) diimplementasikan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari 122 Program prioritas nasional, terdapat 60,66% sudah diadopsi dalam Program RPJMD Kota Blitar 2016-2021. Sedangkan program prioritas nasional yang tidak bisa dilaksanakan oleh Kota Blitar antara lain Kelautan dan Kemaritiman, Daerah Perbatasan, Daerah Tertinggal dan Desa dan Kawasan perdesaan, karena secara faktual Kota Blitar tidak memiliki wilayah tersebut.

Persandingan RPJMD Kota Blitar 2016-2021 dengan Nawa Cita dalam RPJMN 2014-2019 diuraikan dalam skema kesesuaian RPJMD dengan RPJMN berikut.

RPJMD KOTA BLITAR 2016-2021**Visi**

"Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Bersama APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021"

1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pada sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif
5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat Rukun Agawe Santoso.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional

NAWA CITA RPJMN 2015-2019**Visi**

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

- 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
- 2 Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
- 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
- 4 Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan pro-gram Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar
- 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik
- 8 Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional
- 9 Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga

1.3.4 Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur .

Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah **“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”**. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Timur lebih sejahtera dan mandiri bersama wong cilik. Visi tersebut diuraikan dalam beberapa misi, yaitu: 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, 2) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi, 3) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang, 4) Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, 5) Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Sama halnya dengan RPJM Nasional, substansi RPJMD Propinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 juga wajib menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 sehingga tercipta sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah. Untuk mengetahui hubungan antara ke-2 dokumen perencanaan ini dapat dilihat dalam Diagram Persandingan antara RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 berikut.



1.3.5 Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RTRW Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan aspek tata ruang. Tata ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek kewilayahan dalam bentuk alokasi kegiatan – kegiatan sosial – ekonomi, pusat pelayanan, infrastruktur, serta permukiman yang akan saling memperkuat satu dengan lainnya dalam konteks pengembangan kota yang berkelanjutan.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur No. 5 tahun 2012 arah Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pembangunan di Kota Blitar adalah tentang rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem jaringan sarana perwilayahan di Provinsi Jawa Timur. Pada sistem kota-kota di Jawa Timur, perkotaan sebagai pusat pelayanan dan kegiatan dapat dikelompokkan berdasarkan hierarkinya sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional yaitu kota atau perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional. Kota yang diklasifikasikan sebagai PKN adalah wilayah Surabaya Metropolitan Area.
2. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yaitu kota atau perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam lingkup wilayah, meliputi Kota Jember, Kediri, Kota Madiun, dan Kota Malang. Selain itu, daerah yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKW adalah daerah-daerah yang potensial atau daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan relatif tinggi, yaitu Kota Jember dan Kota Blitar.

Kebijakan yang telah diarahkan terhadap Kota Blitar dalam kerangka RTRW Propinsi, membawa beberapa konsekuensi terutama yang terkait penyediaan fasilitas dan ruang untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan. Adapun penyediaan ruang yang perlu dilakukan sesuai dengan arahan dari kebijakan regional RTRW Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

- Ruang untuk pengembangan Pendidikan Tinggi;
- Ruang untuk pengembangan pasar umum, perdagangan semi modern, perbankan, hotel, tempat hiburan, toko swalayan, dan PKL (Pedagang Kaki Lima).

- Ruang untuk pengembangan rumah sakit Tipe B, rumah sakit swasta, dan klinik kesehatan.
- Ruang untuk pengembangan kawasan wisata (akomodasi, wisata kota, revitalisasi kawasan wisata lama).
- Ruang untuk pengembangan fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan.
- Pengembangan ruang untuk fasilitas olah raga.
- Ruang untuk pengembangan home industri.
- Ruang untuk pengembangan jalan lingkar (Outer dan Inner Ring Road).

1.3.6 Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.

Renstra PD sebagaimana diatur dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Hubungan nyata RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Blitar. IKU selain menggambarkan indikator dan target kinerja tugas dan fungsi Perangkat Daerah, juga sebagai sebuah alat ukur komprehensif bagaimana target kinerja Pemerintah Daerah didukung oleh indikator dan target kinerja Perangkat Daerah. Maka, penyusunan IKU Pemerintah Daerah harus benar-benar mempertimbangkan IKU PD,

sebagai sebuah pemicu dan pendorong pencapaian kinerja IKU Pemerintah Kota Blitar. RPJMD Kota Blitar harus dipastikan akan dapat tercapai indikator dan target kinerjanya yang sudah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama, oleh program dan kegiatan Perangkat Daerah.

1.3.7 Hubungan RPJMD dengan RKPD

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 99 huruf d, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Blitar yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

1.3.8 Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kota Blitar. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain: Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan *Sustainable Development Goals*(SDG's) di Indonesia, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral Provinsi Jawa Timur yang perlu diperhatikan yaitu: RAD *Sustainable Development Goals* (SDG's) Provinsi Jawa Timur, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Timur, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Timur, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Timur, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Timur. Beberapa dokumen pembangunan sektoral Kota Blitar yang perlu diperhatikan yaitu : RAD Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Pengembangan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah, Strategi Sanitasi Kota, Rencana Aksi Kota Pusaka, Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sistem Inovasi Daerah Kota Blitar.

1.3.9 Hubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD Kota Blitar 2016-2021

KLHS merupakan instrument pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penguatan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam merupakan hal yang relative baru di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Metode kajian meliputi kajian pustaka secara terfokus. KLHS sebagai sebuah kelembagaan baru dalam penyelenggaraannya secara spesifik mendasarkan pada asas; penilaian mandiri (self assessment), akuntabel dan partisipatif. Dalam menyusun KLHS ada empat filosofi yang harus dipegang sebagai perinsipnya, yaitu : (1) Self assesment yang berarti dalam KLHS “introspeksi” untuk menghasilkan sesuatu

yang lebih baik. (2) *Planing Process Improvement* yang berarti dalam KLHS memperkaya proses perencanaan yang telah ada (KLHS, setidaknya ada 6 kajian dan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPLH. (3) *Capacity Building* yang berarti dalam KLHS peningkatan kapasitas dalam proses penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP). (4) *Influencing Decision* artinya dalam KLHS rekomendasinya mempengaruhi keputusan yang diambil untuk menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil kajian maka Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh wilayah Indonesia wajib segera melaksanakan, KLHS dalam RTRW dan RPJMD Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan menugaskan Bappeda Propinsi dan atau Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan, dengan berpedoman pada surat edaran bersama Menteri dalam Negeri RI dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI. Dalam mendukung pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 18 (2) dan Pasal 19 ayat (1) UU PPLH perlu segera dan sudah mendesak dibuatnya Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai panduan.

KLHS yang telah disusun Pemerintah Kota Blitar adalah suatu dokumen telaah (*assessment document*) yang disertai dengan rekomendasi terhadap isu-isu lingkungan hidup dari kebijakan, rencana atau program yang telah tersusun/terlaksana salah satunya adalah RPJMD Kota Blitar. Rekomendasi tersebut umumnya berupa kegiatan-kegiatan yang sebaiknya dilakukan Pemerintah Kota Blitar untuk meminimalisir dampak lingkungan yang mungkin terjadi, antara lain:

1. Peningkatan nilai - nilai kebangsaan, nilai - nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal untuk mengatasi terjadinya pengikisan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal.
2. Peningkatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau di seluruh wilayah Kota Blitar untuk mengatasi kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik.
3. Peningkatan fungsi resapan dan keanekaragaman hayati melalui pembangunan sumur resapan dan embung, penanaman pohon dan pengembangan Green House untuk mengatasi menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya air

4. Peningkatan pengelolaan Pedagang Kaki Lima seluruh wilayah Kota Blitar untuk mengatasi kondisi kesemrawutan penataan PKL.
5. peningkatan penguasaan lahan oleh Pemerintah Kota dan pengendalian pemanfaatan lahan sebagai pengendalian alih fungsi lahan dalam usaha mengatasi penurunan luasan lahan pertanian.

1.3.10 Hubungan RPJMD Kota Blitar 2016-2021 dengan Daerah sekitar

Keterkaitan RPJMD dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya telah diuraikan secara jelas pada bagian sebelumnya, disamping itu juga perlu memperhatikan kebijakan pembangunan daerah sekitar. Perlunya suatu daerah menelaah RPJMD daerah sekitar karena adanya : 1). persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan; 2). persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; 3). adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan 4). kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Mengingat letak geografis Kota Blitar yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Blitar, maka perencanaan pembangunan Kota Blitar perlu disinergikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Blitar. Secara substansi perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 telah memperhatikan keterkaitan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Blitar.

Secara umum ada beberapa strategi pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 yang mengarah pada pola kerjasama dan kemitraan untuk membangun kawasan Blitar Raya (Kabupaten dan Kota Blitar). Hal ini terlihat jelas adanya pengembangan sistem jaringan transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan wilayah yang diarahkan pada pengembangan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Blitar dengan Pantai Serang untuk menyatukan Jalan Lintas Selatan (JLS).

Disamping itu, juga direncanakan pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri Kabupaten Blitar, melalui kerjasama pengembangan obyek wisata unggulan Makam Bung Karno (MBK) dengan Candi Penataran dan obyek wisata potensial lainnya.

1.4 Sistematika

Sistematika Penyusunan RPJMD 2016-2021 Kota Blitar sebagai berikut

Bab 1. Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Blitar.

Bab 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Blitar secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas di antaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

Bab 3. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

Menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan (proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 5 tahun).

Bab 4. Analisis Isu Isu Strategis

Menjelaskan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis berdasarkan analisis kondisi lingkungan eksternal dan internal.

Bab 5. Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Menjelaskan tentang Visi, Misi Tujuan dan Sasaran.

Bab 6. Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Bab 7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang uraian hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Disajikan juga penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih..

Bab 8. Indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

Menjelaskan tentang hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab

Perangkat Daerah. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Bab 9. Penetapan Indikator Kinerja daerah

Menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah setiap tahun selama masa jabatan sampai dengan akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari komitmen target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Bab 10. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dari RPJMD kota Blitar Tahun 2016-2021.

1.5 Maksud Dan Tujuan

Komitmen membangun dari Pemerintah Kota Blitar periode 2016 - 2021, yang selanjutnya dituangkan ke dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 dengan maksud untuk :

- a. Menjamin penyelenggaraan pembangunan yang berdasarkan pada makna dan/atau prinsip-prinsip demokrasi, kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional dan kesatuan Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Kota Blitar, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Menjamin penyelenggaraan pembangunan yang sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tersebut.
- c. Menjamin penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dengan azas umum penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 ini adalah untuk :

- a. Memaksimalkan Koordinasi, Integrasi atau Sinergi, Sinkronisasi, Simplifikasi (KISS) antar pelaku pembangunan dan/atau antar Perangkat Daerah, ruang dan waktu, serta antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Blitar;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan guna mewujudkan pencapaian penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pembangunan Kota Blitar; dan
- c. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Blitar periode tahun 2016-2021.

B A B II

GAMBARAN UMUM

Gambaran umum dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 yang disusun pada awal tahun 2017 ini tetap menyajikan data dan informasi selama 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu data kondisi tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang disajikan sesuai aspek geografi dan demografi; kesejahteraan masyarakat; pelayanan umum; dan aspek daya saing daerah, sebagai dasar penentuan capaian sampai dengan tahun 2021 nanti. Aspek geografi merupakan aspek sumber daya alam yang ada berdasarkan tata letak suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif terhadap wilayah lainnya, dan aspek demografi adalah mempelajari tentang aspek sumber daya manusia berdasarkan struktur, komposisi dan persebaran penduduk.

Aspek kesejahteraan masyarakat adalah mengkaji tentang tingkat perekonomian dan kajian sosial masyarakat dalam suatu wilayah. Aspek pelayanan umum memberikan gambaran tentang jenis-jenis layanan umum yang diberikan oleh pemerintah yang dapat diperoleh masyarakat, serta aspek daya saing daerah menjelaskan tentang kemampuan-kemampuan unggulan daerah yang selanjutnya menjadi nilai jual daerah dan dapat diperbandingkan secara relatif terhadap wilayah lain.

Berikut ini diuraikan gambaran kondisi umum Kota Blitar yang merupakan kondisi awal perencanaan dokumen perubahan RPJMD Kota Blitar (2012-2016) serta memuat informasi dan potensi sebagai bahan penyusunan analisis dan isu-isu daerah, sekaligus bahan analisis, prediksi dan titik awal dalam perencanaan lima tahun kedepan.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Blitar Bumi Bung Karno juga dikenal dengan sebutan Kota Patria dan Kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Blitar. Meskipun status pemerintahannya kota, tidak serta-merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakatnya seperti kota-kota

besar, termasuk luas wilayahnya tidak mencerminkan sebuah kota yang luas. Level yang dicapai kota Blitar digolongkan sebagai kota sedang.

Kota Blitar merupakan tempat disemayamkan Bung Karno, Sang Proklamator, Presiden Pertama RI, idiolog dan pemikir besar dunia yang dikagumi baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Kota Blitar juga merupakan salah satu tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia, dimana sebelum dicetuskannya Proklamasi ditempat ini telah diserukan kemerdekaan Indonesia yang diikuti dengan pengibaran Sang Merah Putih yang kemudian berujung pada Pemberontakan PETA oleh Sodanco Supriyadi.

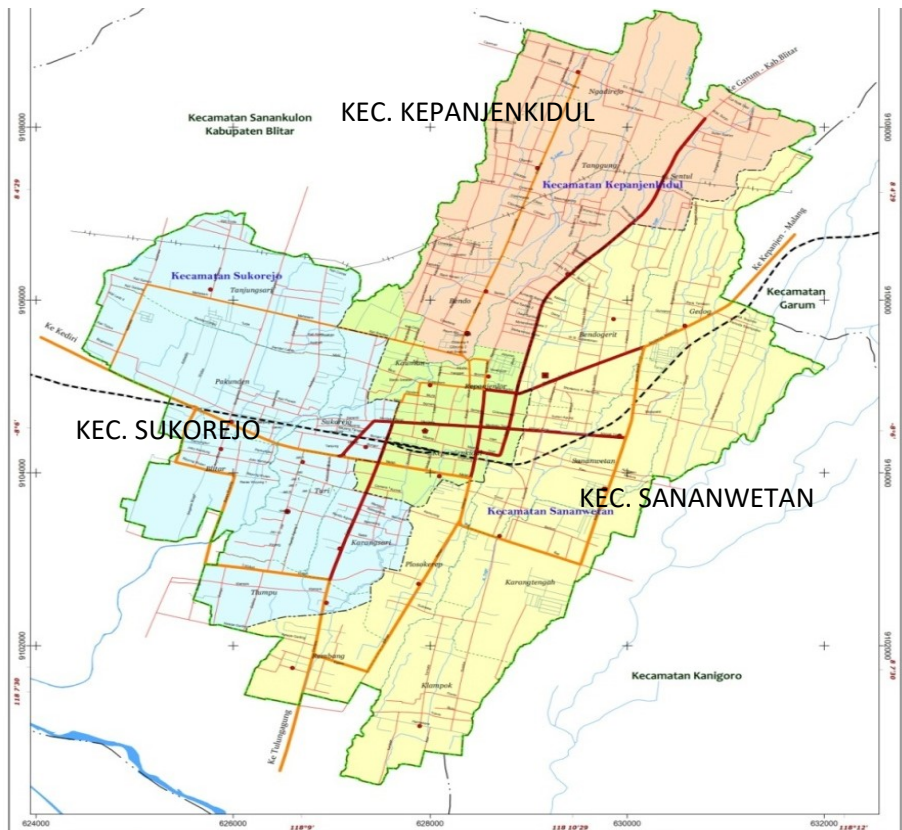
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Blitar merupakan wilayah kota terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto, semua wilayah dikelilingi Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok
- Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro
- Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok.

Kota Blitar memiliki luas wilayah 32,58 km² dan terbagi menjadi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km², Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 km², dan Kecamatan Sananwetan 12,15 km². Masing-masing kecamatan memiliki 7 (tujuh) kelurahan yang kemudian terbagi dalam 187 Rukun Warga (RW) dan 638 Rukun Tetangga (RT).

Gambar 2.1
Peta Administratif Kota Blitar



Sumber : RTRW Kota Blitar 2011-2030

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Blitar secara geografis terletak di ujung selatan Propinsi Jawa Timur dengan ketinggian 156 meter dari permukaan air laut, pada koordinat 112° 14'-112° 28' Bujur Timur dan 8° 2' - 8° 10' Lintang Selatan dan memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24°C-34°C karena lokasinya berada di kaki Gunung Kelud. Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan potensi di luar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

2.1.1.3 Topografi

Ketinggian wilayah di Kota Blitar rata-rata adalah 156 meter, dengan rincian untuk wilayah Kota Blitar bagian utara ketinggiannya adalah 245 meter dengan tingkat kemiringan 2-15°, bagian tengah memiliki ketinggian rata-rata sebesar 185 meter dengan kemiringan 0-2°, sedangkan untuk wilayah bagian selatan memiliki ketinggian rata-rata sebesar 140 meter dengan tingkat kemiringan berkisar dari 0-2°.

2.1.1.4 Geologi

Jenis tanah yang ada di Kota Blitar termasuk dalam jenis tanah litosol dan regosol dengan tingkat kesuburan yang cukup baik akibat pengaruh dari debu vulkanik Gunung Kelud. Jenis tanah regosol berasal dari bahan vulkanis serta batuan endapan kapur, dimana tanah regosol yang ada di Kota Blitar berasosiasi dengan tanah litosol yang berasal dari batuan beku basis sampai intermedier. Tanah Regosol coklat kelabu merupakan tanah dengan bahan induk abu/pasir vulkan masam yang bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60%. Tanah ini sesuai untuk penggunaan hutan primer dan sekunder, semak belukar, palawija dan rerumputan.

Kedalaman efektif tanah yang ada di Kota Blitar rata-rata diatas 90 cm, sehingga cocok untuk vegetasi dengan mengoptimalkan pertumbuhan akarnya. Sedangkan untuk tekstur tanah termasuk dalam tekstur tanah halus dengan jenis tanah litosol dan regosol yang mencakup 75% dari seluruh wilayah kota. Hal ini berarti tanah yang ada mempunyai kemampuan menahan dan mengikat air cukup besar. Sisanya 25% memiliki tekstur sedang dengan sifat kurang mampu menahan air, namun jika dilihat dari penyediaan unsur hara maka tekstur tanah ini relatif baik dibandingkan dengan tekstur sedang.

2.1.1.5 Hidrologi

Dilihat dari aspek hidrologi, sungai utama yang melintasi Kota Blitar dari utara ke selatan adalah Sungai Lahar. Sungai Lahar ini memiliki panjang ±7,85 km dengan hulu sungainya berada di kaki Gunung Kelud dan bermuara ke Sungai Brantas. Selain Sungai Lahar, ada beberapa sungai-sungai kecil/anak sungai lain, baik yang berasal dari limpahan mata air ataupun sungai alami lainnya. Dari bentuk topografi Kota Blitar, maka arah aliran air akan menuju ke arah selatan. Kota Blitar jika dilihat secara hidrologis memiliki tiga wilayah DPS (Daerah Pengairan Sungai), yaitu DPS Lahar, DPS Cari dan DPS Sumber Nanas. Selain itu Kota Blitar juga memiliki beberapa lokasi sumber mata air yang tersebar diseluruh wilayah Kota Blitar dengan jumlah keseluruhan 31 lokasi. Kondisi air permukaan di Kota Blitar secara umum masih bagus. Beberapa sumber air permukaan di Kota Blitar adalah mata air dan sungai. Mayoritas air permukaan di Kota Blitar digunakan untuk pengairan. Kondisi mata air mulai mengkhawatirkan karena banyak yang debitnya mengecil bahkan terancam mati. Hal ini memerlukan penanganan serius. Berikut adalah data eksisiting 31 mata air yang sudah diukur debitnya sampai tahun 2016 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Nama, Lokasi, Luas dan Debit Sumber Mata Air
Kota Blitar

No .	Kecamatan/ Kelurahan	Nama Mata Air/Sum- ber	Lingkungan	Posisi		Elevasi	Luas	Q
				X	Y	(m)	(m ²)	(lt / dt)
A.	Kecamatan Kepanjenkidul							
1.	Sentul	Saman	Jurang Sembot	630737	9107230	240	285	11
2.		Mbah Judel	Jati Malang	631113	9108002	253	200	1.9
3.		Kucur	Jurang Sembot	630164	9107084	230	143	1.2
4.		Kucur Ripik						
5.	Ngadirejo	Jajar	Bangsongan	629268	9108552	243	960	50.6
6.	Kepanjenkidul	Sumber Ndongki						
B.	Kecamatan Sukorejo							
7.	Pakunden	Wayuh	Kundi	626239	9105142	189	506	15.5
8.		Jaran	Kundi	626587	9105004	175.5	300	15.4
9.		Patihan/Beli kPitek	Tambak Boyo	625789	9105716	178	150	1.2
10.		Tanjung Sari	Tanjung Sari	627383	9105934	191	100	3.4
11.		Lumbu		627332	9105226	174.5	200	12
12.		Sumber Lanang						
13.		Sumber Wedok						
14.		Sukorejo	Dimoro	Dimoro	627770	9105364	180	75
15.	Kerantil		Kerantil	627449	9105386	176	16	20
16.	Tlumpu	Rondo Kuning/Corah	Ki Ageng	626686	9102584	153	100	0.5

No .	Kecamatan/ Kelurahan	Nama Mata Air/Sum- ber	Lingkungan	Posisi		Elevasi	Luas	Q
				X	Y	(m)	(m ²)	(lt / dt)
17.	Blitar	Tengis / Tiloro	Aryo Blitar	626028	9103760	162	300	5
18.	Turi	Jati		627312	9103756	157	15	1
19.	Karangsari	Sumber Krembul						
C.	Kecamatan Sananwetan							
20.	Bendogerit	Sendang	Sendang	629342	9105146	193	180	16.5
21.		Urung - Urung		630330	9105100	198	150	Mati
22.	Gedog	Ngrebo	Ngrebo	630949	9104552	193	12	9.95
23.		Ngegong	Ngegong	631146	9105768	211	60	9.9
24.		Gedok	Gedok	630717	9106406	248	100	0.5
25.	Sananwetan	Kotes	Bendil	630769	9104902	198	50	4.2
26.		Nglobong	Sanan Wetan	629797	9104340	170	100	33
27.		Sumber Gede						
28.	Klampok	Gempur	Sawah	627912	9101588	151	50	0.6
29.		Ubalan	Sawah	628517	9102124	153	150	6.9
30.	Plosokerep	Aren		628650	9103870	167	24	22
31.		Mbah Bawuk		628510	9102908	170	13	42.7

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2017

Kota Blitar hanya memiliki satu sungai besar yang mengalir dari sisi utara sampai selatan Kota Blitar yaitu sungai Lahar yang hulunya ada di Kabupaten Blitar. Panjang sungai lahar yang melintasi Kota Blitar ± 7 km. Selain itu hanya anak sungai atau sungai dari mata air yang ada di wilayah Kota Blitar.

Secara umum kondisi air badan air Kota Blitar masih relatif baik. Pemantauan kualitas air badan air rutin dilakukan sejak tahun 2012 pada badan air yang menjadi titik pembuangan dari air limbah industry tahu yaitu sungai sumber wayuh dan sumber jaran serta pertemuan kedua sungai itu yaitu kali tempur, dengan hasil pengujian kualitas air sebagai berikut:

1) Kali tempur

Kondisi kali Tempur untuk jenis-jenis parameter pada umumnya masih dibawah standar baku mutu air namun untuk parameter tertentu sudah melebihi dari standart baku mutu dan meningkat dari tahun 2013 , 2014, 2015 yaitu BOD dengan hasil 26,75 mg/l tahun 2013, di tahun 2014 menjadi 175,5 mg/l , tahun 2015 turun menjadi 19,70 mg/l, di mana baku mutu sebesar 6 mg/l, sedangkan untuk parameter COD tahun 2013 pada angka 57,87 mg/l di tahun 2014 menjadi 506,8 mg/l, tahun 2015 sebesar 37,80 mg/l di mana standart baku mutu sebesar 50 mg/l. Parameter TSS tahun 2013 sebanyak 52,70 mg/l, tahun 2014 sebesar 190,20 mg/l, tahun 2015 sebanyak 161,90 mg/l masih dibawah standart baku mutu sebesar 400 mg/l . Untuk parameter Phospat total juga menunjukkan angka diatas standart baku

mutu yaitu pada angka 1360 mg/l di tahun 2013 dan menjadi 1455 mg/l di tahun 2014, Hasil parameter minyak dan lemak menunjukkan angka 3,0 mg/l di tahun 2013 dan di tahun 2014 meningkat menjadi 3,6 mg/l dari standart baku mutu 1 mg/l, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencemaran mengalami kenaikan .

2) Middle Sungai Sumber Wayuh

Dari hasil pemeriksaan laboratorium tahun 2012 sampai tahun 2015 didapatkan bahwa ada parameter yang mengalami penurunan signifikan yaitu BOD dan COD dengan nilai BOD 19 mg/l dan COD 39,6 mg/l.

3) Hulu Sungai Sumber Jaran

Hasil pemeriksaan laboratorium hulu sungai sumber jaran tahun 2012 sampai tahun 2015 menunjukkan angka – angka di bawah standart baku mutu, kecuali untuk kandungan COD pada tahun 2015 menunjukkan angka diatas baku mutu.

4) Middle Sungai Sumber Jaran

Dari hasil pemeriksaan laboratorium tahun 2012 sampai tahun 2015 didapatkan hasil bahwa ada parameter yang rata – rata masih di atas baku mutu yaitu BOD dan COD.

2.1.1.6 **Klimatologi**

Kota Blitar memiliki tipe iklim C-3 yang ditandai dengan adanya 2 kali pergantian musim setiap tahunnya. Klimatologi di Kota Blitar terbagi atas keadaan curah hujan dan intensitas hujan. Kondisi iklim ditandai dengan adanya bulan basah dan bulan kering. Posisi Kota Blitar tidak jauh dari Gunung Kelud dengan ketinggian 156 diatas permukaan laut, sehingga berpengaruh terhadap curah hujan dan hari hujan. Perkembangan curah hujan dan hari hujan di Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 2
Perkembangan Rata-Rata Hari Hujan (CH) dan Curah Hujan (CH)*
Kota Blitar Tahun 2012-2016

Bulan	2012		2013		2014		2015		2016	
	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH
Januari	17	24.23	18	18.55	19	17.4	17	24.23	24	12,00
Februari	12	15.76	15	12.3	16	26.15	12	15.76	9	23
Maret	15	16.68	14	19.64	13	16.91	15	16.68	6	16
April	7	20	8	14.23	12	16.56	7	20	12	16
Mei	8	21.36	6	19.33	10	15.57	8	21.36	3	18
Juni	3	11.23	1	3	11	22.55	3	11.23	4	31
Juli	0	0	2	3	6	13.36	0	0	1	3
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	4	22.89	3	19.75	3	8.38	4	22.89	0	0
November	14	14.82	10	14.92	14	22.12	14	14.82	9	21
Desember	14	15.42	16	16.17	18	33.11	14	15.42	17	26

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)- Karangploso
 Keterangan : * dalam mm

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah hari hujan dan intensitas curah hujan di Kota Blitar selama 5 tahun terakhir sangat fluktuatif. Terjadi peningkatan jumlah bulan yang mengalami hujan menjadi 3 (tiga) bulan tanpa hujan di Tahun 2016. Di sisi lain terjadi peningkatan rata-rata curah hujan bulanan mencapai angka tertinggi pada dan bulan April 2016 (372 mm). Ini menunjukkan perubahan hari dan curah hujan sebagai dampak perubahan iklim sudah dirasakan di Kota Blitar. Hal ini berdampak negatif pada aktivitas perekonomian kota, terutama di sektor-sektor yang sangat bergantung kepada intensitas hujan, seperti sektor pertanian.

Seperti halnya dengan curah hujan, rata-rata suhu udara juga mengalami kenaikan. Berdasarkan data Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika Karangposo, Malang, salam rentang waktu 2003-2010 suhu rata-rata udara Blitar (Kabupaten dan Kota) sebesar 27,3°C. Pada tahun 2012, suhu rata-ratanya meningkat dan mencapai 28,1°C dan pada Tahun 2016 mencapai 28,8°C. Adanya perubahan suhu ini akan mempengaruhi beberapa sektor, antara lain sektor kesehatan, sektor air bersih serta sektor pertanian (perubahan musim panen dan kegagalan panen). Gangguan terhadap sektor-sektor tersebut akan mempengaruhi keberlanjutan kegiatan perekonomian dan pembangunan kota.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Sebagai wilayah perkotaan, ketersediaan lahan di Kota blitar relatif terbatas, dengan sebaran penggunaan lahan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penggunaan Lahan Kota Blitar

No	Uraian	Penggunaan Lahan Tahun 2016 (ha)	Prosentase
I	KAWASAN LINDUNG		
1	Kawasan Resapan Air	148	4.29%
2	Kawasan Perlindungan Setempat	58	1.68%
3	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	549.5	15.92%
II	KAWASAN BUDIDAYA		
1	Kawasan Pertanian	1,087	31.49%
2	Kawasan Permukiman	1,236	35.81%
3	Kawasan Perdagangan dan Jasa	165	4.78%
4	Kawasan Perkantoran	63	1.83%
5	Kawasan Pelayanan Pendidikan	74	2.14%
6	Kawasan Industri	38	1.10%
7	Kawasan Pelayanan Kesehatan	13	0.38%
8	Kawasan Pariwisata	20	0.58%

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2017

Dari tabel di atas, sebagian besar wilayah Kota Blitar berupa kawasan permukiman (35,81%) dan pertanian (31,49%). Hingga Tahun 2016 persentase Ruang Terbuka Hijau adalah 15,92% dari seluruh wilayah Kota Blitar. Khusus untuk RTH publik, pada Tahun 2015 mencapai 10,42%. Diharapkan pada Tahun 2030 luas Ruang Terbuka Hijau akan dapat mencapai 30% sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah dalam bentuk penambahan luasan wilayah sudah tidak memungkinkan. Namun, potensi pengembangan wilayah bagi Kota Blitar dapat diartikan dengan pengembangan kemampuan wilayah. Hal ini mengingat dengan terus meningkatnya jumlah penduduk, dan semakin banyaknya jenis kegiatan usaha baik dari segi perdagangan dan jasa, maupun industri pengolahan, akan menimbulkan tuntutan pengembangan wilayah yang juga semakin besar. Dorongan terhadap pengembangan wilayah tersebut merupakan bentuk-bentuk tuntutan dari kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan pelayanan baik dari sektor pendidikan, kesehatan, industri, perdagangan dan jasa, komunikasi serta berbagai bentuk tuntutan pelayanan yang lainnya .

Karena keterbatasan lahan, Kota Blitar tidak memiliki potensi sumber daya alam yang memadai. Penggerak ekonomi Kota Blitar tidak dari sektor primer, tetapi sektor tersier (perdagangan barang dan jasa) sehingga pengembangan wilayah diarahkan pada pengembangan kawasan wisata dan kawasan perdagangan barang dan jasa. Potensi pengembangan wisata Kota Blitar relatif besar dengan keberadaan Makam Bung Karno sebagai icon wisata Kota Blitar. Perkembangan jumlah wisatawan Kota Blitar dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara
Kota Blitar Tahun 2012–2016

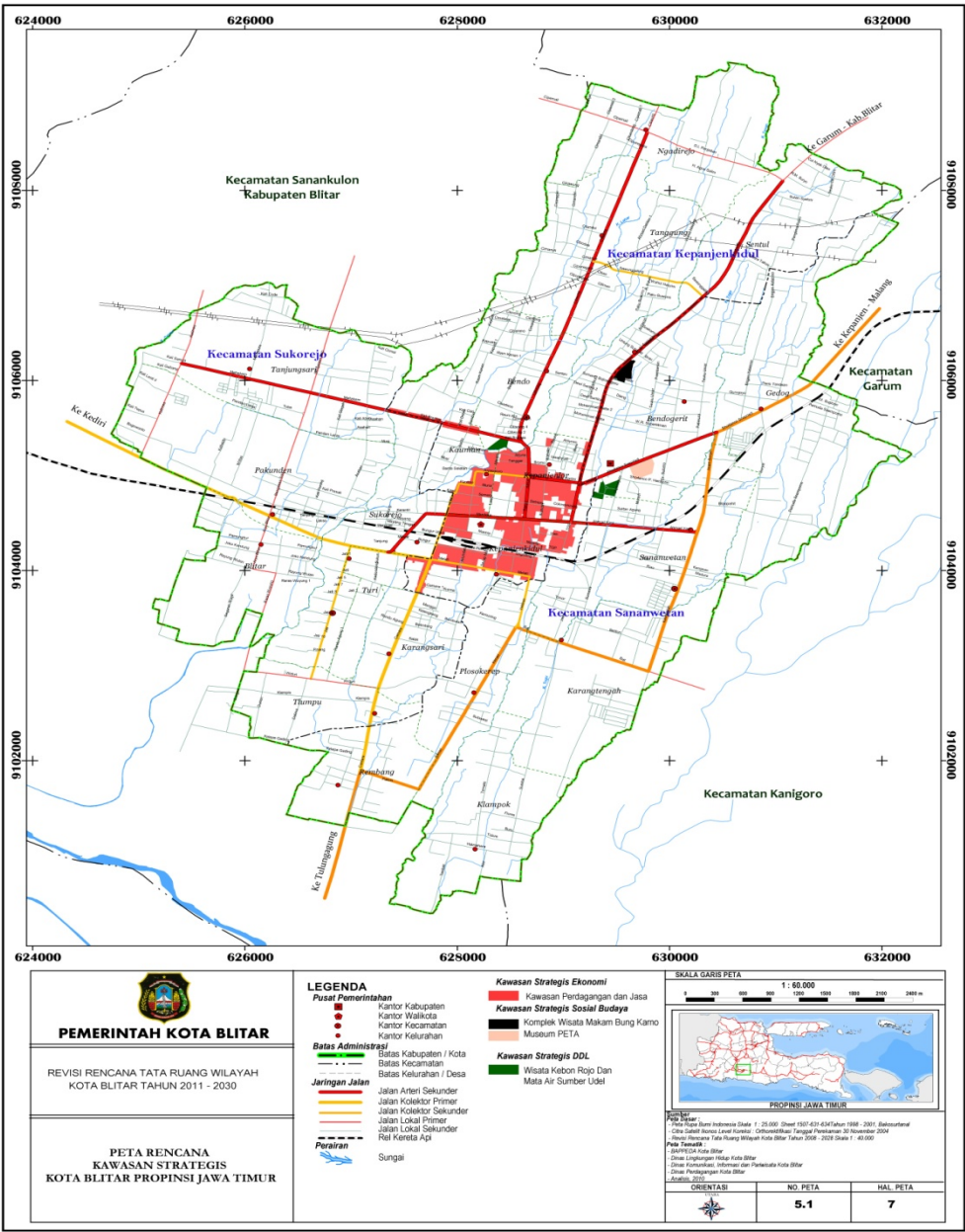
No	Objek Wisata	Jumlah Wisatawan Per-Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Makam Bung Karno	662.599	819.239	831.858	890.966	1.035.657
2	Perpustakaan Bung Karno	552.248	761.286	810.698	899.875	660.586
3	Sumber Udel	67.783	70.371	65.136	75.776	67.586
4	Pemandian Herlingga Jaya	71.175	154.353	73.481	71.146	45.914
5	Istana Gebang	1.211.680	292.142	381.282	463.028	490.973

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kota Blitar, 2017

Berdasarkan tabel di atas jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Kota Blitar yaitu Makam Bung Karno dan Istana Gebang mengalami kenaikan secara signifkn sedangkan Perpustakaan Bung Karno, Sumber Udel dan Pemandian Herlingga Jaya pada Tahun 2016 mengalami penurunan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh semakin berkembangnya destinasi wisata baru di wilayah Kabupaten Blitar yang kemudian menjadi destinasi alternatif/ pilihan setelah Makam Bung Karno dan Istana Gebang.

Sektor pariwisata merupakan salah satu pengungkit utama perekonomian Kota Blitar. Oleh karena itu di Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Blitar 2010-2030, kawasan wisata ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis. Ada 3 (tiga) kawasan strategis yang akan dikembangkan meliputi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis sosial budaya dan kawasan strategi aspek lingkungan. Khusus kawasan strategis sosial budaya terdiri dari kawasan wisata Makam Bung Karno dan Kawasan Wisata Perjuangan PETA.

Gambar 2.2 Peta Kawasan Strategis Kota Blitar



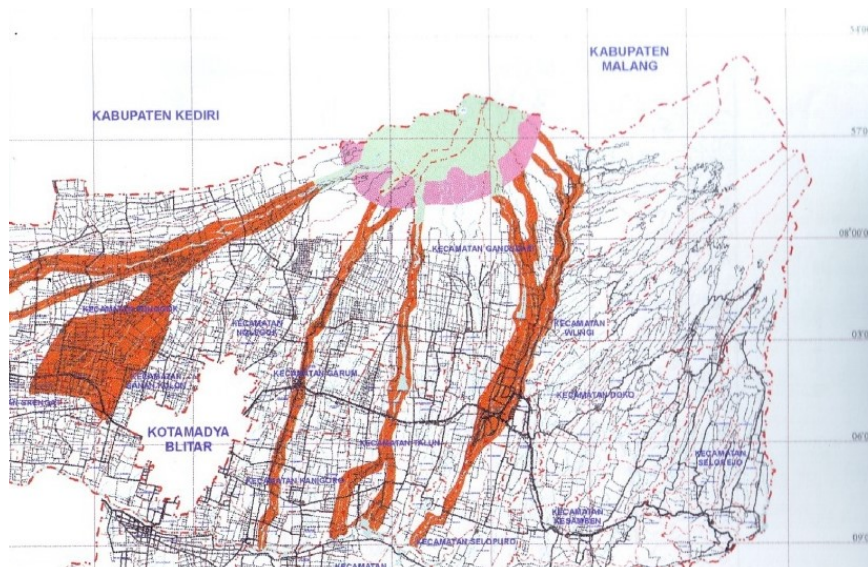
Sumber : RTRW Kota Blitar 2011-2030

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

2.1.3.1 Letusan Gunung Berapi

Kawasan rawan bencana di Kota Blitar tidak terlepas dari keberadaan gunung Kelud, yang merupakan salah satu gunung berapi di Jawa Timur. Gunung Kelud memiliki ketinggian 1.731 meter dengan kondisi yang masih aktif. Gunung kelud berada pada daerah perbatasan antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar dengan jarak sekitar 27 km dari sebelah timur Kota Kediri. Pada letusan Gunung Kelud Tahun 1991, Kota Blitar terkena aliran lahar dan hujan abu yang sangat tebal sehingga melumpuhkan aktivitas perekonomian Kota Blitar. Meskipun letusan Tahun 2014 relatif tidak berdampak besar terhadap Kota Blitar, mengingat sifat letusan yang tidak dapat diprediksi, Kota Blitar tetap menjadi wilayah yang rawan terhadap letusan Gunung Kelud. Beberapa wilayah yang menjadi kawasan rawan lahar Gunung Kelud adalah Kelurahan yang berada di sepanjang Sungai Lahar.

Gambar 2.3
Peta Rawan Bencana Gunung Kelud Kota Blitar



Sumber : Profil Mitigasi Perubahan Iklim Kota Blitar, 2012

2.1.3.2 Kebakaran

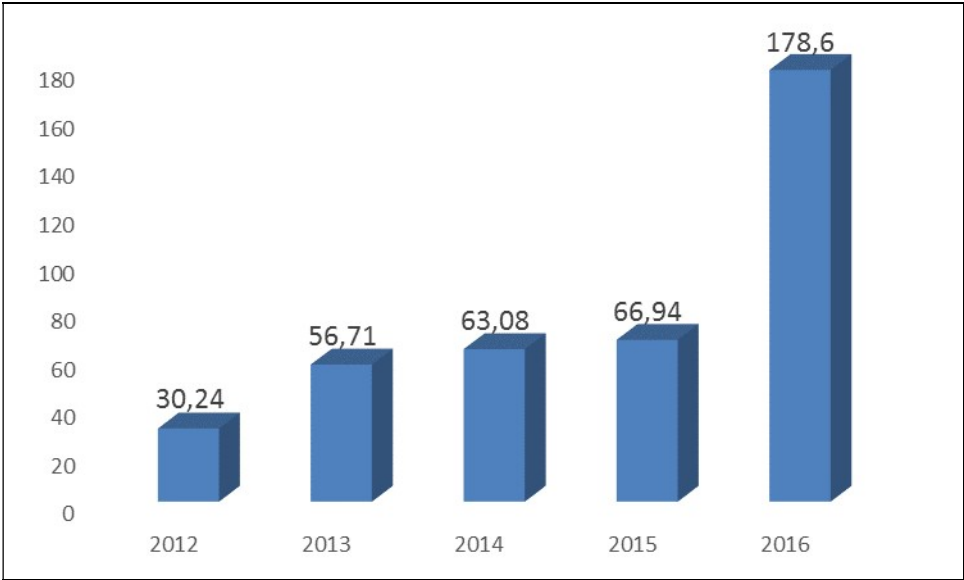
Tingkat kepadatan penduduk Kota Blitar relatif tinggi, mencapai 4.486 jiwa per km². Kondisi jalan lingkungan padat hunian, sebagian besar tidak dapat dilewati mobil pemadam kebakaran termasuk jenis mobil paling kecil sekalipun sehingga menimbulkan kerawanan terjadinya kebakaran di pemukiman. Data historis menunjukkan kawasan yang rawan kebakaran adalah kawasan perdagangan dan jasa dan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Kejadian kebakaran pada Tahun 2015 di wilayah pertokoan (Kelurahan Kepanjen Lor) dan di Pasar Legi (Kelurahan Sukorejo). Meskipun memiliki akses jalan yang relatif lebih lebar daripada

kawasan permukiman, tapi jika tidak ditanggulangi dengan optimal akan menimbulkan kerugian yang cukup berdampak pada aktifitas perekonomian kota. Kajian Rawan Bencana Provinsi Jawa Timur juga menyebutkan bahwa Kota Blitar (seperti wilayah perkotaan lainnya) merupakan salah satu wilayah yang rawan kebakaran.

2.1.3.3. Dampak Perubahan Iklim

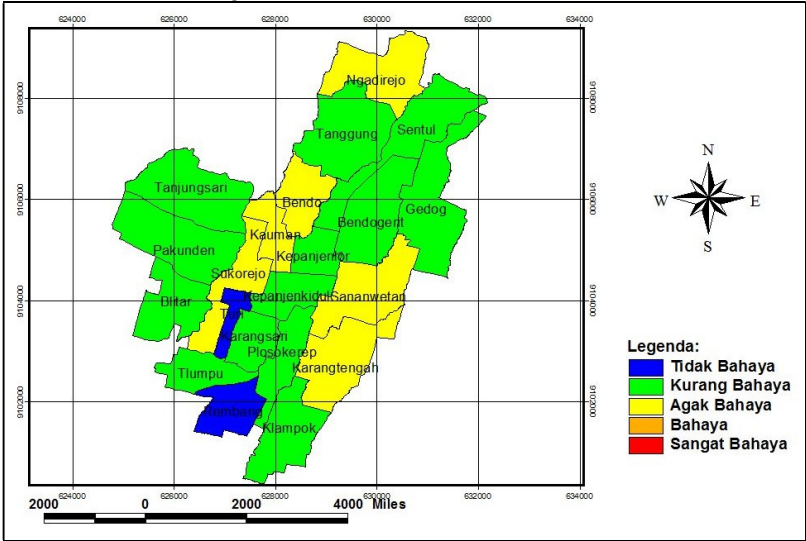
Bencana terkait dampak perubahan iklim juga sudah mulai dirasakan masyarakat Kota Blitar. Berdasarkan Analisis Resiko Perubahan Iklim Kota Blitar, terdapat 5 bahaya yang merupakan dampak dari perubahan iklim Kota Blitar yaitu kekeringan, wabah penyakit yang terkait perubahan iklim. (Diare, ISPA, DBD, Chikungunya, Dipteri), genangan, angin ribut, tanah longsor, dan gagal panen. Pada akhir Tahun 2015 dan awal Tahun 2016 terjadi genangan air hujan yang frekuensi dan intensitasnya meningkat sehingga cukup aktivitas warga. Gejala keterbatasan air tanah ditunjukkan dengan semakin dalamnya warga kota harus mengebor sumur untuk memperoleh air (hingga 16 meter). Angka kejadian penyakit terutama Dipteri dan DBD meningkat tajam (Gambar 2.4). Meskipun jika dibandingkan dengan daerah lain bahaya di atas tidak terlalu ekstrim (karena Kota Blitar tidak terletak di *coastal area*), tetapi kondisi ini sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan sektor infrastruktur dan kesehatan di Kota Blitar.

Gambar 2.4.
Angka Kejadian DBD per 1000 Penduduk Kota Blitar 2012-2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Blitar, 2017

Gambar 2.5
Peta Bahaya Perubahan Iklim di Kota Blitar

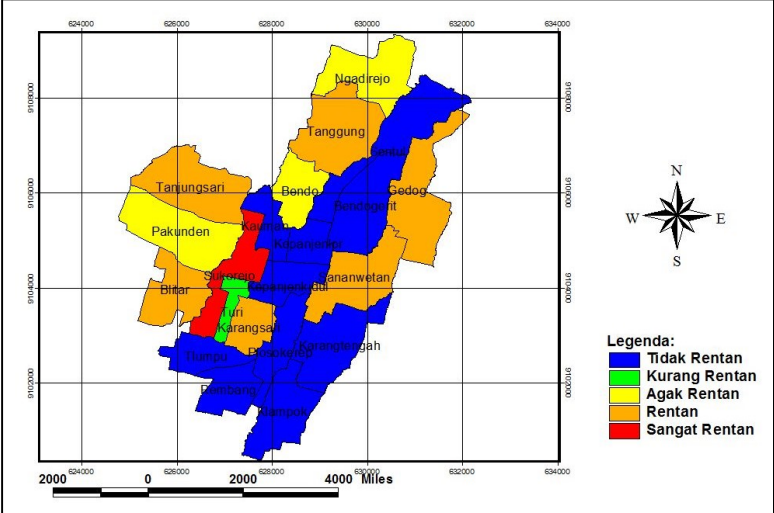


Sumber : Kajian Risiko Perubahan Iklim Kota Blitar, 2013

Berdasarkan peta di atas, terdapat 6 kelurahan yang kondisinya agak bahaya karena mengalami dampak perubahan iklim. Sedangkan jika dilihat dari aspek kerentanan (Gambar 2.6), satu kelurahan yaitu Kelurahan Sukorejo merupakan kelurahan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, sedangkan kelurahan lainnya bervariasi dari kurang rentan hingga tidak rentan.

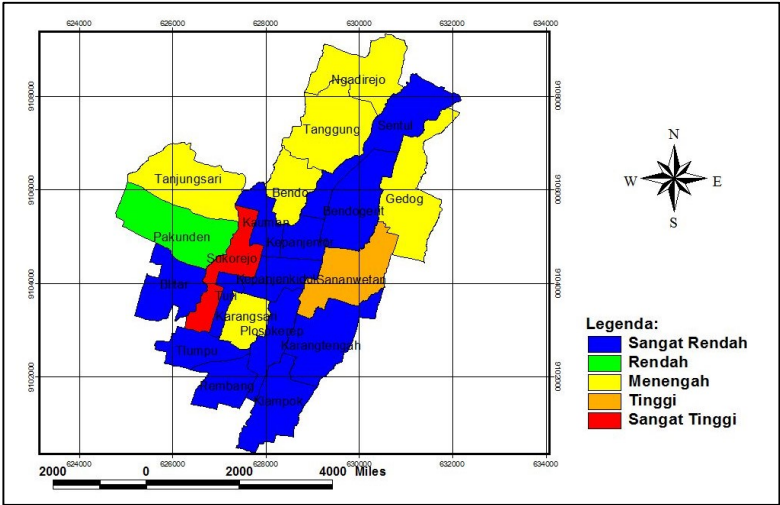
Untuk risiko iklim (Gambar 2.7) sebagian besar kelurahan di Kota Blitar memiliki tingkat risiko yang rendah dan menengah, kecuali untuk Kelurahan Sukorejo, risikonya sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan jumlah rumah tangga miskin yang lebih besar daripada kelurahan lainnya.

Gambar 2.6
Peta Kerentanan Perubahan Iklim di Kota Blitar



Sumber : Kajian Risiko Perubahan Iklim Kota Blitar, 2013

Gambar 2.7
Peta Risiko Perubahan Iklim di Kota Blitar



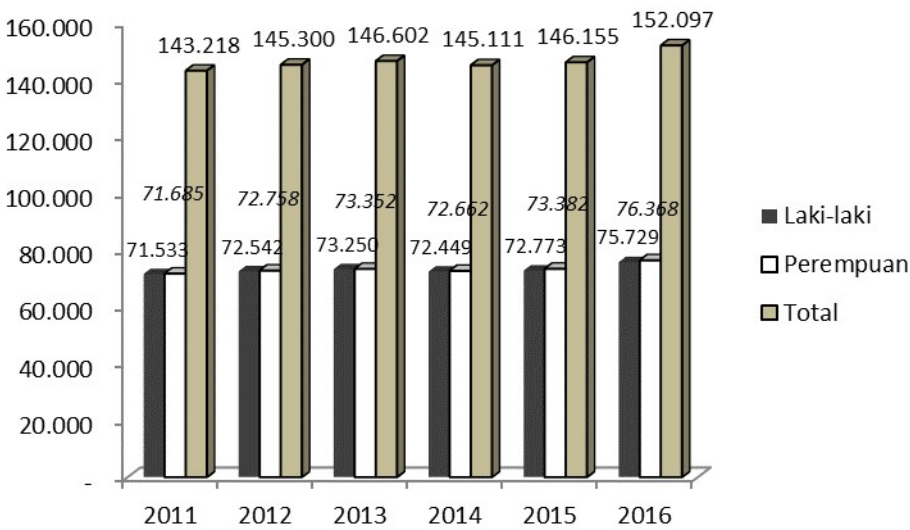
Sumber : Kajian Risiko Perubahan Iklim Kota Blitar, 2013

2.1.4 Demografi

Jika dibandingkan dengan 6 tahun sebelumnya, jumlah penduduk Kota Blitar mengalami peningkatan dari 143.218 jiwa pada tahun 2011 menjadi 152.097 jiwa pada Tahun 2016 (terjadi peningkatan sebesar 6,20%).

Berdasarkan data registrasi penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.8
Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2011- 2016 (jiwa)



Sumber : Dispenduk Capil Kota Blitar, 2017

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 terjadi pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi mencapai 4% . Pertumbuhan ini disebabkan karena sebagian besar proses verifikasi E-KTP sudah selesai.

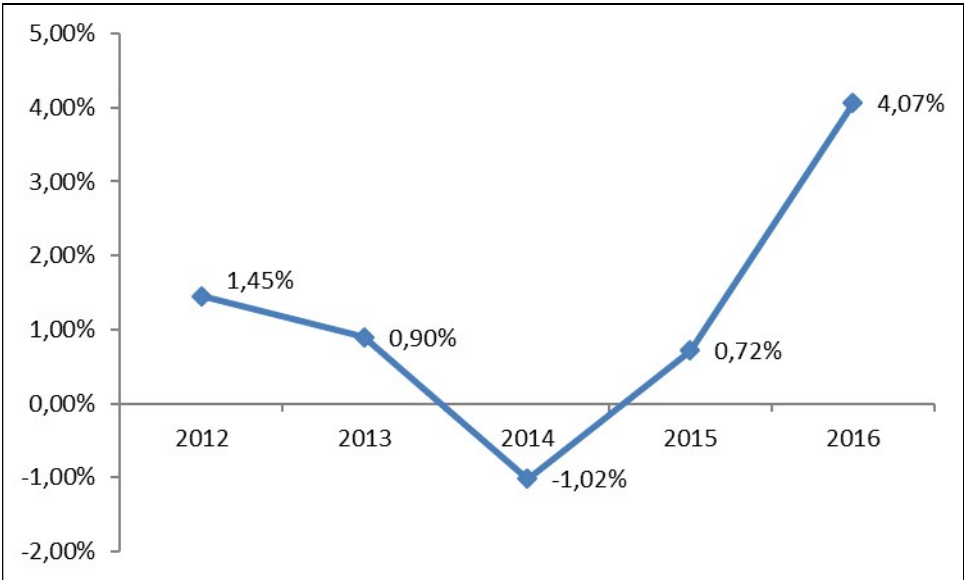
Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kota Blitar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kepanjenkidul	21.746	22.128	43.874
Sukorejo	25.972	25.842	51.814
Sananwetan	28.011	28.398	56.409
Kota	75.729	76.368	152.097

Sumber : Dispenduk Capil Kota Blitar, 2017

Kecamatan paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Sananwetan, kemudian diikuti oleh Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Kepanjenkidul.

Gambar 2.9
Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar
Tahun 2012-2016 (%)

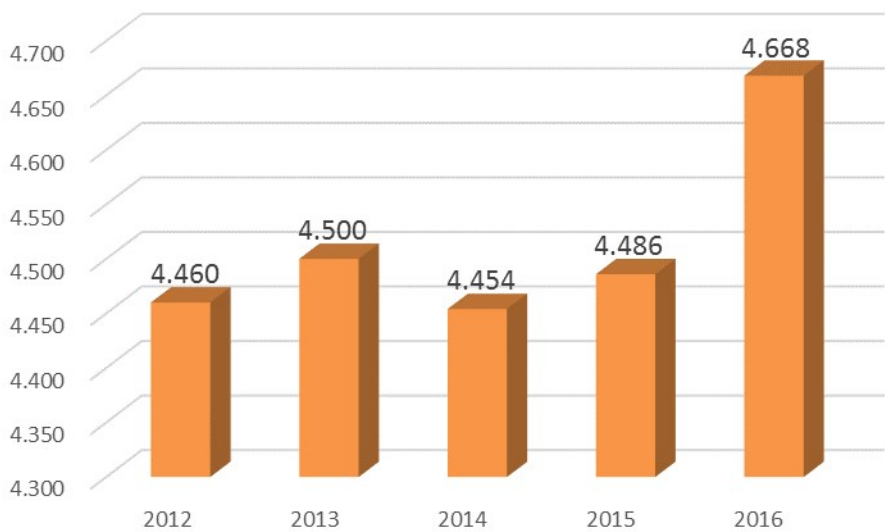


Sumber : Dispenduk Capil Kota Blitar, 2017

Dari grafik di atas tergambar bahwa prosentase pertumbuhan penduduk relatif rendah dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahunnya di Kota Blitar sebesar 1,22 %, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 mencapai 4,07%.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Blitar termasuk kategori padat penduduk. Untuk Tahun 2016 mencapai 4.668 jiwa per km². Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Sukorejo. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Sananwetan dan Kepanjenkidul, sebagaimana gambar berikut :

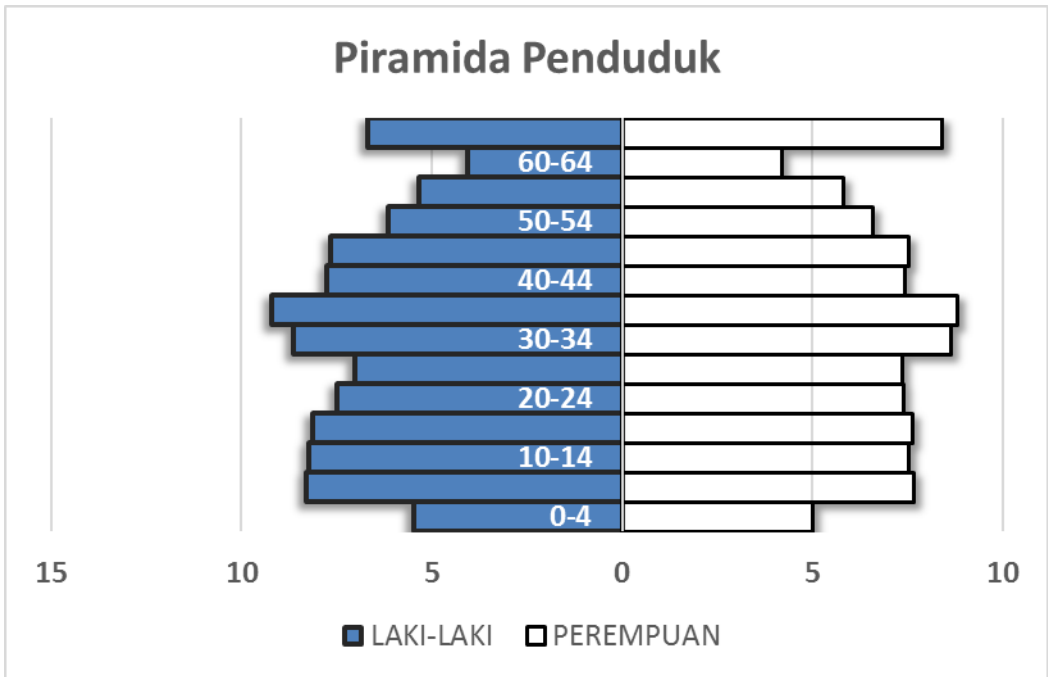
Gambar 2.10
Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Blitar (jiwa/km²)
Tahun 2012-2016



Sumber : Dispenduk Capil Kota Blitar, 2017.

Berdasarkan Gambar berikut, bentuk piramida penduduk Kota Blitar adalah stasioner. Piramida stasioner adalah piramida merata atau disebut juga berbentuk granat. Pada piramida ini tingkat kelahiran dan kematian seimbang atau tetap (*stasioner*). Karakteristik dari piramida stasioner adalah penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama, tingkat kelahiran dan kematian rendah dan pertumbuhan penduduk mendekati nol atau lambat.

Gambar 2.11
Piramida Penduduk Kota Blitar Tahun 2016



Sumber : Dispenduk Capi lKota Blitar, 2017

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan cerminan potensi perekonomian suatu wilayah. Nilai PDRB merupakan agregat nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut. PDRB juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk dimana besaran PDRB menunjukkan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduknya.

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun tertentu. Tahun yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan untuk PDRB ADHK adalah Tahun 2010.

Tabel 2.6
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) Kota Blitar Tahun 2012- 2016

No	Sektor / Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	PRIMER	128.909,6	3,64	138.980,3	3,54	151.498,8	3,48	164.340,5	3,41	173.250,67	3,25
	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	128.580,4	3,63	138.647,0	3,53	151.164,7	3,47	164.006,1	3,4	172.914,90	3,24
	Pertambangan & Penggalian	329,2	0,01	333,3	0,01	334,1	0,01	334,4	0,01	335,77	0,01
2	SEKUNDER	599.757,5	16,92	665.296,6	16,92	755.627,2	17,36	839.548,0	17,42	928.050,13	17,40
	Industri Pengolahan	329.019,6	9,28	362.414,3	9,22	406.632,6	9,34	457.012,2	9,48	502.362,53	9,42
	Pengadaan Listrik & Gas	2.516,5	0,07	2.463,9	0,06	2.497,7	0,06	2.736,6	0,06	3.297,87	0,06
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	6.605,3	0,19	6.760,0	0,17	6.913,1	0,16	7.145,7	0,15	7.709,92	0,14
	Konstruksi	261.616,1	7,38	293.658,4	7,47	339.583,8	7,8	372.653,5	7,73	414.679,81	7,78
3	TERSIER	2.817.140,6	79,45	3.125.232,1	79,53	3.446.930,8	79,17	3.815.200,4	79,17	4.230.985,95	79,35
	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi mobil & Sepeda Motor	823.265,9	23,22	916.321,8	23,32	1.008.152,5	23,15	1.125.713,6	23,36	1.271.622,36	23,85
	Transportasi & Pergudangan	137.219,2	3,87	154.789,1	3,94	177.165,2	4,07	198.590,4	4,12	222.264,69	4,17
	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	161.701,3	4,56	180.490,1	4,59	209.184,3	4,8	240.316,2	4,99	277.001,55	5,19
	Informasi & Komunikasi	408.099,7	11,51	443.518,5	11,29	471.362,3	10,83	505.492,5	10,49	556.924,43	10,44
	Jasa Keuangan & Asuransi	352.938,9	9,95	410.932,2	10,46	466.897,0	10,72	526.913,2	10,93	589.209,86	11,05
	Real Estate	136.231,0	3,84	152.044,3	3,87	163.600,2	3,76	180.103,2	3,74	197.689,16	3,71
	Jasa Perusahaan	29.923,3	0,84	31.929,1	0,81	33.486,6	0,77	35.624,9	0,74	38.903,43	0,73
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	277.422,6	7,82	294.399,8	7,49	302.985,6	6,96	317.849,3	6,6	339.763,04	6,37
	Jasa Pendidikan	237.681,2	6,7	270.537,7	6,88	309.336,0	7,1	345.002,2	7,16	374.821,78	7,03
	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	65.756,7	1,85	73.456,7	1,87	83.520,6	1,92	92.237,3	1,91	100.880,98	1,89
	Jasa Lainnya	186.900,9	5,27	196.812,9	5,01	221.240,6	5,08	247.357,4	5,13	261.904,66	4,91
KOTA BLITAR		3.545.807,7	100,00	3.929.509,1	100,00	4.354.056,8	100,00	4.819.088,9	100,00	5.332.286,72	100,00

Sumber : BPS Kota Blitar, 2017

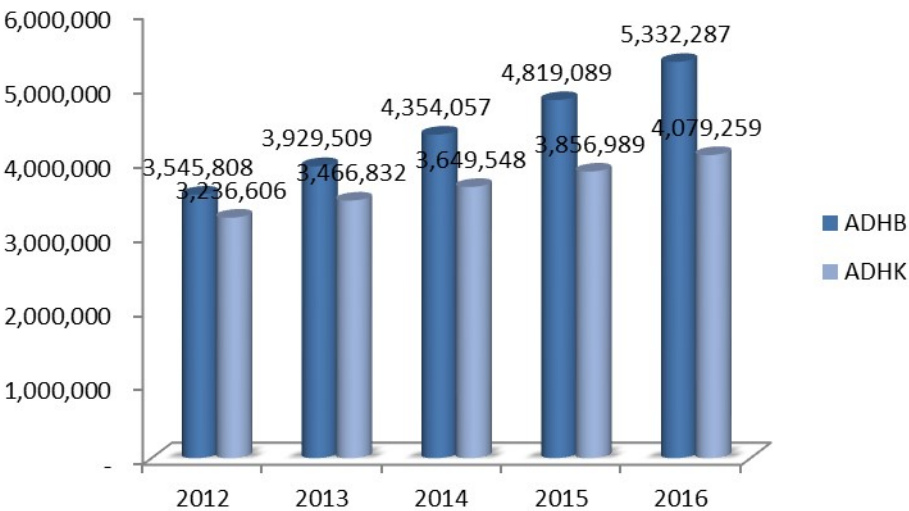
Tabel 2.7
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp) Kota Blitar 2012 – 2016

No	Sektor / Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp	%	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%
1	PRIMER	113.717,80	3,51	114.750,80	3,33	115.979,50	3,18	117.180,60	3,04	118.139,09	2,90
	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	113.400,50	3,5	114.444,70	3,32	115.694,70	3,17	116.909,50	3,03	117.873,96	2,89
	Pertambangan& Penggalian	317,3	0,01	306,1	0,01	284,7	0,01	271,2	0,01	265,13	0,01
2	SEKUNDER	538.540,00	16,64	568.606,90	16,5	605.692,50	16,6	636.993,90	16,52	669.974,58	16,42
	Industri Pengolahan	295.716,80	9,14	311.327,40	9,03	334.126,90	9,16	354.123,10	9,18	373.779,16	9,16
	Pengadaan Listrik& Gas	2.678,60	0,08	2.741,70	0,08	2.760,70	0,08	2.778,10	0,07	2.972,85	0,07
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	6.454,10	0,2	6.476,60	0,19	6.484,40	0,18	6.572,20	0,17	6.767,76	0,17
	Konstruksi	233.690,40	7,22	248.061,10	7,2	262.320,50	7,19	273.520,50	7,09	286.454,81	7,02
3	TERSIER	2.584.348,50	79,85	2.763.474,5	80,17	2.927.876,00	80,23	3.102.814,60	80,45	3.291.145,16	80,68
	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi mobil & Sepeda Motor	760.317,90	23,49	817.673,70	23,72	869.221,60	23,82	923.712,60	23,95	980.198,85	24,03
	Transportasi & Pergudangan	126.056,30	3,89	134.125,70	3,89	142.947,90	3,92	152.378,70	3,95	161.944,82	3,97
	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	147.795,40	4,57	158.189,50	4,59	171.713,80	4,71	186.550,30	4,84	202.751,35	4,97
	Informasi & Komunikasi	390.939,90	12,08	422.519,80	12,26	447.967,60	12,27	475.033,20	12,32	507.961,79	12,45
	Jasa Keuangan & Asuransi	309.064,30	9,55	343.102,50	9,95	368.767,70	10,1	396.418,50	10,28	424.290,99	10,40
	Real Estate	127.346,40	3,93	136.550,80	3,96	144.859,10	3,97	153.238,50	3,97	162.527,22	3,98
	Jasa Perusahaan	27.864,20	0,86	28.820,80	0,84	29.934,80	0,82	31.032,10	0,8	32.293,64	0,79
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	245.475,50	7,58	250.019,90	7,25	251.955,40	6,9	258.265,40	6,7	264.450,18	6,48
	Jasa Pendidikan	207.058,10	6,4	220.563,70	6,4	235.974,20	6,47	252.085,10	6,54	269.017,36	6,59
	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	61.524,00	1,9	66.764,50	1,94	71.323,30	1,95	74.190,70	1,92	78.311,36	1,92
	Jasa Lainnya	180.906,40	5,59	185.143,60	5,37	193.210,60	5,29	199.909,40	5,18	207.397,60	5,08
	KOTA BLITAR	3.236.606,30	100	3.466.832,10	100	3.649.547,90	100	3.856.989,10	100	4.079.258,84	100,00

Sumber : BPS Kota Blitar, 2017.

Berdasarkan tabel PDRB ADHK Kota Blitar (Tabel 2.7) dapat dikatakan bahwa PDRB ADHK Kota Blitar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi pada semua lapangan usaha/industri di Kota Blitar kecuali pada lapangan usaha/industri Pertambangan dan Penggalan yang terus menurun sejak tahun 2012 – 2016 dan lapangan usaha/industri Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang sempat mengalami penurunan di tahun 2012 dan kembali meningkat di tahun 2014 hingga 2016 meski nilainya sangat kecil. Apabila merujuk pada ketujuh belas lapangan usaha/industri yang ada di dalam PDRB ADHK Kota Blitar, yang memiliki kontribusi terbesar dalam penentuan nilai PDRB Kota Blitar adalah lapangan usaha/industri Perdagangan Besar/Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan nilainya terus naik. Sedangkan untuk lapangan usaha/industri yang memiliki kontribusi terendah dalam penentuan nilai PDRB ADHK Kota Blitar adalah lapangan usaha/industri Pertambangan dan Penggalan dan lapangan usaha/industri ini merupakan lapangan usaha/industri terendah sejak lima tahun terakhir.

Gambar 2.12
Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar
Tahun 2012 - 2016 (Rp. 000.000)

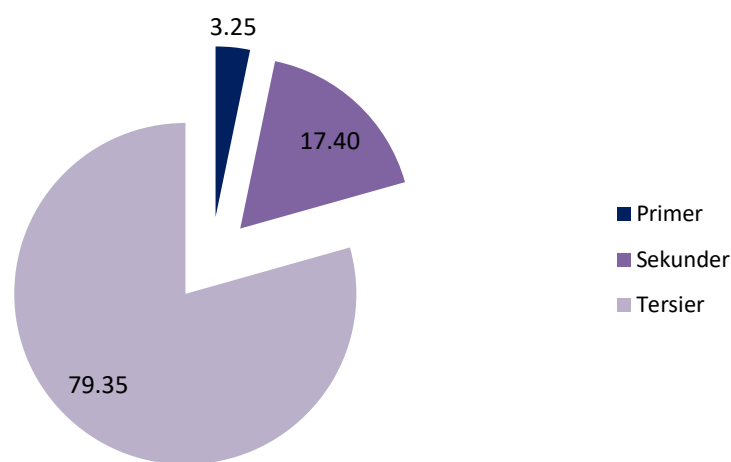


Sumber: BPS Kota Blitar, 2017

Dari grafik di atas terlihat bahwa PDRB ADHB Kota Blitar mengalami peningkatan 50,38% dari Tahun 2012 sebesar Rp 3.545.808 juta menjadi Rp. 5.332.287 juta pada Tahun 2016. Untuk PDRB ADHK dari Tahun 2012 sejumlah Rp. 3.236.606 juta menjadi Rp. 4.079.259 juta pada Tahun 2016 (meningkat 26,04%). Perkembangan nilai PDRB

dan kontribusi sektor dalam PDRB Kota Blitar ADHB dan ADHK secara rinci dapat dilihat dalam gambar di atas.

Gambar 2.13
Sebaran Kontribusi PDRB Kota Blitar Tahun 2016
Berdasarkan Sektor (%)

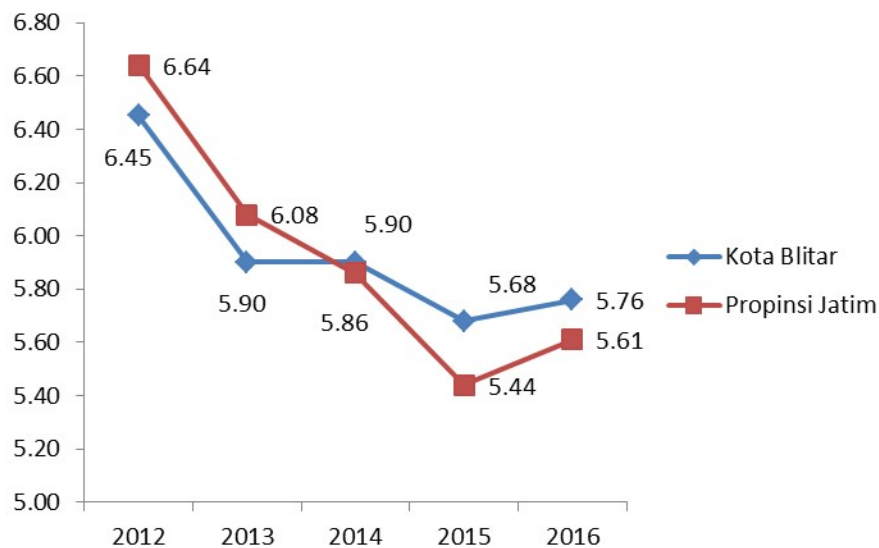


Sumber : BPS Kota Blitar, 2017.

Dilihat dari data PDRB, Kota Blitar mempunyai nilai PDRB yang tinggi berturut turut dari sektor tersier, sekunder dan terakhir sektor primer. Sektor primer tidak terlalu banyak memberikan kontribusi bagi Kota Blitar. Keterbatasan Kota Blitar dalam sumber daya alam ditunjukkan dengan kontribusi PDRB dari sektor primer yang sangat kecil. Dengan demikian, untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar, upaya-upaya bidang ekonomi yang dapat dilakukan dan perlu untuk terus dikembangkan adalah dengan memberikan perhatian yang tinggi terhadap jenis-jenis usaha di tiga bidang tersebut maupun jenis-jenis usaha yang pada dasarnya menjadi penunjang dari ketiga sektor ekonomi tersebut di atas. Sektor tersier memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kota Blitar dengan prosentase rata-rata 79,35%. Salah satunya adalah sub sektor perdagangan dan sub sektor pariwisata (hotel dan restoran).

Sektor tersier mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Blitar yang relatif stabil di kisaran angka 5% sampai 6% per tahun (Gambar 2.14). Selain PDRB, tingkat pertumbuhan ekonomi juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat, Dengan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi hingga melampaui pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.14
Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2012-2016(%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2017

Mulai Tahun 2015, salah satu sektor ekonomi lokal yang didorong pengembangannya adalah ekonomi kreatif. Untuk Tahun 2016, jumlah pelaku ekonomi kreatif Kota Blitar sebanyak 4.745 unit saha dan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan akan mengalami peningkatan yang signifikan.

2.2.1.2 PDRB Per Kapita

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan pendapatan perkapita penduduk Kota Blitar terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari peningkatan nilai PDRB. Tahun 2016 PDRB perkapita ADHB meningkat sebesar 45,63% dibandingkan Tahun 2012 (11,41% per tahun). PDRB perkapita ADHK juga mengalami peningkatan sebesar 22,05% dibandingkan Tahun 2012. Untuk melihat perkembangan PDRB perkapita tersebut selama tahun 2011 - 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
PDRB Perkapita Kota Blitar
Tahun 2012- 2016

No	TAHUN	PDRB PERKAPITA (Rp. 000,-)	
		ADHB	ADHK
1.	2012	26.319,25	24.024,16
2.	2013	28.956,90	25.400,01
3.	2014	31.803,95	26.657,91
4.	2015	34.944,23	27.967,84
5.	2016	38.329,51	29.322,50

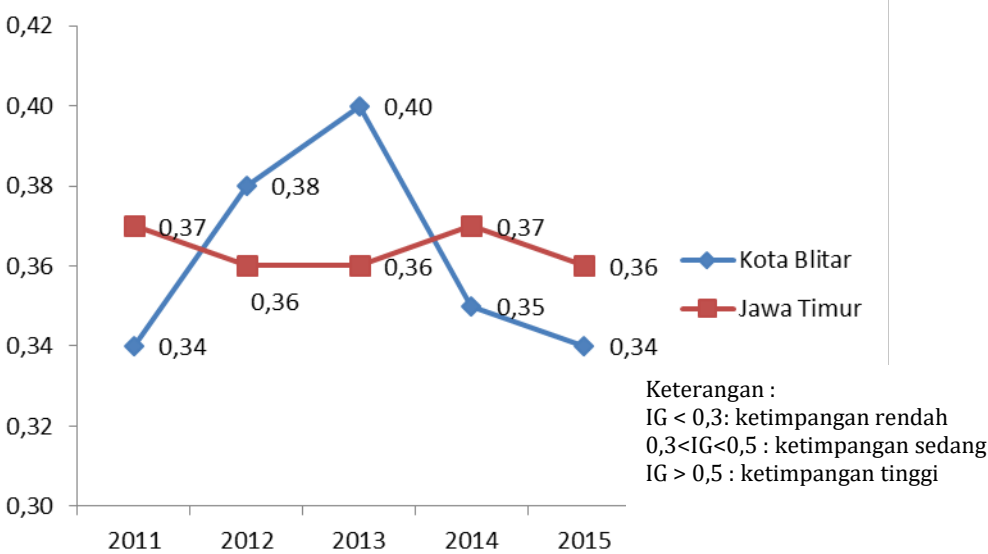
Sumber : BPS Kota Blitar, 2017

2.2.1.3 Indeks Gini

Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal, yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Nol merupakan pemerataan sempurna, sedangkan satu merupakan ketimpangan sempurna. Indeks gini digunakan untuk mengukur pemerataan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat Kota Blitar. Pembangunan Daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi saja, namun disertai dengan peningkatan pemerataan pembangunan.

Berdasarkan gambar berikut, Indeks gini Kota Blitar berkisar pada nilai 0,3 berarti termasuk ketimpangan sedang (pada batas bawah-relatif rendah). Dengan demikian pemerataan pendapatan di Kota Blitar relatif tinggi dan pada Tahun 2015 hampir sama dengan nilai Indeks gini Provinsi Jawa Timur.

Gambar 2.15
Perkembangan Indeks Gini Kota Blitar 2011-2015



Sumber : BPS Kota Blitar, 2016

Secara keseluruhan Indeks Gini selama periode 5 tahun mengalami penurunan sebesar 14,71%. Hal ini berarti pemerataan pendapatan di Kota Blitar semakin merata. Program pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan perlu diidentifikasi dengan baik sehingga dapat membuka akses pendidikan dan lapangan kerja yang lebih luas untuk masyarakat Kota Blitar. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi angka Indeks Gini.

Sebagai wilayah perkotaan, Kota Blitar tentu tidak sosial yang harus dihadapi. Secara umum kondisi Kota Blitar relatif kondusif, terbukti sejak Tahun 2012 sampai Tahun 2016 tidak pernah terjadi kasus demonstrasi dan kasus SARA. Salah satu permasalahan yang

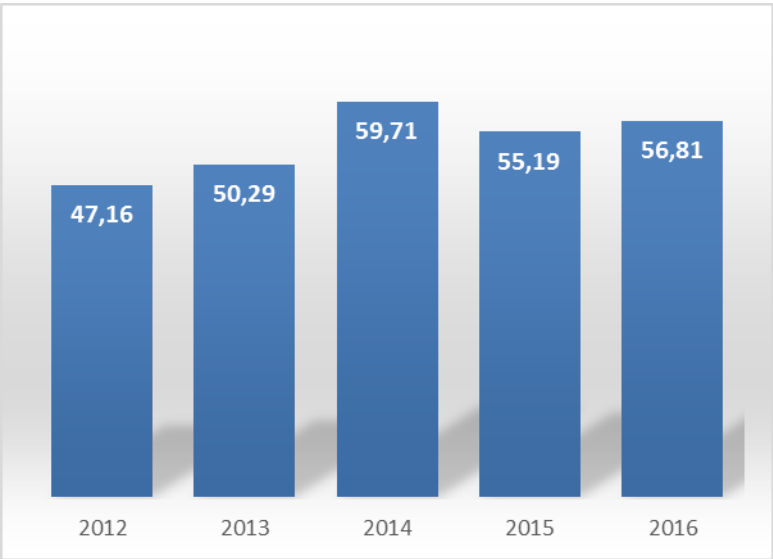
harus diminimalisir adalah angka kriminalitas. Perkembangan Angka Kriminalitas Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Perkara Kejahatan yang Dilaporkan dan Diselesaikan 2012- 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
A. Kejahatan Yang Dilaporkan	299	511	412	366	440
1. Pembunuhan	2	1	3	2	1
2. Perampokan	0	12	4	7	0
3. Pencurian Biasa	35	56	36	31	49
4. Pencurian Berat	50	82	39	57	53
5. Lain-lain	212	360	330	269	337
B. Kejahatan Yang Diselesaikan	141	257	246	202	250
1. Pembunuhan	1	1	2	2	1
2. Perampokan	0	5	1	5	0
3. Pencurian Biasa	21	40	22	20	33
4. Pencurian Berat	16	19	23	23	20
5. Lain-lain	103	192	198	152	196

Sumber : Kasatreskrim Polresta Blitar, 2017

Gambar 2.16
Persentase Kasus Kriminalitas yang Diselesaikan di Kota Blitar Tahun 2012–2016 (%)

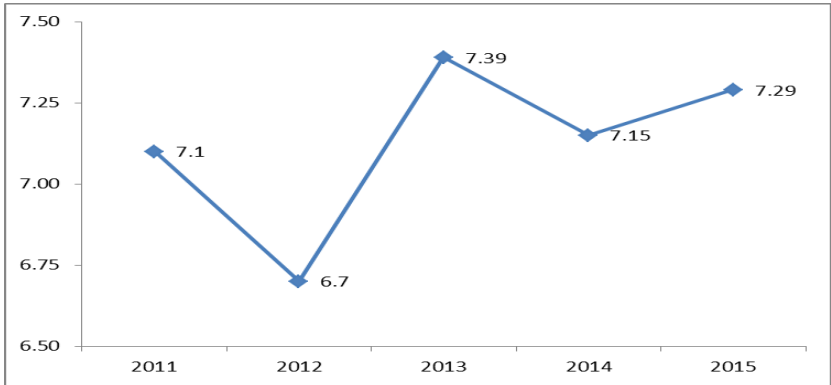


Sumber : Kasatreskrim Polresta Blitar, 2017

2.2.1.4 Angka Kemiskinan

Berdasarkan data BPS Kota Blitar tingkat kemiskinan Kota Blitar pada Tahun 2015 adalah 6,94%, sedangkan dilihat dari Rumah Tangga Sasaran PPLS 2011, prosentase Rumah Tangga Miskin pada Tahun 2015 adalah 10,09%.

Gambar 2.17
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Blitar
Tahun 2011-2015 (%)



Sumber : BPS Kota Blitar, 2016

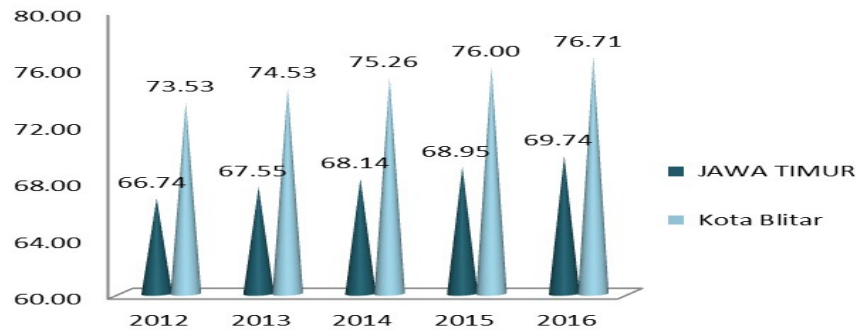
Secara kumulatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun angka kemiskinan di Kota Blitar mengalami kenaikan menjadi 7,29%

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas Sumber Daya Manusia. IPM merupakan perhitungan komulatif dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli penduduk di wilayah tersebut. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu wilayah termasuk wilayah yang maju, atau berkembang dan juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Berdasarkan metode perhitungan baru, unsur IPM terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per kapita. Khusus untuk Indeks Pendidikan, ada perubahan metode perhitungan IPM dari Angka Melek Huruf menjadi Angka Harapan Lama Sekolah.

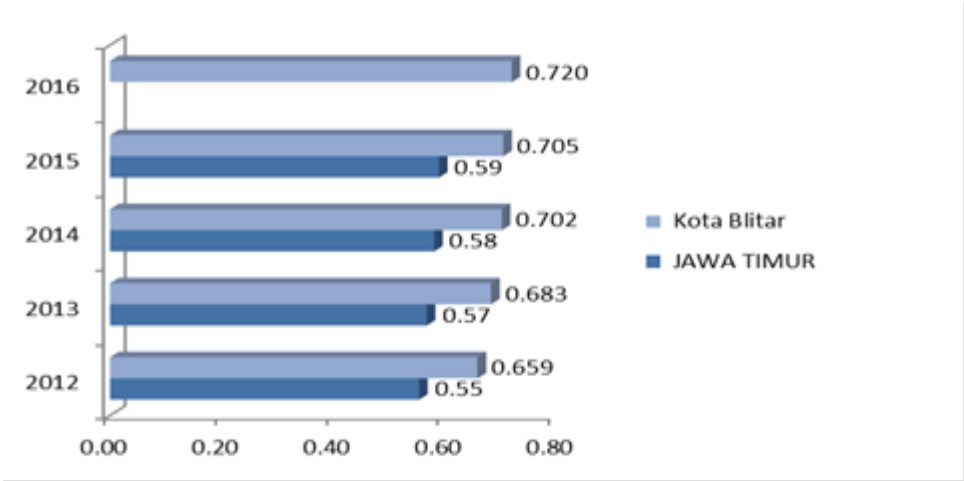
Gambar 2.18
Perkembangan Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Blitar
Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Kota Blitar , 2017

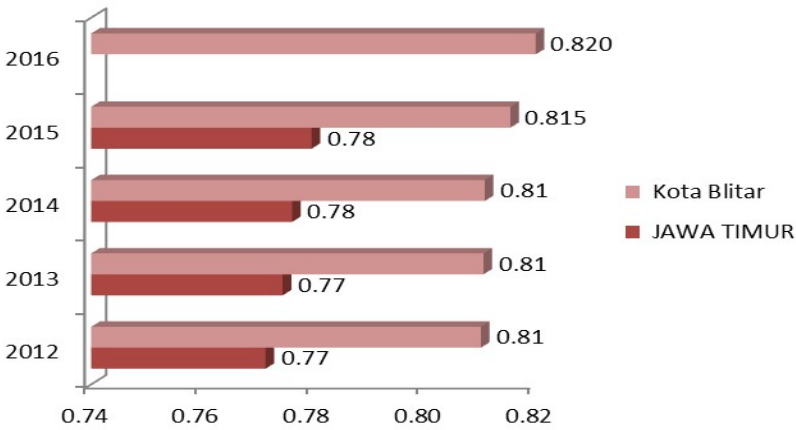
Secara keseluruhan IPM Kota Blitar mengalami peningkatan sebesar 4,32% selama 5 tahun. Pencapaian IPM Kota Blitar ini di atas rata-rata nilai IPM Jawa Timur, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain se Jawa Timur, IPM Kota Blitar menempati urutan tertinggi ke-5 (lima). Peningkatan IPM per tahun dapat dilihat pada gambar di atas.

Gambar 2.19
Perkembangan Nilai Indeks Pendidikan Kota Blitar
Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Kota Blitar , 2017

Gambar 2.20
Perkembangan Nilai Indeks Kesehatan Kota Blitar
Tahun 2011-2015



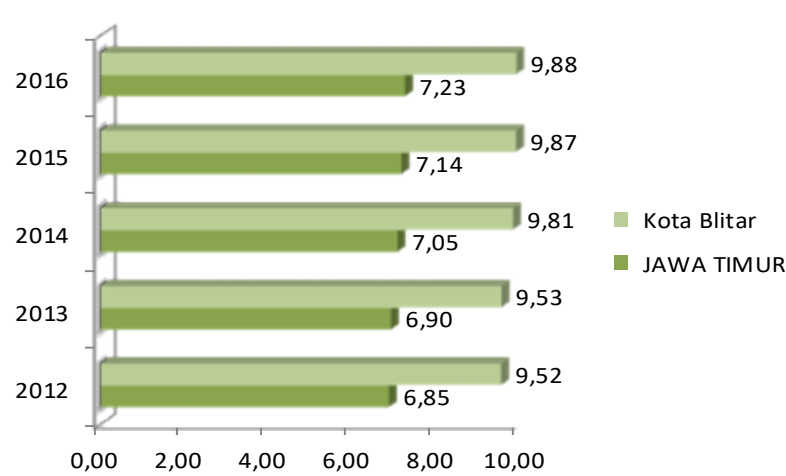
Sumber: BPS Kota Blitar , 2017

2.2.2.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun, dengan cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kota Blitar Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada gambar berikut. Grafik berikut menunjukkan bahwa selama periode lima tahun terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah sebesar 3,79%. Angka ini masih di atas capaian Provinsi Jawa Timur. Perhatian Pemerintah Kota Blitar terhadap sektor pendidikan perlu dipertahankan untuk meningkatkan angka lama sekolah sebagai salah satu indikator kualitas sumber daya manusia.

Gambar 2.21
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Blitar
2012-2016 (Tahun)



Sumber: BPS Kota Blitar , 2017

2.2.2.3 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut.

Tabel 2.10
Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
Kota Blitar Tahun 2012-2016

No	Tingkatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jenjang SD (SD/SDLB/MI)	89,84%	90,15%	95,91%	95,89%	96,28%
2	Jenjang SMP (SMP/SMPLB/MTs)	81,16%	82,87%	88,13%	90,31%	92,33%
3	Jenjang SMA (SMA/SMK/SMALB/MA)	73,35%	74,69%	73,15%	80,22%	82,02%

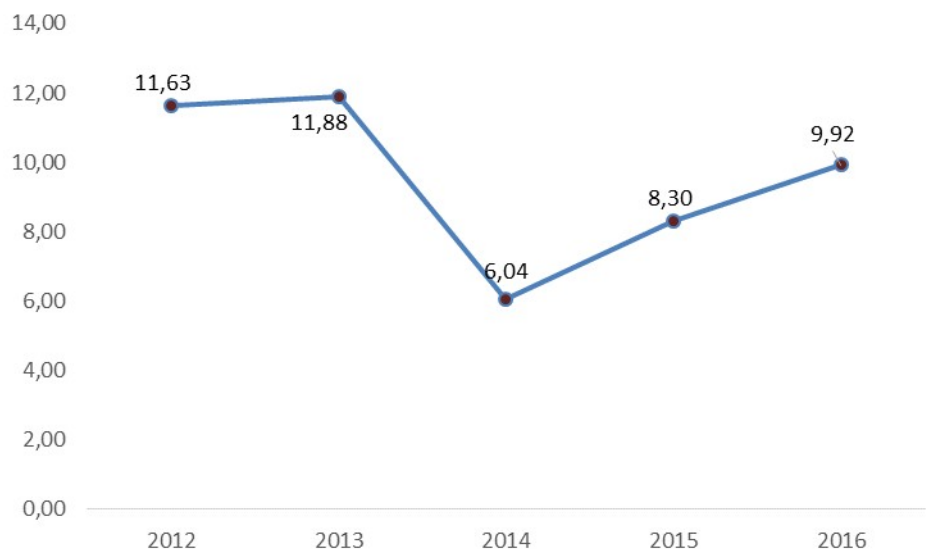
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, APM di jenjang SD dan SMP sudah relatif tinggi, di atas 90%, sedangkan untuk SMA mencapai 80,22%. Program Pendidikan Gratis yang sudah diimplementasikan sejak Tahun 2011 diharapkan akan meningkatkan APM Kota Blitar.

2.2.2.4 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun). Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Blitar dari Tahun 2012-2016 di Kota Blitar disajikan pada grafik berikut :

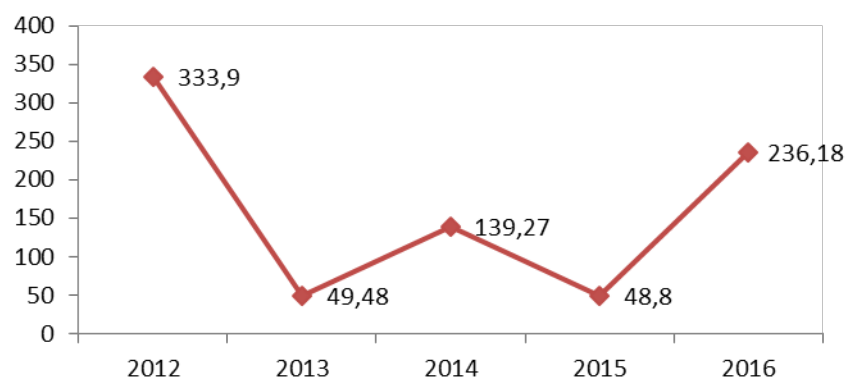
Gambar 2.22
Perkembangan Angka Kematian Bayi Kota Blitar
Tahun 2012-2016 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2017

Grafik di atas menunjukkan bahwa angka kematian bayi di Kota Blitar menurun sebesar 30,44% dibandingkan kondisi Tahun 2012. Pada Tahun 2015 dan 2016 ada kecenderungan meningkat. Hal ini perlu diwaspadai dengan memperkuat program-program bidang kesehatan terkait peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil.

Gambar 2.23
Perkembangan Angka Kematian Ibu Kota Blitar
2012-2016 (%)

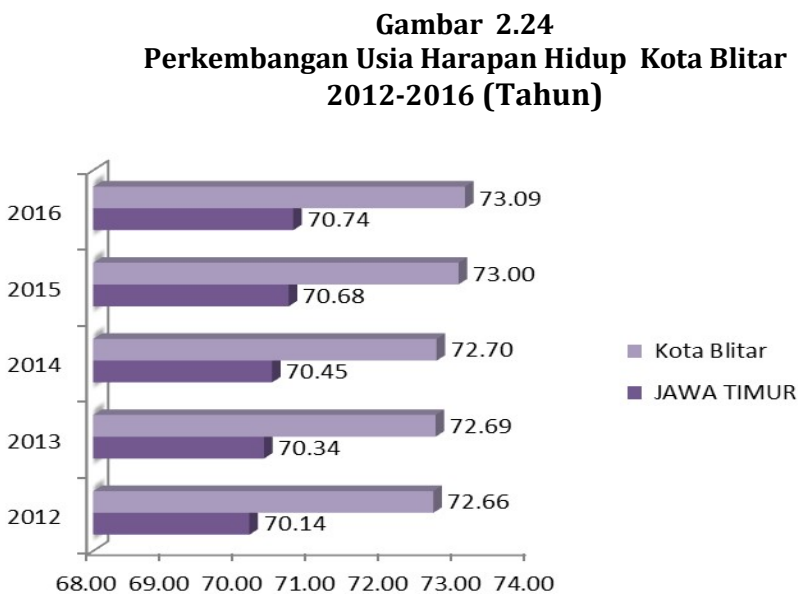


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2017

Gambar 2.23 menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Kota Blitar cenderung *fluktuatif*, tetapi secara umum jika dibandingkan kondisi 2012 dengan 2016 mengalami penurunan sebesar 29,27%.

2.2.2.5 Usia Harapan Hidup

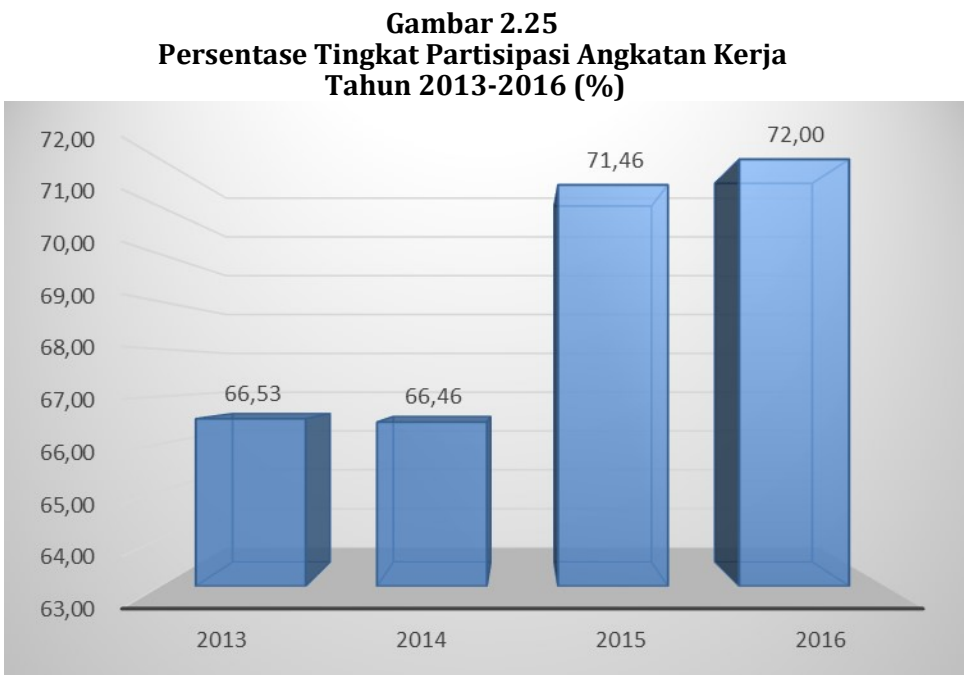
Indikator UHH merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan bidang kesehatan, dengan perkembangan selama kurun waktu 2012-2016 sebagai berikut :



Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2016

UHH Kota Blitar relatif lebih tinggi dari UHH Provinsi Jatim. Dalam periode 5 tahun UHH meningkat sebesar sebesar 0,59% da(rata-rata 0,15% per tahun) dan menempati urutan pertama di Jawa Timur.

2.2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

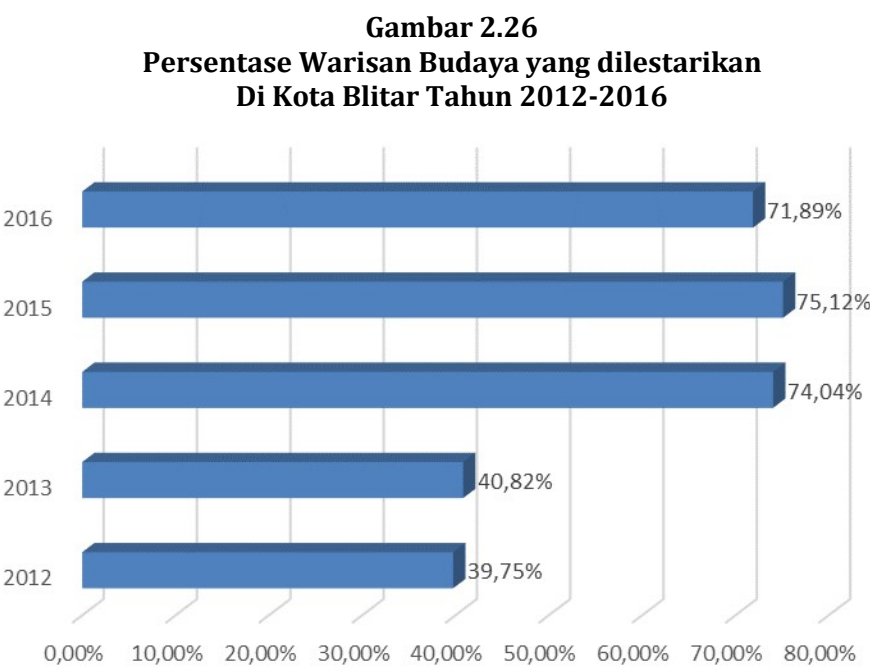


Sumber data : Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, 2017

Berdasarkan gambar di atas, tingkat partisipasi angkatan kerja relatif meningkat sesuai dengan kecenderungan kenaikan jumlah penduduk. Hal ini karena terjadi pertambahan penduduk yang relatif besar pada Tahun 2016 sebagai hasil verifikasi penduduk yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kota Blitar merupakan kota yang cukup mempunyai andil dalam pengembangan seni budaya dan olahraga di tingkat regional Jawa Timur. Dengan keberadaan beberapa jenis kesenian yang khas dari Kota Blitar baik berupa grup musik, tari-tarian, lagu dan kesenian khas daerah lainnya, maka hal ini menunjukkan tingkat apresiasi budaya oleh masyarakat Kota Blitar juga cukup tinggi. Keberadaan Kota Blitar sebagai tempat Makam Bung Karno, presiden pertama Indonesia merupakan potensi pengembangan budaya yang terus menerus dilakukan terutama terkait peringatan Bung Karno.



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, 2017

Jenis warisan budaya yang dilestarikan meliputi kesenian, cagar budaya dan museum. Berdasarkan grafik di atas, pada periode 2012-2016 persentase warisan budaya yang dilestarikan relatif meningkat. Peningkatan ini salah satu disebabkan oleh adanya fasilitasi alat seni budaya di masing-masing kelurahan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Fasilitas olah raga berupa Gedung olah raga di Kota Blitar ada 2 (dua) yaitu Stadion Patria dan GOR Bung Karno serta 3 gedung Tenis Lapangan. Sebagian besar kegiatan olahraga dilakukan oleh masyarakat di gedung atau lapangan kelurahan. Kegiatan kesenian warga masyarakat sebagian besar diselenggarakan di Auditorium Perpustakaan Nasional Bung Karno, anjungan Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Istana Gebang dan di gedung atau lapangan kecamatan/kelurahan.

Perhatian dan pembinaan pemerintah Kota Blitar terhadap bidang budaya dan olahraga ini memang masih perlu terus ditingkatkan, sehingga tidak terhenti atau bahkan mengalami kemunduran. Kebutuhan terhadap fasilitas dan event seni budaya dan olahraga ini pada ujungnya akan menarik minat wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara. Adanya berbagai pertunjukan yang digelar dalam rangka peringatan budaya, festival maupun kegiatan pertandingan olahraga dipastikan akan menarik minat masyarakat secara umum untuk menyemarakkan kegiatan tersebut. Perhatian pemerintah dalam hal seni budaya dan olahraga ini pada masa mendatang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek ini diurutkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk aspek pelayanan umum, Pemerintah Kota Blitar setiap tahun melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada beberapa SKPD yang terkait pelayanan langsung ke masyarakat.

Secara umum, berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat, sampai dengan Tahun 2016, nilai SKM Kota Blitar mencapai 82 (baik).

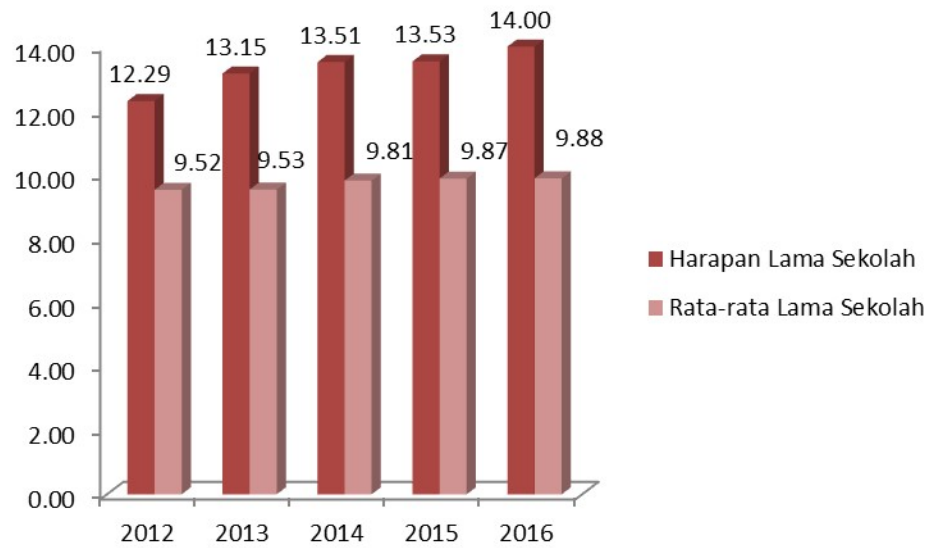
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Capaian angka harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.27
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Di Kota Blitar Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Kota Blitar, 2017

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan angka harapan lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 13.91%. Rata-rata lama sekolah juga meningkat sebesar 3,78%. Sedangkan capaian indikator urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Realisasi Kinerja Indikator Pendidikan
Di Kota Blitar Tahun 2012-2016

8	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	APK Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)	67,86	105,20	90,56	90,94	105,09
2	Angka Partisipasi Murni SD/MI (%)	-	90,15	95,91	95,89	96,28
3	Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat (%)	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
4	Angka Kelulusan SD Sederajat (%)	100	100	100	100	100
5	Rasio Guru terhadap Siswa SD/MI	1 : 17,26	1 : 18,55	1 : 19	1 : 18,83	1 : 15,00
6	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS (%)	-	82,87	88,13	90,31	92,33
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100	100	99,82	100	100
9	Rasio Guru terhadap Siswa SMP/MTs	1 : 13,69	1 : 13,63	1 : 14	1 : 14,32	1 : 12,50
10	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA (%)	--	74,69	73,15	80,22	84,78
11	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%)	1,95	0,77	0,02	0,02	0,00
12	Angka Kelulusan SMA/MA sederajat (%)	98,17	99,60	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Blitar, 2017

Berdasarkan tabel di atas, APM pendidikan dasar selama tahun 2012-2016, capaiannya fluktuatif dan cenderung menurun. APM SD sederajat tahun 2016 naik menjadi 96,28% dibanding tahun 2015 sebesar 95,89%. Sedangkan APM SMP/MTS Kota Blitar tahun 2016 sebesar 90,31%.

Sedangkan Angka Putus Sekolah menunjukkan kondisi yang baik dan mencapai 0% pada semua jenjang pendidikan. Artinya sudah sesuai target nasional Angka Putus Sekolah SD sederajat pada tahun 2016 adalah 0% dan di bawah target Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menetapkan 0,22%.

Salah satu keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur melalui indikator angka kelulusan. Dengan capaian Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD dan SMP sederajat selama Tahun 2012-2016 menunjukkan capaian yang sangat baik dimana pada Tahun 2016 mencapai 100%.

b. Kesehatan

Salah satu tujuan pembangunan kesehatan menurut Undang-undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009, adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Capaian pembangunan kesehatan dari 2012-2016 dapat dilihat dari beberapa indikator di bawah ini.

1. Indikator Kesehatan Masyarakat

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kesehatan Kota Blitar Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka kematian bayi	11,63	11,88	6,04	8,30	9,92
2	Angka kematian balita	0,97	0,98	0,00	0,98	0,92
3	Angka kematian ibu	333,9	49,48	139,27	48,8	236,18
4	Usia harapan hidup	72,66	72,69	72,70	73,00	73,09
5	Persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	98	81,53	87,27	89,11	92,00

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar, 2017

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, per 100.000 kelahiran hidup. AKI di Kota Blitar selama lima tahun (2012-2016) relatif fluktuatif.

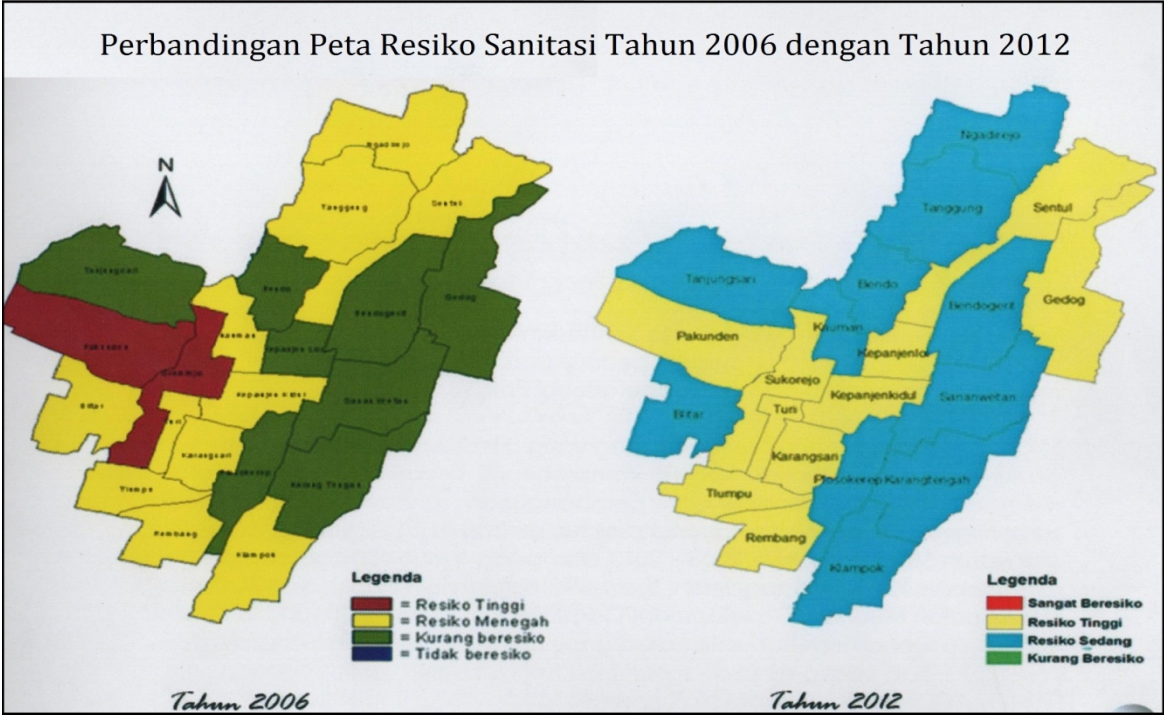
Indikator ini menggambarkan taraf status kesehatan masyarakat, yang secara langsung juga memberikan gambaran hasil pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan. Salah satu hasilnya adalah Angka Harapan Hidup di Kota Blitar pada tahun 2016 sudah menyentuh angka 73,09 tahun, yang tertinggi di Jawa Timur.

2. Sanitasi Masyarakat

Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam tatanan rumah tangga merupakan salah satu upaya strategis untuk menggerakkan dan memberdayakan anggota rumah tangga untuk hidup bersih. Melalui upaya ini setiap rumah tangga diberdayakan agar tahu, mau dan mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan dengan mengupayakan lingkungan yang sehat, mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi, serta memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada.

Sebagian besar wilayah Kota Blitar memiliki risiko sanitasi yang relatif rendah. Wilayah yang memiliki risiko yang relative tinggi adalah Kelurahan Sukorejo yang merupakan wilayah permukiman padat. Kondisi sanitasi di Kota Blitar di masing-masing kelurahan tergambar pada Peta Risiko Sanitasi Kota (Gambar 2.28).

Gambar 2.28
Peta Risiko Sanitasi Kota Blitar



Sumber : Strategi Sanitasi Kota Blitar 2012-2020

Cakupan layanan sanitasi masyarakat terdiri dari cakupan rumah tangga sehat, air bersih, jamban keluarga dan saluran pembuangan limbah. Perkembangan cakupan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Perkembangan Cakupan Layanan Sanitasi Masyarakat
di Kota Blitar Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Cakupan rumah tangga sehat	30,40	38,65	40,39	39,30	40,58
2	Cakupan air bersih	95,24	100,00	70,10	74,77	73,23
3	Cakupan jamban keluarga	82,79	84,66	96,58	96,58	101,40
4	Cakupan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)	77,32	79,00	80,00	82,5	83,58

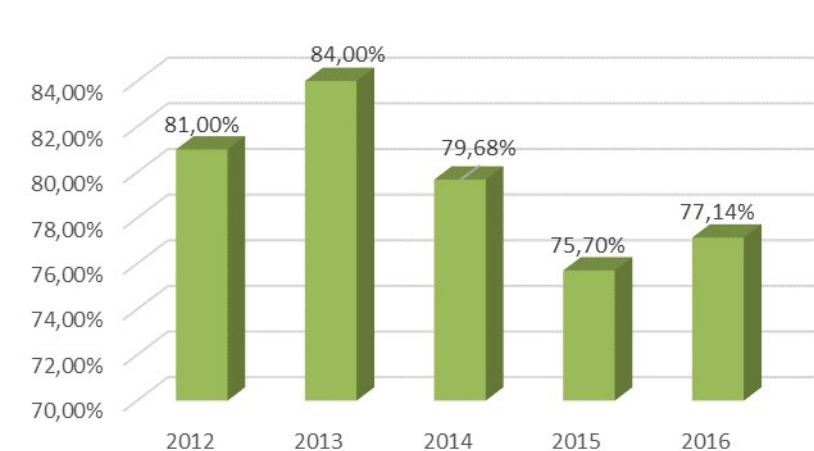
Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan rumah tangga sehat di Kota Blitar secara agregat mengalami peningkatan dari 30,40 persen ditahun 2012 menjadi 40,58 persen di tahun 2016. Hal ini juga dapat dilihat dengan meningkatnya cakupan jamban keluarga dan meningkatnya cakupan pembuangan air limbah (SPAL) di periode yang sama. Namun demikian peningkatan cakupan rumah tangga sehat tidak disertai dengan meningkatnya cakupan air bersih.

Air bersih bagi kehidupan dan begitu banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia, maka pengelolaan dan penggunaan air ini perlulah diperhatikan. Cakupan Air bersih merupakan salah satu indikator kesehatan masyarakat. Jamban keluarga juga merupakan aspek penting dalam kesehatan lingkungan antara lain dapat mencegah berkembangnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh kotoran manusia. Sementara dampak serius membuang kotoran di sembarang tempat menyebabkan pencemaran tanah, air dan udara karena menimbulkan bau. Pembuangan tinja yang tidak dikelola dengan baik berdampak mengawatirkan terutama pada kesehatan dan kualitas air. Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) adalah bangunan yang digunakan untuk mengumpulkan air buangan sisa pemakaian dari kran/hidran umum, sarana cuci tangan, kamar mandi, dapur, dan lain-lain, sehingga air limbah tersebut dapat tersimpan atau meresap ke dalam tanah dan tidak menyebabkan penyebaran penyakit serta tidak mengotori lingkungan sekitarnya.

3. Layanan Rumah Sakit Daerah

Gambar 2.29
Perkembangan Nilai IKM RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar 2012-2016



Sumber : RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, 2017

Berdasarkan grafik di atas, nilai IKM RSUD relatif fluktuatif, tapi masih dalam range predikat “baik”. Ini menandakan bahwa masyarakat Kota Blitar relatif cukup puas terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Mardi Waluyo. Ke depan, penambahan kelengkapan sarana dan prasarana RSUD serta peningkatan kualitas SDM RSUD akan ditingkatkan untuk meingkatkan kualitas layanan kesehatan di RSUD Mardi Waluyo.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Urusan pekerjaan umum merupakan pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Pekerjaan umum merupakan salah satu urusan yang perlu mendapatkan perhatian. Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air dan Perkotaan, Air Minum dan Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Jasa Konstruksi.

Perkembangan kinerja terkait program nasional 100-0-100 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Perubahan risiko sanitasi di masing-masing kelurahan dapat dilihat di Gambar 2.28.

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah disekitarnya. Sesuai dengan target dalam RPJMD, Kota Blitar telah menyusun dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk periode 2011-2030 yang secara hukum ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030. Sebagai tindak lanjut RTRW, telah disusun 7 (tujuh) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sedang dalam proses pembahasan Ranperda di DPRD Kota Blitar.

Tabel 2.14.1
Realisasi Kinerja Penataan Ruang
Kota Blitar 2012-2016

No.	Uraian	Realisasi Per-Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Ketersedian Dokumen Rencana Tata Ruang	Ada	ada	ada	ada	ada
2	Status Dokumen Rencana Tata Ruang Kota	perda	perda	Perda	Perda	Perda
3	Status Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota	Belum ada	Belum ada	Draft Perda	Draft Perda	Draft Perda

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2016

Berdasarkan informasi realisasai kinerja bidang penataan ruang di Kota Blitar, terlihat bahwa setelah RTRW ditetapkan pada tahun 2011, posisi RDTR sebagai dokumen turunan RTRW yang disusun sejak Tahun 2014. Tahun 2015-2017 ini masih dalam proses persetujuan substansi di Provinsi Jawa Timur dan asistensi peta di Badan Informasi Geospasial (BIG), diharapkan 2017 ini merupakan akhir penetapan.

Tabel 2.14.2.
Realisasi Pelayanan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Penataan Ruang Kota Blitar 2012-2016

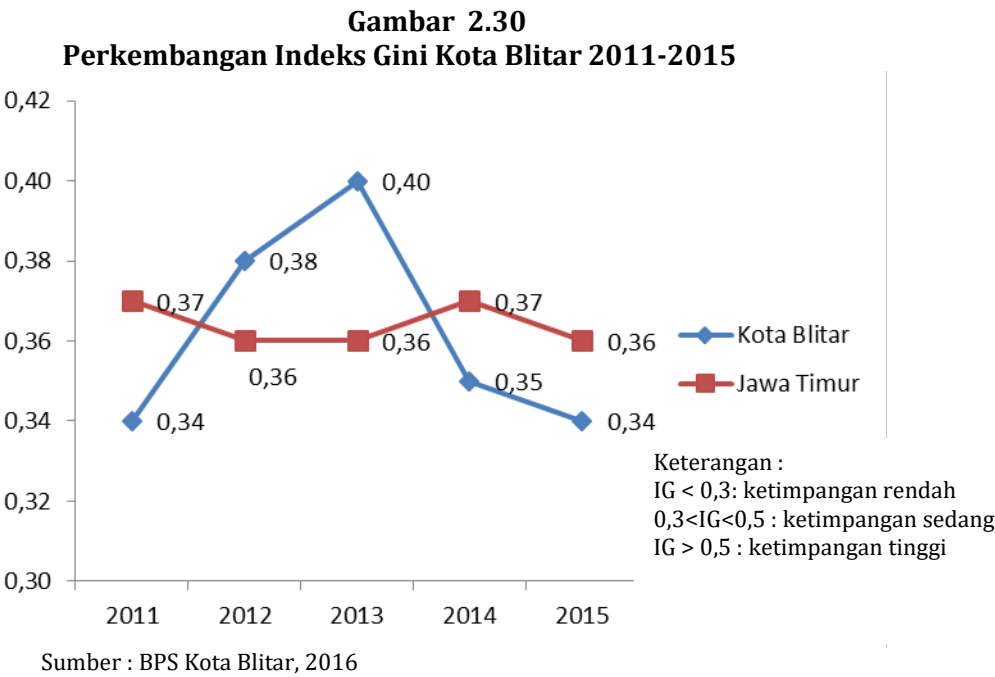
No	Indikator	Satuan	Target				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rinciannya melalui peta analog dan peta digital:						
	- Tingkat Kota	%	100	100	100	100	100
	- Tingkat Kecamatan/Kelurahan	%	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
2.	Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	%	NA	NA	NA	10,42	9,91

Sumber : DLH, 2016

d. Sosial

Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal, yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Nol merupakan pemerataan sempurna, sedangkan satu merupakan ketimpangan sempurna. Indeks gini digunakan untuk mengukur pemerataan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat Kota Blitar. Pembangunan Daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi saja, namun disertai dengan peningkatan pemerataan pembangunan.

Berdasarkan gambar berikut, Indeks gini Kota Blitar berkisar pada nilai 0,3 berarti termasuk ketimpangan sedang (pada batas bawah-relatif rendah). Dengan demikian pemerataan pendapatan di Kota Blitar relatif tinggi dan pada Tahun 2015 hampir sama dengan nilai Indeks gini Provinsi Jawa Timur.



Secara keseluruhan Indeks Gini selama periode 5 tahun mengalami penurunan sebesar 14,71%. Hal ini berarti pemerataan pendapatan di Kota Blitar semakin merata. Program pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan perlu diidentifikasi dengan baik sehingga dapat membuka akses pendidikan dan lapangan kerja yang lebih luas untuk masyarakat Kota Blitar. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi angka Indeks Gini.

e. Perumahan Rakyat dan Kawasan

Capaian kinerja untuk urusan perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Perumahan
Kota Blitar 2012-2015

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase Rumah Tangga yang lantainya bukan tanah	98,87	99,35	99,14	99,37
2.	Persentase Rumah Tangga yang atapnya beton/genteng	99,09	97,49	97,36	93,89
3.	Persentase Rumah Tangga yang dinding terluasnya tembok	98,26	97,64	97,58	98,42

Sumber : BPS Kota Blitar, 2016

Berdasarkan data di atas sebagian besar (di atas 97%) rumah tangga di Kota Blitar sudah tinggal di rumah yang layak huni.

f. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ini diarahkan pada terwujudnya stabilitas daerah melalui peningkatan iklim politik yang kondusif, penguatan lembaga sosial dan politik masyarakat, penegakan produk-produk hukum daerah; peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur, dan peningkatan peran serta masyarakat. Perkembangan capaian indikator penyelenggaraan penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Blitar Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tahun 2012-2016

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Rasio tempat ibadah dan penduduk	1:480	1:353	1:324	1:380	1 : 380

Sumber : Bakesbangpolinmas dan PBD Kota Blitar, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah tempat ibadah di Kota Blitar yang ditunjukkan dengan nilai rasio tempat ibadah 1:480 pada Tahun 2012 menjadi 1:380 pada Tahun 2016. Pelaksanaan peribadatan sehari-hari tidak mengalami masalah yang berarti. Jika ada peringatan hari besar agama yang memerlukan tempat lebih luas dari biasanya seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, Natal, dan Paskah masing masing pengurus jemaah menambah bangunan non permanen berupa tenda dan sejenisnya secara swadaya.

Tingkat kerukunan dan toleransi antar umat beragama maupun antar suku dan golongan relatif cukup baik, hal ini terbukti dari tidak adanya konflik sosial berbau SARA yang terjadi dalam kurun waktu 2012-2016. Hal ini tercapai berkat kerjasama yang baik antar umat beragama, tokoh agama, tokoh ormas, para tokoh politik dan segenap aparat pemerintah yang ada di Kota Blitar.

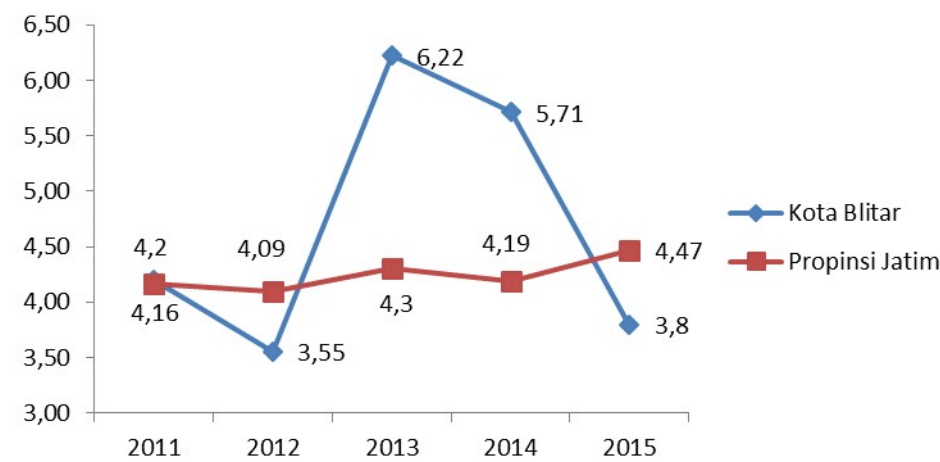
2.3.1.2 Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja mempunyai peran dalam meningkatkan produktivitas daerah, sehingga apabila potensi tenaga kerja kita berkualitas akan berdampak positif pada peningkatan PDRB dan pendapatan perkapita daerah. Namun apabila tenaga kerja tersebut tidak dikelola dan dikendalikan secara baik akan berpotensi menjadi permasalahan.

Pengangguran adalah salah satu permasalahan yang harus dihadapi sebagai bagian dari proses menyejahterakan masyarakat. Penganggur dikelompokkan menjadi dua yaitu penganggur terbuka dan setengah penganggur. Penganggur yang dimaksud dalam konteks ini adalah penganggur terbuka, yaitu penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang tidak bekerja namun aktif mencari pekerjaan. Penganggur terbuka juga mencakup mereka yang tidak bekerja namun sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang tidak aktif mencari pekerjaan karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Gambar 2.31
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar
Tahun 2011-2015 (%)



Sumber data : BPS Kota Blitar, 2017

Berdasarkan Data BPS Kota Blitar, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar relatif fluktuatif. Meski sempat mengalami kenaikan menjadi 6,22% di Tahun 2013 (sebagai akibat dari kenaikan BBM dan Tarif Dasar Listrik yang memicu banyaknya PHK), pada Tahun 2014 mulai mengalami penurunan. Secara keseluruhan selama 5 tahun TPT Kota Blitar mengalami penurunan sebesar 8,65%. Grafik di atas juga menunjukkan bahwa TPT Kota Blitar berada di bawah angka TPT Provinsi Jawa Timur.

Data di atas menunjukkan bahwa ketenagakerjaan masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan solusi cepat. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah orang yang bekerja menunjukkan perkembangan positif, setiap tahun mengalami pertumbuhan yang signifikan. Akan tetapi, disisi lain jumlah pengangguran juga terus meningkat. Artinya bahwa peningkatan jumlah lapangan kerja yang tersedia belum mampu menampung secara optimal pertumbuhan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya, sehingga peran pemerintah perlu lebih dioptimalkan lagi.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi dari pelayanan antar kerja dan memberikan kesempatan kerja, maka Pemerintah juga memfasilitasi melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) dan Bursa Kerja Online (BKOL). Laporan Informasi Pasar Kerja memuat data - data Pencari Kerja yang terdaftar, lowongan kerja, penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN), yang dirinci menurut jenis pendidikan formal, umur, jenis kelamin dan sektor usaha.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penempatan dan perluasan kesempatan kerja di Kota Blitar dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya untuk Antar Kerja Antar Negara. Sementara itu penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal cukup fluktuatif.

Untuk menyebarluaskan informasi pasar kerja pada masyarakat luas (terutama pencari kerja), antara lain : Pelaksanaan Bursa Kerja, juga dapat di akses melalui website www.infokerjajatim.go.id. Disini para pencari kerja bisa mengakses langsung informasi lowongan kerja yang ada, baik dalam negeri maupun luar negeri.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mengingat pentingnya peran serta perempuan dan anak dalam pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Blitar memberikan perhatian yang besar terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Data indikator kinerja dari penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun terakhir antara lain dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.17
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Blitar 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1..	Indeks Pembangunan Gender (IPG)*	97,63	97,74	98,23	98,23	-
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*	69,39	69,48	67,57	67,22	-
3	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : * BPS Kota Blitar, 2016
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, 2017

Kenaikan angka IPG dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kesetaraan gender di Kota Blitar pada bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Sementara itu untuk tingkat keterwakilan perempuan dalam ranah publik yang ditunjukkan melalui IDG terdapat sedikit penurunan pada tiga tahun terakhir. Yang cukup perlu menjadi perhatian adalah adanya peningkatan pada KDRT, pelecehan seksual dan kasus kekerasan pada anak. Meskipun jumlah kasus relatif meningkat, tetapi persentase penyelesaiannya relatif tinggi.

c. Pangan

Tabel 2.18
Perkembangan Skor PPH Ketersediaan Pangan dan Konsumsi Pangan
Kota Blitar 2012-2016

1	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Skor PPH Ketersediaan Pangan	74,56	79,09	78,00	79,91	80,04
2	Skor PPH Konsumsi Pangan	80,00	82,20	85,30	88,70	89,70

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, 2017

Sebagai wilayah perkotaan, karena keterbatasan lahan, pembangunan di bidang pangan tidak dititikberatkan di sektor produksi pangan tetapi lebih mengarah pada ketersediaan pangan dan konsumsi pangan yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan

(PPH). Secara keseluruhan selama 5 tahun skor PPH Konsumsi meningkat sebesar 14,60%. Data ini menunjukkan kualitas pola konsumsi masyarakat Kota Blitar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya daya beli dan tingkat kesadaran masyarakat akan kualitas gizi dan pangan.

Dari segi keamanan pangan untuk dikonsumsi, telah dilakukan uji laboratorium terhadap 20 sampel pangan segar yang diperdagangkan di Kota Blitar. Hasil uji menunjukkan 100% dari seluruh sampel dinyatakan aman untuk dikonsumsi, karena tidak mengandung cemaran pestisida yang berbahaya.

d. Pertanahan

Pelayanan bidang pertanahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan proses sertifikasi tanah hak milik masyarakat tetap menjadi kewenangan BPN sebagai instansi vertikal pertanahan di Kota Blitar. Proses sertifikasi yang dilaksanakan sebagai penjabaran tupoksi BPN inilah yang sering disebut sertifikasi rutin. Fungsi Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini sudah terwakili oleh peran dari kelurahan dan kecamatan karena dari pemerintahan kelurahan inilah semua data dan sejarah tanah terdokumentasikan, melalui buku tanah/girik atau letter C kelurahan setempat. Selain peran dan tugas tersebut, pelayanan pertanahan kepada masyarakat juga diberikan langsung oleh aparatur di kecamatan dan kelurahan. Perangkat daerah di kecamatan sebagai bagian dari Aparat Pemerintah Kota Blitar juga berperan dalam mutasi pertanahan yang dalam hal ini bertindak selaku Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), khususnya bagi tanah petak D (Letter C Kelurahan). Sampai dengan Tahun 2015, luas tanah yang bersertifikat adalah 82,47%.

e. Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup Kota Blitar salah satunya dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai yang menunjukkan pencapaian kinerja di bidang lingkungan Hidup dengan melihat pada 3 (tiga) parameter yaitu:

1. Indeks pengendalian pencemaran air
2. Indeks pengendalian pencemaran udara
3. Indeks tutupan vegetasi

Yang sudah dilakukan sampai tahun 2016 adalah pemantauan kualitas air dan udara serta pembinaan terhadap aktifitas penghasil limbah serta adanya peningkatan area untuk RTH. Nilai IKLH Kota Blitar baru bisa dihitung 2015 dengan Nilai IKLH tahun 2015 sebesar 57,94 dan Tahun 2016 sebesar 59,65.

Perkembangan kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup lainnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

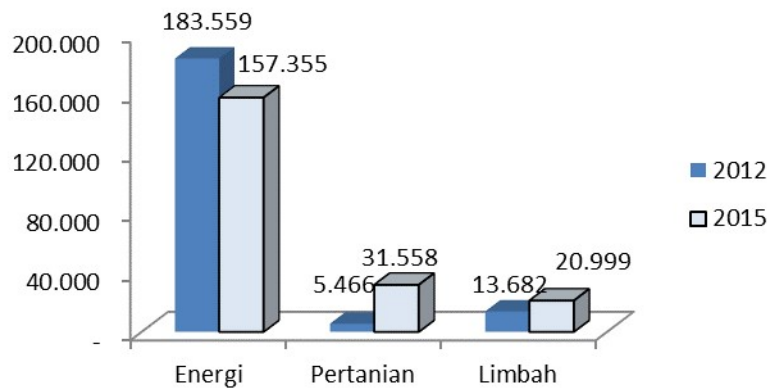
Tabel 2.19
Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kota Blitar Tahun 2012-2016

No	Uraian	Capaian Kinerja Per-Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Nilai Indeks Tutupan Vegetasi	NA	NA	NA	41,13	41,13
2	Nilai Indeks Pencemaran Air	NA	NA	NA	50	45
3	Nilai Indek Pencemaran Udara	NA	NA	NA	96	96
4	Persentase Mata Air Yang berfungsi	96	96	96	96	96
5	Predikat Pengelolaan Lingkungan	ADIPURA	ADIPURA	ADIPURA	ADIPURA	ADIPURA BUANA
6	Persentase Cakupan pelayanan sampah (%)	71,00	71,00	80,00	80,00	93,49
7	Persentase Rumah Tangga yang terlayani IPAL Komunal	3,65	4,48	4,85	4,99	4,99
8	Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2e)	202.707	NA	NA	209.912	NA

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar, 2017

Sebagai wilayah perkotaan, pengelolaan sampah selalu menjadi tantangan tersendiri. Sampai dengan Tahun 2016, jumlah sampah mencapai 74,26 ton per hari dan 72% sudah dapat terangkut dan diproses di TPA Kota Blitar dengan cakupan pelayanan sampah mencapai 93,49%. Dari aspek pengolahan limbah padat, sudah terbangun sejumlah 52 IPAL Komunal dengan presentase rumah tangga yaang terayani IPAL Komunal sejumlah 4,99% pada Tahun 2016. Keberhasilan pengelolaan lingkungan juga ditunjukkan dengan berhasilnya Kota Blitar meraih predikat Adipura Buana pada Tahun 2016. Data dan informasi lingkungan yang bisa diakses publik terdiri dari beberapa jenis diantaranya : Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang dapat diakses di website Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar di alamat www.dlh.blitarkota.go.id, buku Profil Lingkungan Hidup, Video publikasi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Gambar 2.32
Perkembangan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Blitar (ton Co2e)



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar, 2017

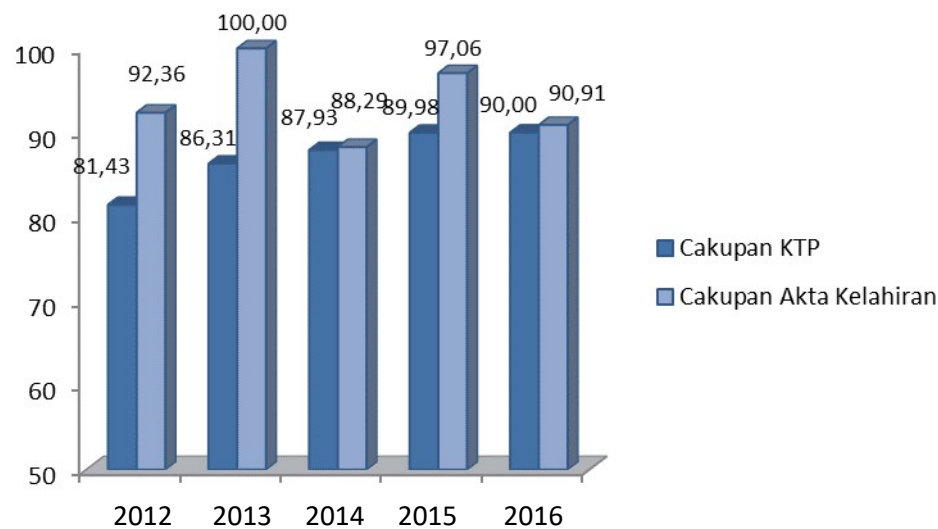
Hasil perhitungan emisi Gas Rumah Kaca Kota Blitar mengalami peningkatan dari Tahun 2012 sejumlah 202.707 ton CO₂e menjadi 209.912 ton CO₂e pada 2015. Meskipun sudah terjadi penurunan dari sektor energi, tetapi terjadi peningkatan di sektor pertanian dan limbah. Ke depan, upaya-upaya pengurangan Emisi GRK terkait kedua sektor tersebut perlu ditingkatkan. Penggunaan pupuk organik dan pengurangan produksi sampah melalui Gerakan 3R perlu terus dioptimalkan.

f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Sejak tahun 2011 telah dilaksanakan program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Jika sebelumnya pelayanan pencatatan administrasi kependudukan dilaksanakan secara manual maka melalui program e-KTP semua data penduduk beserta Nomer Induk Kependudukan (NIK) dicatat secara elektronik. Penerapan e-KTP secara serentak menimbulkan beberapa perubahan baik dalam pelayanan maupun waktu pelaksanaan pelayanan. Dengan sistem dan program baru diharapkan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan dapat efektif dan lebih efisien. Kondisi ini berimplikasi pada data indikator capaian keberhasilan di bidang administrasi kependudukan seperti persentase kepemilikan KTP dan bayi yang memiliki akte kelahiran serta dokumen kependudukan lainnya.

Kebijakan pada urusan Kependudukan dan catatan sipil sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2012-2016 diarahkan pada upaya pengelolaan administrasi kependudukan berbasis *Single Identification Number* dan pencatatan sipil dalam kerangka keseimbangan persebaran penduduk.

Gambar 2.33
Perkembangan Persentase Cakupan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Kota Blitar 2012-2016



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar, 2017

Dari tabel diatas Cakupan KTP Kota Blitar pada Tahun 2012 mencapai 81,43% dan telah mencapai 90,00% pada Tahun 2016. Hal ini tidak terlepas dari upaya kerjasama yang senantiasa dikembangkan bersama antara segenap pemangku kepentingan dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat. Dari data tabel diatas nampak bahwa cakupan akta kelahiran Kota Blitar pada Tahun 2012 mencapai 92,36% dan Tahun 2016 telah mencapai 90,91%. Untuk hasil Survey Kepuasan Masyarakat di bidang kependudukan dan catatan sipil baru mulai dilakukan ada tahun 2016 dan predikat yang diperoleh adalah “BAIK”.

g. Pemberdayaan Masyarakat

Mengingat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, Pemerintah Kota Blitar dalam Program dan Kebijakannya mengutamakan partisipasi masyarakat dengan tetap tidak mengesampingkan tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri yaitu mengembangkan kemampuan, kemandirian dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan.

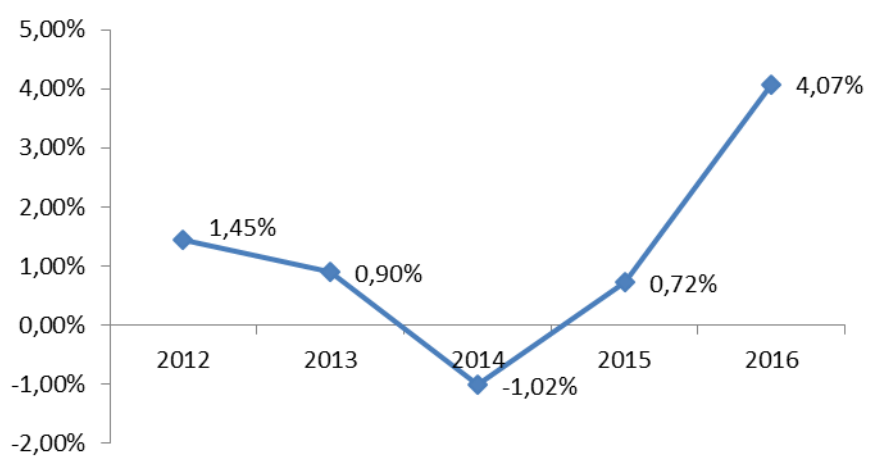
Dari tahun 2012 sampai dengan 2016 pelaksanaan musrenbang sudah mulai dari tingkat Rukun Warga (RW), Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Sedangkan lembaga keswadayaan masyarakat sudah ada di setiap kelurahan, sehingga total lembbaga yang ada berjumlah 21 lembaga. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar telah

melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, bahkan partisipasi masyarakat ini dilakukan mulai dari awal perencanaan pembangunan yaitu mulai dari Musrenbang tingkat RW dan kelurahan, Musrenbang tingkat kecamatan dan Musrenbang tingkat kota.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu indikator utama dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah laju pertumbuhan penduduk. Perkembangan Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.34
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar
Tahun 2012-2016 (%)



Sumber : Dispenduk Capil Kota Blitar, 2017

Pada Tahun 2016 terjadi peningkatan LPP yang cukup tajam menjadi 4,07%. Ini disebabkan karena terselesaikannya sebagian besar proses rifikasi e-KTP yang menjadi program nasional dan bukan karena meningkatnya angka kelahiran. Capaian indikator pendukung lainnya pada Tahun 2016 diantaranya rata-rata jumlah anak per keluarga 1,5, prevalensi peserta KB aktif mencapai 16.653, Jumlah KB Pria 199 orang dan Jumlah peserta KB Baru 2,719 orang.

i. Perhubungan

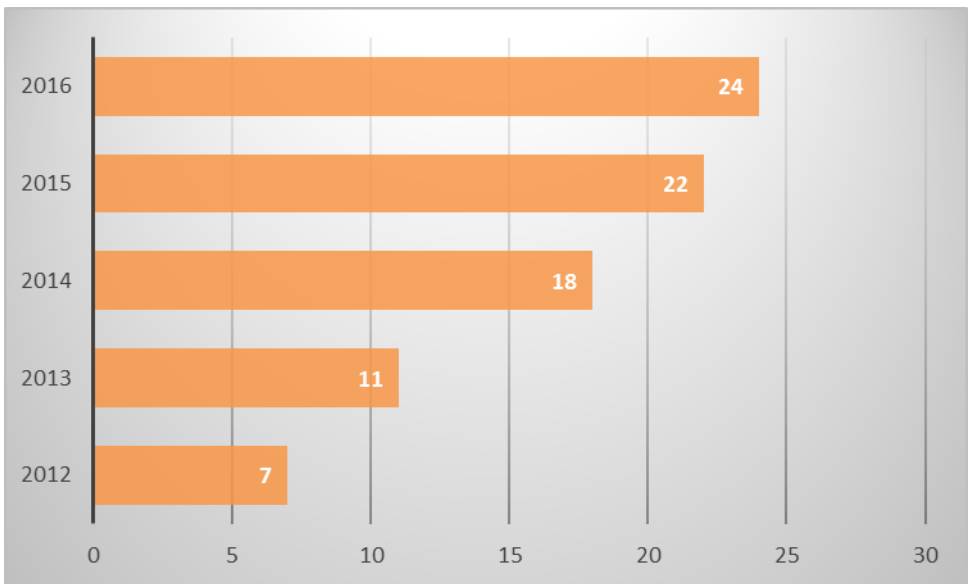
Dalam pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain, Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih

mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah, oleh karena itu Pemerintah Kota Blitar mengoptimalkan hal-hal yang menjadi kewenangan guna menjamin pelayanan transportasi yang aman dan lancar. Pada Tahun 2015 persentase fasilitas prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik adalah 97,32% dan pada Tahun 2016 mencapai 97,09%. Angka ini relatif tinggi sehingga sudah cukup memadai sehingga pelayanan transportasi berjalan lancar.

j. Komunikasi dan Informatika

Penerapan layanan publik yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi sudah menjadi tuntutan kemajuan pembangunan. Perkembangan persentase penerapan layanan pemerintah dan layanan publik berbasis TIK dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.35
Persentase Penerapan Layanan Pemerintahan Dan Layanan Publik Berbasis TIK Yang Terintegrasi Tahun 2012-2016 (%)

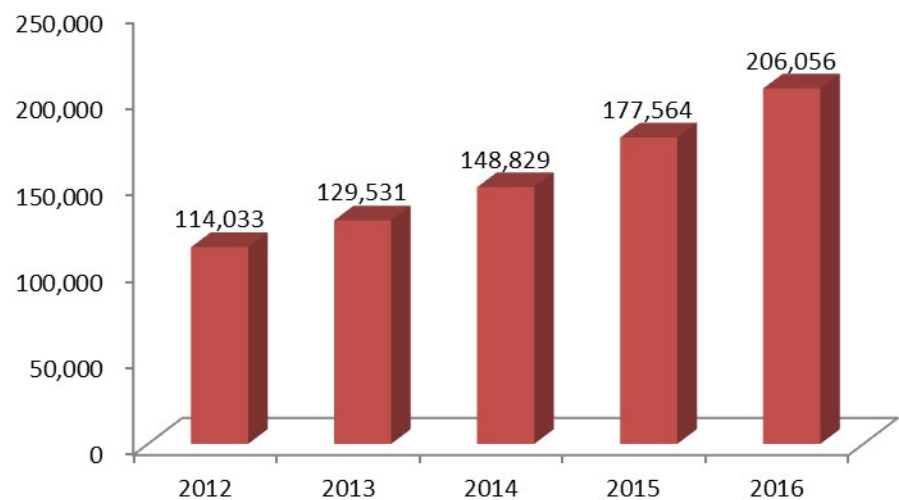


Sumber : Dinas Kominfotik Kota Blitar, 2017.

Grafik di atas menunjukkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari kondisi 2012 sebesar 7% menjadi 24% pada Tahun 2016. Upaya ini terus ditingkatkan dengan adanya pengembangan pengelolaan manajemen pemerintah daerah melalui e-planning, e-bugetting, e-procurement dan aplikasi-aplikasi lainnya.

k. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah-

Gambar 2.36
Perkembangan Nilai Kontribusi PDRB ADHB Sektor UKM*
Kota Blitar Tahun 2012-2016 (Rp. 000.000)



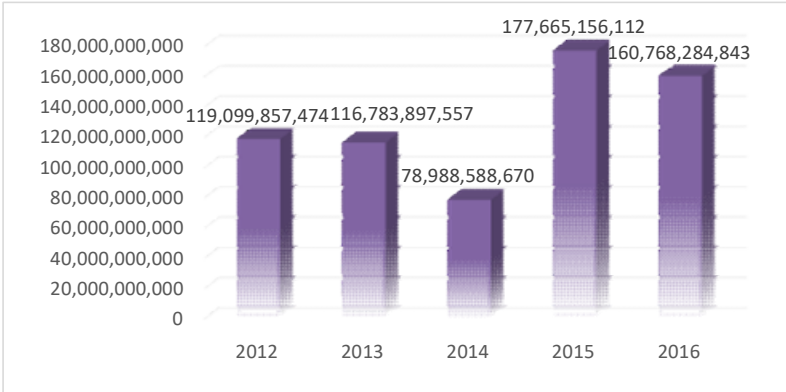
Sumber : BPS Kota Blitar, 2016.
* industri makan, tekstil dan pakaian jadi

Koperasi dan UKM merupakan sektor yang mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Nilai kontribusi sektor ini terhadap PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2012 mencapai 114.033 juta rupiah menjadi 206.056 juta rupiah pada Tahun 2016 (meningkat 80,69%). Hal ini didorong oleh semakin berkembangnya sektor ini sebagai dampak penerapan APBD Pro Rakyat pada periode RPJMD Kota Blitar 2011-2015 dimana dukungan dan fasilitasi kepada pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi dilakukan secara optimal.

1. Penanaman Modal Daerah

Penyelenggaraan urusan penanaman modal diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif, peningkatan investasi/ penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah.

Gambar 2.37
Perkembangan Nilai Investasi PMDN Kota Blitar
Tahun 2012-2016 (Rp.)



Sumber : Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP, 2017

Grafik di atas menunjukkan investasi PMD Kota Blitar meningkat dari Rp. 119.099.857.474 Tahun 2012 menjadi Rp.160.768.284.843 pada Tahun 2016 (meningkat 34,99%).

Di aspek pelayanan perijinan, sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2012 tentang jenis dan mekanisme perijinan di KPT, jumlah perijinan yang dilayani ada 38 jenis ijin dan 4 jenis non ijin.

m. Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan memiliki peran strategis dan diarahkan untuk meningkatkan daya kreatif dan inovatif pemuda dan membiasakan kepada pemuda untuk selalu peka terhadap perkembangan jaman dan lingkungannya. Capaian indikator urusan kepemudaan dan olahraga sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.20
Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2012-2016

No	Tingkatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	5	5	5	5	5
2	Persentase peningkatan prestasi olahraga	19	19	20	21	27

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Blitar, 2017

Sampai dengan Tahun 2016, organisasi kepemudaan sudah ada dii masing-masing Kelurahan dan Kecamatan sehingga total organisasi kepemudaan yang dibina Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Blitar adalah 24 Karang Taruna.

Implementasi pengembangan bidang olahraga diantaranya

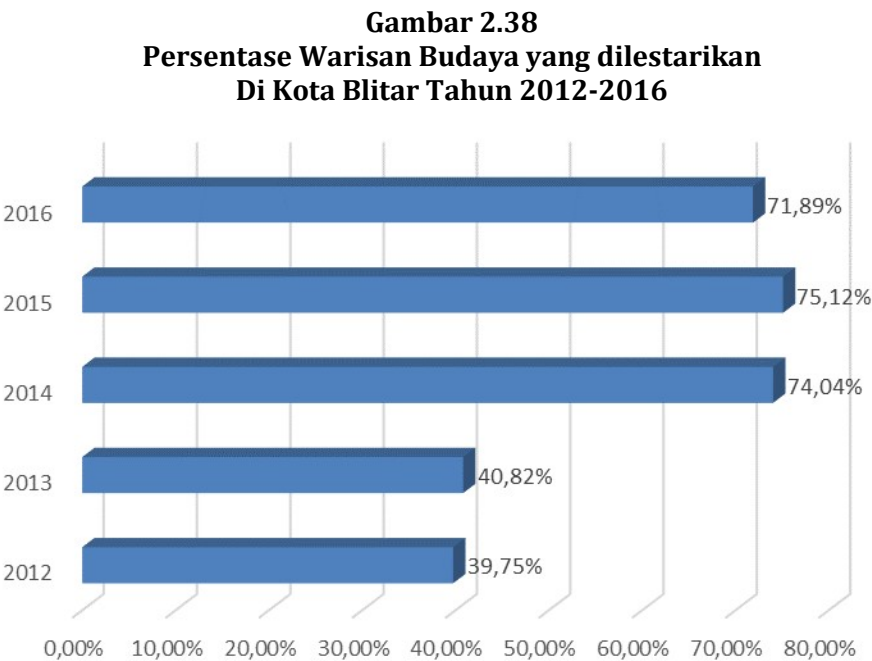
didukung oleh ketersediaan fasilitas olahraga di Kota Blitar. Fasilitas yang sudah ada di Kota Blitar berupa 1 (satu) stadion olahraga terbuka (Stadion Patria), 1 (satu) stadion olahraga tertutup (GOR Sukarno) dan 3 gedung untuk tenis lapangan. Sebagian besar kegiatan olahraga dilakukan masyarakat di gedung-gedung Kelurahan, kecamatan dan beberapa lapangan olahraga yang tersebar di kelurahan Kota Blitar. Keberadaan fasilitas ini sangat membantu menumbuhkembangkan minat dan bakat masyarakat Kota Blitar di bidang olah raga.

n. Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik diarahkan untuk penyediaan data dan informasi pembangunan serta untuk memenuhi permintaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan daerah. Khusus urusan ini sekarang merupakan kewenangan Dnas Komunikasi, Informatika dan Statistik Daerah.

o. Kebudayaan

Salah satu bentuk pembangunan di Kota Blitar adalah pelestarian dan pengembangan kawasan budaya seperti tempat Makam Bung Karno, Istana Gebang, Makam Aryo Blitar, dan situs-situs lain yang masih dalam pengkajian dan penelitian.



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, 2017

Jenis warisan budaya yang dilestarikan meliputi kesenian, cagar budaya dan museum. Berdasarkan grafik di atas, pada periode 2012-2016 persentase warisan budaya yang dilestarikan relatif meningkat. Peningkatan ini salah satu disebabkan oleh adanya fasilitasi alat seni budaya di masing-masing kelurahan melalui Program Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan.

Penyelenggaraan aktivitas seni budaya oleh pemerintah Kota Blitar setiap tahunnya diparalelkan dengan upaya pengembangan pariwisata agar para pelaku seni budaya memperoleh manfaat secara ekonomi, yang pada gilirannya dapat mendukung pelestariannya dan pengembangan seni budaya itu sendiri.

p. Perpustakaan

Perkembangan indikator urusan perpustakaan Tahun 2015-2016 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Perkembangan Indikator Urusan Perpustakaan
Kota Blitar Tahun 2015 - 2016

No	Uraian	2015	2016
1.	Jumlah koleksi (buku)	12.574	14.059
2.	Prosentase Pemustaka yang puas atas pelayanan perpustakaan	45	70
3.	Jumlah Pemustaka	11.540	14.387
4.	Jumlah Judul koleksi perpustakaan	800	1.465

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Blitar, 2017

Dari data di atas dalam kurun waktu dua tahun, jumlah pemustakan mennnngkat dari 11.540 orang di Tahun 2015 menjadi 14.387 orang pada Tahun 2016 (meningkat 24,67%). Mulai Tahun 2017 akan dilakuan penghitungan Indeks Minat Baca sebagai indikator urusan perpustakaan Kota Blitar.

q. Kearsipan

Kearsipan sangat memegang peranan penting terkait dengan kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagi organisasi. Dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik, maka akan memudahkan pemimpin untuk menentukan kebijakan.

Perkembangan persentase arsip daerah yang diselamatkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Perkembangan Capaian Indikator Urusan Kearsipan
Kota Blitar Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	100	100	100	79,13	82,61

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Blitar, 2017

Mulai Tahun 2015, semakin meningkat kesadaran SKPD untuk menyerahkan pengelolaan arsipnya sehingga semakin banyak jumlah arsip SKPD yang diserahkan kepada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah. Hal ini menyebabkan persentase arsip yang diselamatkan menjadi menurun dari 100% menjadi 79,13% di tahun 2015 dan 82,61% di Tahun 2016.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

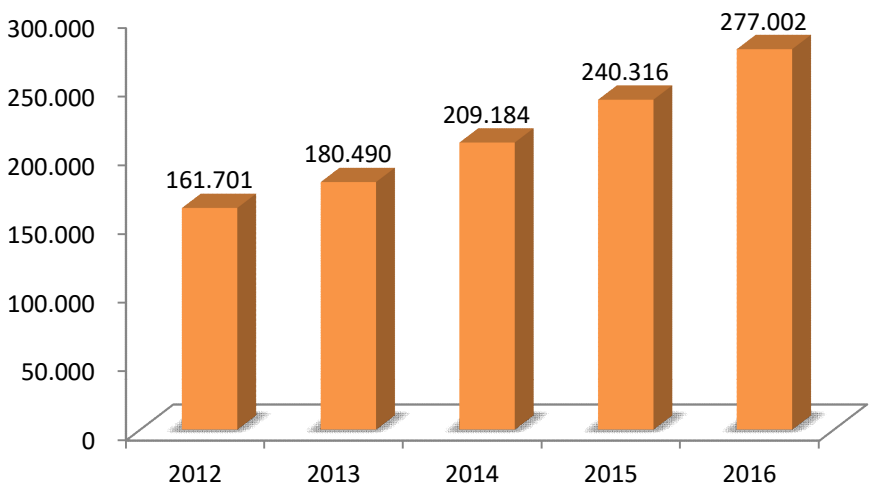
2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan urusan kelautan dan perikanan di Kota Blitar didukung keberadaan petani ikan yang memiliki kolam ikan (perikanan air tawar). Salah satu produk unggulannya adalah Ikan Hias dengan jumlah produksi ikan hias tahun 2016 mencapai 4.237.524 ekor dan ikan konsumsi mencapai 188 ton. Untuk aspek konsumsi ikan, pada Tahun 2016 mencapai 16,4 kg/kapita/tahun.

2.3.2.2 Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu potensi andalan untuk meningkatkan kinerja perekonomian Kota Blitar sehingga sektor ini menjadi salah satu sektor prioritas dalam rencana pembangunan Kota Blitar. Sejalan dengan hal tersebut, upaya pengembangan sektor pariwisata terus ditingkatkan guna mendukung pencapaian visi dan misi Kota Blitar. Perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Blitar dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.39
Perkembangan Nilai Kontribusi PDRB ADHB Sektor Pariwisata*
Kota Blitar Tahun 2012-2016 (Rp. 000.000)



Sumber : BPS Kota Blitar, 2017.
* PDRB Hotel dan Restoran

Nilai kontribusi sektor ini mengalami peningkatan sebesar 71,30% jika dibandingkan dengan kondisi awal pada Tahun 2012.

Tabel 2.23
Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara
di Kota Blitar Tahun 2012 – 2016

No	Objek Wisata	Jumlah Wisatawan Per-Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Makam Bung Karno	662.599	819.239	831.858	890.966	1.035.657
2	Perpustakaan Bung Karno	552.248	761.286	810.698	899.875	660.586
3	Sumber Udel	67.783	70.371	65.136	75.776	67.586
4	Pemandian Herlingga Jaya	71.175	154.353	73.481	71.146	45.914
5	Istana Gebang	1.211.680	292.142	381.282	463.028	490.973

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kota Blitar, 2017.

Berdasarkan tabel di atas jumlah wisatawan yang berkunjung ke Makam Bung Karno dan Istana Gebang mengalami peningkatan sebesar 64,2% dibandingkan Tahun 2012 sedangkan pengunjung Perpustakaan Bung Karno, Waterpark Sumber Udel dan Pemandian Herlingga Jaya mengalami penurunan yang relatif signifikan sebesar 39,3%. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya destinasi wisata alternatif lainnya di wilayah Kabupaten Blitar yang menjadi destinasi pendamping Makam Bung Karno dan Istana Gebang.

Obyek wisata yang tersedia seperti tertera pada tabel berikut. Potensi obyek wisata yang ada diharapkan mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Blitar, khususnya pada event-event tertentu seperti Haul Bung Karno, Grebeg Pancasila dan peringatan Pemberontakan PETA.

Tabel 2.24
Nama-nama Objek Wisata di Kota Blitar
Selama Tahun 2012 – 2016

NO	JENIS	NAMA
1.	Wisata Minat Khusus	Makam Bung Karno Makam Aryo Blitar Makam Pangeranan Makam Djojodigdan Taman Green Park Bendogerit Taman Sentul
2.	Wisata Budaya	Museum & Perpustakaan Bung Karno Istana Gebang Monumen Peta Bersih Desa tiap kelurahan Pementasan Kethoprak Pementasan Tari Trawesti/Eprak Pagelaran Wayang Kulit Pementasan Cokek-an Pemantasan Hadrah / Samroh Pementasan Campursari / Jaranan / Jedor Pementasan Dram Kolosal Peta Peringatan Hari Jadi Kota Blitar Grebeg Pancasila (Peringatan Lahirnya Pancasila)
3.	Wisata Industri	Kerajinan Bubut Kayu Kerajinan Batu Onix Kerajinan Ukir-ukiran kayu dan Gembol Kerajinan Monel, Kalung dan Manik – manik Sambel Pecel Wajik Klethik
4.	Wisata Pertanian	Agro Wisata BBI Kel. Rembang Agro Wisata Blimbing Kel. Karangsari Pasar Ikan Hias Kel. Kepanjenlor Kebon Binatang Mini Kel. Sentul Pasar Hewan Terpadu Dimoro
5.	Wisata Olah Raga	Stadion Patria Kawasan olah raga otomotif Waterpark Sumber Udel Gedung Olah Raga Soekarno – Hatta
6.	Wisata Cagar Budaya	Kebonrojo Alon – alon
7.	Wisata Religi	Goa Maria

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kota Blitar, 2017.

2.3.2.3 Pertanian

Kota Blitar memiliki lahan dan potensi yang terbatas untuk kegiatan pertanian, namun demikian Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Blitar mengembangkan kreasi dan inovasi dengan keterbatasan yang ada untuk kegiatan Pertanian. Kondisi ini disesuaikan dengan kondisi daerah serta pelaksanaan kebijakan kearifan lokal.

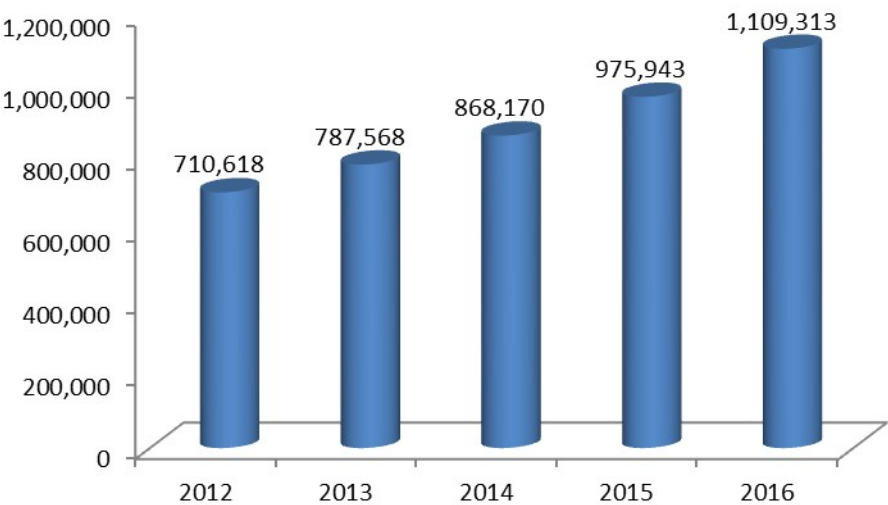
Sampai dengan Tahun 2016, produktivitas padi mencapai 8,02 ton/hektar, jagung 6,7 ton per hektar dan kacang-kacangan 1,88 ton/hektar. Keterbatasan lahan pertanian menjadi kendala utama dalam pengembangan produksi pertanian di Kota Blitar.

Untuk sub sektor peternakan, sampai Tahun 2016, jumlah populasi sapi potong mencapai 2.920 ekor, kambing 4.163 ekor dan ayam ras petelur mencapai 311.150 ekor.

2.3.2.4 Perdagangan

Sebagai wilayah perkotaan, sektor perdagangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kota Blitar. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.40
Perkembangan Nilai Kontribusi PDRB ADHB Sektor Perdagangan*
Kota Blitar Tahun 2012-2016 (Rp. 000.000)



Sumber : BPS Kota Blitar, 2017.
* Sektor perdagangan bukan mobil dan sepeda motor

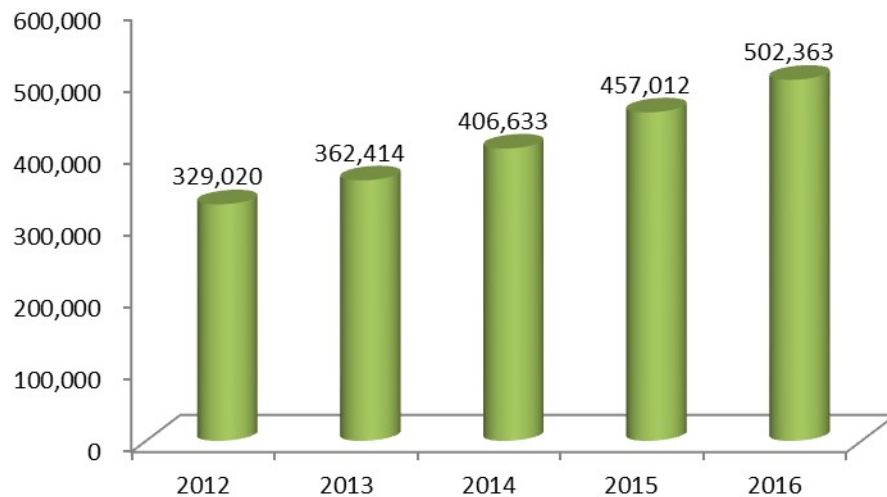
Nilai PDRB sektor perdagangan meningkat dari Tahun 2012 sebesar 710.618 juta Rupiah menjadi 1.109.313 juta rupiah (meningkat 56,10%) pada Tahun 2016.

2.3.2.5 Perindustrian

Penyelenggaraan urusan perindustrian diarahkan pada tewujudnya industri kecil/*home industry* yang bertumpu pada mekanisme pasar melalui (1) inovasi *city branding* (2) pembinaan industri kecil/*home industry*, (3) fasilitasi akses permodalan industri kecil/*home industry*; (4) pengembangan sentra-sentra industri kecil/*home industry*; (5) peningkatan kemitraan usaha industri kecil/*home industry*.

Perkembangan nilai kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kota Blitar dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.41
Perkembangan Nilai Kontribusi PDRB ADHB Sektor Perindustrian*
Kota Blitar Tahun 2012-2016 (Rp. 000.000)



Sumber : BPS Kota Blitar, 2017.

** Sektor perdagangan bukan mobil dan sepeda motor*

Nilai PDRB sektor perindustrian meningkat dari Tahun 2012 sebesar 329.020 juta Rupiah menjadi 502.363 juta rupiah (meningkat 52,68%) pada Tahun 2016.

2.3.3. Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.3.1 Perencanaan

Berlakunya kebijakan otonomi bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota menjadikan perencanaan pembangunan daerah bersifat strategis mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan memerlukan kelengkapan dan akurasi data yang tepat dan obyektif. Fungsi strategis perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui keterpaduan dokumen perencanaan antara dokumen perencanaan yang ada baik sektoral maupun perencanaan tingkatan pemerintahan di atasnya.

Sampai dengan akhir tahun 2016, persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar mencapai 80,78%.

2.3.3.2 Keuangan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan memegang peranan sangat penting karena dari fungsi inilah pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah di Kota Blitar dapat dianggarkan. Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Blitar selama kurun waktu 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.26 dan Tabel 2.27.

Realisasi pendapatan daerah selama periode tahun 2012-2016 secara umum melebihi dari target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga dapat membiayai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang sudah direncanakan. Namun demikian, ketergantungan pendapatan daerah dari Dana Transfer Pemerintah dan Provinsi masih cukup tinggi atau derajat desentralisasi fiskal Kota Blitar dalam kurun waktu tahun 2012-2016 tergolong masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah selama kurun waktu tersebut berada pada kisaran 11% - 15%. Proporsi Dana Transfer Pemerintah dan Provinsi terhadap total Pendapatan Daerah selama tahun 2012-2016 mengalami kecenderungan penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2012 mencapai 88,27% dan terus mengalami penurunan hingga 84,27% di tahun 2016. Ditengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Kota Blitar terus berupaya untuk meningkatkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun mengalami kenaikan sebesar 10,11 %, namun pertumbuhan ini lebih didominasi oleh sumber pendapatan yang bersifat khusus (*specific-grant*) seperti : Pendapatan BLUD dan Kapitasi JKN pada komponen Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada komponen Dana Perimbangan; dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, Alokasi Pendapatan untuk Sertifikasi dan Tambahan Penghasilan Guru serta Bantuan Keuangan Provinsi pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Data realisasi belanja daerah tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa alokasi belanja mengalami peningkatan rata-rata 10,36% per tahun, yaitu Rp. 518.217.383.008,61 pada Tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 857.379.693.587,67 pada tahun 2016, yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan besaran proporsi terbesar pada tahun 2012 sebesar 53,39 % dan terendah sebesar 40,94% terjadi pada tahun 2016.

Penurunan proporsi belanja tidak langsung salah satunya disebabkan karena tidak adanya penambahan pegawai baru dan perubahan kebijakan kenaikan gaji pokok pegawai menjadi tunjangan hari raya (bulan keempat belas). Penurunan proporsi belanja tidak langsung tersebut diimbangi dengan meningkatnya proporsi Belanja Langsung yang mencapai proporsi tertinggi Kota Blitar sebesar 59,06% pada tahun 2016.

Belanja Aparatur untuk kebutuhan belanja gaji, tunjangan, insentif pajak dan retribusi daerah, tambahan penghasilan, honorarium dan uang lembur yang terangkum dalam Belanja Pegawai pada setiap jenis Belanja Daerah terus mengalami penurunan. Gaji dan Tunjangan termasuk untuk Kepala Daerah dan Anggota DPRD, sedangkan insentif pajak daerah dan retribusi daerah untuk pengelola pemungutan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.25
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar Tahun 2012-2016

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	
	PENDAPATAN DAERAH	542.713.560.207,63	612.551.692.285,86	703.295.836.804,34	769.743.723.207,97	848.814.322.342,55	10,11
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	63.640.945.338,63	72.853.545.667,86	102.757.907.576,34	121.264.917.467,97	133.546.753.050,97	23,62
1	Pajak Daerah	11.156.119.478,60	12.357.982.714,67	21.258.883.283,00	24.054.196.460,66	26.049.843.912,99	25,49
2	Retribusi Daerah	6.839.996.401,90	7.894.066.348,25	8.247.787.104,00	8.808.457.272,50	9.668.860.140,00	7,97
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	949.883.433,97	865.904.541,66	921.913.877,24	985.410.769,74	1.023.333.373,00	5,76
4	Lain-lain PAD yang Sah	44.694.946.024,16	51.735.592.063,28	72.329.323.312,10	87.416.852.965,07	96.804.715.624,98	26,23
	DANA PERIMBANGAN	386.200.075.755,00	434.688.185.289,00	469.115.316.257,00	483.344.695.393,00	622.676.097.741,00	11,73
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	52.898.747.755,00	49.307.449.289,00	53.795.745.257,00	49.308.924.393,00	56.541.040.622,00	7,03
2	Dana Alokasi Umum	315.773.358.000,00	355.673.006.000,00	392.221.911.000,00	400.654.035.000,00	428.743.959.000,00	12,83
3	Dana Alokasi Khusus	17.527.970.000,00	29.707.730.000,00	23.097.660.000,00	33.381.736.000,00	137.391.098.119,00	16,63
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	92.872.539.114,00	105.009.961.329,00	131.422.612.971,00	165.134.110.347,00	92.591.471.550,58	5,51
1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	30.034.305.684,00	33.103.143.577,00	58.104.832.567,00	54.056.306.347,00	60.846.898.009,00	19,55
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.362.693.430,00	59.179.632.752,00	70.618.903.404,00	81.694.661.000,00	24.284.423.541,58	2,19
3	Bantuan Keuangan dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.475.540.000,00	12.727.185.000,00	2.698.877.000,00	29.383.143.000,00	7.460.150.000,00	209,99
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	11,73%	11,89%	14,61%	15,74%	15,73%	
	Rasio Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah	71,16%	70,96%	66,70%	62,80%	73,36%	
	Rasio lain-lain pendapatan yang sah terhadap Pendapatan daerah	17,11%	17,14%	18,69%	21,46%	10,91%	

Sumber : BPKAD Kota Blitar, 2017

Tabel 2.26
Realisasi Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	Realisasi Belanja (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
	BELANJA DAERAH	518.217.383.008,61	594.594.934.114,59	659.079.331.972,57	782.148.792.596,66	857.379.693.587,67	10,36
	Belanja Tidak Langsung	276.655.734.068,00	295.326.259.671,09	319.346.414.638,88	366.010.552.094,56	350.973.667.305,43	9,10
1	Belanja Pegawai	252.421.887.115,00	274.319.725.416,09	295.476.082.886,88	306.160.384.901,56	325.739.607.305,43	8,19
2	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	546.600.000,00	1.311.840.000,00	0,00
3	Belanja Hibah	18.601.183.843,00	15.147.867.000,00	16.047.191.000,00	31.959.577.404,00	14.626.515.000,00	22,05
4	Belanja Bantuan Sosial	5.150.535.069,00	5.546.204.510,00	7.306.440.000,00	26.863.078.749,00	8.140.565.000,00	29,84
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	466.454.041,00	312.462.745,00	386.238.752,00	480.911.040,00	499.969.500,00	3,77
6	Belanja Tidak Terduga	15.674.000,00	0,00	130.462.000,00	0,00	655.170.500,00	0,00
	Belanja Langsung	241.561.648.940,61	299.268.674.443,50	339.732.917.333,69	416.138.240.502,10	506.406.026.282,24	12,56
1	Belanja Pegawai	10.516.041.782,00	11.048.904.072,00	9.778.596.905,00	34.834.084.113,00	42.405.723.370,00	39,84
2	Belanja Barang Dan Jasa	140.057.519.225,61	181.044.332.108,50	203.627.992.865,69	212.967.330.167,92	260.628.422.516,69	20,72
3	Belanja Modal	90.988.087.933,00	107.175.438.263,00	126.326.327.563,00	168.336.826.221,18	203.371.880.395,55	6,02
	JUMLAH BELANJA	518.217.383.008,61	594.594.934.114,59	659.079.331.972,57	782.148.792.596,66	857.379.693.587,67	10,36
	% Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah	53,39%	49,67%	48,45%	43,23%	40,94%	
	% Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah	46,61%	50,33%	51,55%	56,77%	59,06%	

Sumber : BPKAD Kota Blitar, 2017

2.3.3.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana ketersediaan Sumber Daya Manusia (Pegawai Pemerintah Kota Blitar) baik dari aspek kuantitas dan kualitas untuk mendukung implementasi program pembangunan daerah.

Tabel 2.27
Perkembangan Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Blitar berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2012- 2016

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
SD	99	89	68	60	47
SLTP	159	148	140	134	110
SLTA	887	848	841	817	766
D. I	39	35	35	30	19
D. II	178	158	107	91	82
D. III	464	457	446	463	436
D. IV	44	44	51	53	54
S1	2032	1997	2053	2061	2077
S2	201	196	199	198	208
S3	0	0	0	0	0
TOTAL	4.103	3.972	3.940	3.907	3.799

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar, 2017

Salah satu aspek yang menentukan kualitas pegawai adalah pendidikan terakhir. Perkembangan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.56. Sebagian besar pegawai Kota Blitar ($\pm$ 50%) memiliki pendidikan terakhir Sarjana S-1. Terdapat peningkatan prosentase S-1, 48,73% pada Tahun 2011 menjadi 52,75% pada Tahun 2016. Mulai Tahun 2017 akan dilakukan penilaian Indeks Profesionalitas ASN sebagai indikator baru kepegawaian.

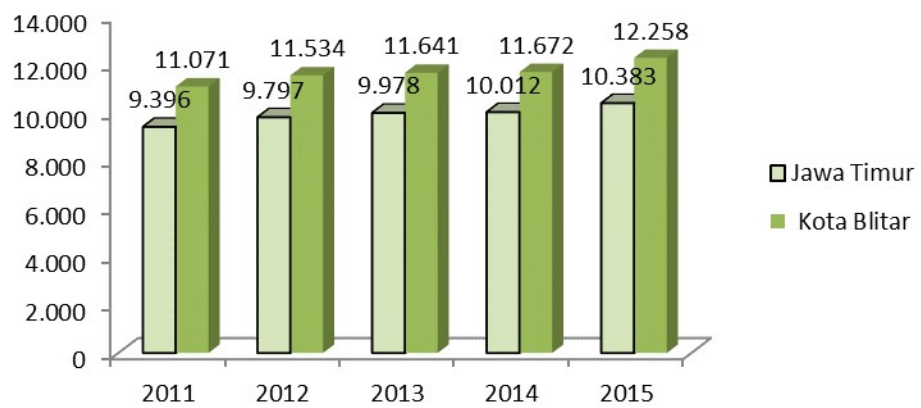
2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita

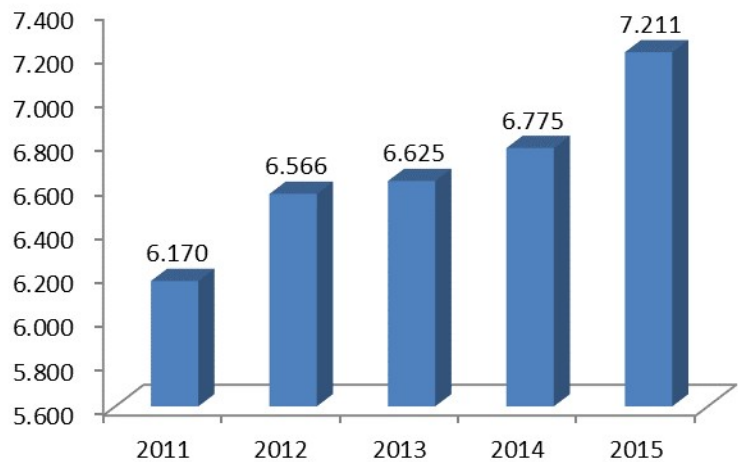
Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*puchasing power parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran perkapita setahun diperoleh dari Susenas. Rata-rata pengeluaran per kapita, dibuat konstan atau riil dengan Tahun Dasar 2012=100.

Gambar 2.42
Pengeluaran Rumah Tangga Perkapita
Kota Bitar Tahun 2011 – 2015 (Rp.000)



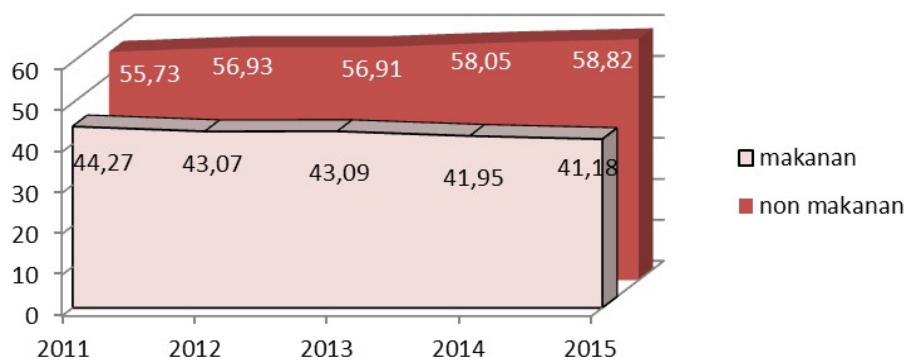
Sumber : BPS Kota Bitar, 2016

Gambar 2.43
Pengeluaran Non Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Kota Bitar Tahun 2011 – 2015 (Rp)



Sumber : BPS Kota Bitar, 2016

Gambar 2.44
Pergeseran Pola Pengeluaran Rumah Tangga Perkapita
Kota Bitar Tahun 2011 – 2015 (%)

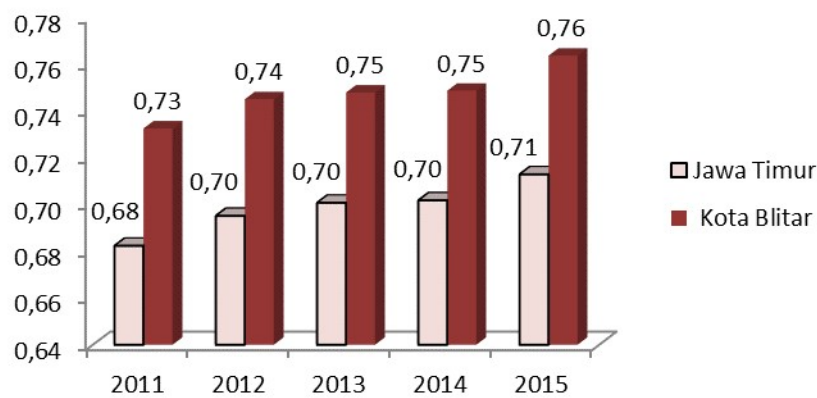


Sumber : BPS Kota Bitar, 2016

2.4.1.2 Indeks Daya Beli

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya non makanan. Metode perhitungannya menggunakan metode Rao.

Gambar 2.45
Perkembangan Indeks Daya Beli
Kota Blitar Tahun 2011 - 2015 (Rp)



Sumber : BPS Kota Blitar, 2016

Indeks Daya Beli masyarakat Kota Blitar, sesuai data rilis BPS pada tahun 2016 naik 0,01 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,77

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

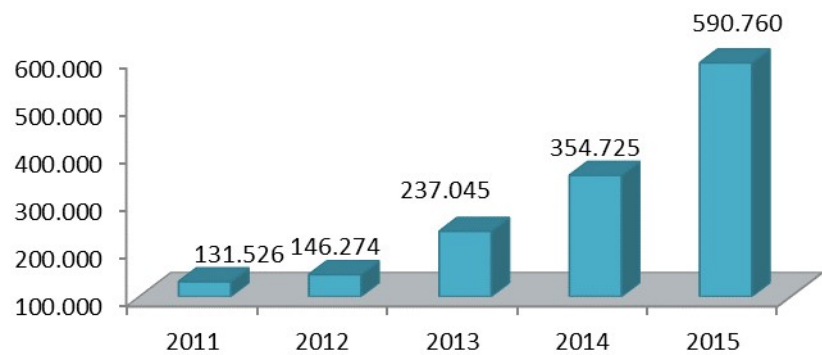
2.4.2.1 Sarana, Prasarana dan Moda Transportasi

Pemerintah Kota Blitar mengoptimalkan hal-hal yang menjadi kewenangan guna menjamin pelayanan transportasi yang aman dan lancar. Selama periode tahun 2012-2016 angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Blitar seluruhnya memiliki izin trayek. Sedangkan fasilitas terminal selama lima tahun ini tidak mengalami perubahan/penambahan dengan pertimbangan jumlah yang ada secara relatif sudah mencukupi.

Infrastruktur merupakan salah satu pendukung aspek daya saing daerah. Infrastruktur terdiri dari jalan, jembatan dan saluran drainase. Sampai dengan Tahun 2016 kondisi infrastruktur dalam kondisi baik sebesar 79,4%.

Untuk jumlah penumpang yang dilayani oleh angkutan umum dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.46
Jumlah Penumpang yang Dilayani Angkutan Umum
di Kota Blitar Tahun 2011-2015 (orang)



Sumber : Dinhub Kota Blitar, 2017

2.4.2.2 Ketaatan Terhadap RTRW

Tabel 2.28
Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dengan RTRW Kota Blitar (%)

No	Uraian	Penggunaan Lahan Tahun 2016 (ha)	Target Tahun 2030 (ha)	Prosentase Tercapai Target RTRW (%)
I	KAWASAN LINDUNG			
1	Kawasan Resapan Air	148	231	64.07%
2	Kawasan Perlindungan Setempat	58	290	20.00%
3	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	549.5	1147	47.91%
II	KAWASAN BUDIDAYA			
1	Kawasan Pertanian	1087	677	160.56%
2	Kawasan Permukiman	1236	1490	82.95%
3	Kawasan Perdagangan dan Jasa	165	157	105.10%
4	Kawasan Perkantoran	63	47	134.04%
5	Kawasan Pelayanan Pendidikan	74	64	115.63%
6	Kawasan Industri	38	69	55.07%
7	Kawasan Pelayanan Kesehatan	13	14	92.86%
8	Kawasan Pariwisata	20	24	83.33%

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2017

Dari tabel di atas, sebagian besar kawasan belum sesuai dengan target RTRW Kota Blitar. Perlu dilakukan penambahan kawasan lindung karena capaian targetnya berkisar antara 20% sampai 64%. Untuk kawasan budidaya, kawasan yang luasnya sudah melebihi target RTRW adalah kawasan pertanian, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran dan kawasan pelayanan pendidikan. Kawasan yang perlu ditingkatkan luasannya adalah kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pelayanan kesehatan dan kawasan pariwisata karena luas kawasan tersebut belum memenuhi target.

2.4.2.3 Luas Wilayah Produktif

Tabel 2.29
Prosentase Luas Wilayah Produktif
Kota Blitar Tahun 2016

No	Uraian	Penggunaan Lahan Tahun 2016 (ha)	% Penggunaan lahan (ha)
I	KAWASAN LINDUNG	1,352.5	33.41%
1	Kawasan Resapan Air	148.0	
2	Kawasan Perlindungan Setempat	549.5	
3	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	655.0	
II	KAWASAN BUDIDAYA	2,696.0	66.59%
1	Kawasan Pertanian	1,087.0	
2	Kawasan Permukiman	1,236.0	
3	Kawasan Perdagangan dan Jasa	165.0	
4	Kawasan Perkantoran	63.0	
5	Kawasan Pelayanan Pendidikan	74.0	
6	Kawasan Industri	38.0	
7	Kawasan Pelayanan Kesehatan	13.0	
8	Kawasan Pariwisata	20.0	

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2017

Tabel di atas menunjukkan prosentase total wilayah produktif (kawasan budidaya) dari total kawasan. Dari seluruh kawasan budidaya, kawasan pertanian, Perdagangan dan Jasa serta perindustrian menggunakan lahan sebesar 1.290 ha (47,85%) dari kawasan budidaya. Potensi Kota Blitar di bidang pariwisata juga cukup besar dan prosentase kawasan pariwisata mencapai 20 ha (0,74% dari kawasan budidaya).

Untuk wilayah kekeringan dan banjir, berdasarkan data historis (sebagaimana sudah dijelaskan pada kawasan rawan bencana), Kota Blitar belum pernah mengalami kekeringan dan banjir. Yang terjadi adalah penurunan permukaan air tanah dan adanya genangan di beberapa titik lokasi di Kota Blitar.

2.4.2.4 Fasilitas Penunjang

Beberapa fasilitas penunjang untuk fokus wilayah dan infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Perkembangan Jumlah Bank di Kota Blitar 2012 – 2016

Uraian		2012	2013	2014	2015	2016
1.	a. Bank Pemerintah	2	2	2	3	3
	b. Bank Syariah Pemerintah	0	0	1	1	1
2.	Bank Pembangunan Daerah	1	1	1	1	1
3.	a. Bank Swasta Nasional	3	3	5	2	2
	b. Bank Syariah Swasta	1	1	2	0	0
4.	Bank Perkreditan Rakyat	10	10	10	15	15

Sumber: Bank Indonesia Cabang Kediri, 2017

Jumlah fasilitas perbankan Kota Blitar juga mengalami peningkatan usaha, hal ini ditunjukkan oleh jumlah Perbankan di Kota Blitar Tahun 2012 - 2016 sebanyak 20 Bank menjadi 23 Bank.

Tabel 2.31
Perkembangan Jumlah dan Jenis Hotel dan Penginapan Kota Blitar 2012-2016

Tahun	Hotel		Penginapan	
	Jumlah	Kamar	Jumlah	Kamar
2012	16	664	3	47
2013	16	656	3	45
2014	16	656	3	45
2015	11	597	8	140
2016	11	602	7	116

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017

Khusus untuk warung dan restoran, sampai tahun 2016, terdapat 61 warung dan restoran yang terdaftar. Makanan yang disajikan beragam, dari menu makanan tradisional sampai ke makanan non tradisional.

2.4.2.5 Penggunaan Utilitas

Cakupan penggunaan air bersih Kota Blitar sampai dengan Tahun 2016 adalah 74,77%. Ini menurun dari kondisi Tahun 2011 yang mencapai 80,95%. Untuk penggunaan fasilitas listrik, sebagai wilayah perkotaan yang luasnya relatif kecil, sebagian besar penduduk sudah menggunakan fasilitas listrik (di atas 90%).

Penggunaan media komunikasi melalui telepon sudah banyak digantikan oleh penggunaan telepon seluler. Perkembangan data jumlah pelanggan sambungan telepon dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.32
Perkembangan Jumlah Pelanggan Sambungan Telepon
Kota Blitar 2012-2016

Jenis Pelanggan	2012	2013	2014	2015	2016
A. Langganan					
1. Rumah Tangga	26.009	26.287	26.685	25.524	25.716
2. Sosial	100	0	0	0	0
3. Bisnis	1841	2099	2190	1624	1701
4. Kantor/Perusahaan	195	0	0	90	114
5. Flexi	4012	3506	3064	0	0
B. Telepon Umum					
1. TUC	92	87	76	0	0
2. Warung Telkom	1012	902	771	28	16
3. Warung Internet	7	15	19	0	0

Sumber: PT. Telkom Blitar, 2017

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Sebagai wilayah perkotaan, Kota Blitar tentu tidak lepas dari permasalahan sosial yang harus dihadapi. Secara umum kondisi Kota Blitar relatif kondusif, terbukti sejak Tahun 2011 sampai Tahun 2016 tidak pernah terjadi kasus demonstrasi dan kasus SARA. Salah satu permasalahan yang harus diminimalisir adalah angka kejahatan. Sejak tahun 2011, angka kriminalitas sudah bisa ditekan berkat kerjasama yang kondusif antara Pemerintah Daerah, Aparatur Kepolisian dan Masyarakat. Menurunnya angka krimanilitas akan berdampak positif terhadap investasi dan akhirnya pada pertumbuhan ekonomi.

Berikut ditampilkan data tindak kejahatan yang terjadi selama Tahun 2012 hingga 2016. Keunikan dari kasus ini adalah tidak semua kasus dilandasi oleh semata-mata masalah kesulitan ekonomi, namun seringkali kondisi mental psikologis yang sedang mengalami gangguan/permasalahan juga bisa menjadi pemicunya.

Gambar 2.47
 Persentase Kasus Kriminalitas yang Diselesaikan
 di Kota Blitar Tahun 2011-2016 (%)



Sumber : Kasatreskrim Polresta Blitar, 2017

Tabel 2.33
 Perkara Kejahatan yang Dilaporkan dan Diselesaikan 2012- 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
A. Kejahatan Yang Dilaporkan	299	511	412	366	440
1. Pembunuhan	2	1	3	2	1
2. Perampokan	0	12	4	7	0
3. Pencurian Biasa	35	56	36	31	49
4. Pencurian Berat	50	82	39	57	53
5. Lain-lain	212	360	330	269	337
B. Kejahatan Yang Diselesaikan	141	257	246	202	250
1. Pembunuhan	1	1	2	2	1
2. Perampokan	0	5	1	5	0
3. Pencurian Biasa	21	40	22	20	33
4. Pencurian Berat	16	19	23	23	20
5. Lain-lain	103	192	198	152	196

Sumber : Kasatreskrim Polresta Blitar, 2017

Perkembangan Jenis Tindak Pidana yang terjadi di Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34
 Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan 2012 - 2016

Jenis Tindak Pidana	2012		2013		2014		2015		2016	
	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1. Pencurian Berat	82	27	39	23	28	14	57	23	53	20
2. Pencurian Biasa	56	45	36	22	9	8	31	20	49	33
3. Pencurian Kendaraan Bermotor	77	21	51	7	18	2	42	5	40	15
4. Perkosaan	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
5. Penipuan	50	17	63	19	33	9	81	13	72	16
6. Penggelapan	24	12	19	8	7	5	15	8	16	7
7. Penganiayaan	14	13	7	6	3	3	15	11	15	15
8. Sajam	4	4	2	1	0	0	2	2	2	1
9. Kebakaran	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0
10. Perjudian	68	68	61	61	28	28	38	38	41	41
11. Pengerusakan	3	3	6	4	2	0	9	1	1	1
12. Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
13. Lain-lain	0	0	0	0	0	0	75	80	151	101
Jumlah/ Total	380	212	286	152	130	71	366	202	440	250

Sumber : Kasatreskrim Polresta Blitar, 2017

Terkait erat dengan banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor, semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor juga berakibat semakin naiknya kejadian kecelakaan. Hal ini digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.35

Kecelakaan Lalu Lintas menurut Kecamatan dan Jenisnya 2012-2016

Tahun	Banyak Kejadian	Jenis Kecelakaan			Kerugian Materi (000 Rp.)
		MD	LB	LK	
2016	167	83	36	226	98.900
2015	59	18	3	95	41.100
2014	69	21	8	97	65.120
2013	102	26	24	127	12.350
2012	115	32	42	134	16.535

Sumber : Kasatreskrim Polresta Blitar, 2017

Keterangan:
MD : Meninggal Dunia
LB : Luka Berat
LK : Luka Kecil

2.4.3.2 Lama Proses Perijinan

Pemerintah Kota Blitar melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) memberikan layanan perijinan dan non perijinan. Jenis Perijinan dan non perijinan yang dilayani tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.36

Standar Waktu Pelayanan Perijinan Kota Blitar

NO	NAMA PERIZINAN	STANDAR WAKTU (HARI KERJA)
1.	Izin Prinsip	12
2.	Izin Penetapan Lokasi	3
3.	Izin Lokasi	3
4.	Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT)	3
5.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (IPKD)	5
	a. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Jalan (IPKDJ)	5
	b. Izin Pemakaian Gedung & Tempat Olah Raga	5
6.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	11
7.	Izin Gangguan (HO)	10
8.	Izin Reklame	3
9.	Izin Pemakaian Tempat Usaha PKL	5
10.	Izin Trayek	3
11.	Izin Pendidikan Non Formal (PNF) & Lembaga Pelatihan Kerja	7
12.	Izin Usaha :	
	a. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3
	b. Izin Usaha Industri (IUI)	5
	c. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5
	d. Izin Hotel dan Penginapan	5
	e. Izin Restoran dan Rumah Makan	5
	f. Izin Usaha Kos-Kosan;	7
	g. Izin Usaha Poultry Shop (PS);	6
	h. Izin Usaha Toko Obat Hewan	6

NO	NAMA PERIZINAN	STANDAR WAKTU (HARI KERJA)
	i. Izin Usaha Depo Obat Hewan	6
	j. Izin Usaha Parkir Swasta	6
13.	Izin Tower Bersama	6
14.	Izin Sarana Kesehatan :	
	a. Izin Apotek (SIA);	7
	b. Izin Optikal;	7
	c. Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama;	7
	d. Izin Mendirikan Klinik Pratama &Utama;	7
	e. Izin Operasional Klinik Pratama &Utama;	7
	f. Izin Klinik Kecantikan Estetika (KKE);	7
	g. Izin Pedagang Eceran Obat;	7
	h. Izin Pendirian Rumah Sakit ;	7
	i. Izin Operasional Rumah Sakit;	7
15.	Izin Tempat Berjualan Minuman Beralkohol;	7
16.	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;	7
17.	Izin Prinsip Penanaman Modal.	4
	NON PERIZINAN	
1.	Pendaftaran Penanaman Modal	3
2.	TDP	3
3.	TDI	4
4.	TDG	8

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, 2017

Pada Tahun 2015, KPPT Kota Blitar memperoleh sertifikasi ISO Perijinan 9001:2008. **ISO 9001:2008** adalah standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga atau organisasi yang telah mendapatkan akreditasi ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk atau jasa yang dihasilkannya. Sertifikat ini setelah dilakukan penilaian oleh Tim ISO *National Quality Assurance Indonesia* (NQA Indonesia) dan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008.

2.4.3.3 Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis pajak daerah yang dikelola Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.37
Jenis Pajak Daerah Kota Blitar

Nomor	Uraian
1	Pajak Hotel
2	Pajak Restoran
3	Pajak Hiburan
4	Pajak Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan
6	Pajak Parkir
7	Pajak Air Tanah
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber : BPKAD Kota Blitar, 2017

Tabel 2.38
Jumlah dan Macam Retribusi Daerah Kota Blitar

Nomor	Nama
I	Retribusi Jasa Umum
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	Retribusi Pelayanan Pasar
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
9	Retribusi Pemeriksaan Laboratorium
10	Retribusi Sewa Alat Berat Walls
II	Retribusi Jasa Usaha
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3	Retribusi Terminal
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir
5	Retribusi Rumah Potong Hewan
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
7	Retribusi Jasa Informasi dan Penyiaran
8	Retribusi memasuki Kawasan Wisata
III	Retribusi Perizinan Tertentu
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2	Retribusi Izin Gangguan (HO)
3	Retribusi Izin Trayek

Sumber : BPKAD Kota Blitar, 2017

2.4.3.4 Peraturan Daerah

Dalam rangka mendukung iklim investasi, Pemerintah Kota Blitar bersama dengan DPRD Kota Blitar mengeluarkan beberapa kebijakan berupa peraturan daerah yang didukung peraturan walikota yang berisikan tentang kebijakan otonomi daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan, perangkat daerah dan kepegawaian.

Tabel 2.39
Peraturan Daerah yang diterbitkan di Kota Blitar
Tahun 2012 – 2016

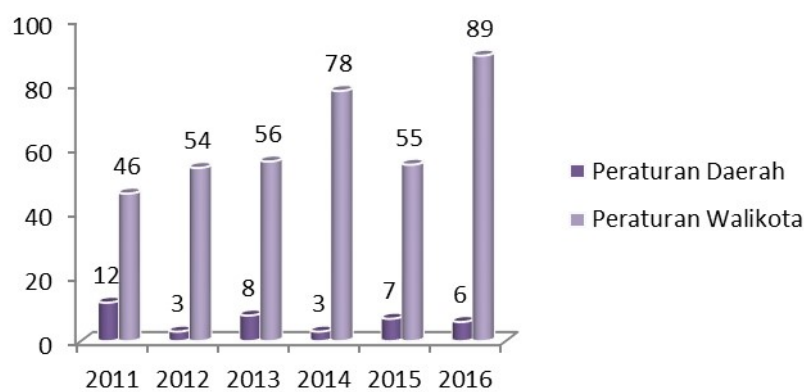
No.	Nomor PERDA	Tentang
	Tahun 2012	
1	Perda No. 1 Tahun 2012	APBD TA. 2012
2	Perda No. 2 Tahun 2012	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2011
3	Perda No. 3 Tahun 2012	Perubahan APBD TA. 2012
	Tahun 2013	
1	Perda No. 1 Tahun 2013	APBD TA. 2013
2	Perda No. 2 Tahun 2013	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2012

No.	Nomor PERDA	Tentang
3	Perda No. 3 Tahun 2013	Perubahan APBD TA. 2013
4	Perda No. 4 Tahun 2013	Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar
5	Perda No. 5 Tahun 2013	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
6	Perda No. 6 Tahun 2013	Perubahan Atas Perda Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
7	Perda No. 7 Tahun 2013	Perubahan Atas Perda Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
8	Perda No. 8 Tahun 2013	APBD TA. 2014
	Tahun 2014	
1	Perda No. 1 Tahun 2014	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2013
2	Perda No. 2 Tahun 2014	Perubahan APBD TA. 2014
3	Perda No. 3 Tahun 2014	APBD TA. 2015
	Tahun 2015	
1.	Perda No. 1 Tahun 2015	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2.	Perda No. 2 Tahun 2015	Pencabutan peraturan daerah Kota Blitar No. 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
3.	Perda No. 3 Tahun 2015	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD
4.	Perda No. 4 Tahun 2015	Ijin Usaha Jasa Konstruksi
5.	Perda No. 5 Tahun 2015	Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
6.	Perda No. 6 Tahun 2015	Perubahan APBD Tahun 2015
7.	Perda No. 7 Tahun 2015	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016
	Tahun 2016	
1.	Perda No. 1 Tahun 2016	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
2.	Perda No. 2 Tahun 2016	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021
3.	Perda No. 3 Tahun 2016	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016
4.	Perda No. 4 Tahun 2016	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5.	Perda No. 5 Tahun 2016	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah
6.	Perda No. 6 Tahun 2016	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017

Sumber : Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar, 2017.

Perkembangan jumlah Perda, Perwali dan Keputusan Walikota Kota Blitar Tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

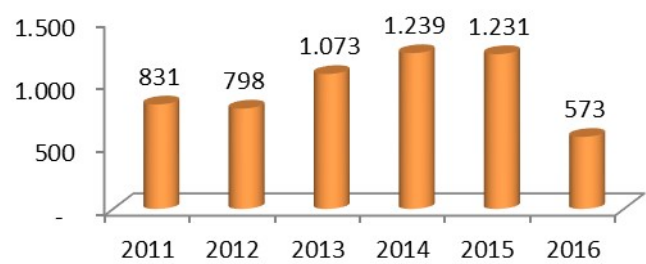
Gambar 2.48
Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Blitar
Yang diterbitkan selama Tahun 2011 - 2016



Sumber : Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Blitar, 2017

Dari gambar diatas, secara umum selama kurun waktu tahun 2011-2016 terjadi kenaikan jumlah Peraturan Walikota, dari 46 pada tahun 2011 menjadi 89 Peraturan Walikota Blitar pada tahun 2016, meskipun ada penurunan khusus pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2013 dan 2014. Hal ini karena tahun 2015 merupakan masa transisi pelaksanaan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait kewenangan kabupaten/kota yang belum terbit peraturan pelaksanaanya, sehingga belum dapat ditindaklanjuti dengan peraturan walikota. Sementara jumlah perda yang diterbitkan selama kurun waktu 2011-2016 lebih fluktuatif, dengan jumlah Perda yang ditetapkan pada Tahun 2016 sebanyak 6 (enam) Perda, sebagai produk hukum hasil pembahasan DPRD baru hasil Pemilu 2014.

Gambar 2.49
Keputusan Walikota Blitar
Yang diterbitkan selama Tahun 2011 - 2016



Sumber : Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Blitar, 2017

Sejak Tahun 2013 sampai 2015 jumlah Keputusan Walikota meningkat signifikan, hal ini disebabkan karena adanya aturan bahwa penerimaan honorarium dalam bentuk apapun (baik internal SKPD maupun lintas SKPD) harus dengan Surat Keputusan Walikota.

Sedangkan pada tahun 2016 kembali turun menjadi 573 dari 1.231 keputusan walikota pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena mulai tahun 2016, Pemerintah Kota Blitar memberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP), dengan konsekuensi semua honorarium kegiatan “dihapus”, kecuali untuk kegiatan yang sangat selektif untuk kegiatan lintas sektoral, strategis dan ada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan.

2.4.3.5 Indeks Reformasi Birokrasi

Sebagai salah satu indikator yang dapat mendukung keberlangsungan iklim investasi adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: **Pengungkit (*Enablers*)** dan **Hasil (*Results*)**. Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan tujuan:

1. Memudahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
2. Menyediakan data/informasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kota Blitar telah melakukan PMPRB secara online sejak tahun 2014 dengan hasil penilaian sebagai berikut :

Tabel 2.40
Perekembangan Indeks Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Blitar Tahun 2014 dan 2016

Uraian Penilaian	2014	2015	2016
A. PROSES / PENGUNGKIT	35,07	37,32	44,05
1. Manajemen Perubahan	3,22	3,41	3,41
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan	4,38	5,00	5,00
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	6,00	6,00
4. Penataan Tata Laksana	3,71	4,00	4,00
5. Penataan Sistem Manajemen SDM	6,10	6,68	12,12
6. Penguatan Akuntabilitas	2,94	2,94	2,94
7. Penguatan Pengawasan	3,74	4,29	5,59
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4,99	4,99	4,99
B. HASIL	17,14	23,95	22,61
1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	7,08	7,53	6,19
2. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	2,5	8,85	8,85
3. Kualitas Pelayanan Publik	7,56	7,56	7,56
INDEKS REFORMASI BIROKRASI	52,22	61,26	66,66

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2017

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Tabel 2.41
Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Blitar 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah lulusan S1	2.831	10.076	10.026	10.287	11.067
2.	Jumlah lulusan S2	191	718	729	780	866
3.	Jumlah lulusan S3	12	33	28	27	27
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	3.034	10.827	10.783	11.094	11.954
5.	Jumlah penduduk	145.300	146.602	145.111	146.155	152.097
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	0,021	0,074	0,074	0,076	0,078

Sumber : Dispenduk Capil Kota Blitar, 2017.

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Tabel 2.42
Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Blitar
Tahun 2012- 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	36.280	36.607	31.940	31.635	32.079
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	10.355	10.450	10.541	11.083	11.489
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	46.635	47.057	42.481	42.718	43.568
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	98.665	99.545	102.630	103.437	108.529
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,47	0,47	0,41	0,41	0,29

Sumber : Dispenduk Capil Kota Blitar, 2017.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2016, jumlah penduduk dengan usia non produktif (0-14 tahun dan di atas 65 tahun) adalah 43.568 jiwa sedangkan usia produktif sebanyak 108.529 jiwa. Dengan demikian rasio ketergantungan penduduk Kota Blitar pada Tahun 2016 adalah 0,29. Hal ini berarti setiap 100 orang usia produktif harus menanggung sebanyak 29 orang usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.43
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Blitar
Tahun 2012 - 2016

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	8
I	GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
1.	Luas Wilayah (km2)	32,58	32,58	32,58	32,58	32,58
2.	Jumlah Penduduk	145.300	146.602	145.000	146.155	152.097
II	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1.	PDRB ADHB (Rp.000.000)	3.545.807,7	3.929.509,1	4.354.056,8	4.819.088,9	5.332.286,72
2.	PDRB ADHK(Rp.000.000)	3.236.606,30	3.466.832,10	3.649.547,90	3.856.989,10	4.079.258,84
3.	Nilai Kontribusi PDRB ADHB Sektor Perdagangan (Rp.000.000)	710.618	787.568	868.170	975.943	1.109.313,45
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,45	5,90	5,90	5,68	5,76
5.	PDRB Perkapita ADHB (Rp.000)	26.319,25	28.956,90	31.803,95	34.944,23	38.329,51
6.	PDRB Perkapita ADHK (Rp.000)	24.024,16	25.400,01	26.657,91	27.967,84	29.322,50
7.	Indeks Gini	0,38	0,40	0,35	0,34	0,34*)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
8.	Angka Kemiskinan	6,7	7,39	7,15	7,29	6,72*)
9.	IPM	73,53	74,53	75,26	76,00	76,71
10.	Indeks Pendidikan	0,659	0,683	0,702	0,705	0,72
11.	Indeks Kesehatan	0,810	0,811	0,811	0,815	0,82
12.	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,52	9,53	9,81	9,87	9,88
13.	Angka Partisipasi Murni SD (SD/SDLB/MI)	89,84%	90,15%	95,91%	95,89%	96,28%
14.	Angka Partisipasi Murni SMP (SMP/SMPLB/MTs)	81,16%	82,87%	88,13%	90,31%	92,33%
15.	Angka Kematian Bayi	11,63	11,88	6,04	8,30	9,92
16.	Usia Harapan Hidup (tahun)	72,66	72,69	72,70	73,00	73,09
III. PELAYANAN UMUM						
a. Layanan Urusan Wajib						
1 .	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS (%)	81,16%	82,87%	88,13%	90,31%	92,33%
2 .	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 .	Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100	100	99,82	100	100
4.	Indeks Minat Baca	NA	NA	NA	NA	NA
5.	Angka Kematian Ibu	333,9	49,48	139,27	48,8	236,18
6.	Angka kematian bayi	11,63	11,88	6,04	8,30	9,92
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Rumah SakiT Mardi Waluyo	81,00%	84,00%	79,69%	75,70%	77,14%
8.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	90,23%	83,15%	79,25%	71,97	73,84
9.	Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	20,31%	20,35%	27,50%	27,63%	32,10%
10.	Persentase Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dalam kondisi baik	NA	NA	NA	NA	79.4
	Persentase Rumah Layak Huni	NA	NA	NA	95.00	95.64
11.	Persentase tempat ibadah aktif	48	50	52	55	62
12.	Rasio Pengajar Ilmu Agama dengan Jumlah Penduduk	1 : 88	1 : 88	1 : 85	1 : 86	1 : 86
13.	Indeks Gini	0,38	0,40	0,35	0,34	0,34*)
14.	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	NA	NA	NA	NA	NA
15.	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	NA	NA	NA	NA	NA
16 .	Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA	100%	100%	100%	100%	100%
17.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,55	6,22	5,71	3,80	3,70*)
18 .	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	NA	66,53	66,46	71,46	72,00
19 .	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,63	97,74	98,23	98,23	98,23*)
20 .	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,39	69,48	67,57	67,22	67,22*)
21.	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%
22.	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	74,56	79,09	78,00	79,91	80,04
23.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	76	77	78,34	79,80	81,30
24.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	NA	NA	NA	57,94	59,65
25.	Indeks Pencemaran Air	NA	NA	NA	50	45
26.	Indeks Pencemaran Udara	NA	NA	NA	88,31	99,00
27.	Indeks Tutupan Vegetasi	NA	NA	NA	41,13	41,13
28.	Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2 eq)	202.707	-	-	209,912	208,262
29.	Persentase Mata Air yang berfungsi	96	96	96	96	96
30.	Predikat Pengelolaan Lingkungan	ADIPURA	ADIPURA	ADIPURA	ADIPURA	ADIPURA BUANA
31.	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani IPAL Komunal	3,65	4,48	4,85	4,99	4,99
32.	Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan	71,00	71,00	80,00	80,00	93,49
33.	Survey Kepuasan Masyarakat bidang kependudukan dan capil	NA	NA	NA	NA	BAIK
34.	Persentase Pertumbuhan Penduduk	1,45	0,90	-1,02	0,72	4,07

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
35.	Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik	NA	NA	NA	97,32	97,09
36.	Prosentase Peningkatan PDRB usaha Mikro	15,55% (104.032,87 juta rupiah)	13,59% (129.530,92 juta rupiah)	14,90% (148.829,46 juta rupiah)	19,31% (177.564,48 juta rupiah)	16,04% (206.056,29 juta rupiah)
37.	Nilai investasi (Milyar Rupiah)	119,099	116,783	78,988	177,665	160,768
38.	Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perijinan	NA	NA	NA	baik	Baik
39.	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	5	5	5	5	5
40.	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	19	19	20	21	27
41.	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	39,75	40,82	74,04	75,12	71,89
42.	Indeks Minat Baca	NA	NA	NA	NA	NA
43.	Persentase Arsip Daerah yang dilakukan Penyelamatan dan Pelestarian	100	100	100	79,13	82,61
44.	Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan	NA	-18,25%	3,10%	11,02%	-4,17%
45.	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Hotel dan Restoran	13,78% (161.701,34 juta rupiah)	11,62% (180.490,09 juta rupiah)	15,90% (209.184,26 juta rupiah)	14,88% (240.316,16 juta rupiah)	15,26% (277.001,55 juta rupiah)
46.	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif Unggul	NA	NA	NA	1.162 pelaku	3
47.	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	12,28% (710.618,09 juta rupiah)	10,83% (787,567,55 juta rupiah)	10,23% (868.169,67 juta rupiah)	12,41% (975.943,16 juta rupiah)	13,66% (1.109.313,45 juta rupiah)
48.	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri	10,69% (329.019,62 juta rupiah)	10,15% (362.414,34 juta rupiah)	12,20% (406.632,65 juta rupiah)	12,39% (457.012,20 juta rupiah)	9,92% (502.362,53 juta rupiah)
b. Penunjang Urusan Pemerintahan						
49.	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	NA	NA	61.26	62.71
50.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
51.	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Perencanaan Baik	NA	NA	NA	60	80
52.	Pesentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	11,73%	11,89%	14,61%	15,74%	15,79%
53.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	NA	NA	NA	NA	NA
54.	Nilai Evaluasi SAKIP	NA	NA	CC	C	B
55.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda	NA	NA	NA	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
56.	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai minimal “Baik” (B)	NA	NA	NA	30	30
57.	Persentase Penerapan Layanan Pemerintah dan Layanan Publik berbasis TIK yang terintegrasi	7	11	18	22	24
58.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
59.	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	NA	NA	NA	NA	Cukup
60..	Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	NA	NA	NA	NA	baik
IV DAYA SAING DAERAH						
1.	Pereentase kasus kriminalitas yang tertangani	47,16	50,29	59,71	55.19	55.20
2.	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda	NA	NA	NA	NA	70,85
3.	Indeks Demokrasi Indonesia	NA	NA	NA	NA	73,6

Keterangan :
*) : Data sementara, karena data rilis BPS belum keluar

B A B III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan selama kurun waktu sebelumnya memberikan gambaran mengenai kemampuan keuangan dan kerangka pendanaan yang telah dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pengeluaran daerah, baik belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah, dengan memanfaatkan potensi penerimaan daerah, baik pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup target dan alokasi anggaran serta realisasi yang memberikan gambaran pertumbuhan setiap tahun pada tahun sebelumnya, sehingga menjadi acuan untuk perhitungan perencanaan anggaran 5 (lima) tahun mendatang.

3.1 Kinerja Masa Lalu

Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD meliputi struktur dan akurasi pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan neraca daerah mencerminkan perkembangan kondisi aset, kewajiban serta ekuitas dana pemerintah daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2012-2016

Kinerja keuangan Kota Blitar yang disajikan pada periode tahun 2012-2015 mengacu pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, sedangkan kinerja keuangan tahun 2016 mengacu pada Laporan Pelaksanaan APBD sebelum di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kinerja keuangan tidak terlepas dari perencanaan yang ditetapkan selama periode tahun 2012-2016, dengan perincian pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1
Ringkasan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2012-2016

No	Uraian	Target dan Alokasi APBD				
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
	PENDAPATAN DAERAH	523.933.790.906,56	600.642.893.951,66	683.354.098.924,70	769.104.960.708,53	850.656.933.347,58
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	55.966.506.013,56	61.342.371.370,66	85.721.323.251,70	100.056.657.160,53	120.126.343.300,00
1	Pajak Daerah	8.651.257.425,00	9.336.513.825,00	16.544.169.867,80	21.928.923.643,00	24.685.433.982,00
2	Retribusi Daerah	7.662.957.438,00	6.900.283.494,00	7.210.011.349,80	8.481.395.926,00	9.157.436.870,00
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	949.883.433,97	865.904.541,66	921.913.877,24	1.116.831.433,50	1.023.333.373,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	38.702.407.716,59	44.239.669.510,00	61.045.228.156,86	68.529.506.158,03	85.260.139.075,00
	DANA PERIMBANGAN	374.005.599.981,00	436.230.413.789,00	477.707.604.675,00	504.888.249.633,00	640.315.588.300,00
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	40.704.271.981,00	50.849.677.789,00	54.688.813.675,00	63.575.744.633,00	62.282.246.000,00
2	Dana Alokasi Umum	315.773.358.000,00	355.673.006.000,00	392.221.911.000,00	400.654.035.000,00	428.743.959.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	17.527.970.000,00	29.707.730.000,00	30.796.880.000,00	40.658.470.000,00	149.289.383.300,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	93.961.684.912,00	103.070.108.792,00	119.925.170.998,00	164.160.053.915,00	90.215.001.747,58
1	Pendapatan Hibah	1.800.000.500,00	0,00	0,00	0,00	19.284.423.541,58
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	31.215.290.412,00	31.363.942.792,00	47.160.754.998,00	53.424.748.915,00	58.424.838.206,00
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	45.320.404.000,00	58.978.981.000,00	70.065.539.000,00	81.298.192.000,00	5.000.000.000,00
4	Bantuan Keuangan dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.625.990.000,00	12.727.185.000,00	2.698.877.000,00	29.437.113.000,00	7.505.740.000,00
	BELANJA DAERAH	544.445.039.499,48	649.994.547.689,60	746.312.423.156,91	874.279.789.772,51	923.078.871.757,89
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	289.990.283.375,12	316.529.616.576,15	353.814.227.125,69	382.518.181.233,69	368.790.977.848,56
1	Belanja Pegawai	261.510.596.636,12	289.842.995.426,15	325.918.692.675,69	345.423.271.273,69	340.463.257.888,56
2	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	546.600.000,00	1.421.160.000,00

No	Uraian	Target dan Alokasi APBD				
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
3	Belanja Hibah	20.976.326.989,00	18.536.391.150,00	18.148.084.450,00	26.593.050.000,00	16.208.800.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	5.753.359.750,00	6.685.230.000,00	8.497.450.000,00	8.705.260.000,00	9.447.760.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	499.999.960,00	499.999.960,00
6	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	965.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
	BELANJA LANGSUNG	254.454.756.124,36	333.464.931.113,45	392.498.196.031,22	491.761.608.538,82	554.287.893.909,33
1	Belanja Pegawai	11.536.714.150,00	12.947.613.395,00	12.243.963.190,00	32.399.971.338,00	38.233.518.463,50
2	Belanja Barang dan Jasa	143.148.579.567,93	191.032.919.312,90	223.871.104.599,99	257.352.373.565,36	283.020.568.711,50
3	Belanja Modal	99.769.462.406,43	129.484.398.405,55	156.383.128.241,23	202.009.263.635,46	233.033.806.734,33
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.511.248.592,92)	(49.351.653.737,94)	(62.958.324.232,21)	(105.174.829.063,98)	(72.421.938.410,31)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.765.621.362,92	49.397.193.737,94	62.958.324.232,21	108.174.829.063,98	95.456.361.951,89
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	20.630.761.433,92	45.044.331.060,94	62.958.324.232,21	107.174.829.063,98	95.456.361.951,89
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
3	Penerimaan Piutang Daerah	134.859.929,00	4.352.862.677,00	0,00	0,00	0,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	254.372.770,00	45.540.000,00	0,00	3.000.000.000,00	23.034.423.541,58
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	23.034.423.541,58
2	Pembayaran Pokok Utang	254.372.770,00	45.540.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	20.511.248.592,92	49.351.653.737,94	62.958.324.232,21	105.174.829.063,98	72.421.938.410,31

Sumber : Perda Perubahan APBD Kota Blitar

Penyajian data kinerja keuangan didasarkan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan perundang-undangan meliputi : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Realisasi pendapatan daerah selama periode tahun 2012-2016 secara umum melebihi dari target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga dapat membiayai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang sudah direncanakan. Namun demikian, ketergantungan pendapatan daerah dari Dana Transfer Pemerintah dan Provinsi masih cukup tinggi atau derajat desentralisasi fiskal Kota Blitar dalam kurun waktu tahun 2012-2016 tergolong masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah selama kurun waktu tersebut berada pada kisaran 11%-15%. Proporsi Dana Transfer Pemerintah dan Provinsi terhadap total Pendapatan Daerah selama tahun 2012-2016 mengalami kecenderungan penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2012 mencapai 88,27% dan terus mengalami penurunan hingga 84,43% di tahun 2016. Ditengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Kota Blitar terus berupaya untuk meningkatkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun mengalami kenaikan sebesar 11,80%, namun pertumbuhan ini lebih didominasi oleh sumber pendapatan yang bersifat khusus (*specific-grant*) seperti : Pendapatan BLUD dan Kapitasi JKN pada komponen Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada komponen Dana Perimbangan; dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, Alokasi Pendapatan untuk Sertifikasi dan Tamsil Guru serta Bantuan Keuangan Provinsi pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kondisi keuangan daerah Pemerintah Kota Blitar pada periode tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang antara lain disebabkan oleh :

- a. Peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berdampak pada beralihnya target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dari Dana Bagi Hasil Pajak menjadi Pajak Daerah.
- b. Puskesmas sebagai unit Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah mendapat alokasi dana kapitasi yang masuk sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah sebagai akibat dari implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- c. Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang juga berdampak terhadap peningkatan pendapatan BLUD pada RSUD.

Dana Bagi Hasil yang diterima Kota Blitar pada beberapa tahun terakhir mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan Pemerintah. Komponen Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2016 mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan :

- a. ditetapkannya komponen pendanaan baru berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang sebelumnya merupakan bagian dari dana Tugas Pembantuan;
- b. beralihnya pendapatan dana Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru yang menjadi salah satu bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Gambaran realisasi pendapatan daerah selama periode tahun 2012-2016 sebagaimana pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Blitar Tahun 2012-2016

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	PENDAPATAN DAERAH	542.713.560.207,63	612.551.692.285,86	703.295.836.804,34	769.743.723.207,97	848.814.322.342,55	11,80
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	63.640.945.338,63	72.853.545.667,86	102.757.907.576,34	121.264.917.467,97	133.546.753.050,97	20,58
1.1.1	Pajak Daerah	11.156.119.478,60	12.357.982.714,67	21.258.883.283,00	24.054.196.460,66	26.049.843.912,99	26,05
1.1.2	Retribusi Daerah	6.839.996.401,90	7.894.066.348,25	8.247.787.104,00	8.808.457.272,50	9.668.860.140,00	8,79
1.1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	949.883.433,97	865.904.541,66	921.913.877,24	985.410.769,74	1.023.333.373,00	2,09
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	44.694.946.024,16	51.735.592.063,28	72.329.323.312,10	87.416.852.965,07	96.804.715.624,98	21,39
1.2	DANA PERIMBANGAN	386.200.075.755,00	434.688.185.289,00	469.115.316.257,00	483.344.695.393,00	622.676.097.741,00	13,08
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	52.898.747.755,00	49.307.449.289,00	53.795.745.257,00	49.308.924.393,00	56.541.040.622,00	2,16
1.2.2	Dana Alokasi Umum	315.773.358.000,00	355.673.006.000,00	392.221.911.000,00	400.654.035.000,00	428.743.959.000,00	8,02
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	17.527.970.000,00	29.707.730.000,00	23.097.660.000,00	33.381.736.000,00	137.391.098.119,00	100,83
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	92.872.539.114,00	105.009.961.329,00	131.422.612.971,00	165.134.110.347,00	92.591.471.550,58	4,99
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.856.270.850,00	0,00	361.000.000,00	0,00	19.284.423.541,58	0,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	30.069.252.621,00	33.303.795.329,00	58.297.196.971,00	54.056.306.347,00	60.846.898.009,00	22,77
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	45.450.355.000,00	58.978.981.000,00	70.065.539.000,00	81.694.661.000,00	5.000.000.000,00	(7,18)
1.3.4	Bantuan Keuangan dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.496.660.643,00	12.727.185.000,00	2.698.877.000,00	29.383.143.000,00	7.460.150.000,00	204,36
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	11,73%	11,89%	14,61%	15,74%	15,57%	
	Rasio Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah	71,16%	70,96%	66,70%	62,80%	73,50%	
	Rasio lain-lain pendapatan yang sah terhadap Pendapatan daerah	17,11%	17,14%	18,69%	21,46%	10,93%	

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Januari 2017

Data realisasi belanja daerah Kota Blitar selama kurun waktu tahun 2012-2016 menunjukkan adanya peningkatan rata-rata 13,48% per tahun, yaitu Rp.518.217.383.008,61 pada Tahun 2012 dan meningkat menjadi Rp. 857.795.223.707,67 pada tahun 2016. Adanya kenaikan ini dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan besaran proporsi terbesar pada tahun 2012 sebesar 53,39 % dan terendah sebesar 40,92% pada tahun 2016.

Adanya penurunan proporsi belanja tidak langsung salah satunya disebabkan karena tidak adanya penambahan pegawai baru dan perubahan kebijakan kenaikan gaji pokok pegawai menjadi tunjangan hari raya (bulan keempat belas). Penurunan proporsi belanja tidak langsung tersebut diimbangi dengan meningkatnya proporsi Belanja Langsung yang mencapai proporsi tertinggi sebesar 59,08% pada tahun 2016. Peningkatan proporsi Belanja Langsung seiring dengan peningkatan alokasi pendanaan khusus dari dana transfer Pemerintah untuk penyediaan infrastruktur fasilitas umum serta beralihnya beberapa komponen pembiayaan yang sebelumnya dialokasikan oleh Pemerintah langsung dalam bentuk Tugas Pembantuan.

Gambaran realisasi Belanja Daerah selama periode tahun 2012-2016 sebagaimana pada tabel 3.3 :

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	Realisasi Belanja (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
	BELANJA DAERAH	518.217.383.008,61	594.594.934.114,59	659.079.331.972,57	782.148.792.596,66	857.795.223.707,67	13,48
	Belanja Tidak Langsung	276.655.734.068,00	295.326.259.671,09	319.346.414.638,88	338.099.487.787,06	350.976.252.255,43	6,14
1	Belanja Pegawai	252.421.887.115,00	274.319.725.416,09	295.476.082.886,88	306.160.384.901,56	325.739.607.305,43	6,60
2	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	546.600.000,00	1.311.840.000,00	0,00
3	Belanja Hibah	18.601.183.843,00	15.147.867.000,00	16.047.191.000,00	22.905.728.650,00	14.626.515.000,00	(1,51)
4	Belanja Bantuan Sosial	5.150.535.069,00	5.546.204.510,00	7.306.440.000,00	7.905.645.000,00	8.140.565.000,00	12,65
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	466.454.041,00	312.462.745,00	386.238.752,00	480.911.040,00	499.969.500,00	4,77
6	Belanja Tidak Terduga	15.674.000,00	0,00	130.462.000,00	0,00	658.295.450,00	0,00
	Belanja Langsung	241.561.648.940,61	299.268.674.443,50	339.732.917.333,69	416.138.240.502,10	506.406.026.282,24	20,56
1	Belanja Pegawai	10.516.041.782,00	11.048.904.072,00	9.778.596.905,00	34.834.084.113,00	42.405.723.370,00	56,32
2	Belanja Barang Dan Jasa	140.057.519.225,61	181.044.332.108,50	203.627.992.865,69	212.967.330.167,92	260.628.422.516,69	17,21
3	Belanja Modal	90.988.087.933,00	107.175.438.263,00	126.326.327.563,00	168.336.826.221,18	203.371.880.395,55	22,43
	JUMLAH BELANJA	518.217.383.008,61	594.594.934.114,59	659.079.331.972,57	782.148.792.596,66	857.379.693.587,67	13,48
	Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah	53,39%	49,67%	48,45%	43,23%	40,92%	
	Rasio Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah	46,61%	50,33%	51,55%	56,77%	59,08%	

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Januari 2017

Realisasi kelompok pembiayaan meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan adalah kelompok anggaran yang digunakan untuk menutup selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (*defisit*) atau memanfaatkan selisih lebih Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (*surplus*).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, disebabkan oleh batasan penggunaan dana yang bersifat khusus (DAK, DBHCHT, DBH Pajak Rokok). Disamping itu juga adanya keterlambatan pedoman teknis kegiatan pendanaan khusus, efisiensi belanja, realisasi pendapatan yang melebihi target karena adanya ketetapan kurang bayar dana transfer tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk dana investasi (penyertaan modal) yang mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan tahun 2016 dikarenakan adanya ketetapan perubahan tambahan dana penyertaan modal kepada BUMD (PDAM dan BPR Artha Praja) dan penyelesaian utang PDAM melalui dana non tunai/kas sesuai ketetapan Pemerintah, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah selama periode tahun 2012-2016 sebagaimana pada tabel 3.4 :

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Blitar Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	Realisasi Pembiayaan Daerah (Rp)					Rata-rata Pertum buhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah						
1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	20.630.761.383,92	45.044.331.060,94	62.958.324.232,21	107.169.829.063,98	95.456.361.951,89	54,35
2	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	32.066.952,00	2.775.000,00	0	3.565.514.207,49	667.898.079,44	(68,15)
3	Penerimaan Piutang Daerah	139.698.296,00	0	0	0	0	(25,00)
4	Penerimaan dari Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0,00
5	Penerimaan/ Penarikan Deposito	0	0	0	0	0	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	20.802.526.631,92	45.047.106.060,94	62.958.324.232,21	110.735.343.271,47	96.124.260.031,12	54,75
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah						
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	2.750.000.000,00	23.034.423.541,58	184,40
2	Pembayaran Pokok Utang	254.372.770,00	45.540.000,00	0	0	0	(45,52)
3	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0,00
4	Pengembalian Kepada Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	254.372.770,00	45.540.000,00	0,00	2.750.000.000,00	23.034.423.541,58	138,88
C	Jumlah Pembiayaan Netto	20.548.153.861,92	45.001.566.060,94	62.958.324.232,21	107.985.343.271,47	73.089.836.489,54	49,53

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Januari 2017

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan gambaran posisi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi. Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana – dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban finansial jangka pendek.

Sedangkan rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban – kewajiban jangka panjang. Neraca ini digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Perkembangan ini dapat dilihat terutama dari pertumbuhan aset tetap Kota Blitarsetiap tahunnya. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Neraca Daerah Kota Blitar Tahun 2012-2016

No.	Uraian	NERACA DAERAH KOTA BLITAR 2012-2016 (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	AKTIVA						
1	ASET LANCAR						
	Kas di Kas Daerah	41.618.202.567,54	62.490.182.690,36	102.585.342.169,74	85.319.141.802,50	60.750.269.277,68	17,17
	Kas di Bendahara Pengeluaran	10.602.137,00	5.695.570,00	2.914.089,00	4.720.000,00	282.250,00	-31,79
	Kas di Bendahara Penerimaan	68.042.306,80	92.174.207,33	194.945.767,15	175.157.953,01	171.937.975,80	33,74
	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	3.527.745.189,40	545.273.069,85	4.169.436.129,42	9.304.881.320,39	593.317.390,45	152,41
	Kas di Kapitasi JKN			420.050.764,82	832.338.829,00	1.138.786.126,00	33,74
	Piutang Pajak	15.558.115,00	66.646.657,00	4.654.858.301,00	5.752.637.183,00	5.680.165.203,00	1808,77
	Piutang Retribusi	5.623.239.006,00	6.152.671.800,00	6.492.873.518,00	6.697.405.714,00	7.075.402.721,00	5,93
	Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi	0	6.806.298.875,00	2.847.681.965,00	13.210.661.080,00	0,00	51,44
	Bagian Lancar pinjaman kepada perusahaan daerah	161.473.000,00	121.473.000,00	121.473.000,00	121.473.000,00	121.473.000,00	-6,19
	Piutang Bunga	35.739.150,00	78.287.280,00	90.600.330,00	90.600.330,00	90.600.330,00	33,69
	Piutang Lainnya	4.570.825.565,96	14.199.023.848,25	9.374.692.079,14	12.619.414.303,64	17.202.222.976,85	61,90
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-1.745.557.476,21	-1.871.932.514,95	-3.360.811.029,10	-11.276.151.688,80	-11.817.846.585,89	81,77
	Persediaan	6.987.488.902,73	8.168.425.643,86	11.401.338.100,82	14.831.283.797,55	14.390.470.307,59	20,90
	Jumlah Aset Lancar	60.873.358.464,22	96.854.220.126,70	138.995.395.184,99	140.821.711.520,60	98.403.609.668,79	18,45

No.	Uraian	NERACA DAERAH KOTA BLITAR 2012-2016 (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
a	Investasi Non Permanen						
	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	746.297.810,00	0	0	0	0	0
	Investasi Dana Bergulir	11.736.101.639,34	10.495.944.544,73	10.577.278.255,34	8.108.027.167,65	8.187.443.814,21	-8,04
	Penyisihan Piutang (Investasi Non Permanen) Tak Tertagih	-5.189.572.009,02	-3.971.717.938,15	-4.183.423.347,60	-4.159.335.697,06	-4.137.414.680,41	-4,81
	Investasi Non Permanen Lainnya	0					
	Jumlah Investasi Non Permanen	7.292.827.440,32	6.524.226.606,58	6.393.854.907,74	3.948.691.470,59	4.050.029.133,80	-12,05
b	Investasi Permanen						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	16.366.782.117,11	7.066.571.743,21	7.057.519.312,45	8.717.161.177,17	10.914.152.309,11	-2,06
	Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Investasi Permanen	16.366.782.117,11	7.066.571.743,21	7.057.519.312,45	8.717.161.177,17	10.914.152.309,11	-2,06
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	23.659.609.557,43	13.590.798.349,79	13.451.374.220,19	12.665.852.647,76	14.964.181.442,91	-7,82
3	ASET TETAP						0
	Tanah	1.238.498.254.952,00	1.238.498.254.952,00	1.243.859.596.344,00	1.245.258.235.194,00	1.158.409.591.194,00	-1,61
	Peralatan dan Mesin	162.273.213.706,03	191.860.304.488,03	226.019.762.951,31	278.235.848.887,88	288.755.658.780,08	15,73
	Gedung dan Bangunan	447.473.369.116,26	467.817.660.869,08	544.469.376.451,31	588.001.709.521,40	613.225.898.666,09	8,30
	Jalan , Irigasi dan Jaringan	345.216.656.657,54	370.461.514.939,54	405.886.020.469,44	454.084.455.136,34	561.134.143.556,34	13,08
	Aset Tetap Lainnya	20.907.707.228,15	21.926.547.728,15	22.423.364.928,15	27.963.065.175,00	26.989.816.032,80	7,09
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.850.575.600,00	28.188.655.210,00	2.008.722.200,00	23.973.183.358,23	11.718.986.677,23	459,59

No.	Uraian	NERACA DAERAH KOTA BLITAR 2012-2016 (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Akumulasi Penyusutan	0	-541.525.424.560,88	0	-607.737.158.727,68	-683.494.360.873,57	-21,88
	Jumlah Aset Tetap	2.217.219.777.259,98	1.777.227.513.625,92	2.570.580.748.455,20	1.836.929.684.616,53	1.976.739.734.032,97	0,97
4	DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
5	ASET LAINNYA						
	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	255.789.559,00	19.033.070,33	18.033.070,33	18.033.070,33	18.033.070,33	-24,45
	Aset tidak berwujud	3.598.294.650,00	5.166.162.850,00	6.034.266.350,00	6.760.340.350,00	7.440.812.350,00	20,62
	Aset Lain-lain	2.391.744.000,04	4.724.098.845,04	0	1.378.173.485,00	154.606.892.786,86	2778,94
	Jumlah Aset Lainnya	6.245.828.209,04	9.909.294.765,37	6.052.299.420,33	2.838.464.570,33	156.747.655.872,19	1347,22
	JUMLAH AKTIVA	2.307.998.573.490,67	1.897.581.826.867,78	1.995.428.753.442,04	2.090.348.165.137,97	2.246.855.181.016,86	-0,10
B	PASIVA						
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	5.500.570,00	2.914.089,00	153.773.144,89	149.334.694,89	1281,74
	Utang Pemotongan Pajak Pusat	4.161.317,00	0	0	0	0	-25,00
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	2.769.175.116,01	3.470.218.268,58	5.042.744.595,00	7.385.719.921,40	6.640.496.495,37	26,75
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	268.694.599,71	268.694.599,71	268.694.599,71	268.694.599,71	0	-25,00
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0	0	0	0	0	0

No.	Uraian	NERACA DAERAH KOTA BLITAR 2012-2016 (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	0	0	0
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	0	0	0	0	0	0
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.361.179.216,00	5.486.656.405,90	1.679.797.608,00	9.264.914.716,07	9.332.993.416,40	128,82
	Pendapatan diterima dimuka	2.385.433.532,26	794.459.606,00	798.897.786,66	892.868.162,52	872.856.044,96	-14,15
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	7.788.643.780,98	10.025.529.450,19	7.793.048.678,37	17.965.970.544,59	16.995.680.651,62	32,90
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0	0	0	0	0	0
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	7.788.643.780,98	10.025.529.450,19	7.793.048.678,37	17.965.970.544,59	16.995.680.651,62	32,90
3	EKUITAS DANA	2.300.209.929.709,69	1.887.556.297.417,59	1.987.635.704.763,62	2.072.382.194.593,38	2.229.859.500.365,24	-0,19
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.307.998.573.490,67	1.897.581.826.867,78	1.995.428.753.441,99	2.090.349.165.137,97	2.246.855.181.016,86	-0,10

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Januari 2017

Tabel 3.6
Rasio Keuangan Daerah Kota Blitar Tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Rasio Likuiditas					
1.	Rasio Lancar = (Aktiva Lancar : Kewajiban Jangka Pendek)	781,56	966,07	1.783,58	783,82	578,99
2.	Rasio Quick = (Aktiva Lancar - Persediaan : Kewajiban Jangka Pendek)	691,85	884,59	1.637,28	701,27	494,32
II.	Rasio Solvabilitas					
1.	Rasio Total Hutang thd Asset = Total Hutang : Total Asset	0,33	0,52	0,39	0,85	0,75
2.	Rasio Total Hutang thd Modal = Total Hutang : Total Ekuitas	0,33	0,53	0,39	0,86	0,76

Sumber: BPKAD, Olahan Bappeda Kota Blitar, Januari 2017

Berdasarkan tabel perkembangan neraca daerah Kota Blitar selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Total asset selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2016 terlihat dinamis dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Penurunan jumlah asset hanya terjadi pada tahun 2013.
- 2) Penurunan nilai aset daerah terutama disebabkan oleh akumulasi penyusutan asset tetap.
- 3) Komposisi terbesar untuk aset tetap Pemerintah Kota Blitar adalah berasal dari Tanah yaitu sekitar 57,35% dari total aset tetap atau sekitar 55,94% dari total aset akan tetapi jika dibandingkan dengan nilai kontribusi terhadap total aset maka dapat diketahui peran aset berupa tanah terhadap total aset naik sebesar 3,62%.

Naiknya kontribusi ataupun peran aset tanah terhadap kekayaan kota sejalan dengan indikasi dalam melaksanakan program atau kegiatan jika kemudian kegiatan ataupun program tersebut memerlukan tanah dilakukan dengan pengadaan tanah untuk menambah aset daerah.

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar diukur berdasarkan analisis rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari tabel di atas terlihat bahwa Rasio likuiditas APBD Kota Blitar masih sangat tinggi di atas 100% dengan kecenderungan yang dinamis fluktuatif.

Sedangkan rasio solvabilitas rendah menunjukkan bahwa pemerintah memiliki struktur modal yang lebih besar dibandingkan dengan hutang yang dimiliki sehingga tingkat resiko keuangan pun juga rendah. Hubungan rasio likuiditas dan solvabilitas dalam perspektif manajemen kinerja untuk melihat resiko, Pemerintah Kota Blitar yaitu likuid dan solvable dimana kinerja keuangan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik, karena mampu melunasi kewajiban jangka pendek dan mampu melunasi hutang yang jatuh tempo secara tepat waktu. Meskipun begitu dalam jangka panjang pemerintah perlu memperhatikan kondisi tersebut, dengan melakukan pengendalian likuiditas secara proporsional sehingga tidak terjadi *idle money* secara berlebihan, serta meningkatkan nilai investasi dalam komposisi asset yang dimiliki.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan Umum Anggaran yang ditempuh Pemerintah Kota Blitar periode Tahun 2012-2016 diarahkan untuk semakin optimal berjalannya fungsi keuangan daerah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada bagian ini akan dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kota Blitar bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Blitar pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini dilakukan melalui analisis proporsi realisasi belanja daerah terhadap alokasi anggaran, analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan belanja aparatur, serta pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama.

Analisis proporsi realisasi belanja daerah terhadap alokasi anggaran menunjukkan bahwa realisasibelanja daerah selama periode tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi dengan rata-rata capaian realisasi 91,46% dari alokasi anggaran belanja yang direncanakan dengan gambaran sebagaimana pada tabel 3.7:

Tabel 3.7
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja
Kota Blitar tahun 2012-2016

No.	URAIAN	2012			2013			2014			2015			2016			Rata2
		APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%	APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%	APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%	APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%	APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	Belanja Tidak Langsung	289.990.283.375,12	276.655.734.068,00	95,40	316.529.616.576,15	295.326.259.671,09	93,30	353.814.227.125,69	319.346.414.638,88	90,26	382.518.181.233,69	366.010.552.094,56	88,39	368.790.977.848,56	350.973.667.305,43	95,17	92,50
1	Belanja Pegawai	261.510.596.636,12	252.421.887.115,00	96,52	289.842.995.426,15	274.319.725.416,09	94,64	325.918.692.675,69	295.476.082.886,88	90,66	345.423.271.273,69	306.160.384.901,56	88,66	340.463.257.888,56	325.739.607.305,43	95,68	93,23
2	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.600.000,00	546.600.000,00	100,00	1.421.160.000,00	1.311.840.000,00	92,31	38,46
3	Belanja Hibah	20.976.326.989,00	18.601.183.843,00	88,68	18.536.391.150,00	15.147.867.000,00	81,72	18.148.084.450,00	16.047.191.000,00	88,42	26.593.050.000,00	31.959.577.404,00	86,13	16.208.800.000,00	14.626.515.000,00	90,24	87,04
4	Belanja Bantuan Sosial	5.753.359.750,00	5.150.535.069,00	89,52	6.685.230.000,00	5.546.204.510,00	82,96	8.497.450.000,00	7.306.440.000,00	85,98	8.705.260.000,00	26.863.078.749,00	90,81	9.447.760.000,00	8.140.565.000,00	86,16	87,09
5	Belanja Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00	466.454.041,00	46,65	500.000.000,00	312.462.745,00	62,49	500.000.000,00	386.238.752,00	77,25	499.999.960,00	480.911.040,00	96,18	499.999.960,00	499.969.500,00	99,99	76,51
6	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	15.674.000,00	2,09	965.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	130.462.000,00	17,39	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	658.295.450,00	87,77	21,45
B	Belanja Langsung	254.454.756.124,36	241.561.648.940,61	94,93	333.464.931.113,45	299.268.674.443,50	89,75	392.498.196.031,22	339.732.917.333,69	86,56	491.761.608.538,82	416.138.240.502,10	90,30	554.287.893.909,33	506.406.026.282,24	90,30	90,37
1	Belanja Pegawai	11.536.714.150,00	10.516.041.782,00	91,15	12.947.613.395,00	11.048.904.072,00	85,34	12.243.963.190,00	9.778.596.905,00	79,86	32.399.971.338,00	34.834.084.113,00	82,29	38.233.518.463,50	42.405.723.370,00	110,91	89,91
2	Belanja Barang dan Jasa	143.148.579.567,93	140.057.519.225,61	97,84	191.032.919.312,90	181.044.332.108,50	94,77	223.871.104.599,99	203.627.992.865,69	90,96	257.352.373.565,36	212.967.330.167,92	96,77	283.020.568.711,50	260.628.422.516,69	92,23	94,52
3	Belanja Modal	99.769.462.406,43	90.988.087.933,00	91,20	129.484.398.405,55	107.175.438.263,00	82,77	156.383.128.241,23	126.326.327.563,00	80,78	202.009.263.635,46	168.336.826.221,18	83,33	233.033.806.734,33	203.371.880.395,55	84,74	84,56
	BELANJA	544.445.039.499,48	518.217.383.008,61	95,18	649.994.547.689,60	594.594.934.114,59	91,48	746.312.423.156,91	659.079.331.972,57	88,31	874.279.789.772,51	782.148.792.596,66	89,46	923.078.871.757,89	857.379.693.587,67	92,23	91,33

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Januari 2017

Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan belanja aparatur menunjukkan bahwa total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama periode Tahun 2012-2016 mengalami kenaikan seiring dengan kebijakan Pemerintah yang menetapkan kenaikan Gaji Pegawai, Tunjangan Sertifikasi Guru dan tambahan penghasilan berupa pemberian gaji ke-13 (ketigabelas). Sedangkan proporsi terhadap total pengeluaran daerah, baik belanja daerah maupun pengeluaran daerah, kecenderungan setiap tahun mengalami penurunan.

Untuk pemenuhan Belanja Aparatur yang dialokasikan meliputi belanja kebutuhan gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, penerimaan anggota dan pimpinan DPRD, operasional KDH/WKDH, insentif pajak dan retribusi daerah yang terangkum dalam Belanja Tidak Langsung, dan kebutuhan honorarium, uang lembur, jasa pelayanan kesehatan, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas pegawai dan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis pegawai yang terangkum dalam Belanja Langsung.

Gambaran realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 5 (tahun) terakhir sebagaimana pada tabel 3.8 :

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Blitar Tahun 2012-2016

No.	URAIAN	REALISASI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR				
		2012 (Rp.)	2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Belanja Tidak Langsung	252.181.887.115,00	274.319.725.416,09	295.476.082.886,88	306.160.384.901,56	325.739.067.305,43
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	238.287.250.089,00	260.217.309.226,00	281.852.467.668,00	290.714.414.685,00	301.829.865.572,00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasioanal KDH/Wakil KDH	1.011.034.500,00	1.655.165.000,00	1.638.695.000,00	1.611.500.000,00	1.739.533.500,00
a.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD	630.000.000,00	1.255.800.000,00	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00
b.	Belanja Operasional KDH/ Wakil KDH	381.034.500,00	399.365.000,00	378.695.000,00	351.500.000,00	479.533.500,00
3	Belanja Insentif Pajak dan Retribusi Daerah	383.017.301,00	1.032.966.940,09	654.719.543,88	1.280.196.841,56	1.464.414.812,92
4	Belanja Tambahan Penghasilan	12.500.585.225,00	11.414.284.250,00	11.330.200.675,00	12.554.273.375,00	20.705.253.420,51
B	Belanja Langsung	19.822.318.147,00	27.488.154.512,00	34.822.448.675,00	59.252.250.552,50	77.605.168.425,00
1	Belanja Honorarium	5.323.638.917,00	6.320.927.222,00	6.033.783.025,00	7.084.090.806,00	4.754.454.075,00
2	Belanja Uang Lembur	1.914.706.165,00	2.396.702.100,00	2.693.058.800,00	3.571.352.450,00	3.582.103.720,00
3	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan		194.263.995,00	2.623.405.300,00	26.733.632.062,00	36.230.535.136,00
4	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.326.941.530,00	5.369.009.760,00	6.830.388.820,00	4.843.536.850,00	6.551.599.225,00
5	Belanja Perjalanan Dinas	7.071.530.790,00	10.715.577.795,00	15.789.095.230,00	14.861.730.884,50	23.942.932.923,00
6	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	2.185.500.745,00	2.491.673.640,00	852.717.500,00	2.157.907.500,00	2.543.543.346,00
	TOTAL	272.004.205.262,00	301.807.879.928,09	330.298.531.561,88	365.412.635.454,06	403.344.235.730,43

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Januari 2017

Gambaran proporsi realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebagaimana tertuang pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur
Kota Blitar Tahun 2012-2016

NO	TAHUN ANGGARAN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (Rp)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2012	272.004.205.262,00	518.471.755.778,61	52,46
2	2013	301.807.879.928,09	594.640.474.114,59	50,75
3	2014	330.298.531.561,88	659.079.331.972,57	50,12
4	2015	365.412.635.454,06	784.898.792.596,66	46,56
5	2016	403.344.235.730,43	880.414.117.129,25	45,81

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Januari 2017

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa walaupun kebutuhan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung meningkat tetapi tetap lebih memprioritaskan terselenggaranya kebutuhan pelayanan publik melalui penurunan proporsi terhadap total pengeluaran daerah.

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran melalui pendekatan *money follow fuction*. Pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan menjadi prioritas yang harus tercapai, terutama dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Sasaran pengelolaan belanja daerah Kota Blitar adalah :

1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah berdasarkan target-target capaian dalam agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam visi dan misi daerah.
2. Membaiknya komposisi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung, dengan prioritas pada kebutuhan belanja pelayanan publik.
3. Meningkatnya aspek transparansi, partisipatif, responsivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja daerah.

Sedangkan kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Sumber PAD lainnya dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendorong pertumbuhan pendapatan daerah yang diperoleh melalui Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah dan Provinsi. Mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, melalui :

- 1) optimalisasi pendapatan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, terutama pendapatan asli daerah dalam upaya untuk meningkatkan desentralisasi fiskal daerah;
- 3) peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengelola pendapatan daerah;
- 4) peningkatan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur dan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pendapatan daerah;
- 6) peningkatan kesadaran masyarakat melalui peran aktif berbagai unsur/lembaga yang hidup dan berkembang di masyarakat.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*), maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sumber penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Gambaran realisasi defisit riil anggaran komposisi penutup defisit riil anggaran dapat dilihat pada tabel 3.10 dan tabel 3.11:

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran
Kota Blitar Tahun 2014-2016

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	703.295.836.804,34	769.619.811.277,08	847.185.074.738,05
	Dikurangi realisasi :			
2	Belanja Daerah	659.079.331.972,57	782.148.792.596,66	857.795.223.707,67
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	2.750.000.000,00	23.034.423.541,58
	Defisit Riil	44.216.504.831,77	(15.278.981.319,58)	(33.644.572.511,20)

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Januari 2017

Tabel 3.11
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Blitar Tahun 2014-2016

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		Tahun 2014 (%)	Tahun 2015 (%)	Tahun 2016 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100,00	96,78	99,30
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	3,22	0,70
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Januari 2017

Proporsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya lebih dominan dibandingkan dengan sumber penutup defisit lainnya. Gambaran realisasi SiLPA sebagaimana pada tabel 3.12 :

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Blitar Tahun 2014-2016

NO	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Jumlah SiLPA	62.958.324.232,21		107.174.829.063,98		95.456.361.951,89	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	4.714.713.415,20	7,49	17.036.584.325,40	15,90	21.084.348.376,55	22,09
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.497.441.973,00	18,26	12.135.977.684,00	11,32	974.056.432,00	1,02
4	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	35.720.778.162,07	56,74	47.775.300.667,44	44,58	22.919.789.241,01	24,01
5	Sisa Belanja DAK	5.242.156.150,94	8,33	13.909.356.457,14	12,98	19.282.198.237,33	20,20
6	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	3.097.940.718,00	4,92	1.935.444.693,00	1,81	12.517.402.082,00	13,11
7	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	1.875.399.300,00	2,98	13.725.673.874,00	12,81	17.712.092.200,00	18,56
8	Sisa Belanja Dana Bantuan Provinsi	809.894.513,00	1,29	656.491.363,00	0,61	966.475.383,00	1,01

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Januari 2017

Kebijakan pembiayaan daerah digunakan untuk menutup selisih kurang antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah (defisit) melalui pembebanan pada penerimaan pembiayaan atau pemanfaatan selisih lebih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah (surplus) melalui pembebanan pada Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah meliputi :

1. SiLPA tahun sebelumnya dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata – rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaa anggaran secara konsisten.
2. Penggunaan pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek-proyek besar lainnya.
3. Penggunaan sumber pembiayaan alternatif non APBD untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan melalui pengembangan investasi berupa program kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau kerjasama pengelolaan aset daerah dengan pihak ketiga.

4. Pengembangan program CSR untuk pembiayaan pembangunan pelestarian lingkungan serta program sosial kemasyarakatan sebagai bentuk tanggungjawab sosial bagi pihak swasta (korporasi)
5. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD.
6. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman jika surplus anggaran.
7. Penyertaan modal ke BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk membiayai atau pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Langkah awal yang digunakan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah yang dapat direncanakan dan pengalokasian ke pos-pos pengeluaran. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, dengan memperhatikan kebijakan pengalokasian sumber penerimaan, antara lain :

- a. Penerimaan pajak dan retribusi daerah diprioritaskan pengalokasiannya untuk belanja pada program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana pajak dan retribusi daerah tersebut dipungut.
- b. Penerimaan dan pendapatan hasil pengelolaan asset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- c. Penerimaan dari pendapatan BLUD dialokasikan kembali untuk pemenuhan kebutuhan belanja BLUD.

- d. Penerimaan dari pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan dialokasikan kembali untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (FASKES) Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintah daerah.
- f. Penerimaan dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- g. Penerimaan dana bagi hasil yang bersifat *block-grant* dialokasikan secara memadai untuk perbaikan dan peningkatan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.
- h. Penerimaan dana bagi hasil yang bersifat *specific-grant* dialokasikan sesuai dengan ketentuan pengelolaannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat serta Prioritas Utama

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan dengan menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran, antara lain :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai yang meliputi : Pegawai Negeri Sipil Daerah, Kepala Daerah dan Anggota DPRD.
- b. Belanja Penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- c. Belanja Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- e. Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap.
- f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.
- g. Belanja Jasa Kantor (tagihan bulanan kantor seperti : listrik, air, telepon dan sejenisnya).

- h. Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas.
- i. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat.
- j. Belanja Pelatihan Pegawai.
- k. Belanja Materi Pendidikan Siswa.
- l. Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum dan Perkantoran.

Gambaran realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama tertuang dalam tabel 3.13 :

Tabel 3.13
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kota Blitar 2012-2016

No.	URAIAN	PENGELUARAN PERIODIK WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA					Rata2 Pertumbuh an (%)
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	
A	Belanja Tidak Langsung	252.888.341.156,00	274.632.188.161,00	295.862.321.639,00	306.741.514.137,00	327.978.570.305,43	6,73
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	251.410.852.615,00	272.664.560.416,00	293.837.387.887,00	304.649.103.097,00	325.739.067.305,43	3,68
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasioanal KDH/Wakil KDH	1.011.034.500,00	1.655.165.000,00	1.638.695.000,00	1.611.500.000,00	1.739.533.500,00	17,25
a.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD	630.000.000,00	1.255.800.000,00	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	
b.	Belanja Operasional KDH/ Wakil KDH	381.034.500,00	399.365.000,00	378.695.000,00	351.500.000,00	479.533.500,00	
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	466.454.041,00	312.462.745,00	386.238.752,00	480.911.040,00	499.969.500,00	4,77
B	Belanja Langsung	18.702.354.364,50	27.691.625.641,00	25.144.858.224,00	73.189.728.643,00	85.786.299.219,80	17,58
1	Belanja Pegawai (Honorarium Pegawai Tidak Tetap)	2.216.151.417,00	2.347.484.022,00	2.097.584.525,00	2.448.903.606,00	2.696.581.875,00	5,54
2	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	23.189.948.757,00	32.934.684.075,00	14,99

No.	URAIAN	PENGELUARAN PERIODIK WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA					Rata2 Pertumbuh an (%)
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	
3	Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet)	5.969.853.617,00	7.374.414.180,00	7.949.626.832,00	11.160.871.671,00	11.386.745.713,00	18,44
4	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan	140.088.100,00	163.514.900,00	189.584.500,00	208.618.400,00	220.654.820,00	12,12
5	Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat	0,00	3.889.138.698,00	4.078.843.904,00	6.456.722.228,00	7.243.864.210,00	25,12
6	Belanja Pelatihan Pegawai	2.185.500.745,00	2.491.673.640,00	852.717.500,00	2.157.907.500,00	2.543.543.346,00	29,79
7	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum dan Perkantoran	8.190.760.485,50	9.763.646.101,00	7.650.787.563,00	11.504.119.331,00	12.587.971.780,80	14,34
8	Belanja Materi Pendidikan Siswa	0,00	1.661.754.100,00	2.325.713.400,00	16.062.637.350,00	16.172.253.400,00	20,32
C	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	254.372.770,00	45.540.000,00	0,00	2.750.000.000,00	23.034.423.541,58	0,00
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	2.750.000.000,00	23.034.423.541,58	0,00
2	Pembayaran Pokok Utang	254.372.770,00	45.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL A+B+C	271.378.614.249,50	302.056.891.057,00	320.620.941.111,00	382.200.331.740,00	436.299.323.566,81	8,16

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Januari 2017

3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu

Proyeksi Pendapatan Daerah sebagai sumber pendanaan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata realisasi pendapatan selama 5 (lima) tahun sebelumnya, dengan memperhatikan beberapa asumsi antara lain :

1. Realisasi sumber pendapatan yang tidak dapat direncanakan, seperti : penerimaan dari pengembalian kelebihan belanja, denda keterlambatan dan denda retribusi, dan sumber pendapatan yang tidak setiap tahun terealisasi (sewa alat berat, pemeriksaan laboratorium), *tidak diperhitungkan* sebagai akumulasi rata-rata pertumbuhan.
2. Realisasi sumber pendapatan yang hanya diperoleh pada akhir-akhir tahun diperhitungkan sebagai akumulasi rata-rata pertumbuhan sesuai periode tahun perolehannya.
3. Sumber pendapatan yang bersifat khusus (Kapitasi JKN, DAK, Bantuan Keuangan Provinsi) diperhitungkan tersendiri dengan menggunakan data dasar realisasi tahun 2016 dan memperhatikan juga target tahun 2017 yang sudah ditetapkan.
4. Perubahan pengelompokan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Dana Transfer, seperti : Alokasi Dana Sertifikasi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi, yang semula berada pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah komponen Dana Penyesuaian, pada tahun 2016 beralih ke kelompok Dana Perimbangan komponen Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
5. Perhitungan sumber-sumber pendapatan baru yang sudah dialokasikan mulai tahun 2016 yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah, terutama pada komponen Dana Alokasi Khusus Non Fisik, yang meliputi : Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional KB, Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Akreditasi Rumah Sakit.

6. Dampak beralihnya kewenangan urusan pemerintahan terhadap perhitungan dana alokasi umum serta kebijakan pemerintah maupun perkembangan ekonomi terhadap dana bagi hasil.
7. Obyek sumber pendapatan asli daerah yang beralih fungsi menjadi fasilitas umum (gedung/bangunan, taman kota, jalan, tempat rekreasi) serta perijinan yang tidak menghambat tumbuh kembangnya investasi.
8. Data Tahun 2017 bukan lagi merupakan sebuah proyeksi karena merupakan tahun anggaran berjalan, maka tahun 2017 merupakan target capaian.

Dengan memperhatikan hal diatas, target Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut :

Tabel 3.14
Target Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021

No	Uraian	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021
1	2	4	5	6	7	8
4.1	Pendapatan Asli Daerah	122.898.829.937,00	127.585.010.489,30	133.509.622.104,31	139.667.604.302,19	146.164.500.079,86
4.1.1	Pajak Daerah	27.047.724.702,00	27.841.730.319,40	28.667.336.806,92	29.526.377.595,85	30.420.827.676,70
4.1.2	Retribusi Daerah	8.524.756.085,00	8.454.843.428,40	8.947.729.379,84	9.488.938.617,60	10.084.598.821,48
4.1.3	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	1.022.000.000,00	1.058.500.000,00	1.096.387.000,00	1.135.717.210,00	1.176.549.256,30
4.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	86.304.349.150,00	90.229.936.741,50	94.798.168.917,56	99.516.570.878,74	104.482.524.325,38
4.2	Dana Perimbangan	588.846.317.645,00	603.432.923.241,03	618.650.169.628,12	634.539.821.953,41	651.147.246.463,98
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	69.955.670.645,00	73.823.677.266,03	78.054.359.703,74	82.682.783.980,92	87.747.449.742,19
4.2.2	Dana Alokasi Umum	428.743.959.000,00	439.462.557.975,00	450.449.121.924,38	461.710.349.972,48	473.253.108.721,80
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	90.146.688.000,00	90.146.688.000,00	90.146.688.000,00	90.146.688.000,00	90.146.688.000,00
4.2.3.1	DAK Fisik	49.895.000.000,00	49.895.000.000,00	49.895.000.000,00	49.895.000.000,00	49.895.000.000,00
4.2.3.2	DAK Non Fisik	40.251.688.000,00	40.251.688.000,00	40.251.688.000,00	40.251.688.000,00	40.251.688.000,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	75.813.730.503,00	81.800.473.026,56	86.970.643.274,03	92.629.211.471,67	98.824.973.586,97
4.3.1	Hibah	0	0	0	0	0
4.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	60.853.580.503,00	66.840.323.026,56	72.010.493.274,03	77.669.061.471,67	83.864.823.586,97
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.460.150.000,00	7.460.150.000,00	7.460.150.000,00	7.460.150.000,00	7.460.150.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		787.558.878.085,00	812.818.406.756,89	839.130.435.006,47	866.836.637.727,27	896.136.720.130,82

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Januari 2017

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan berpedoman pada analisa penerimaan APBD tahun-tahun sebelumnya, yang digunakan sebagai dasar acuan untuk proyeksi penerimaan masing-masing sumber pendapatan, terutama diprioritaskan pada sumber pendapatan yang bersifat umum (*block-grant*) dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah yang berdampak langsung terhadap perhitungan dana transfer salah satunya adalah implementasi pembagian kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari hasil analisa yang telah dilakukan, Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan direncanakan naik rata-rata 3,28% per tahun dengan perincian : Pendapatan Asli Daerah naik rata-rata 4,43% per tahun, Dana Transfer Pemerintah dan Provinsi yang bersifat umum naik rata-rata 2,55% per tahunserta Dana Transfer Pemerintah dan Provinsi yang bersifat Khusus naik rata-rata 7,86% per tahun.

Penerimaan Pembiayaan direncanakan pada saat terjadi defisit pendapatan daerah. Perencanaan penerimaan pembiayaan diprioritaskan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya dengan memperhatikan batasandefisit maksimal APBD yang ditetapkan Pemerintah. Sesuai ketentuan Menteri Keuangan, terdapat 4 (empat) batasan defisit APBD menurut kategori fiskal daerah :

- a. batasan defisit 5,25% dari perkiraan Pendapatan Daerah untuk kategori sangat tinggi,
- b. batasan defisit 4,25% dari perkiraan Pendapatan Daerah untuk kategori tinggi,
- c. batasan defisit 3,25% dari perkiraan Pendapatan Daerah untuk kategori sedang,
- d. batasan defisit 2,50% dari perkiraan Pendapatan Daerah untuk kategori rendah.

Pertimbangan dalam penetapan SiLPA juga memperhatikan kinerja perencanaan keuangan dan pelaksanaan APBD, dimana semakin tinggi kinerja, maka akan berdampak semakin berkurangnya penerimaan dari SiLPA. Dari hasil analisa realisasi SiLPA pada tahun-tahun terakhir yang menurun setiap tahun dengan rata-rata 22,74%, maka diproyeksikan penerimaan pembiayaan pada komponen SiLPA sebagaimana tabel 3.15 :

Tabel 3.15
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Kota Blitar Tahun 2017-2021

NO	TAHUN	PROYEKSI SiLPA (Rp)
1	2017	62.482.372.794,13
2	2018	34.544.782.287,17
3	2019	30.769.037.583,18
4	2020	28.820.793.949,78
5	2021	22.268.386.445,30

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Januari 2017

Proyeksi SiLPA tahun 2017 didasarkan pada perhitungan sementara dalam laporan keuangan daerah tahun 2016 yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Perhitungan proyeksi SiLPA Tahun Sebelumnya tidak terlepas dari realisasi tahun-tahun sebelumnya, sehingga tetap diproyeksikan dengan kecenderungan penurunan.

Sedangkan dalam membiayai pembangunan yang akan datang, perlu diproyeksikan kerangka pendanaan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta rencana penggunaannya, dengan terlebih dahulu menetapkan proyeksi alokasi anggaran untuk mendanai pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Gambaran alokasi anggaran untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama tahun 2017-2021 sebagaimana pada Tabel 3.16 :

Tabel 3.16
Alokasi Anggaran Untuk Mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kota Blitar tahun 2017-2021

No	URAIAN	Alokasi Anggaran				
		Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	302.399.800.819,40	311.385.694.885,18	320.641.165.731,74	330.174.300.703,69	339.993.429.724,80
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	299.529.800.859,40	308.515.694.885,18	317.771.165.731,74	327.304.300.703,69	337.123.429.724,80
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasioanal KDH/Wakil KDH	2.370.000.000,00	2.370.000.000,00	2.370.000.000,00	2.370.000.000,00	2.370.000.000,00
a.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00
b.	Belanja Operasional KDH/ Wakil KDH	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	499.999.960,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
B	Belanja Langsung	73.645.243.659,80	86.484.045.069,84	89.666.216.243,59	92.965.475.064,78	96.386.129.760,87
1	Belanja Pegawai (Honorarium Pegawai Tidak Tetap)	3.313.183.800,00	3.496.596.074,48	3.625.252.952,47	3.758.643.746,50	3.896.942.640,51
2	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	26.666.551.590,00	30.664.361.579,82	31.792.653.479,23	32.962.460.758,22	34.175.310.970,71
3	Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet)	12.697.974.818,00	15.039.049.119,54	15.592.409.320,84	16.166.130.351,46	16.760.961.385,95

No	URAIAN	Alokasi Anggaran				
		Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan	344.823.560,00	386.612.335,99	400.837.695,48	415.586.475,54	430.877.935,39
5	Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat	7.492.208.949,00	9.374.419.592,03	9.719.350.356,68	10.076.972.811,87	10.447.753.946,99
6	Belanja Pelatihan Pegawai	2.928.577.000,00	3.801.038.144,90	3.940.896.936,26	4.085.901.816,86	4.236.242.136,51
7	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum dan Perkantoran	9.776.222.992,80	11.177.881.782,81	11.589.170.745,58	12.015.593.041,67	12.457.705.500,47
8	Belanja Materi Pendidikan Siswa	10.425.700.950,00	12.544.086.440,27	13.005.644.757,05	13.484.186.062,66	13.980.335.244,34
C	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
	TOTAL A+B+C	378.045.044.479,20	400.869.739.955,02	413.307.381.975,32	426.139.775.768,47	439.379.559.485,68

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Januari 2017

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah disajikan pada Tabel 3.17 :

Tabel 3.17
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Blitar
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Proyeksi (dalam jutaan)				
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
I	Pendapatan Daerah	787.558	812.818	839.130	866.836	896.136
1	Pendapatan Asli Daerah	122.898	127.585	133.509	139.667	146.164
1.1	Pajak Daerah	27.047	27.841	28.667	29.526	30.420
1.2	Retribusi Daerah	8.524	8.454	8.947	9.488	10.084
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.022	1.058	1.096	1.135	1.176
1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	86.304	90.229	94.798	99.516	104.482
2	Dana Perimbangan	588.846	603.432	618.650	634.539	651.147
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	69.955	73.823	78.054	82.682	87.747
2.2	Dana Alokasi Umum	428.743	439.462	450.449	461.710	473.253
2.3	Dana Alokasi Khusus	90.146	90.146	90.146	90.146	90.146
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	75.813	81.800	86.970	92.629	98.824
3.1	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	60.853	66.840	72.010	77.669	83.864
3.2	Dana Penyesuaian	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.3	Bantuan Keuangan Provinsi	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
II	Penerimaan Pembiayaan	32.482	34.544	30.769	28.820	22.268
1	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.482	34.544	30.769	28.820	22.268
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	820.041	847.363	869.899	895.657	918.405

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Januari 2017

Dengan melihat proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, maka dalam mengalokasikan anggaran didasarkan sesuai prioritas daerah yang ditetapkan dalam bentuk kebijakan alokasi kedalam berbagai Kelompok Prioritas, yang terdiri dari :

Prioritas I, dialokasikan untuk pendanaan:

- 1). Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar periode 2016-2021, dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan bidang kesehatan 10% (sepuluh persen).

- Program tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan umum, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah.
- 2). Prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas II, program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada pelayanan masyarakat sesuai prioritas dan permasalahan yang berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung selain gaji dan tunjangan, seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial serta belanja tidak terduga.

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun kedepantersaji pada Tabel 3.18 dan Tabel 3.19 berikut :

Tabel 3.18
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Blitar tahun 2017-2021

NO	Uraian	Tahun				
		2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	820.041.250.879,13	847.363.189.044,06	869.899.472.589,65	895.657.431.677,05	918.405.106.576,12
1	Pendapatan	787.558.878.085,00	812.818.406.756,89	839.130.435.006,47	866.836.637.727,27	896.136.720.130,82
2	Penerimaan Pembiayaan	32.482.372.794,13	34.544.782.287,17	30.769.037.583,18	28.820.793.949,78	22.268.386.445,30
B	BELANJA DAERAH	817.041.250.879,13	844.363.189.044,05	866.899.472.589,66	892.657.431.677,05	915.405.106.576,12
1	<i>BELANJA TIDAK LANGSUNG</i>	<i>321.523.800.819,40</i>	<i>331.385.694.885,18</i>	<i>342.641.165.731,74</i>	<i>365.674.300.703,69</i>	<i>365.993.429.724,80</i>
1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH	279.946.484.259,40	288.932.378.285,18	298.187.849.131,74	307.720.984.103,69	317.540.113.124,80
1.2	Belanja hibah (Pilkada)	0,00	0,00	0,00	11.500.000.000,00	0,00
1.3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	499.999.960,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.4	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	21.953.316.600,00	21.953.316.600,00	21.953.316.600,00	21.953.316.600,00	21.953.316.600,00
1.5	Belanja hibah	14.000.000.000,00	15.500.000.000,00	17.000.000.000,00	18.500.000.000,00	20.000.000.000,00
1.6	Belanja bantuan sosial	3.124.000.000,00	3.500.000.000,00	4.000.000.000,00	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00
1.7	Belanja subsidi	0	0	0	0	0
1.8	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2	<i>BELANJA LANGSUNG</i>	<i>495.517.450.059,73</i>	<i>512.977.494.158,87</i>	<i>524.258.306.857,92</i>	<i>526.983.130.973,36</i>	<i>549.411.676.851,32</i>

NO	Uraian	Tahun				
		2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Belanja Rutin Mengikat dan Prioritas Utama	73.645.243.659,80	86.484.045.069,84	89.666.216.243,59	92.965.475.064,78	96.386.129.760,87
2.2	Program Prioritas Pencapaian Visi Misi	421.872.206.399,93	426.493.449.089,03	434.592.090.614,33	434.017.655.908,58	453.025.547.090,45
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
1	Penyertaan Modal kepada BUMD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Januari 2017

Tabel 3.19
Kerangka Pendanaan
Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Blitar tahun 2017-2021

Jenis Dana	Alokasi									
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
PRIORITAS I	357.091.727.879,20	43,55	378.916.423.355,02	44,72	391.354.065.375,33	44,99	415.686.459.168,47	46,41	417.426.242.885,67	45,45
PRIORITAS II	421.872.206.399,93	51,45	426.493.449.089,03	50,33	434.592.090.614,33	49,96	434.017.655.908,58	48,46	453.025.547.090,45	49,33
PRIORITAS III	41.077.316.600,00	5,01	41.953.316.600,00	4,95	43.953.316.600,00	5,05	45.953.316.600,00	5,13	47.953.316.600,00	5,22
JUMLAH	820.041.250.879,13		847.363.189.044,05		869.899.472.589,66		895.657.431.677,05		918.405.106.576,12	

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Januari 2017

B A B IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan kedepan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa yang akan datang, dengan kata lain isu strategis juga dikatakan sebagai jantung perencanaan pembangunan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu-isu strategis Kota Blitar untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun waktu tahun 2016-2021 diidentifikasi melalui serangkaian proses yang dimulai dari identifikasi permasalahan pembangunan Kota Blitar, telaahan terhadap isu/kebijakan internasional, nasional, dan provinsi yang berpengaruh pada pembangunan Kota Blitar. Termasuk didalamnya telaahan terhadap isu/kebijakan Kota Blitar meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2021, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2030, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 2016-2021. Berbagai hal tersebut kemudian dianalisis dan dibuat dalam prioritas untuk menghasilkan rumusan isu-isu strategis pembangunan daerah Kota Blitar untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Pengelompokan permasalahan pembangunan di Kota Blitar sesuai bidang, secara umum mencakup: (i) Bidang Pemerintahan Umum, (ii) Bidang Ekonomi, (iii) Bidang SosialBudaya, dan (iv) Infrastruktur. Penjabaran dari permasalahan-permasalahan berbagai bidang tersebut tersaji selengkapnya sebagai berikut:

4.1.1 Bidang Pemerintahan Umum (urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian)

Permasalahan yang muncul adalah: (a) Pemenuhan standar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang masih belum mencapai target pemerintah pusat; (b) belum terpenuhinya penerapan Standar Pelayanan Publik dan maklumat pelayanan publik pada semua unit pelayanan publik; (c) sistem pengelolaan pengaduan berupa prosedur tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dinilai belum sesuai yang diharapkan; (d) permasalahan akurasi, kebaruan data dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja; (e) Sistem inovasi daerah yang masih akan disusun dan dikembangkan.

Isu pokok tata kelola pemerintahan umum yang masih menjadi kebijakan sentral sejak tahun 2009 adalah reformasi birokrasi. Keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi dan Nomor 01 Tahun 2015 tentang evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, masih sangat penting. Reformasi birokrasi adalah kebijakan strategis pemerintah pusat dan Propinsi Jawa Timur saat ini. Pemerintah daerah didorong dan bahkan dipaksa untuk melakukan usulan kebijakan reformasi birokrasi sebagai prasyarat untuk memperoleh berbagai fasilitas kebijakan pemerintah pusat, antara lain kebijakan remunerasi (tunjangan kinerja). Maka, isu reformasi birokrasi dan pelayanan publik harus tetap menjadi bagian isu sentral dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Blitar 5 (lima) tahun kedepan.

Kota Blitar memang sudah menyusun Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, akan tetapi dalam penerapannya masih banyak program dan kegiatan reformasi birokrasi yang pelaksanaannya perlu didukung oleh program unggulan reformasi birokrasi yaitu Zona Integritas (zona bebas korupsi) dan Transparansi Informasi melalui keterbukaan Informasi publik sebagaimana

diharapkan sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 belum sepenuhnya diterapkan dan dikembangkan Pemerintah Kota Blitar. Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dan pelayanan publik, maka reformasi birokrasi ini harus segera diterapkan.

a. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk dapat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah semakin baik, dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu : 1) makin meningkatnya proporsi (rasio) pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan; 2) makin menurunnya proporsi dana perimbangan; dan 3) makin meningkatnya proporsi pendapatan lain-lain yang sah. Salah satu komponen pendapatan daerah adalah pajak daerah. Terkait dengan pajak daerah utamanya pendataan data dasar (*based data*) obyek dan subyek pajak berpengaruh terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang belum optimal, termasuk ketertiban daftar pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Efektifitas dan efisiensi belanja daerah perlu dioptimalkan untuk belanja yang kemanfaatannya lebih besar di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola pendapatan asli daerah semakin baik, dalam jangka panjang hal ini diharapkan semakin meningkat, sehingga akan mendorong kemandirian keuangannya daerah. Demikian pula bagaimana pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah terkait dengan kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, kemampuan untuk menutupi kewajiban operasionalnya, memasok layanan kepada masyarakat sesuai standar dan kualitas, demikian mampu untuk mengantisipasi kondisi yang tak terduga dimasa yang akan datang.

Selain itu, publikasi informasi kinerja keuangan daerah ke masyarakat masih perlu ditingkatkan, hal selaras dengan prioritas kebijakan Pemerintah Pusat melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) yang mengkoordinir transparansi dan keterbukaan informasi publik semua SKPD sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Ketertiban administrasi aset daerah perlu ditingkatkan terkait sertifikasi tanah, menyangkut persoalan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

b. Pengelolaan Perangkat Daerah

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa dampak perubahan dalam penataan dan pengelolaan jabatan perangkat daerah di Kota Blitar. Hal membawa kepada pilihan-pilihan alternatif model, struktur, kultur organisasi perangkat yang dibentuk baik gabungan atau tidak. Hal ini agar dapat membawa kepada tantangan kemampuan organisasi perangkat daerah dalam menjawab tantangan sesuai dengan bidang, urusan kewenangan yang dimiliki.

Selain itu kelembagaan di atas, beberapa kebijakan kewenangan sektoral juga sudah dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat terhadap kewenangan sektoral daerah, antara lain: a) penarikan kewenangan sekolah menengah ke provinsi; b) penarikan kewenangan bidang kelautan, kehutanan, sampai pertambangan dan energi ke pemerintah pusat; c) pemisahan dinas komunikasi dan informatika harus berdiri sendiri sebab akan menjadi *leading sector* keterbukaan informasi publik (KIP); d) penarikan kewenangan urusan kesatuan bangsa dan politik akan lebih netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Isu kelembagaan ini akan berpengaruh terhadap perubahan dan distribusi kewenangan setiap organisasi perangkat daerah dan akhirnya juga akan berdampak terhadap pengelolaan dan alokasi penganggaran daerah.

c. Manajemen Kepegawaian dan Penataan Organisasi

Manajemen sumber daya aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, efektif, efisien, dan akuntabel yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu dioptimalkan. Upaya nyata kebijakan adalah penempatan jabatan pegawai yang berbasis pada kompetensi dan profesionalitas jabatan melalui pelaksanaan *assesment* jabatan sebelumnya.

Isu dibidang kepegawaian terkait dengan kebijakan *minus growth* dimana penerimaan PNS baru di daerah harus lebih kecil dibandingkan dengan yang purna tugas (pensiun), pelatihan berbasis kompetensi dan isu lelang terbuka jabatan bagi jabatan eselon tertentu. Terakhir adalah isu strategis penerapan zona integritas dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Kebijakan penting dalam hal

ini adalah selain mendorong adanya keterbukaan informasi publik melalui publikasi kinerja, juga adanya sistem dan mekanisme perbaikan kinerja yang dilakukan mulai dari perencanaan kinerja sampai dengan review kinerja. Pemerintah Kota Blitar benar-benar *concern* dan memberikan prioritas yang tinggi pada program akuntabilitas kinerja ini.

Isu dibidang kepegawaian juga terkait dengan penataan organisasi perangkat daerah (OPD) seiring dengan ditetapkan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, khususnya terkait jabatan struktural dan kelembagaan sesuai urusan dan kewenangan daerah.

d. Penyusunan Naskah Akademik, Penjelasan atau Keterangan

Adanya mekanisme dan prosedur penyusunan produk hukum daerah mulai dari peraturan kepala daerah (Perkada) sampai dengan peraturan daerah (perda) membawa dampak pada produktivitas penyusunan regulasi, kebijakan daerah maupun implementasinya. Produktivitas kajian dan penusunan Peraturan Daerah perlu dilakukan selain sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan maupun penyusunan naskah akademik. Juga terhadap usulan peraturan daerah yang harus berbasis pada prioritas kebutuhan dan tuntutan masyarakat perlu ditetapkan.

Demikian pula penegakan regulasi pemerintah perlu dilakukan melalui upaya-upaya persuasif sampai dengan represif. Hal ini utamanya terkait dengan persoalan sosial yang harus segera diselesaikan. Penegakan peraturan daerah perlu memperhatikan isu-isu pembangunan daerah yang ada yang berpotensi menimbulkan konflik sosial horisontal maupun vertikal. Sehingga, sinergi kerja antara aparaturnya penegak peraturan daerah dan pihak berwajib lainnya sangat diperlukan.

Penyusunan dan penegakan peraturan, regulasi daerah, perlu didukung dengan update publikasi informasi peraturan daerah ke dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) Kota Blitar. Maka, penanganan terhadap keterbukaan informasi publik regulasi ini harus dikelola melalui sistem Pengelola Informasi Daerah (PPID) sebagaimana prioritas program RPJMN 2014-2019.

e. Keterbukaan Informasi, Akuntabilitas Publik, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan.

Transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam ruang publik (*public space*) masih perlu ditingkatkan baik akses maupun ruang lingkungannya. Permasalahan transparansi informasi dan kemudahan akses publik masih perlu ditingkatkan. Semua SKPD yang dikoordinir PPID harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mempublikasikan data berbagai dokumen secara periodik agar mudah diakses oleh masyarakat umum. Maka, perlu disusun *road map* dan mekanisme keterbukaan informasi publik bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Isu lain adalah terkait dengan penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagai wujud monitoring evaluasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. Akses dan ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan melalui dengar pendapat masyarakat (*publik hearing*) yang diadakan oleh DPRD dalam pembahasan Ranperda RAPBD dan non APBD masih perlu ditingkatkan.

Perkembangan Teknologi Informasi saat ini juga terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Penggunaan media sosial sebagai salah satu media kontrol, meski kadang berdampak buruk dan berpotensi konflik, tidak dapat dihindarkan lagi. Informasi apapun akan segera menjadi isu dan informasi publik yang secara real time masuk ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Maka, penerapan berbagai instrumen pelayanan untuk menjamin kepastian dan akuntabilitas pelayanan publik harus ditingkatkan. Penerapan standar pelayanan, standar operasional prosedur (SOP) dan pengelolaan pengaduan menjadi prioritas program pemerintah pusat dalam meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat dan sekaligus mendorong kinerja pemerintahan akan semakin akuntabel.

Kebijakan perluasan partisipasi masyarakat yang lain adalah melalui kebijakan keterbukaan informasi publik. Pemerintah pusat dan Provinsi memiliki concern yang besar terhadap hal ini antara lain melalui berbagai kebijakan kepada daerah untuk melakukan publikasi berbagai laporan kinerja kepada masyarakat melalui website. Selain itu, penerapan standar akuntabilitas administrasi pemerintahan terus

dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, antara lain penyusunan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal. Kesemuanya ditujukan dalam rangka mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah.

f. Kerjasama antar Daerah dan Dunia Usaha (*Private Sector*)

Kerjasama antar daerah dalam rangka mengembangkan daya saing sejauh ini masih belum optimal, seringkali berhenti di Kesepakatan dan Kesepahaman (MOU: *Memorandum of Understanding*), tetapi tidak berlanjut hingga menghasilkan *outcome* peningkatan daya saing. Beberapa program sinergi kerja melalui Tanggungjawab Sosial perusahaan (TSP) dengan masyarakat dan pemerintah daerah belum optimal, meskipun pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan pemerintah terkait TSP dan bahkan Provinsi Jawa Timur sudah menyusun Peraturan Daerah tentang TSP. Pemerintah Kota Blitar segera harus menyusun Regulasi terkait dengan kerjasama pengelolaan Tanggungjawab Sosial perusahaan (TSP) dengan kalangan dunia usaha baik pola bapak asuh, pembinaandengan fokus sasaran pada pemberdayaan koperasi dan UMKM, industri rumah tangga perlu segera disiapkan.

g. Kerjasama Internal Penyelenggara Pemerintahan dan DPRD

Kerjasama, sinergitas, integrasi dan sinkronisasi antara SKPD masih perlu dioptimalkan lagi. Sinergi program dan kegiatan lintas sektor, termasuk didalamnya sinergitas administrasi pengelolaan dan pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi program/kegiatan masih harus terus ditingkatkan. Kerjasama dengan DPRD dalam bidang proses legislasi, pengawasan dan penganggaran perlu dioptimalkan sehingga fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi penyenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis kinerja dapat lebih akuntabel.

h. Permasalahan Manajemen Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih perlu ditingkatkan. Validitas data penduduk masih harus terus dilakukan pembaruan. Validitas dan akurasi data dalam rangka ketertiban administrasi penduduk guna pengelolaan data kependudukan yang benar dan tepat. Oleh karena itu semua komponen yang terlibat perlu cermat dan teliti serta ketepatan dalam pengurusan data kependudukan. Data kependudukan yang valid,

benar sangat membantu para stakeholder dalam pengolahan, memanfaatkan data kependudukan baik terkait dengan urusan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Demikian pula nantinya sebagai sumber informasi yang akan diolah dalam rangka penyusunan kebijakan, regulasi baik tingkat daerah, maupun pusat. Demikian pula terkait dengan dokumen kependudukan yang sudah harus dimiliki oleh seluruh penduduk baik anak dengan Kartu Identitas Anak (KIA), dewasa dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) atau dokumen lainnya yang pengelolaannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.

i. Permasalahan Perlindungan Masyarakat

Perlindungan masyarakat yang dimaksud adalah kebijakan terhadap perlindungan masyarakat terhadap rasa aman dan nyaman dari ancaman lingkungan fisis (fisik) dan konflik sosial budaya. Perlindungan masyarakat dari ancaman lingkungan fisik terutama dari adanya potensi bencana yang terjadi dan mengancam kehidupan masyarakat. Kegiatan penanggulangan bencana masih harus terus ditingkatkan intensitas dan fokus terutama terkait dengan kesiapsiagaan, daya tanggap bencana masyarakat, dalam menghadapi bencana, harus mampu, berkapasitas memiliki daya adaptasi secara swasembada, swadaya serta swakelola dalam berbagai situasi khususnya ketika terjadi bencana. Demikian pula upaya mitigasi bencana: identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta penetapan sistem peringatan dini di setiap wilayah Kota Blitar masih ditingkatkan pelaksanaannya. Terkait dengan perlindungan terhadap bencana alam, Kota Blitar harus menjadi prioritas mengingat beberapa potensi ancaman bencana baik bencana gunung berapi, dampak perubahan iklim (*climate change*).

Sedangkan, untuk potensi ancaman konflik sosial budaya dan kemasyarakatan agar menjadi lingkungan kondusif masih perlu ditingkatkan melalui: penurunan angka kriminalitas, peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat, keterbatasan personil Satpol PP, dan masih rendahnya aktifitas persandian. Potensi konflik yang dipicu oleh suku, agama, ras, dan antar golongan masih harus tetap diwaspadai. Sehingga, sinergi kerjasama dengan berbagai institusi

penegak hukum dan keamanan baik ditingkat Kota sampai ke Kecamatan harus terus ditingkatkan. Selain itu, peran peningkatan peran satuan perlindungan masyarakat (linmas) di berbagai lingkungan masyarakat harus dioptimalkan melalui pelatihan dan koordinasi secara intensif.

4.1.2 Bidang Ekonomi

Permasalahan-permasalahan bidang ekonomi dikelompokkan dalam beberapa sub permasalahan berdasar urusan sebagai berikut:

a. Koperasi dan UKM

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (a) masih kurangnya jumlah koperasi aktif, rendahnya kualitas kesehatan koperasi, kurangnya SDM koperasi sesuai dengan standar keahlian teknis; (b) Masih rendahnya aplikasi IPTEKS dalam sistem produksi UMKM sehingga kurang mendukung daya saingnya; (c) keberlanjutan efektifitas pasar rakyat yang harus segera dimodernisasi dan bahkan dikembangkan menjadi wisata rakyat; (d) belum tersedianya kebijakan yang mendukung bagi perkembangan dan keberlanjutan UMKM; (e) Masih kurangnya kualitas SDM dan daya saing pemasaran (promosi) produk UMKM, baik pada bidang sandang, pangan, kerajinan, dan jasa; (f) masih belum tersedianya informasi perkembangan usaha UMKM baik berupa data keuangan dan non keuangan yang utuh; dan (g) Masih rendahnya ketersediaan dan aksesibilitas UMKM terhadap permodalan lembaga keuangan/pembiayaan mikro. Program pengembangan koperasi dan UMKM sebagai kelompok ekonomi strategis berbasis rakyat harus ditingkatkan penanganannya dalam rangka menghadapi pasar bebas ASEAN (MEA) tahun 2016.

b. Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang terkait dengan Penanaman Modal bahwa perlunya: (a) ketersediaan regulasi dan implementasinya terkait informasi peluang investasi dan kemudahan pengurusan perijinan melalui penyederhanaan prosedur perijinan baik melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu maupun integrasi teknologi informasi dalam pelayanan perijinan; (b) perlunya regulasi untuk menghadapi kebebasan arus investasi dalam rangka menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean); (c) peningkatan capaian kinerja investasi (masih didominasi oleh PMDN) dan

kemampuan kompetisi modal, barang, dan jasa; (d) SDM yang berkompeten mengelola investasi daerah menghadapi MEA (termasuk BUMD); dan (e) serta ketersediaan infrastruktur daerah sebagai penunjang daya tarik investasi dan mendukung kegiatan operasional investasi di daerah. Perlunya pengembangan infrastruktur yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2010-2030.

c. Ketahanan Pangan

Tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan, dan kestabilan pangan. Terkait dengan ketahanan pangan, nampak masih adaya: (a) ketergantungan bahan pangan dari luar daerah yang masih besar; (b) Belum optimalnya pencapaian skor pola pangan harapan; (c) Masih rendahnya konsumsi pangan berbasis lokal yang sehat dan aman bagi anak-anak sekolah; (e) Kurang terjaminnya ketersediaan pasokan bahan pokok; dan (f) Sering terjadi fluktuasi harga dari berbagai komoditas di Kota Blitar. Disamping itu perlunya upaya peningkatan melalui ketahanan pangan berbasis masyarakat perkotaan, yang berbeda dengan perdesaan.

d. Pertanian

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan pertanian dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (a) Belum optimalnya produktivitas dan pemasaran hasil pertanian (perkebunan/peternakan/perikanan); dan (b) Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian dan pemanfaatan pekarangan dalam mendukung daya tahan pangan di masyarakat. Kontribusi ekonomi sektor pertanian terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2014 kontribusi sektor pertanian hanya 6,28% dan terus turun dari tahun sebelumnya yaitu 6,29%. Pemerintah Kota Blitar harus segera mengambil langkah-langkah strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian ini.

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan energi adalah belum optimalnya upaya pemanfaatan ataupun pencintaan energy baru terbarukan sebagai alternatif lain di Kota Blitar. Sejauh ini telah ada pemanfaatan biogas yang berasal dari kotoran ternak, akan tetapi cakupannya masih minim, karena baru tingkat lingkungan beberapa rumah tangga peternak. Sehingga perlunya inovasi, kreasi dan kajian

maupun penelitian untuk meningkatkan cakupan dan kuantitas serta kualitas energi yang dihasilkan.

f. Perdagangan

KondisiPerdagangan:nampak (a) Masih banyaknya peredaran barang dan jasa yang belum terstandarisasi dan ada yang belum aman; (b) Standarisasi produk barang dan jasa dalam rangka penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan peningkatan daya saing; (d) Masih belum optimalnya penataan PKL, (e) Masih banyaknya pasar rakyat (tradisional) yang memenuhi syarat dan standar kesehatan, kebersihan dan kenyamanan; (f) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia pelaku usaha UMKM sebagai pelaku usaha pasar rakyat; dan (g) Pertumbuhan pasar modern (minimarket) begitu pesat yang dapat mengancam pasar tradisonal. Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan penataanperkembangan dan dinamika perdagangan modern agar dapat berkontribusi dalam pertumbuhan perdagangan tradisonal, pasar tradisional. Hal ini ditujukan selain untuk melindungi, mengembangkan, serta meningkatkan pedagang pasar tradisional serta menciptakan persaingan sehat dan membina lingkungan sosial yang kondusif.

g. Industri

Permasalahannya yang dihadapi bidang industri antara lain: (a) Masih rendahnya kinerja perindustrian yang diindikasikan dengan masih rendahnya rasio nilai ekspor terhadap PDRB; (b) Penguasaan teknologi pada IKM belum optimal; (c) Penurunan kontribusi sektor pertanian yang belum seimbang dengan kenaikan PDRB sektor industri; (d) Belum optimalnya pertumbuhan jumlah usaha; (e) Ketergantungan bahan baku impor yang tinggi; (f) Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industri masih rendah.

4.1.3 Bidang Sosial Budaya

a. Pendidikan

Keberhasilan perluasan dan pemerataan pendidikan formal masih perlu ditingkatkan, antara lain dengan terus meningkatkan indikator pemerataan pendidikan dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu (a) Capaian APM; (b) Capaian APS; (c) capaian APK; dan (d) Kualitas tenaga pendidik pada jenjang Sekolah Dasar/sederajat yang harus ditingkatkan.

b. Kesehatan

Kesimpulan permasalahan bidang kesehatan: (a) Masih rendahnya sinergitas pelayanan dalam perawatan kehamilan dan kelahiran; (b) Perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan tingkat kepatuhan ibu dalam menjaga kesehatannya; (c) Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular disebabkan oleh masih buruknya perilaku di masyarakat dalam mengikuti Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan (d) perluasan akses kesehatan masyarakat pada berbagai sarana kesehatan dasar masih perlu ditingkatkan.

c. Perempuan dan Anak

Permasalahan perempuan dan anak yaitu: (a) masih perlu ditingkatkan kualitas hidup manusia Kota Blitar yang diukur dengan IPM dan IPG. Nilai IPM Kota Blitar sudah cukup tinggi dan bahkan ketiga tertinggi di Jawa Timur, namun capaian ini belum diimbangi dengan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG); (b) Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan partisipasi angkatan kerja perempuan dalam dunia kerja; (c) Perlunya peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan melalui kerjasama Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PTPA) dengan SKPD terkait, LSM, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, layanan kesehatan dan kelurahan sebagai pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM); Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini; Belum tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah.

d. Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Permasalahan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga di Kota Blitar, yaitu: (a) penyelenggaraan program Keluarga Berencana perlu terus dioptimalkan untuk mengendalikan keseimbangan pertumbuhan penduduk: cakupan *unmet need* dan Cakupan Angka pemakaian kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate/CPR*); (b) Rasio Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB di setiap kelurahan masih kurang; dan (c) Partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja, dengan indikator cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), masih perlu ditingkatkan.

e. Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan yang masih dihadapi dalam bidang kepemudaan: (a) masih rendahnya tingkat pertumbuhan kelompok wirausaha/entrepreneurship di kalangan pemuda; dan (b) Masih rendahnya kapasitas dan kualitas kelembagaan kepemudaan baik formal melalui organisasi kepemudaan maupun non formal yaitu kelompok sosial masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang olahraga: (a) masih minimnya prestasi olah raga masyarakat; (b) Rendahnya rasio gedung olah raga, juga diikuti oleh minimnya pembinaan olah raga sehingga berimbas pada minimnya prestasi olah raga di kalangan pemuda.

f. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. PMKS meliputi anak balita terlantar, anak korban tindak kekerasan, anak nakal, anak jalanan, anak penyandang disabilitas, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK), lanjut usia terlantar, lanjut usia tindak kekerasan, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang cacat bukan kusta, tuna susila, eks narapidana, pekerja migran bermasalah dan korban NAPZA. Beberapa permasalahan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): (a) Penanganan PMKS untuk membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan secara optimal; (b) Terbatasnya daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana panti sosial; (b) Belum optimalnya kemitraan lintas sektoral juga menjadi permasalahan dalam penanganan PMKS.

g. Ketenagakerjaan

Angka pengangguran di Kota Blitar pada tahun 2011 masih tergolong cukup tinggi namun persentasenya semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,22% sedangkan pada tahun 2015 turun menjadi 3,55%. Angka ini masih perlu diturunkan lagi, maka beberapa isu strategis yang dapat diidentifikasi antara lain: (a) kesempatan kerja yang ada belum mampu menampung seluruh pencari kerja; (b) pencari tenaga kerja belum kompetitif, sehingga perlu difasilitasi pendidikan

keterampilan sesuai standarisasi pasar tenaga kerja baik lokal, regional, nasional maupun internasional; dan (c) perlunya regulasi perlindungan ketenagakerjaan.

h. Kearsipan dan Perpustakaan

Jumlah arsip dalam wujud digitalisasi/aplikasi teknologi informasi masih sangat sedikit dan belum optimal. Kebijakan pengelolaan arsip secara digital (*electronic arsip*) harus mulai dikembangkan sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015. *E-arsip* adalah salah satu prioritas program unggulan Pemerintah Pusat dalam membangun sistem tatalaksana yang akuntabel dan efisien.

Pengelolaan/manajemen perpustakaan, layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan di Kota Blitar belum optimal. Belum dibangun interkoneksi dengan perpustakaan lain baik di dalam maupun luar negeri terutama dalam rangka pelestarian naskah-naskah kuno Kota Blitar mengingat banyak peninggalan sejarah Kota Blitar yang masih harus digali. Selain itu, kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah masih rendah. Pengembangan perpustakaan masyarakat juga perlu memperoleh perhatian serius dalam rangka meningkatkan akses pengetahuan masyarakat.

i. Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Blitar sebagai kotawisata sejarah telah menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Blitar. Dari 1.200.465 ribu pengunjung naik menjadi 2.162.455 pengunjung, atau meningkat sebesar 80,62 persen. Peningkatan jumlah wisatawan ternyata sejalan dengan peningkatan jumlah tamu menginap di hotel dan penginapan. Tahun 2011 ke 2015 jumlah tamu yang menginap meningkat dari 115 ribu menjadi 131 ribu. Walau menunjukkan perkembangan, namun pariwisata di Kota Blitar masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan, yaitu: (a) perlunya pemantapan Rencana Induk Program Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Blitar sebagai panduan pembangunan pariwisata secara terpadu yang menyangkut aspek sosial dan ekonomi serta bersifat berkesinambungan; (b) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan warisan wisata religi dan kebangsaan dengan ikon makan Bung Karno sang Proklamator. Selain Makam Proklamator, destinasi wisata yang ditawarkan di Kota Blitar adalah Perpustakaan Bung Karno, Istana Gebang dan *Water Park*

Sumber Udel dan wisata cagar budaya bersejarah lainnya sebagai warisan budaya daerah yang memiliki potensi sebagai obyek wisata sejarah dan budaya;(c) Belum optimalnya kreativitas masyarakat terhadap kekayaan seni dan budaya. Potensi wisata belum mampu menarik (mendorong) tumbuhnya sektor industri kerajinan untuk melengkapi destinasi wisata tersebut, sehingga harus menjadi perhatian serius; (d) Belum dilakukan pemanfaatan jaringan informasi dan promosi pariwisata secara efektif; dan (e) Rendahnya peran aktif darimasyarakat khususnya generasi muda dalam upaya pengembangan pariwisata melalui pelestarian seni dan budaya khas Kota Blitar.

j. Masalah Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan

Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal Kota Blitar, dimana Kota Blitar yang secara sosio kultural merupakan perpaduan antara pengaruh Jawa Timur yang dikenal pemberani dan budaya Jawa Tengah yang terkenal lembut dengan filosofinya yang kuat melahirkan tokoh-tokoh nasional yang dikenal memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme tinggi seperti Bung Karno, Suprijadi dan lain-lain akan menimbulkan penurunan semangat nasionalisme dan patriotisme yang selama ini melandasi dan mewarnai setiap gerak kehidupan masyarakat Kota Blitar baik dalam pembangunan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Gempuran budaya dan gaya hidup asing yang masuk melalui berbagai media terutama teknologi informasi. Jika tidak diantisipasi dengan baik dengan indoktrinasi jiwa patriotisme, semangat nasionalisme dan budaya kegotongroyongan lewat berbagai kesempatan dan media seperti memasukkannya dalam kurikulum sekolah, maka dikhawatirkan nilai-nilai kearifan lokal tersebut akan bisa terkikis oleh gerusan budaya asing maupun kepentingan-kepentingan pragmatis sesaat.

4.1.4 Bidang Infrastruktur

a. Perhubungan

Jumlah pengguna angkutan umum setiap tahun mengalami kenaikan. Sampai akhir tahun 2015 terdapat jumlah penumpang sebanyak 354.725 orang. Jenis moda transportasi layanan yang tersedia antara lain armada bus antar kota antar propinsi (AKAP) sebanyak 28 kendaraan, antar kota dalam propinsi sebanyak 135 kendaraan, serta pelayanan dari armada lain maupun angkutan

pedesaan sebanyak 115 kendaraan. Permasalahan perhubungan dan transportasi antar daerah menjadi masalah yang mendesak untuk ditangani: (i) agresifitas Kebijakan oleh Pemerintah Pusat dalam mengembangkan sarana transportasi massal perlu disikapi kebijakan peningkatan kualitas sarana transportasi melalui peremajaan jenis dan modal angkutan; (ii) peningkatan akses transportasi publik antar wilayah bagi masyarakat terutama ke pusat-pusat kegiatan; (iii) belum optimalnya kinerja transportasi massal melalui peningkatan layanan uji kir. Perlu fokus prioritas pada integrasi penataan ruang dengan pemenuhan aksesibilitas transportasi yang mengarahkan pembangunan kawasan strategis.

b. Pekerjaan Umum

Permasalahan yang dihadapi: (a) Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah; (b) antisipasi mitigasi bencana alam; (c) Akses sanitasi dan air bersih yang menjadi target kementrian, dimana akhir tahun 2019 semua penduduk harus memperoleh akses air bersih secara layak; (d) rasio kecukupan penyediaan air minum layak bagi masyarakat; (e) ketersediaan sumber air baku untuk air minum; (f) Upaya hemat energi dan infrastruktur hijau (*green infrastructure*); dan (g) keterpaduan infrastruktur dengan mengatasi degradasi lingkungan pada kawasan tertentu.

c. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan komunikasi dan Informasi menyangkut ketersediaan *website* dan jaringan internet bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kota Blitar. Juga kemudahan akses masyarakat terhadap publikasi informasi kinerja dan keuangan harus ditingkatkan. Komunikasi dan informasi menjadi tantangan menjembatani pemerintah dan pihak luar dalam peningkatan pencitraan kota dan penarikan *capital inflow* ke Kota Blitar. Prioritas kebijakan yang harus menjadi fokus program pembangunan Kota Blitar adalah terkait optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dalam mengkoordinir dan bertanggung-jawab terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat sebagaimana telah menjadi prioritas reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.

d. Perumahan

Degradasi lingkungan pada kawasan dengan kondisi rumah tidak layak huni dapat menjadi isu utama menuju Blitar Bebas Kumuh. Masih ditemukan masalah dalam hal: (a) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); (b) kawasan yang kurang layak huni; (c) permukiman pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; (d) terbatasnya lahan untuk penyerapan air pada waktu terjadi genangan dan pemenuhan sumur-sumur resapan pada kawasan padat permukiman (e) sanitasi dan air bersih; (f) IPAL komunal kawasan padat; dan (g) pengembangan rumah sehat berbasis STBM. Di samping itu masalah pertanahan cukup penting dengan: (a) beberapa lahan tidak bersertifikat dan (b) konflik pertanahan.

e. Lingkungan Hidup

Degradasi Lingkungan menjadi masalah utama disamping terkait dengan upaya pemenuhan Kota Blitar menjadi daerah hijau terutama menyangkut ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang dipersyaratkan sesuai standar pelayanan minimal yaitu 20%; pengembalian RTH pada kawasan konservasi alam dan lahan resapan air beserta pengelolaan. Target penyediaan RTH sebesar 20% oleh Pemerintah Daerah menjadi target kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas tata ruang dan sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan.

Persampahan menjadi masalah lingkungan hidup, teridentifikasi: (a) pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah perlu ditingkatkan; (b) pelebagaan pengelolaan persampahan menuju konsep Zero waste; (c) pemahaman masyarakat akan pengelolaan sampah berbasis 3 R (*reduce*, *reuse* dan *recycling*) masih terbatas. Masalah pencemaran yang ditemukan: (a) pencemaran air yang disebabkan limbah industri dan domestik masih ada; (b) belum ditegakkan regulasi lingkungan seperti AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL dan UPL sebagai prasyarat izin bisnis; (c) peningkatan pencemaran air dan menurunnya kualitas air permukaan, karena terbatasnya kemampuan industri kecil untuk mengolah limbahnya dengan standar pengolahan *waste water treatment*; (d) kuantitas sumber air tanah yang semakin menurun, yang dibuktikan dengan beberapa sumber mata air di Kota Blitar kering; (e) belum tergalinya potensi sumber-sumber energi terbarukan, antara lain biogas dan energi yang bersumber dari sampah.

f. Penataan Ruang

Permasalahan utama bidang penataan ruang adalah belum terkoneksi penataan ruang dengan pembangunan sektoral. Dokumen perencanaan tata ruang perkotaan dan turunannya (RTRW, RDRTK, RTBL) belum operasional sebagai dasar perijinan pemanfaatan ruang (IPR). Hal ini disebabkan karena persetujuan sampai dengan penetapan Perda RDTR yang telah disusun memakan waktu yang cukup, bahkan sampai dengan ditetapkan Perda RPJMD Kota Blitar 2016-2021 ini, masih dalam tahap evaluasi Provinsi Jawa Timur, sehingga belum dapat dijadikan dasar/rujukan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai peruntukan. Termasuk didalamnya RDTR sebagai dokumen turunan RTRW yang disusun sejak Tahun 2014. Tahun 2015 sampai dengan 2017 ini masih dalam proses persetujuan substansi, aistensi peta di Badan Informasi Geospasial (BIG) dan proses di DPRD dan diharapkan 2017 ini merupakan akhir penetapan. Imbas dari belum ditetapkan RDTR ini, penyediaan informasi terkait tataruang bagi masyarakat melalui peta digital tingkat kelurahan dari Tahun 2012 sampai 2016 masih sebesar 12,5% meskipun peta digital Tingkat Kota dari Tahun 2012-2016 sudah terpenuhi 100%. Rencana peta digital tingkat kelurahan akan dipenuhi pada tahun 2019.

Selain itu terjadi alih fungsi lahan dari peruntukan satu ke peruntukan lain. Permasalahan penataan Ruang pada kawasan strategis yaitu: (a) menurunnya daya dukung kawasan strategis cepat tumbuh (kawasan pusat wilayah); (b) penguatan karakter kawasan secara berkelanjutan (fisik, sosial, ekonomi) untuk mendukung Blitar sebagai pariwisata berbasis kekuatan ekonomi lokal; (b) konservasi kawasan bersejarah, menyangkut: pelestarian, pengembangan, dan perlindungan cagar budaya dan bangunan bersejarah yang banyak terdapat di Blitar; dan (c) pengembangan kawasan Strategis perlu perhatian khusus di dalam kawasan strategis.

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Isu Strategis Internal

Pembahasan mengenai lingkungan internal yang akan dikaji dalam bagian ini, mencakup: (i) Posisi Geografis dan Geoekonomi Daerah, (ii) Kondisi Demografi, dan (iii) Lingkungan Sosial Budaya, dengan penjelasan selengkapnya sebagai berikut :

a. Posisi Geografis dan Geo-ekonomi Daerah

Geografis Kota Blitar terletak diujung selatan Provinsi Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut dengan suhu udara cukup sejuk rata-rata 24°C- 34°C karena berada di kaki Gunung Kelud. Secara geografis, Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan potensi diluar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Potensi tersebut didukung dengan kekuatan demografi Kota Blitar yang terus mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,25%. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Kota Blitar sebesar 143.218 jiwa, maka pada tahun 2015 mencapai 146.155 jiwa. Berdasarkan data registrasi penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar, dari jumlah penduduk tersebut memiliki rasio jenis kelamin 0,997 dengan tingkat kepadatan penduduk Kota Blitar pada tahun 2015 sebesar 4.486 jiwa/km². Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW 2011-2030, Kawasan strategis Kota Blitar dibagi menjadi kawasan strategis yang meliputi: a) kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi; dan b) kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek sosialbudaya. Implikasi tantangannya: (1) harus mengembangkan industri kreatif, sektor jasa dan perdagangan; (2) harus menciptakan iklim yang kondusif dan ramah investasi; (3) mengembangkan Inovasi Daerah, aspek kelembagaan Iptek dan aspek infrastruktur inovasi; budaya inovasi; dan pengembangan kluster industri secara komprehensif dan kolaboratif; (4) sebagai daerah agraris dan pariwisata, bagaimana mensinergikan nilai global dan nilai budaya lokal daerah dalam optimalisasi potensi pariwisata; (5) menata kawasan yang berorientasi ekonomi perdagangan yang kompetitif, memberi kenyamanan bagi pelaku usaha atau investor untuk menambah lama tinggal (*length of stay*) di Kota Blitar.

b. Kondisi Demografi

Kota Blitar termasuk daerah dengan laju pertumbuhan yang cukup rendah di Provinsi Jawa Timur, dengan tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah, maka beberapa isu strategi kependudukan antara lain: memanfaatkan data kependudukan untuk perencanaan

persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna lahan/tanah serta perencanaan dan penganggaran pembangunan, mengantisipasi dampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah perkotaan, yang dapat beresiko pada kesehatan lingkungan dan persaingan akses fasilitas hidup.

c. Lingkungan Sosial Budaya.

Kota Blitar yang secara sosio kultural merupakan perpaduan antara pengaruh Jawa Timur yang dikenal pemberani dan budaya Jawa Tengah yang terkenal lembut dengan filosofinya yang kuat melahirkan tokoh-tokoh nasional yang dikenal memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme tinggi seperti Bung Karno, Suprijadi dan lain-lain. Semangat nasionalisme dan patriotisme inilah yang selama ini melandasi dan mewarnai setiap gerak kehidupan masyarakat Kota Blitar baik dalam pembangunan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bila modal sosio kultural ini tidak dipelihara dengan baik akan menimbulkan permasalahan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Gempuran budaya dan gaya hidup asing yang masuk melalui berbagai media terutama teknologi informasi. Jika tidak diantisipasi dengan baik dengan indoktrinasi jiwa patriotisme, semangat nasionalisme, nilai-nilai agama, budaya kegotongroyongan lewat berbagai kesempatan dan media seperti memasukkannya dalam kurikulum sekolah, maka dikhawatirkan nilai-nilai kearifan lokal tersebut akan bisa terkikis oleh gerusan budaya asing maupun kepentingan-kepentingan pragmatis sesaat.

4.2.2 Isu Strategis Eksternal

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Tantangan yang dihadapi Kota Blitar seperti kabupaten/kota lain dari kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi pembangunan daerah Kota Blitar adalah:

- (1) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif;
- (2) mengelola sumber daya aparatur menjadi lebih profesional, kompetitif, akuntabel;
- (3) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar secara efisien dan akuntabel;
- (4) tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel sangat dibutuhkan.

b. Keselarasan Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Kebijakan pengurangan subsidi energi BBM dan tarif Dasar listrik dari Pemerintah berdampak pada resiko inflasi, kerentanan kelompok hampir miskin, penentuan standar satuan harga belanja barang dan jasa, dan kenaikan belanja rutin. Efisiensi belanja rutin dan prioritas alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan wajib dasar menjadi tantangan perencanaan pagu anggaran tahun 2016-2021. Kebijakan moratorium PNS menantang pemerintah Kota Blitar untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan pencari kerja selama 5 tahun di luar sektor PNS. Kreativitas pemerintah Kota Blitar mendidik wirausaha muda menjadi tantangan berat. Diperlukan program-program inovatif untuk memfasilitasi angkatan pencari kerja dengan pihak swasta pemilik usaha.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 mengarahkan:

- (1) menjalankan reformasi birokrasi publik secara masif di semua sektor;
- (2) membuka ruang partisipasi publik lebih intensif;
- (3) membangun politik legislasi yang kuat: pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup.

RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, secara umum memberikan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Blitar untuk membuat perencanaan pembangunan 2016-2021 dengan memprioritaskan penataan kebijakan dan kelembagaan perangkat daerah yang bersih, demokratis, partisipatif dan akuntabel untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan nawacita yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, maka RPJMD Kota Blitar mengambil peran secara aktif dalam tiga aspek :

- 1) cita-cita kedua (2) memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- 2) cita-cita kelima (5) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Blitar melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dan
- 3) cita-cita keenam (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing produk lokal di pasaran Internasional.

c. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Tantangan dari pemberlakuan MEA pada tahun 2015 adalah kesiapan pemerintah Kota Blitar mempersiapkan mental dan ketrampilan hidup penduduk Kota Blitar menghadapi MEA, yaitu:

- (1) memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi untuk mencintai dan mendukung produk dalam negeri;
- (2) mengupayakan standarisasi dan sertifikasi ketrampilan yang dipersyaratkan untuk kompetisi pasar tenaga kerja;
- (3) meningkatkan arus investasi, mencetak eksportir keASEAN, pengiriman tenaga terampil ke ASEAN, dan peningkatan kunjungan wisatawan baik lokal/nasional/manca negara.

d. Agenda Post 2015

Kesepakatan global *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan perubahan iklim menantang pemerintah Kota Blitar menyusun perencanaan daerah tahun 2016-2021 memprioritaskan:

- (1) mengurangi secara drastis jumlah warga masyarakat Kemiskinan;
- (2) mengupayakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (pendidikan, kesehatan, pangandan gizi) dan kesejahteraan (pekerjaan, pendapatan);
- (3) menjaga keberlanjutan lingkungan hidup;
- (4) mengatur tata kelola pemeritaa yang baik;
- (5) kondisi masyarakat stabil dan kolaboratif.

4.2.3 Isu Strategis Kota Blitar 2016-2021

Berdasarkan hasil inventarisasi permasalahan pembangunan berdasarkan bidang-bidang dan hasil analisis diatas, dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) isu-isu strategis daerah yang menjadi prioritas penanganan oleh Pemerintah Kota Blitar selama kurun waktu tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- (1) Menjaga keberlanjutan dan keharmonisan hubungan antar pemeluk agama di Kota Blitar;**
- (2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terutama dari aspek pendidikan, pengetahuan dan keterampilan dalam persaingan Sumber Daya Manusia secara global;**
- (3) Peningkatan kualitas dan daya saing produk Kota Blitar untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan ekonomi global dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;**

- (4) **Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin tinggi yang didukung oleh pengarusutamaan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan;**
- (5) **Menurunnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang mencerminkan berkepribadian bangsa yang bersumber dari kearifan lokal sebagai dampak globalisasi;**
- (6) **Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelaksanaan *good governance* yang mencakup *transparansi* dan keterbukaan informasi publik, akuntabilitas publik, pelayanan publik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.**

Keenam isu strategis ini diharapkan akan menjadi isu strategis pembangunan daerah yang akan menjadi dasar kebijakan Pemerintah Kota Blitar dalam menyusun dan mengembangkan program-program prioritas pembangunan ke depan. Selanjutnya akan diuraikan isu strategis daerah Kota Blitar kurun waktu tahun 2016-2021 dengan penjabarannya berikut.

1). Menjaga Keberlanjutan dan Keharmonisan Hubungan Antar Pemeluk Agama di Kota Blitar

Sebagaimana diketahui bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Heterogenitas bangsa Indonesia adalah sesuatu yang tak terhindarkan dari adanya keanekaragaman suku bangsa yang berasal dari ribuan pulau yang tersebar dalam wilayah 33 provinsi. Sifat heterogen juga bersumber pada keragaman agama, dimana pemerintah mengakui adanya 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Kota Blitar sebagai bagian dari bangsa Indonesia tentunya tidak terlepas dari keheterogenan tersebut.

Sementara itu pengaruh globalisasi lewat informasi komunikasi yang semakin canggih, membuat bangsa Indonesia memiliki berbagai paham, persepsi dan pandangan yang berbeda sekaligus bertentangan. Dalam satu etnis dan satu agama, bisa terjadi perbedaan paham yang bisa meruncing menjadi konflik horisontal. Hampir setiap agama di Indonesia memiliki kelompok yang memiliki paham berbeda dan dalam satu etnis atau suku bisa terjadi berbagai kelompok dengan tradisi, perilaku dan cara hidup berbeda.

Kemajemukan tentu saja menimbulkan kerawanan akan konflik. Karena sebab yang sepele yang terjadi antar dua orang yang kebetulan berbeda agama dapat memicu konflik antar suku atau antar agama. Tetapi dalam bangsa majemuk seperti Indonesia, sebenarnya juga

terdapat potensi yang luar biasa. Ketika kebudayaan dari berbagai suku dikelola dengan baik akan menghasilkan khasanah budaya bangsa yang luar biasa. Ketika semua umat beragama dapat hidup berdampingan dengan semangat toleransi yang tinggi, tentu akan menghasilkan kehidupan yang indah, saling memberdayakan dan saling menghormati dalam kehidupan yang demokratis.

Peningkatan keberlanjutan dan keharmonisan hubungan antar pemeluk agama di Kota Blitar senantiasa terus dijaga melalui implementasi program dan kegiatan perangkat daerah bersama masyarakat dan pemeluk umat beragama, meskipun dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah terjadi “kasus SARA”. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan keadaan yang kondusif berkaitan dengan isu SARA terutama keagamaan dan kesatuan bangsa. Kondisi masyarakat yang kondusif merupakan bekal utama untuk membantu kelancaran pembangunan daerah.

2). Persaingan SDM Secara Global Menuntut Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Terutama dari Aspek Pendidikan, Pengetahuan dan Keterampilan

Tinggi rendahnya daya saing suatu daerah sangat tergantung dari kontribusi kualitas sumber daya penduduknya. Semakin tinggi kualitas sumber daya penduduk dari sisi kesehatan dan tingkat pendidikan, standarisasi dan sertifikasi keterampilan kerja semakin tinggi kontribusinya pada daya saing daerah.

Implementasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun baik bagi laki-laki dan perempuan secara adil dan setara sebagai bagian dari Program Indonesia Pintar melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan, dan memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal juga strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecakapan hidup kompetitif untuk meningkatkan peluang usaha dan pendapatan. Pendidikan PAUD masih perlu diperluas cakupannya untuk membantu kualitas pendidikan usia dini. Kualitas tenaga pendidik dengan kualifikasi yang tersertifikasi perlu dioptimalkan agar benar-benar mampu memberikan berkontribusi peningkatan kualitas pendidikan anak didik.

3). Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Kota Blitar Untuk Menghadapi Mea dan Ekonomi Global dengan Tetap Memperhatikan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Isu-isu dari bidang sosial budaya berkontribusi menyiapkan kewajiban memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, sebagai pilar kesejahteraan rakyat. Hak ekonomi menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggungjawab mencapai janji kesejahteraan. Pemerintah daerah, sebagai representasi negara, dapat menjalin kerjasama swasta untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memfasilitasi elemen-elemen masyarakat lokal dalam menggerakkan ekonomi rakyat untuk menciptakan pemerataan. Pertumbuhan dan pemerataan itu merupakan dua skema untuk membangun kemakmuran.

Daya saing daerah harus menjadi goal dari semua upaya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis dan akuntabel. Daya saing didefinisikan sebagai kondisi institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu daerah. Pilar pendukung daya saing yaitu: institusi, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pasar keuangan, kesiapan teknologi, pasar dan inovasi. Merujuk pilar pendukung sebagaimana diuraikan di atas, hal ini menunjukkan daya saing merupakan dampak pembangunan lintas sektor, mulai dari bidang pemerintahan umum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang fisik prasarana.

a). Bidang Pemerintahan Umum

Isu regulasi, iklim kebijakan daerah yang menjamin kepastian usaha dalam kompetisi sehat dan efisien, bersih dari ekonomi biaya tinggi. mencakup: (1) Sinkronisasi sistem informasi perizinan SKPD teknis dengan sistem informasi PTSP BPM PPT; (2) Pengembangan dan penyempurnaan Sistem informasi PTSP Online; (3) Pengembangan dan penyempurnaan Sistem informasi PTSP Online; (4) Kajian kebijakan yang pro investasi; (5) Kebijakan kerjasama antar daerah; (6) kebijakan yang mengatur pengembangan BUMD, kelembagaan ekonomi, Lembaga Pembiayaan bagi UMKMK dan pembentukan lembaga ekonomi kerakyatan, (7) kebijakan investasi, (8) sistem inovasi daerah (SIDa) yang berdaya saing.

b). Bidang Ekonomi

Isu strategisnya adalah kualitas dan daya saing produk Kota Blitar yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi MEA dan perkembangan ekonomi global menjadi ujung tombak daya saing daerah. Isu strategis daerah adalah perlunya optimalisasi pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan yang bertumpu pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan pengembangan ekonomi lokal. Hal ini dimulai dengan menumbuhkan jumlah wirausaha di kalangan muda yang berkelanjutan. Koperasi diharapkan menjadi lembaga penguat tumbuhnya usaha mikro para wirausahawan pemula. Oleh karena itu peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi aktif harus dikondisikan. Pertumbuhan usaha memerlukan penguatan kelembagaan, melalui pertumbuhan kluster UMKM. Pertumbuhan usaha mikro akan lebih cepat jika didukung oleh kemitraan/bapak angkat pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan menengah. Kemitraan dengan BUMN dan BUMD melalui program CSR (*Corporate Sosial responsibility*) perlu dioptimalkan supaya tepat sasaran dan berkelanjutan menumbuhkan berkembang UMKM, termasuk aksesibilitas UMKM terhadap lembaga keuangan/pembiayaan mikro.

Isu Industri kreatif dan sertifikasi/standarisasi pengembangan industry menjadi komponen kunci peningkatan daya saing daerah dan berujung pada peningkatan PDRB. Industri kreatif potensial dikembangkan di Kota Blitar mengingat posisi geoekonominya, dan ketergantungan bahan baku impor yang tinggi perlu dipecahkan alternatifnya. Perencanaan dan pengendalian kebijakan kemitraan Stakeholders (SKPD, lembaga swadaya masyarakat, dan perbankan) untuk pengembangan industri kreatif di Kota Blitar perlu dioptimalkan, untuk mendorong perluasan pemasaran sektor industri pengolahan (makanan dan minuman). Terkait posisi geoekonomi Kota Blitar, pengembangan industri Kreatif untuk mendukung daya saing pasar pariwisata perlu diprioritaskan. Hal yang mendesak dilakukan untuk peningkatan daya saing produk dan jasa adalah penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam rangka penerapan Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) kepada pelaku usaha dalam distribusi dan peredaran produk barang dan jasa. Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industri masih rendah. Keberhasilan dalam penanganan industri kreatif di Kota Blitar, diharapkan dapat memberikan kontribusi

ke pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019, melalui indikator sumbangan sektor industri ke PDRB Nasional dan juga penambahan jumlah industri kreatif menengah dan besar.

Isu ramah investasi berimplikasi pada ketersediaan sistem informasi layanan investasi yang terintegrasi dan ramah pasar berbasis pada keunggulan daerah (*core competence*) juga urgen untuk penguatan daya saing daerah.

Isu pasar dan komoditas, sebagai penopang daya saing daerah. Oleh karena itu revitalisasi dan rehabilitasi pasar tradisional, ketersediaan stok komoditas pangan, dan terjaganya pengendalian harga merupakan isu strategis.

Isu pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga menjadi strategis, karena kehadiran PKL adalah konsekuensi dari pengembangan ekonomi daerah.

Isu Kemiskinan: Jaminan dan Bantuan Ekonomi bagi Kelompok Miskin. Menantang bagaimana meningkatkan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif. Indikator yang akan dicapai dalam kelompok ini, mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: (i) RTM memiliki ketrampilan, (ii) RTM mampu bekerja, dan (iii) RTM mampu berwirausaha secara mandiri. Targetnya merujuk pada RPJMN, terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekitar 4%-5% pada tahun 2019. Program-program karitatif perlu selektif dalam implementasinya, seperti subsidi Pasar Murah Sembako, Program Raskin, dsb.

Isu Ketahanan Pangan dan Energi, tantangannya bagaimanameningkatkan produktivitas sumber pangan masyarakat, mulai dari produktivitas hasil pertanian, peternakan, perikanan darat yang ditekankan pada diversifikasi pengolahan hasil produksi berbasis teknologi tepat. Aspek yang dipenuhi: (1) ketersediaan, kecukupan, stabilitas, aksesibilitas, kualitas, kuantitas, keterjangkauan serta keamanan pangan secara berkesinambungan; (2) mengamankan stok cadangan pangan dan pengendalian harga daerah.

Indikasi ketahanan pangan mencakup produksi dalam negeri dari hasil tanaman padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi dan produksi perikanan. Isu strategis bidang energi adalah ketepatan distribusi dan stabilitas harga bahan bakar/energi, terutama LPG 3 kg, termasuk upaya penggalakan penghematan energi serta inisiasi penggalian sumber-sumber energi alternatif.

Isu ketenagakerjaan, tantangan angka pengangguran terbuka, tantangan menciptakan lapangan kerja, mata pencaharian berkelanjutan dan pertumbuhan berkeadilan melalui pengurangan jumlah kaum muda yang menganggur. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan pendidikan non formal dalam rangka membekali angkatan kerja dengan keahlian di bidangnya guna menekan angka pengangguran terbuka di masa mendatang.

c). *Isu Bidang Infrastruktur dan Lingkungan*

Isu kecukupan infrastruktur penunjang usaha dan kecukupan pemanfaatan jaringan teknologi komunikasi informasi di suatu daerah akan meningkatkan peluang daya saingnya. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi antar daerah dan pusat dan wilayah pelosok untuk mendukung sektor industri kreatif dan sektor pariwisata dan kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional serta pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung daerah perkotaan sebagai pusat dan simpul utama kegiatan perdagangan barang sebagai pintu gerbang nasional. Alih fungsi lahan dan pengendalian ruang pada kawasan beridentitas budaya lokal menjadi tantangan tersendiri Pemerintah Kota Blitar.

Isu karakter dan identitas daerah, penguatan karakter budaya kawasan dengan cara mengintegrasikan pembangunan karakter fisik lingkungan dengan pengembangan ekonomi wilayah dan pengembangan pariwisata nilai dan budaya berbasis kultural dan religius dalam memperkuat nilai dan karakter masyarakat Kota Blitar. Salah satu destinasi wisata nasional adalah wisata religi dan kebangsaan yaitu makam Bung Karno sang Proklamator. Selain Makam Proklamator, destinasi wisata lain di Kota Blitar adalah Perpustakaan Bung Karno, Istana Gebang, *Water Park* Sumber Udel dan wisata cagar budaya bersejarah lainnya, perlu dijaga keberadaanya dan kondisinya sebagai warisan budaya daerah. Perlu juga dikembangkan kampung tradisional dan potensi ekonomi lokal seperti batik, kuliner, budaya dan adat istiadat menjadi kekuatan besar Kota Blitar untuk bersaing dengan daerah lain.

Isu strategis lingkungan hidup adalah bagaimana mengatasi degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan iklim di Kota Blitar. Peningkatan kepadatan bangunan akibat penambahan penduduk berimplikasi pada

berkurangnya daerah-daerah resapan air dan krisis air tanah. Kondisi sistem drainase yang buruk di perkotaan memperparah terjadinya genangan dan banjir yang dapat membawa korban jiwa dan harta serta berbagai wabah penyakit. Masalah eksploitasi energi, mengakibatkan pemanasan global, perubahan iklim global, dan banjir cenderung meningkat. Dari ranah isu regulasi, perlu penegasan Implementasi Kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban, dan kebijakan pro lingkungan hidup yang berkelanjutan. Disamping itu, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat, dengan menggeser paradigma dari penanggulangan bencana menuju pengelolaan *mitigasi* bencana.

Ruang Terbuka Hijau yang memenuhi persyaratan ekologi, sosial dan ekonomi, menjadi isu strategis karena merupakan upaya perlindungan konservasi sumber daya alam, aktivitas interaksi sosial dan ekonomi. Ruang Terbuka Hijau di beberapa wilayah juga akan menyerap emisi gas kendaraan bermotor dan sebagai resapan air akibat curah hujan di musim kemarau.

Terkait isu persampahan adalah bagaimana mewujudkan pengurangan sampah menuju TPA sampai mencapai konsep *Zero Waste*. Tantangan yang mendesak diselesaikan antara lain: (1) pemenuhan rasio ketersediaan tempat pembuangan sampah (TPS) berdasarkan satuan jumlah penduduk; (2) penanganan Tempat Pembuangan Akhir efektif; (3) Pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, reuse, dan Recycle*) belum maksimal dilakukan di kawasan permukiman; (4) Program Kampung Iklim dan program pro lingkungan seperti *Car Free Day* setiap hari Minggu. Untuk industri kreatif, yang ramah lingkungan, mengembangkan kelompok kreasi usaha rumah tangga menghasilkan karya dari program pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, reuse, dan Recycle*) untuk menambah penghasilan keluarga dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

d). Isu Bidang Sosial Budaya

Isu-isu dari bidang sosial budaya berkontribusi menyiapkan kualitas sumber daya manusia Kota Blitar untuk meraih keunggulan dalam persaingan pasar, termasuk perkembangan inovasi daerah. Semakin banyak inovasi daerah juga semakin tinggi potensi daya saing daerah.

Isu budaya dan pariwisata. Meraih keunggulan dari bidang sosial budaya, juga melalui kekayaan seni budaya daerah sebagai komoditas jasa. Hal ini menantang bagaimana pengelolaan kekayaan budaya daerah, dan pemasaran wisata seni budaya di tingkat regional, nasional dan internasional melalui program kemitraan antar pelaku pariwisata serta melibatkan pemuda. Prioritas untuk mengembangkan industri kreatif pendukung daya saing pasar pariwisata. Dari isu kepemudaan dan olahraga, sinergitas penyelenggaraan event budaya dan olah raga dengan pengembangan ekonomi kreatif pemuda perlu untuk ditingkatkan, sebagai ajang promosi daerah. Peningkatan sarana dan prasarana promosi produk lokal yang lengkap, menjadi modal bagi event-event nasional diselenggarakan di Kota Blitar. Jika hal ini terjadi maka memberi peluang peningkatan pemasaran produk pertanian dan turunannya dari Kota Blitar.

4). Tuntutan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Semakin Tinggi dan Didukung oleh Pengarusutamaan Pelayanan Kesehatan dalam Kebijakan Pembangunan di Tingkat Nasional

Isu Kesehatan, yang krusial adalah (1) Pengurangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), (2) pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Demam Berdarah, TB Paru dan HIV/AIDS), (3) peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang dapat dijangkau masyarakat tidak mampu; (4) mengotimalkan pelayanan RSUD yang sudah berstatus BLUD.

Isu Fisik dan lingkungan, terutama menyangkut degradasi lingkungan meliputi isu kawasan kumuh, rumah tidak layak huni, alih fungsi lahan, rasio pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Kemiskinan perkotaan (*urban Poverty*) di beberapa wilayah diantaranya ditandai oleh adanya permukiman yang tidak layak huni (*slums*) dan permukiman informal yang menempati lahan yang bukan peruntukannya (*squatter settlements*) dan terbatasnya akses terhadap pemenuhan lahan hunian, rumah yang layak dan sehat, infrastruktur dan sarana-prasarana perkotaan. Bagaimana memenuhi Blitar untuk menuju Blitar Bebas Kumuh menjadi isu strategis. Indikasi sasarannya menurunkan jumlah rumah tangga, meningkatkan cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan, meningkatkan cakupan rumah tangga yang dapat mengakses air bersih dan sanitasi dasar, dan meningkatkan pengelolaan sampah masyarakat.

Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan tidak hanya faktor alam, namun juga besarnya populasi manusia (laju pertumbuhan penduduk). Pertumbuhan penduduk memiliki arti pertumbuhan kawasan urban, kebutuhan tambahan produksi pangan dan peningkatan kebutuhan energi. Masing-masing kebutuhan berimplikasi pada lingkungan, mulai dari pencemaran lingkungan hingga penyakit-penyakit menular karena lingkungan. Perilaku masyarakat masyarakat untuk hidup sehat dan tertib mendukung lingkungan sehat. Misalnya: gerakan membuang sampah pada tempat yang tepat, membuang limbah pada tempat yang tepat sampai implementasi pendidikan kesehatan lingkungan ke sekolah

Isu Kesejahteraan Sosial. Penguatan kebijakan pelayanan bagi PMKS secara terpadu dan lintas sektoral, untuk meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS. Rasio jumlah dan kompetensi tenaga pengelola serta pelaksana program KB di Kota Blitar diperlukan untuk memperluas cakupan peserta Keluarga Berencana dan kesehatan seksual dan reproduksi, menuju keluarga sejahtera di Kota Blitar.

5). Menurunnya Nilai-Nilai Sosial yang Berkepribadian Bangsa yang Bersumber dari Kearifan Lokal sebagai Dampak Teknologi informasi dan Globalisasi

Globalisasi mengarah kepada dialog dan persaingan antar ideologi yang mengakibatkan pergeseran nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme bangsa termasuk Indonesia. Kesadaran akan satu kesatuan masyarakat, bangsa dan negara, cita-cita serta kebhinekaan dalam era global sekarang ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu jati diri bangsa dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan sebagai roh utamanya perlu selalu dipupuk dan dibina. Selain itu perlu didasari pemahaman akan kearifan lokal yang kuat. Kearifan lokal merupakan salah satu pilar bagi terbentuknya wawasan kebangsaan. Nasionalisme dan kearifan lokal akan menjadi sebuah dorongan yang kuat apabila didukung oleh penguatan atas nilai-nilai keagamaan. Sinergitas, integritas nilai-nilai kebangsaan, kearifan lokal dan agama akan mampu mengikis radikalisme, terorisme dan chauvinisme. Kota Blitar dengan ciri khususnya, diharapkan menjadi salah satu daerah yang mampu memompakan semangat untuk kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

Isu perlindungan masyarakat, menantang bagaimana mengantisipasi bencana sosial yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror. Isu ini mengingatkan pentingnya kondisi daerah yang tertib, aman, tidak banyak gangguan masalah sosial, akan menciptakan kondisi daerah yang ramah investor, sehingga meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, membangun wawasan kebangsaan dari semua latar belakang kelompok masyarakat untuk mencegah timbulnya bencana sosial sangat penting.

Isu Perempuan dan Anak, menantang upaya (1) mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik; (2) peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan melalui sistem perlindungan dan kesejahteraan sosial terpadu keluarga, sebagai bagian untuk mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, koordinasi lintas sektoral, dan partisipasi masyarakat.

6). Tuntutan Masyarakat yang Semakin Tinggi Terhadap Pelaksanaan Good Governance yang Mencakup Keterbukaan Informasi Publik, Akuntabilitas Publik, Pelayanan Publik dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan sebagai proses memformulasi dan melaksanakan kebijakan, peraturan serta prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi antara eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi(bisnis). Birokrasi sebagai bagian dari aktor tata kelola pemerintahan. Isu tata kelola pemerintahan adalah isu yang strategis karena menakar efektivitas kolaborasi semua elemen yaitu pemerintah (eksekutif), DPRD, masyarakat sipil, dan masyarakat dunia usaha. Pemerintah Kota Blitar sudah melakukan langkah maju dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi sebagai kewajiban sekaligus komitmen Pemerintah dan atau/Pemerintah Kota Blitar dalam menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*).

a). Bidang Pemerintahan Umum

Isu penataan struktur organisasi perangkat daerah dan Kepegawaian menjadi salah satu isu penting di bidang ini. Isu Bidang pemerintahan umum perlu penyediaan regulasi dan pengendalian implementasinya terkait penataan organisasi perangkat daerah dan kepegawaian. Sedangkan, penempatan jabatan harus melalui *assesment*

center, sampai dengan kebijakan lelang jabatan secara terbuka untuk jabatan tertentu. Hal ini sangat penting dalam proses reformasi birokrasi dan anti korupsi dan budaya pelayanan publik berkualitas.

Isu Kemampuan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah secara efisien dan akuntabel menjadi strategis untuk memenuhi (i) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pelayanan wajib dasar dan efisiensi belanja. (ii) Penertiban Aset daerah; (iii) Transparansi dan Akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Isu Regulasi. Ketersediaan regulasi/kebijakan daerah yang tepat adalah berbasis akurasi data dan diimplementasikan berbasis sanksi yang jelas atas segala bentuk pelanggaran/pengabaian. Kota Blitar kurun 2016-2021 memerlukan: (1) Kebijakan yang memberi insentif dan disinsentif untuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah dan penegasan pelaksanaannya, mengatur aset daerah dan pengendalian konflik hak atas tanah; (2) Kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; (3) Inovasi Daerah (SIDa); (4) tata guna lahan dan ruang; (5) konservasi dan pengembangan kekayaan sejarah, dan seni budaya daerah; (6) partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mengungkit daya saing daerah; (7) Kebijakan tentang jaminan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat, termasuk kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah; (8) Kebijakan tentang sistem akuntabilitas kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; (9) Kebijakan tentang partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam sistem *pembangunan daerah* (10) Kebijakan pelaksanaan peraturanperundangan yang lebih tinggi lainnya.

Isu tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelaksanaan Good Governance menjadi isu utama. Good Governance yang dimaksud disini meliputi keterbukaan informasi publik, akuntabilitas publik, pelayanan publik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Kota Blitar sudah mewajibkan seluruh unit pelayanan untuk menyusun dan menjalankan instrumen pelayanan publik, seperti standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan publik, sehingga, hak-hak masyarakat lebih terjamin.

Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis dan akuntabel akan semakin kuat jika didukung oleh hubungan kemitraan antara pemerintah dan DPRD yang efektif. Optimalisasi peran DPRD dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat menjadi jembatan di antara fungsi regulasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dimiliki.

Isu strategis perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan, adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib data administrasi kependudukan. Tidak tertibnya penduduk dalam mengisi data kependudukan dan pemilikan dokumen kependudukan, berdampak pada rendahnya kualitas data informasi kependudukan. Pembangunan wilayah dilakukan untuk kesejahteraan penduduk wilayah tersebut, karenanya harus dikondisikan pemanfaatan data dan informasi kependudukan sebagai dasar analisis program dan kegiatan SKPD. Perlu digalakkan pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan lintas sektor bagi upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk perlu terus ditingkatkan.

Isu Kerjasama antar daerah (KAD) dan dunia privat bersifat strategis, karena KAD sarana untuk menyerasikan dan mensinergikan potensi antar daerah. Kerjasama dengan pihak ketiga penting untuk meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan dunia usaha berperan strategis untuk meningkatkan daya saing daerah. Kerjasama antar daerah juga diperlukan untuk memecahkan masalah lingkungan dan sumber daya publik, seperti persampahan dan air. Kerjasama dengan dunia usaha (*privat*) menjadi isu penting karena adanya kebutuhan transfer ketrampilan, teknologi, dan modal dari dunia usaha. Selama ini bentuk kemitraan dengan dunia usaha melalui CSR (*Corporate Sosial Responsibility*).

b). Bidang Sosial Budaya

Isu pengelolaan kearsipan dalam bentuk *E-government* menjadi kebutuhan bagi tata kelola pemerintahan dalam rangka menciptakan budaya pelayanan publik yang berkualitas sekaligus mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah.

c). Bidang Insfrastruktur

Isu pendataan informasi pembangunan dan penataan pengendalian ruang menjadi isu strategis, karena berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis akurasi data Rencana Tata Ruang wilayah pusat perkotaan sampai tingkat kedetilan tertentu, data sebaran kemiskinan berbasis RT/RW; sebaran kawasan tidak layak huni, dan sejenisnya perlu dipublikasikan secara optimal dengan teknologi informasi, misalnya melalui peta analog dan serta digital. Publikasi peta tata ruang sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Review kebijakan keterpaduan antar dokumen perencanaan yaitu; RTRW Kota Blitar, Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum Kota Blitar, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman melalui sinergi PNPM Perkotaan di Kota Blitar.

Isu aparatur dan transparansi informasi, pembinaan aparatur perangkat daerah yang berintegritas dan anti korupsi menjadi isu strategis. Mengoptimalkan semua fungsi media dan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet dalam meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat dalam proses pengelolaan penganggaran dan pelayanan publik.

B A B V

VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN

5.1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016-2021 merupakan penjabaran periode ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025. Pada periode perencanaan jangka menengah ketiga ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinamika ekonomi pada periode perencanaan sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja dan kegiatan ekonomi yang mengarah pada penguatan ekonomi kreatif. Pada tahapan ini juga ditandai dengan semakin dominannya peran pengetahuan dan penguasaan teknologi, serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya, sehingga kemajuan yang dicapai menjadikan Kota Blitar lebih berdaya saing.

Berpedoman pada arah pembangunan daerah Kota Blitar sebagaimana termuat dalam RPJPD Kota Blitar tahun 2005-2025 tersebut dan berbagai capaian target pembangunan periode tahun 2010-2015 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Kota Blitar lima tahun kedepan, serta berpedoman pada visi dan misi, Walikota dan Wakil Walikota Blitar masa bhakti tahun 2016-2021, maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis menuju Kota Blitar lebih baik, dan lebih sejahtera.

Berdasarkan paparan visi Walikota dan Wakil Walikota Blitar periode tahun 2016-2021 pada saat kampanye, memperhatikan keberlanjutan tahapan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJPD Kota Blitar tahun 2005-2025, maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah :

**“Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui
APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021”**

Adapun dengan penjelasan dari visi tersebut sebagai berikut :

- **Kota Blitar semakin Sejahtera**

Merupakan peningkatan dari kondisi sejahtera, dimana sejahtera merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah. Peningkatan kondisi sejahtera yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan dan juga tata pemerintahan yang aman, tenteram, rukun dan damai. Disamping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas.

Hal ini ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, serta semakin kondusifnya lingkungan kehidupan sosial masyarakat, yang kesemuanya harus bisa dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mencermati realitas masyarakat Kota Blitar yang majemuk, baik dari segi agama, suku bangsa, status sosial ekonomi, dan berbagai latar belakang lainnya diperlukan *spirit* untuk membangun kohesivitas sosial berupa semboyan “*One For All-All For One*”, satu untuk semua, semua untuk satu. Semboyan ini memiliki makna Kota Blitar memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, dan pada saat yang bersamaan seluruh masyarakat Kota Blitar berperan aktif dalam membangun Kota Blitar.

- **APBD Pro Rakyat** mengandung makna bahwa APBD Kota Blitar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan “**Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021**” tersebut, ditempuh melalui semboyan “*One For All All For One*” yang dimaknai sebagai satu kesatuan, satu untuk semua, semua untuk satu, yang mengandung pengertian bahwa Kota Blitar memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, dan pada saat yang bersamaan seluruh masyarakat Kota Blitar berperan aktif dalam membangun Kota Blitar.

Sebagaimana rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, maka ditetapkan 6 (enam) misi Kota Blitar periode 2016 – 2021 sebagai berikut :

Misi Pertama: Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan aktualisasi religius masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat, yang didasarkan pada fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika serta diarahkan pada terwujudnya suatu tatanan sosial masyarakat yang memiliki karakter Religius.

Misi Kedua: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi.

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan pemenuhan dan pemerataan layanan dasar masyarakat dalam sistem pendidikan yang bermutu, terjangkau dan gratis untuk menghasilkan SDM yang kreatif, inovatif, disiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi Ketiga: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing daerah, berorientasi pada ekonomi kreatif dan pariwisata melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan koperasi dan usaha mikro. Disamping itu, pada misi ini juga mengarah pada peningkatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan perdagangan serta peningkatan kontribusi sektor pariwisata yang berdaya saing yang didukung oleh upaya pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal. Termasuk dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi disini mencakup peningkatan kinerja penanaman modal dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta pembangunan yang ramah lingkungan.

Misi Keempat: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berbasis pada Sistem Pelayanan Berkualitas dan Partisipatif

Misi keempat ini diarahkan untuk meningkatkan perwujudan kesejahteraan, melalui peningkatan dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus diimbangi oleh kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat mulai dari lingkungan terkecil yaitu rumah tangga atau keluarga, tetangga sampai dengan lingkungan perkotaan.

Misi Kelima: Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan harmonisasi sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang dilingkupi oleh semangat Rukun Agawe Santoso sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Terciptanya harmoni sosial yang merupakan upaya merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat.

Misi Keenam: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional

Misi keenam RPJMD Kota Blitar ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 melalui keenam misi yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.1
TUJUAN RPJMD KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN TAHUN 2021
Misi I : Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Bermasyarakat		
1. Meningkatkan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	80
Misi II : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Cerdas Dan Berdaya Saing Tinggi		
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,78
Misi III : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Berorientasi Pada Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan		
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi	5,87%
	2. Nilai PDRB perkapita ADHB (Rp. 000)	51,594.19
	3. Nilai PDRB perkapita ADHK (Rp. 000)	35,777.82
2. Memantapkan pengembangan industri pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	Nilai kontribusi pariwisata terhadap PDRB (Rp. 000)	387,614.51
3. Meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	1. Angka kemiskinan	6,28%
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,5%
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68
	2. Persentase infrastruktur dalam kondisi baik.	95%
Misi IV : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berbasis Sistem Pelayanan Berkualitas Dan Partisipatif		
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,82
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman yang sehat dan layak	Persentase rumah layak huni	98,85%
Misi V : Meningkatkan Keharmonisan Sosial Dengan Semangat Rukun Agawe Santoso		
1. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	Persentase kasus kriminalitas yang tertangani	55,27%

Misi VI : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Profesional		
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik	1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	70 Sangat Baik

Sedangkan keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET INDIKATOR KINERJA				
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MENINGKATKAN AKTUALISASI NILAI-NILAI RELIGIUS DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	Meningkatkan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	1. Meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama	Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Meningkatnya kemakmuran tempat ibadah	1. Persentase tempat ibadah aktif	55%	62%	70%	78%	83%	92%	100%
				2. Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	1:86	1:86	1:85	1:84	1:83	1:82	1:80
MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG CERDAS DAN BERDAYA SAING TINGGI	Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat	Indeks Pendidikan	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	9.87	9.96	10.05	10.14	10.23	10.32	10.41
				2. Angka Partisipasi Murni (SD/MI/ Paket A, SMP/MTs/ Paket B)							
				- Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	95,89	96,28	96,47	96.66	96.85	97.04	97,23
				- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B	90,31	92,33	93,52	94,71	95,92	97,14	98,37
				3. Angka melanjutkan SD ke SMP	92,21	92,57	92,83	94,36	96,82	98,12	100
				4. Angka melanjutkan SMP ke SMA/K	92,32	92,78	93,71	95,17	97,83	99,53	100

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET INDIKATOR KINERJA				
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5. Angka rata-rata UN/USBN SD	7,01	7,57	7,87	8,17	8,47	8,77	9,07
				6. Angka rata-rata UN/USBN SMP	7,67	7,86	7,94	8,02	8,1	8,18	8,26
			2. Meningkatnya minat baca masyarakat	Indeks Minat Baca	-	-	40	42	44	46	48
			3. Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas pemuda dan olahraga	1. Persentase organisasi kepemudaan aktif	NA	50%	50%	58%	58%	66%	66%
				2. Persentase peningkatan prestasi olahraga	NA	50%	50%	58%	58%	66%	66%
MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI YANG BERORIENTASI PADA INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatnya kontribusi Usaha Mikro terhadap perekonomian 2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Persentase Peningkatan PDRB Usaha Mikro	177.564 juta rupiah	-	15.84% (238.262 juta)	15.84% (275.997 juta)	15.84% (319.709 juta)	15.84% (370.343 juta)	15.84% (428.997 juta)
		2. Nilai PDRB perkapita ADHB (Rp. 000)		1. Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,66%	11,44%	11%	11.2%	11.3%	11.4%	11.5%
		3. Nilai PDRB perkapita ADHK (Rp. 000)		2. Persentase Peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDRB	12,39%	11,36%	11,5%	11,55%	11,6%	11,65%	11,7%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET INDIKATOR KINERJA				
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi (Miliar Rupiah)	177.665	160.77	160.77	163.20	164.80	166.40	166.67
			5. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1. Skor PPH Ketersediaan	79.91	80.4	81	82	83	84	85
				2. Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Konsumsi	NA	81.7	82	83	84	85	86
	2. Memantapkan pengembangan industri pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	Nilai kontribusi pariwisata terhadap PDRB	1. Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata	1. Persentase peningkatan nilai PDRB sektor hotel dan restaurant	4.987 juta rupiah	13%	20%	30%	40%	50%	60%
				2. Persentase Peningkatan pelaku ekonomi kreatif unggulan	1.162 pelaku	3%	4%	4%	4%	4%	4%
				3. Persentase peningkatan jumlah wisatawan	2.97 % (2,804,24)	3.40%	5.20%	6.60%	7.70%	8.60%	9.20%
			2. Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai upaya mewujudkan kearifan lokal yang berwawasan kebangsaan	Prosentase warisan budaya yang dilestarikan	65%	65%	75%	75%	75%	75%	75%
	3. Meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	1. Angka Kemiskinan	1. Meningkatnya pemerataan dan kesejahteraan	Indeks Gini	0.36	0.33	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka	2. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71.46	72	72,55	73.1	73.65	74.2	74.76

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET INDIKATOR KINERJA				
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98.23	-	98.23	98.23	98.23	98.23	98.24
				2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67.57	67.57	67.57	67.57	67.57	67.57	67.58
	4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sumber Daya Alam	1. Indeks Tutupan Vegetasi	41.13	41.13	41.5	41.5	41.6	41.6	41.7
				2. Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ eq)	NA	208,262	208,031	207,801	207,571	207,111	206,651
				3. Prosentase Mata Air yang Berfungsi	96	96	96	96	96	96	96
				4. Predikat Pengelolaan Lingkungan	Adipura	Adipura Buana	Adipura Buana	Adipura Buana	Adipura Buana	Adipura Kirana	Adipura Kirana
				5. Indeks Pencemaran Air	50	45	53	54	55	56	57
				6. Indeks Pencemaran Udara	88.31	99	98	98	98	99	99
		2. Persentase infrastruktur dalam kondisi baik.	1. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	78,22	79,43	79.60	79.80	80.00	80.20	80.40
			2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	75	77.75	80.5	83.75	87	89.75	93

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET INDIKATOR KINERJA				
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERBASIS SISTEM PELAYANAN BERKUALITAS DAN PARTISIPATIF	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sektor Kesehatan	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Angka Usia Harapan Hidup	73.29	73.59	73.82	74.05	74.28	74.51	74.65
				2. Angka Kematian Ibu (1/100.000 Kelahiran Hidup)	66.27	236,18	188,94	188,94	141,71	141,71	94,50
				3. Angka Kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (AKB)	8,3	9,92	8,88	8,68	8,48	8,28	8,08
			2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSD Mardi Waluyo	75,70	77,14	77,14	77,14	77,50	77,50	78
			3. Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	6,3	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
	2. Meningkatkan kualitas infra-struktur permukiman yang sehat dan layak	Persentase rumah layak huni	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi sektor air limbah dan sampah	1. Persentase Rumah Tangga terlayani IPAL Komunal	4.7%	4.9%	5.5%	5.6%	5.6%	5.7%	5.8%
				2. Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan	90%	93.49%	93.8%	94%	94.4%	94.6%	95%
			2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	1. Persentase kawasan permukiman dalam kondisi baik	NA	NA	84%	85%	86%	87%	88%
				2. Persentase penurunan backlog perumahan	NA	NA	2%	4%	6%	8%	10%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET INDIKATOR KINERJA				
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MENINGKATKAN KEHARMONISAN SOSIAL DENGAN SEMANGAT RUKUN AGAWE SANTOSO	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	Prosentase kasus kriminalitas yang tertangani	1. Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	22,39%	21,21%	18,00%	8,97%	3,98%	1,53%	0.67%
			2. Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman.	Indeks Demokrasi	NA	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6
			3. Menurunnya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN PROFESIONAL	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik	1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kota Blitar	C	B	B	BB	BB	BB	A
				2. Nilai LPPD Kota Blitar	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Persentase PD tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	10%	25%	50%	75%	100%	100%	100%
			3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase PD dengan kualitas perencanaan BAIK	60	80	80	100	100	100	100

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET INDIKATOR KINERJA				
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	NA	NA	70	73	75	78	80
			5. Meningkatnya penerapan e-Governance	Prosentase penerapan Layanan Pemerintahan dan layanan Publik berbasis TIK yang terintegrasi	22	24	27	31	42	58	73
			6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	1. Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	15.74%	15.79%	15.84%	15.90%	15.95%	16%	16%
				2. Persentase PD yang menyusun dokumen keuangan daerah tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				3. Persentase PD tertib pengelolaan aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			7. Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas /kinerja DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	NA	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			8. Meningkatnya tata kearsipan pemerintah daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	NA	28,29%	41,55%	54,88%	68,22%	81,55%	100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET INDIKATOR KINERJA				
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			10. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perizinan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			11. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

B A B VI

STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif yang berisikan upaya strategis dan langkah-langkah konkret Pemerintah Kota Blitar dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021. Melalui pendekatan komprehensif ini, strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam menjalankan program perangkat daerah. Dalam perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan daerah, tetapi juga segala program-program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen serta pemanfaatan teknologi informasi.

6.1 Strategi

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Blitar “Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021”, maka strategi yang akan dilaksanakan mengedepankan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016–2021, sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Guna mempercepat pencapaian misi pertama “Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat”, strategi yang dipilih Pemerintah Kota Blitar adalah:

1. Memperkuat kerukunan umat beragama
2. Meningkatkan fasilitasi dan mendorong partisipasi masyarakat

Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian misi kedua “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi” strategi yang dipilih Pemerintah Kota Blitar adalah :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan
2. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat
3. Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga

Misi Ketiga : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian misi ketiga “Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan” strategi yang dipilih Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro
2. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan perdagangan
3. Mengembangkan sektor industri rumah tangga dan kecil
4. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif
5. Meningkatkan ketahanan pangan daerah
6. Mengembangkan ekonomi kreatif
7. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat
8. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
9. Meningkatkan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan daerah
10. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah
11. Meningkatkan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup secara terpadu
12. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam
13. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan
14. Meningkatkan kualitas layanan transportasi

Misi Keempat : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berbasis pada Sistem Pelayanan Berkualitas dan Partisipatif

Dalam rangka mewujudkan pencapaian misi keempat “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berbasis pada Sistem Pelayanan Berkualitas dan Partisipatif” strategi yang dipilih Pemerintah Kota Blitar adalah :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan cakupan keluarga berencana dan sejahtera
4. Meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi sehat
5. Meningkatkan akses masyarakat mendapatkan permukiman layak

Misi Kelima : Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian misi kelima “Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso” strategi yang dipilih Pemerintah Kota Blitar adalah :

1. Meningkatkan penegakan Perda
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kenyamanan kota
3. Meningkatkan peran serta partai politik dan organisasi kemasyarakatan
4. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak
5. Meningkatkan penguatan budaya dan kearifan lokal

Misi Keenam : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional

Dalam rangka mewujudkan pencapaian misi keenam “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional” strategi yang dipilih Pemerintah Kota Blitar adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik
3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatnya profesionalisme ASN
5. Meningkatnya penerapan e-Governance
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah
7. Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD
8. Meningkatkan tata kearsipan pemerintah daerah
9. Meningkatnya kualitas pelayanan public di bidang kependudukan dan catatan sipil
10. Meningkatnya kualitas pelayanan public di bidang pelayanan perizinan
11. Meningkatnya kualitas pelayanan public di bidang pelayanan kecamatan

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih Pemerintah Kota Blitar agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sampai akhir tahun RPJMD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kota Blitar merupakan fokus/tema pembangunan setiap tahunnya selama akhir tahun RPJMD. Pentahapan dan fokus/tema ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, berkaitan dengan pengaturan waktu dan penganggarannya. Penekanan fokus/tema dalam setiap tahunnya selama akhir periode RPJMD, memiliki kesinambungan antar periode/tahun dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah Kebijakan dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 setiap tahunnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2017)

Tahun Pertama pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2016-2021 merupakan tahun Pemantapan Ekonomi Kreatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah pada 3 (tiga) program prioritas yaitu peningkatan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Masih dalam kerangka Pemantapan Ekonomi Kreatif, maka pada tahun 2017 program-program pembangunan daerah lebih diarahkan pada peningkatan infrastruktur publik, sarana prasarana, teknologi informasi, investasi, industri, UMKM, perdagangan, sosial budaya, kepariwisataan, pertanian, dan perikanan.

Disamping itu, sebagai bagian dari kelanjutan pembangunan tahun sebelumnya, maka penanganan permasalahan dan isu -isu strategis pembangunan daerah seperti pengembangan dan peningkatan daya saing produk-produk ekonomi lokal, peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan, kualitas dan pemerataan infrastruktur kota, kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkualitas terus dilaksanakan secara konsisten dan memastikan adanya perubahan kearah yang lebih baik.

Peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang masalah sosial serta pemberdayaan masyarakat terus dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap mekanisme pelayanan secara terpadu yang terkoniksitas dengan layanan pemerintahan lainnya. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional, pelayanan publik dan penataan administrasi pemerintahan yang lebih baik terus

dilakukan agar reformasi birokrasi memberikan hasil nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.

Selain terus melakukan upaya penanganan diatas, pada tahun kedua pertama pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2016–2021 diarahkan juga pada peningkatan kesadaran warga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, peningkatan kualitas moral dan kehidupan keagamaan serta pengembangan budaya lokal. Upaya untuk meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan perlu terus ditingkatkan dengan peningkatan pelayanan statistik, kearsipan dan perpustakaan, administrasi kependudukan dan pertanahan. Sistem inovasi daerah akan diterapkan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2018)

Tahun 2018 sebagai kedua RPJMD Kota Blitar 2016–2021 merupakan **tahap penguatan ekonomi kreatif** untuk mencapai kondisi pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar pada tahun 2017 sesuai dengan amanat RPJPD Kota Blitar. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun kedua difokuskan pada pengembangan piranti pendukung ekonomi kreatif yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar. Pembangunan tahun kedua dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah, pengembangan ekonomi lokal, penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan dan pemantapan penyediaan infrastruktur kota.

Pada tahun kedua ini, Pemerintah Kota Blitar menekankan pada penciptaan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Penguatan ekonomi kreatif yang berbasis pada sumber daya lokal diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata di lapangan terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat dapat diukur secara berdasarkan indikator pendidikan dan kesehatan yang terus membaik. Pengembangan kinerja pembangunan infrastruktur kota menunjukkan hasil yang dapat dirasakan langsung masyarakat dengan adanya penurunan luas daerah genangan

dan peningkatan kualitas sanitasi permukiman dan pelayanan air bersih, pengembangan konsep manajemen transportasi. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat mulai dirasakan dengan semakin membaiknya perlindungan sosial dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Fokus utama dalam pembangunan tahun kedua adalah untuk terus mendorong perwujudan visi menuju Blitar Cerdas terlihat dari semakin meningkatnya kreativitas ekonomi kota, pelayanan publik yang optimal, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam pelayanan pemerintah daerah.

6.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2019)

Tahun Ketiga RPJMD Kota Blitar 2016–2021 merupakan tahap Penguatan dalam rangka pengembangan kerjasama daerah untuk mencapai kondisi pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif sesuai dengan amanat RPJPD Kota Blitar. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan pada Penguatan Pengembangan Kerjasama Daerah dan Dunia Usaha serta Optimalisasi Jalur Informasi guna meningkatkan Investasi.

Pada tahun ketiga ini, upaya penguatan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan lebih diutamakan untuk mengoptimalisasikan penguatan Kerjasama Daerah & Dunia Usaha dari beberapa program sinergi kerja melalui Tanggung Jawab Sosial (TSP) perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah daerah sehingga menghasilkan outcome peningkatan daya saing. Pemerintah Kota Blitar segera harus menyusun Regulasi terkait dengan kerjasama pengelolaan Tanggung Jawab Sosial (TSP) perusahaan dengan kalangan dunia usaha dengan fokus sasaran pada pemberdayaan koperasi dan UMKM perlu segera disiapkan. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun ketiga ini diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor agar terwujud visi pembangunan kota Blitar Semakin Sejahtera.

Selain terus melaksanakan upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan

infrastruktur kota, arah kebijakan pembangunan kota ditekankan pada penguatan sektor-sektor ekonomi kota yang mengarah pada perluasan lapangan kerja yang berbasis pada kreativitas, inovasi dan sumber daya lokal. Sistem inovasi daerah terus dikembangkan dalam berbagai bidang pembangunan kota. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan terus didorong dalam mewujudkan pembangunan kota yang mensejahterakan masyarakatnya.

6.2.4 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2020)

Tahun 2020 sebagai tahun keempat RPJMD Kota Blitar 2016–2021 merupakan tahap Pemantapan daya saing daerah, yaitu tercapainya kondisi Pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar pada tahun 2020 sesuai dengan amanat RPJPD Kota Blitar. Arah kebijakan pembangunan tahun ini difokuskan pada upaya pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar.

Dengan kata lain, pada tahun ini merupakan tahap “internalisasi” sekaligus konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada bidang yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terakhir. Arah kebijakan pada sektor infrastruktur diarahkan pada pengembangan infrastruktur serta peningkatan cakupan pelayanannya. Pada sektor penataan ruang dan lingkungan hidup, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan serta perencanaan dan pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan. Sedangkan arah kebijakan pada bidang sosial budaya difokuskan pada peningkatan kualitas, akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat serta meningkatnya good governance.

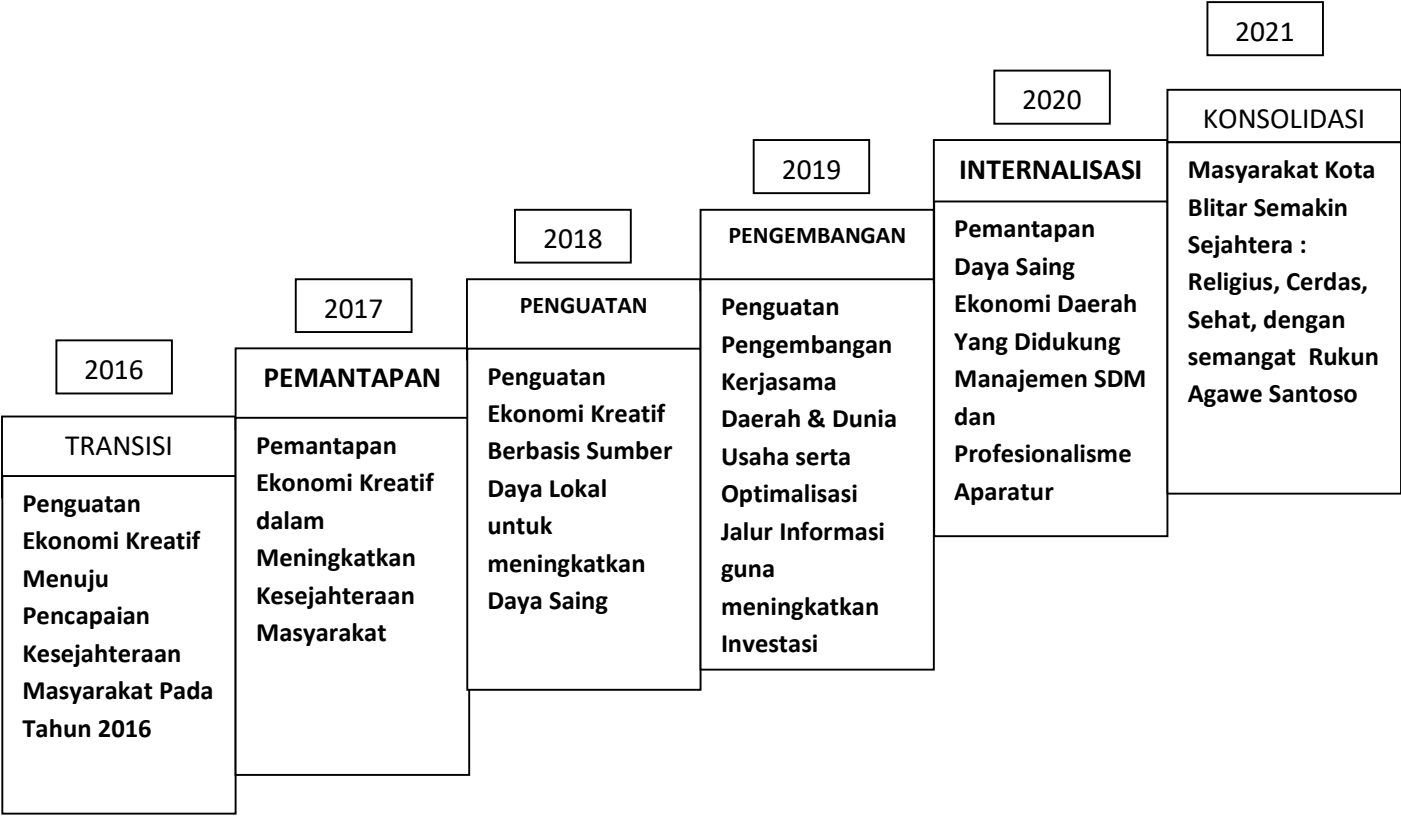
6.2.5 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2021)

Tahun 2021 atau tahun terakhir, dari tahapan RPJMD Kota Blitar 2016–2021 merupakan tahap tercapainya kondisi masyarakat kota Blitar Semakin Sejahtera bersama APBD Pro Rakyat. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi masyarakat yang semakin religius, semakin cerdas, semakin sejahtera secara ekonomi, semakin sehat dalam lingkungan yang aman, tentram dan tertib dengan semangat Rukun Agawe Santoso.

Pada tahun 2021, merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun terakhir difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terakhir. Arah kebijakan pada sektor infrastruktur lebih mengarah pada pengembangan infrastruktur dan peningkatan cakupan pelayanannya, sedangkan sektor penataan ruang dan lingkungan hidup, difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan serta perencanaan dan pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan. Sedangkan arah kebijakan sosial budaya difokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan *good governance*.

Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun ini menjadi dasar (*baseline*) untuk penyusunan perencanaan lima tahunan periode keempat pelaksanaan RPJPD Kota Blitar Tahun 2005-2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun ini tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/ sektor dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian target kinerjanya. Secara sederhana pentahapan pembangunan jangka menengah tersebut sebagai berikut :

Bagan 6.1
Tahapan Pencapaian Pembangunan Jangka menengah



Secara ringkas penjelasan mengenai strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan
RPJMD Kota Blitar 2016-2021

VISI "MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021"			
MISI I : MENINGKATKAN AKTUALISASI NILAI-NILAI RELIGIUS DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kerukunan umat beragama	Meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama	Membina dan mengawasi kehidupan beragama masyarakat	Penguatan kerukunan dan harmoni antar umat beragama dan kelompok masyarakat
	Meningkatnya kemakmuran tempat ibadah	Membina dan mengawasi kehidupan beragama masyarakat	Peningkatan fasilitasi pengembangan tempat peribadatan
MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG CERDAS DAN BERDAYA SAING TINGGI			
Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan	Jaminan akses terhadap layanan pendidikan
	Meningkatnya minat baca masyarakat	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Kemudahan akses layanan mendapatkan informasi dan bacaan masyarakat
	Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pemuda dan olah raga	Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olah Raga	Peningkatan keterampilan dan keahlian pemuda dan atlit
MISI III : MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI YANG BERORIENTASI PADA INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Kontribusi Usaha Mikro terhadap Perekonomian	Meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan Kontribusi Perdagangan dan Perindustrian Terhadap Perekonomian	Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan perdagangan	Peningkatan pembinaan dan pengembangan perdagangan
		Mengembangkan sektor industri rumah tangga dan kecil	Peningkatan jumlah industri rumah tangga dan kecil
	Meningkatnya investasi daerah	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Peningkatan kemudahan dan kualitas layanan perijinan
	Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Meningkatkan ketahanan pangan Kota Blitar	Peningkatan ketersediaan pangan yang aman
			Pengembangan agribisnis pertanian (arti luas)
2. Meman- tapkan pengembanga n industri pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata	Mengembangkan pariwisata yang terpadu	Penataan dan pengembangan industri pariwisata yang didukung ekonomi kreatif
	Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan kearifan lokal yang berwawasan kebangsaan	Penguatan budaya dan kearifan lokal	Pelestarian kawasan / bangunan cagar budaya
			Pelestarian nilai, tradisi, warisan dan kekayaan budaya serta kesenian lokal
3. Meningkat kan efektivit as penang- gulangan kemiskinan dan kualitas kesejahtera- an sosial masyarakat	Meningkatkan Pemerataan dan kesejahteraan	Pembinaan PMKS dan pengembangan PSKS	Pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya
	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi aktif perempuan (gender) dalam pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pembangunan daerah
4. Meningkat kan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu	Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Meningkatkan cakupan dan kualitas infrastruktur perkotaan	Peningkatan ketersediaan infrastruktur perkotaan
	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Meningkatkan kualitas layanan transportasi	Peningkatan ketersediaan dan kualitas perhubungan secara memadai dan merata
MISI IV : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERBASIS SISTEM PELAYANAN BERKUALITAS DAN PARTISIPATIF			
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses masyarakat dan standar layanan kesehatan	Peningkatan budaya sehat masyarakat
			Pemenuhan standar pelayanan kesehatan masyarakat
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan	Peningkatan SDM tenaga kesehatan
	Menurunnya rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Meningkatkan cakupan keluarga berencana dan sejahtera	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan sejahtera
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman yang sehat dan layak	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi sektor air limbah dan sampah	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pengelolaan sanitasi sektor air limbah dan sampah	Pembangunan dan sanitasi sektor air limbah dan sampah berbasis masyarakat
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	Meningkatkan akses masyarakat mendapatkan permukiman layak	Pemenuhan penyediaan perumahan/hunian layak
MISI V : MENINGKATKAN KEHARMONISAN SOSIAL DENGAN SEMANGAT RUKUN AGAWE SANTOSO			
Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Meningkatkan penegakan hukum	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kenyamanan kota	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan kota, penyelesaian konflik serta mitigasi bencana
		Meningkatkan peran serta partai politik dan organisasi kemasyarakatan	Peningkatan fasilitasi partai politik dan pembinaan organisasi kemasyarakatan
	Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Optimalisasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dalam penanganan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
MISI VI : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL			
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan kelembagaan dan sistem informasi manajemen pemerintah daerah
	2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Menerapkan prinsip-prinsip good governance	Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal
	3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan konsistensi pelaksanaan program terhadap dokumen perencanaan	Peningkatan Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian program
	4. Meningkatnya Profesionalisme ASN	Meningkatkan profesionalisme birokrasi	Peningkatan manajemen dan kualitas sumberdaya aparatur secara efektif dan efisien
	5. Meningkatnya penerapan e governance	Meningkatkan penerapan TIK dalam layanan pemerintahan dan layanan publik	Peningkatan penerapan e-Governance
	6. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan aset daerah	Peningkatan panatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara profesional dan terintegrasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	7. Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	Menerapkan standar operasional prosedur pelayanan kepada DPRD	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kepada DPRD sesuai SOP
	8. Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Meningkatkan penyelamatan arsip pemerintah daerah	Pengelolaan kearsipan secara profesional
	9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang kependudukan dan catatan sipil	Menerapkan pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil yang transparan, akuntabel dan efisien.	Peningkatan kualitas standar bidang kependudukan dan catatan sipil
	10. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan	Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan prinsip PTSP	Peningkatan kualitas standar layanan perizinan dan non perizinan
	11. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Peningkatan kualitas layanan pemerintah bidang pelayanan kecamatan

B A B VII

KEBIJAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Blitar bertujuan untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar periode tahun 2016-2021. Pencapaian indikator target kinerja tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran program prioritas Kota Blitar. Guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang terpadu di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas pada setiap strategi merupakan program pembangunan daerah terpilih untuk dapat mencapai secara langsung sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan strategi terpilih yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan disajikan uraian kebijakan secara umum beserta program pembangunan daerah tahun 2016-2021 Kota Blitar. Adapun pelaksanaan program pembangunan jangka menengah serta keterkaitannya dengan kebijakan umum dan program pembangunan daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Blitar
Perubahan RPJMD Kota Blitar 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SAT UAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR 2021	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB	
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
MISI I : MENINGKATKAN AKTUALISASI NILAI-NILAI RELIGIUS DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT																	
Meningkatkan kerukunan umat beragama	Meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama	Membina dan mengawasi kehidupan beragama masyarakat	Penguatan kerukunan dan harmoni antar umat beragama dan kelompok masyarakat	1	PROGRAM PEMBAURAN DAN PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase penduduk usia 14-49 Th yang mengikuti wawasan kebangsaan	%	50%	60%	60%	70 %	80 %	90 %	100 %	100%	Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya kemakmuran tempat ibadah	Membina dan mengawasi kehidupan beragama masyarakat	Peningkatan fasilitasi pengembangan tempat peribadatan	2	PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN	Persentase Tempat Ibadah yang representatif bagi pemeluknya Kriteria Representatif adalah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana standar yang harus dimiliki oleh tempat ibadah	%	73	82	85	87	90	93	95	95	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG CERDAS DAN BERDAYA SAING																	
Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan	Jaminan akses terhadap layanan pendidikan	3	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PAUD	Tercapainya APK PAUD	%	91%	92%	93.06%	94.09%	95.12%	96.15%	97.18%	97.18%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				4	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Angka kelulusan SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Angka kelulusan SMP/MTs/Paket B	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Jumlah siswa yang tertampung jenjang SD sesuai SDPA		55,5	68,87	68,57	68,27	67,97	67,67	67,37	67,37	Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Jumlah siswa yang tertampung jenjang SMP sesuai SDPA		49,2	62,32	62,12	61,92	61,72	61,52	61,52	61,52	Pendidikan	Dinas Pendidikan
						nilai UN/UASBN siswa SD diatas 70		7,01	7,57	7,87	8,17	8.47	8.77	9.07	9.07	Pendidikan	Dinas Pendidikan
						nilai UN/UASBN siswa SMP diatas 70		7.67	7,86	7,94	8.02	8.10	8.18	8.26	8.26	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				5	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B untuk TK	%	68,5	69,57	70,01	71,01	72,01	73,01	74,01	74,01	Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Persentase lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B untuk SD/MI	%	93,2	93,2	94,2	95,2	96,2	97,2	98,2	98,2	Pendidikan	Dinas Pendidikan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET						KONDISI AKHIR 2021	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
					Persentase lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B untuk SMP/MTs	%	72,03	72,03	73,03	74,03	74,03	75,03	76,03	76,03			
				6 PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memenuhi kulaifikasi S-1/D-IV	%	95.92%	96.57%	97.22%	97.87%	98.52%	99.17%	99,82%	99,82%	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
	Meningkatnya minat baca masyarakat	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Kemudahan akses layanan mendapatkan informasi dan bacaan masyarakat	7 PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUS-TAKAAN	Persentase peningkatan pemustaka	%	10.467 org	30 (11.540 orang)	35	40	45	50	55	55	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pemuda dan olah raga	Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olah Raga	Peningkatan keterampilan dan keahlian pemuda dan atlit	8 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang aktif	%	-	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
				9 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	%	-	38%	38%	46%	51%	92%	92%	92%	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
MISI III : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan																	
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Kontribusi Usaha Mikro terhadap Perekonomian	Meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro	Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro	10 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang dibina	%	35%	35%	35%	50%	65	70	85	85	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
				11 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	Persentase Usaha Mikro yang Aktif	%	-	52%	52%	57%	62%	67%	72%	72%	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
				12 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO)	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	-	15%	15%	20%	25%	30%	35%	35%	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	Menigkatkan Kontribusi Perdagangan dan Perindustrian Terhadap Perekonomian	Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan perdagangan	Peningkatan pembinaan dan pengembangan perdagangan	13 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERDAGANGAN	Persentase usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas	%	-	-	4.5%	5.0%	5.2%	5.5%	6.0%	6%	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
				14 PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL	Persentase Pasar dalam Kondisi Baik	%	-	-	55.0%	60.0%	65.0%	70.0%	75.0%	75%	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
				15 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERDAGANGAN	Jumlah Kontak Dagang dengan Daerah Lain	buah	-	1	1	4	5	6	7	7	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
				16 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang	%	34.2%	35.34%	11.0%	30%	40%	50%	60%	60%	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
				17 PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	Persentase Pelanggar Barang Kena Cukai ilegal	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
				18 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Persentase Pertumbuhan jumlah IKM	%	2.375%	1.75%	2.00%	2.25%	2.50%	2.75%	3.0%	13%	Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Mengembangkan sektor industri rumah tangga dan kecil	Peningkatan jumlah industri rumah tangga dan kecil														

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SAT UAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR 2021	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB	
				19	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN	Persentase Industri Kecil Terlatih	%	17.43%	6.01%	6.20%	6.3%	6.4%	6.6%	6.9%			6.9%
				20	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBHCHT)	Persentase IHT yang Menerapkan GMP	%	-	50%	50.0%	50.0%	60.0%	70.0%	75.0%			75%
Meningkatnya investasi daerah	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Peningkatan kemudahan dan kualitas layanan perijinan	21	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Jumlah PMA/PMDN	unit	454 unit	440 unit	451 unit	462 unit	473 unit	484 unit	496 unit	2366 unit	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	
			22	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTANIAN	Produktivitas padi (ton/ha)	ton/ ha	-	8.05	8.08	8.12	8.16	8.20	8.24	8.24	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Meningkatkan ketahanan pangan Kota Blitar	Pengembangan agribisnis pertanian (arti luas)			Produktivitas jagung (ton/ha)	ton/ ha	-	6.72	6.74	6.76	6.78	6.80	7.00	7.00	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				23	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU (DBHCHT)	Persentase produksi tembakau yang berkuaitas	%	-	-	-	50	55	60	65	65	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				24	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN)	Persentase petani peserta pelatihan yang menjawab post test dengan minimal jawaban 80% benar.	keg	-	60.0	80	90	90	95	95	95	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				25	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN	Produksi daging	ton	-	3289.8	3397	3465	3534	3605	3677	3677	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Produksi telur	ton	-	2662.6	2695	2727	2760	2793	2826	2826	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Produksi susu	ribu liter	-	500.6	508	519	529	539	549	549	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				26	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PETERNAKAN)	Persentase petani peserta pelatihan yang menjawab post test dengan minimal jawaban 80% benar.	%	-	-	-	15	15	20	20	35	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			27	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERIKANAN	Produksi ikan konsumsi	ton	-	188.0	197	207	218	229	240	240	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
						Produksi ikan hias	ekor	-	4,237,524	4,343,462	4,343,462	4,452,049	4,563,350	4,677,434	4,677,434	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SAT UAN	KONDISI AWAL		TARGET						KONDISI AKHIR 2021	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
					Produksi benih ikan	ekor	-	8,311,690	8,457,360	8,477,924	8,647,482	8,820,432	8,996,841	8,996,841	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
				28	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)	Persentase petani peserta pelatihan yang menjawab post test dengan minimal jawaban 80% benar.	%	-	50.0	80	90	90	95	95	95	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				29	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Angka konsumsi energi	kkal/kapita/hari	-	1789.0	1792	1799	1809	1819	1829	1829	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Angka konsumsi protein	gram/kapita/hari	-	60.4	60.5	60.7	60.9	61.1	61.3	61.3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2. Memantapkan pengembangan industri pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata	Mengembangkan pariwisata yang terpadu	Penataan dan pengembangan industri pariwisata yang didukung ekonomi kreatif	30	PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF												
				31	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	buah	10	11	12	13	14	15	16	16	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai upaya mewujudkan kearifan lokal yang berwawasan kebangsaan	Penguatan budaya dan kearifan lokal	Pelestarian kawasan / bangunan cagar budaya	32	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Persentase Pagelaran Budaya/ Sejarah Yang Dilestarikan	%	65	75	75	75	75	75	75	75	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3. Meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatkan Pemerataan dan kesejahteraan	Pembinaan PMKS dan pengembangan PSKS	Pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya	33	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase warga miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	94,4	100	100	100	100	100	100	100	Sosial	Dinas Sosial
				34	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH	% PMKS yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan Kesejahteraan sosial	%	80	75	78	80	82	85	90	90	Sosial	Dinas Sosial
				35	PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	% PSKS yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial	%	63	65	68	72	75	77	80	80	Sosial	Dinas Sosial
				36	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG SOSIAL)	% PMKS Terlatih	%	10	15	20	25	30	35	35	35	Sosial	Dinas Sosial

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM	SAT UAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR 2021	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja	37	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	72%	72%	71.00%	71.20%	71.50%	72.00%	72.50%	73%	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
						Persentase fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
				38	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG TENAGA KERJA)	Persentase tenaga kerja terlatih	%	93%	92.72%	93.50%	93.80%	94.20%	94.60%	94.80%	95%	Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi aktif perempuan (gender) dalam pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pembangunan daerah	39	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang aktif pada organisasi atau lembaga kemasyarakatan	%	-	15.76	15.76	15.76	15.88	16.00	16.12	16.12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
						Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun dokumen PPRG	buah	-	7	8	9	10	11	12	12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
	4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu	Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	40	KONSERVASI DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN	Luas RTH yang dikelola (ha)	Ha	126.75	127.33	146.82	165.54	185.61	202.09	228.09	228.09	Lingkungan Hidup
						Jumlah aksi mitigasi RAD yang terlaksana	buah	32	32	33	34	35	36	36	36	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah mata air yang dilindungi	buah	13	13	13	19	25	31	31	31	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah perolehan predikat kelurahan berseri	kelurahan	5	5	10	16	22	28	34	34	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah perolehan predikat sekolah adiwiyata	sekolah	6	29	62	99	137	175	215	215	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SAT UAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR 2021	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				41	PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	%	82.5	86	86	86	86	87	87	87	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						%	100	100	100	100	100	100	100	100	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Meningkatkan cakupan dan kualitas infrastruktur perkotaan	Peningkatan ketersediaan infrastruktur perkotaan	42	PROGRAM PENATAAN RUANG	%	20	33.33	75.00	60.00	73.37	86.67	100	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				43	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	%	89	95.1	96	97	98	99	100	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				44	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	%	98.95	99.80	99.8	99.9	100	100	100	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				45	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	%	-	60.42	76.4	85	90	95	100	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				46	PROGRAM STANDARISASI BIDANG PEKERJAAN UMUM	%	-	16.67	33.3	50.0	66.7	83.3	100.0	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						%	-	20	40	60	80	100	100	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				47	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KECIPTAKARYAAN	%	-	4.17	33.33	50.00	66.67	83.33	100.00	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						%	43.33	50	66.67	83.33	100	100	100	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						%	77.14	80	87.14	94.28	100	100	100	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						%	18.6	27.32	31.68	36.03	40.39	44.75	49.10	49.10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Meningkatkan kualitas layanan transportasi	Peningkatan ketersediaan dan kualitas perhubungan secara memadai dan merata	48	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	%	75	75	75	84	87	90	93	93	Perhubungan	Dinas Perhubungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SAT UAN	KONDISI AWAL		TARGET						KONDISI AKHIR 2021	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				49	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Persentase Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sekolah dalam Kondisi Baik	%	45	45	45	70	80	95	100	100	Perhubungan	Dinas Perhubungan
						Persentase Prasarana dan Fasilitas Terminal Barang/Cargo dalam Kondisi Baik	%	30	30	32	34	36	38	40	40	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				50	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Marka dan Rambu Lalu Lintas	%	18.78	18.78	18.78	13.63	14.77	15.64	11.30	11.30	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				51	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Persentase Kendaraan yang Lulus Uji Kendaraan	%	90	90	90	93	94	95	96	96	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				52	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perparkiran	Predik at Indeks	-	-	cukup	cukup	cukup baik	baik	baik	baik	Perhubungan	Dinas Perhubungan
MISI IV : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERBASIS SISTEM PELAYANAN BERKUALITAS DAN PARTISIPATIF																	
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses masyarakat dan standar layanan kesehatan	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan masyarakat	53	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	%	-	0	0	2	2	2	3	3	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				54	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	-	100.00	100	100	100	100	100	100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
							%	-	57.14	90	90	90	90	90	90	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				55	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	%	85,56	84.23	84.23	100	100	100	100	100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Angka Kematian Balita (AKBAL) per 1.000 KH	%	9,27	10,39	10,39	10,20	8,70	8,20	8,20	8,20	Kesehatan	Dinas Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SAT UAN	KONDISI AWAL		TARGET						KONDISI AKHIR 2021	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
						Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,08	0,07	0,07	0,10	0,1	0,1	0,1	0,1	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				Peningkatan budaya sehat masyarakat	56	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA PENYEHTAN LINGKUNGAN	Persentase kelurahan siaga aktif Strata Purnama Mandiri	%	80,9	71.42	71.42	80,95	71,42	85,71	90,48	90,48	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	57	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU	- Persentase peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit	%	70%	75	80	80	80	80	80	80	Kesehatan	RSUD Mardi Waluyo	
				58	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KESEHATAN)	-Persentase peningkatan Jenis Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran Paru dan Jantung	%	80%	85	85	90	90	100	100	100	Kesehatan	RSUD Mardi Waluyo	
				59	3. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	Persentase peningkatan pencapaian SPM	%	90%	80	85	90	90	100	100	100	Kesehatan	RSUD Mardi Waluyo	
	Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Meningkatkan cakupan keluarga berencana dan sejahtera	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan sejahtera	60	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase angka kesertaan ber KB atau CPR (contraceptive prevalence rate)	%	76.23	74.77	74.77	74.77	75.00	75.15	75.25	75.25	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Capaian median usia nikah pertama wanita	%	Rumus Kalkulator Capaian median usia nikah pertama wanita	NA	21.44	21.44	20.80	21	21	21	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				61	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Persentase anggota Tribina dan UPPKS yang menjadi peserta KB	%	Jumlah peserta KB aktif / jumlah PUS se Kota Blitar x 100%	86.49	86.49	86.49	89.19	91.89	94.59	94.59	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM	SAT UAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR 2021	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman yang sehat dan layak	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi sektor air limbah dan sampah	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pengelolaan sanitasi sektor air limbah dan sampah	Pembangunan dan sanitasi sektor air limbah dan sampah berbasis masyarakat	62	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan	%	58	60	62.5	65	67.5	68	75	75	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				63	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah sampah terolah di TPA	ton/hari	45	53	52	52	52	52	52	52	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	Meningkatkan akses masyarakat mendapatkan permukiman layak	Pemenuhan penyediaan perumahan/hunian layak	64	PROGRAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman prioritas yang tertangani	%	-	0.80%	15.60%	30.40%	45.20%	60.00%	60.00%	60%	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat
				65	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	-	-	0.80	19.08	38.46	66.15	100.00	100	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat
						Persentase Sarana dan Prasarana Perumahan dalam Kondisi Baik	%	-	-	60	65	75	85	90	90	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat
						Persentase tingkat hunian Rusunawa	%	-	-	85	95	100	100	100	100	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat
MISI V : MENINGKATKAN KEHARMONISAN SOSIAL DENGAN SEMANGAT RUKUN AGAWA SANTOSO																	
Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Meningkatkan penegakan hukum	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	66	PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH	Jumlah pelanggaran peraturan daerah	pelanggaran	811	639	524	477	458	451	448	448	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
				67	PENINGKATAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur	%	94.80%	55.02%	58,45%	73.08%	80,82%	84,60%	86,34%	86,34%	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
						Persentase poskamling aktif	%	70.77%	71.06%	71,57%	72,15%	73,01%	73,87%	75,01%	75,01%	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
				68	PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	Persentase korban kebakaran yang tertangani	%	80%	88,89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas kenyamanan kota	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan kota, penyelesaian konflik serta mitigasi bencana	69	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	1.Persentase potensi konflik yang terdeteksi ditangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM	SAT UAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR 2021	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatkan peran serta partai politik dan organisasi kemasyarakatan	Peningkatan fasilitasi partai politik dan pembinaan organisasi kemasyarakatan	70	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	2. Persentase penanganan penyakit masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah
						Persentase tertanganinya kejadian bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah
						Persentase penduduk memilih yang menggunakan hak pilihnya	%	79%	79%	79%	80%	81%	81%	82%	82%	Administrasi Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah
						Persentase ormas/orpol yang dibina sesuai aturan	%	70%	72%	72%	74	76	78	80	80	Administrasi Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah
	Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan keharmonisan keluarga	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak	72	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Persentase OPD yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	%	NA	NA	NA	80	80	90	100	100	Administrasi Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	MISI VI : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL																
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan kelembagaan dan sistem informasi manajemen pemerintah daerah	73	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
						Presentase kasus yang memperoleh Bantuan Hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
						Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah	BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SAT UAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR 2021	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				74 PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	Persentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
					Persentase jumlah kader/ pengurus yang aktif dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan	%	95	80	90	92	93	94	95	95	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
					Persentase OPD yang menyusun LKjIP sesuai aturan yang berlaku	%	17	28	50	64	79	89	100	100	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
					Persentase OPD yang berada pada zona hijau terkait Pelayanan Publik berdasarkan penilaian Ombudsman	%	0	8,3	33,3	50	66.67	83.33	100	100	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
				75 PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelayanan Administrasi di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
					Persentase Jumlah peserta sosialisasi ketentuan dibidang Cukai	%	97	92	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
					Persentase OPD di Kota Blitar yang melaksanakan kegiatan dari DBHCHT sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
					Persentase Penyerapan Anggaran DBHCHT oleh OPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
				76 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Persentase Media di Kota Blitar yang melaksanakan Sosialisasi ketentuan umum di bidang cukai	%	52,2	47,9	65	70	75	78	80	80	Sekretariat Daerah	Bag Humas dan Protokol
					Persentase OPD Kategori tertib administrasi pembangunan	%	0	25	50	60	70	80	90	90	Sekretariat Daerah	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SAT UAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR 2021	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB	
					Kriteria OPD Tertib Administrasi Pembangunan: 1. Melaksanakan entry RUP pada SiRUP sebelum Tahun Anggaran berjalan; 2. Menetapkan dan mengentry ke Sistem terkait Target Realisasi Kegiatan dan Anggaran; 3. Mengentry realisasi fisik kegiatan segera setelah BA PPHP ditandatangani; 4. Realisasi Anggaran sesuai dengan Target yang direncanakan												
				78	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah	%	95	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah	Bagian Umum
				79	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	Persentase Pemberitaan Kegiatan Pembangunan di Media Massa	%	70	70	73	75	78	80	80	80	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM
						Persentase Kegiatan Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	%	65	65	65	70	73	75	78	78	Sekretariat Daerah	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
				80	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Persentase keberhasilan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	%	89,72	96	96	97	98	99	100	100	Sekretariat Daerah	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
				Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Menerapkan prinsip-prinsip good governance	Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal	81	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	1. Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan yang berindikasi kerugian daerah	%	83%	90%	80%	82%	83%	85%	87%
	2. Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditangani	%	100%						95%	95%	95%	96%	98%	100%	85%	Pengawasan	Inspektorat Daerah
	3. Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	78%						75,34%	90%	90%	90%	90%	90%	90	Pengawasan	Inspektorat Daerah
	4. Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	57,04%	80,12%	82,5%	85%			87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	Pengawasan	Inspektorat Daerah			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SAT UAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR 2021	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB			
						5. Persentase SPIP OPD yang telah dievaluasi	%	0%	0%	25%	40%	60%	80%	100%	100%					
						6. Prosentase OPD yang telah diusulkan sebagai zona integritas	%	0%	0%	7%	7%	14%	21%	28%	28%					
						7. Persentase SAKIP OPD yang telah dievaluasi	%	22%	56%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan konsistensi pelaksanaan program terhadap dokumen perencanaan	Peningkatan Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian program	82	PROGRAM PERENCANAAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Persentase kesesuaian indikator tujuan Renstra SKPD dengan sasaran RPJMD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
					Persentase pemanfaatan dokumen Perencanaan Infrastruktur	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
					Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan Ekonomi	%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
				83	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
						Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sosial budaya	%	100%	96%	55%	55%	65%	75%	85%	85%	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
				84	PROGRAM PENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase peserta Musrenbang aktif	%	-	-	7%	7%	8%	9%	10%	10%	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
				85	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan	%	100%	87%	87%	92%	95%	97%	99%	99%	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
				Meningkatnya Pofesionalisme ASN	Meningkatkan profesionalisme birokrasi	Peningkatan manajemen dan kualitas sumberdaya aparatur secara efektif dan efisien	86	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR.	Persentase ASN yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	%	25%	35%	45%	55%	65%	75%	85%	85%	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
							87	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase ASN yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	%	85%	87%	90%	92%	95%	97%	99%	100%	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
							88	PROGRAM FASILITASI PINDAH / PURNA TUGAS	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian aparatur yang pindah/purna tugas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM	SAT UAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR 2021	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya penerapan e governance	Meningkatkan penerapan TIK dalam layanan pemerintahan dan layanan publik	Peningkatan penerapan e-Governance	89	PROGRAM PENYELENGGARAAN E-GOVERNANCE	Persentase aplikasi yang terintegrasi	%	-	-	30%	30%	40%	50%	60%	60%	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
				90	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase PPID aktif	%	-	-	90	90	100	100	100	0%	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
				91	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI/ STATISTIK DAERAH	Persentase Ketersediaan Data/ Informasi Statistik Sektoral	%	80%	-	80	80	100	100	100	0%	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
				92	PROGRAM PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI MILIK PEMERINTAH ATAU NEGARA	Persentase dokumen dan sarana komunikasi pemerintah yang diamankan	%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Peningkatan pendapatan pajak daerah secara profesional dan terintegrasi	93	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	Prosentase peningkatan Target Pajak Daerah	%	21,928,923,643	7.75%	13%	21%	30%	38%	48%	48%	Kuangan	BPKAD
				94	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	21,928,923,643	7.75%	13%	21%	30%	38%	48%	48%	Kuangan	BPKAD
	Meningkatkan Pengelolaan Daerah yang tertib, efektif, efisien dan taat peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan panatausahaan pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan terintegrasi	Peningkatan panatausahaan pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan terintegrasi	95	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang tertib laporan keuangan daerah	%	100%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kuangan	BPKAD
						Persentase peningkatan tertib pengelolaan Akuntansi keuangan Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kuangan	BPKAD
						Persentase Perangkat Daerah yang tertib laporan semesteran dan prognosis	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kuangan	BPKAD
				96	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase peningkatan tertib perencanaan keuangan Daerah	%	100%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kuangan	BPKAD
				97	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase peningkatan tertib penatausahaan keuangan Daerah	%	90%	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%	Kuangan	BPKAD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM	SAT UAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR 2021	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatkan pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan yang berlaku		98	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Prosentase penyajian data keuangan dan Aset Daerah		90%	90%	91%	92%	93%	94%	95%			
	Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	Menerapkan standar operasional prosedur pelayanan kepada DPRD	Peningkatan fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kepada DPRD sesuai SOP	99	PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	Persentase fasilitas Rapat - rapat DPRD	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD
						Persentase fasilitas Peningkatan kapasitas Anggota DPRD	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD
				100	PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI FUNGSI PENGAWASAN DAN ANGGARAN DPRD	Persentase fasilitas pembahasan anggaran daerah	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD
				101	PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP DAERAH	Persentase peningkatan arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	%	11.373 lbr	61,91 (42.327 lbr)	47,25	47,25	47,25	47,25	65,37	65,37	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang kependudukan dan catatan sipil	Menerapkan pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil yang transparan, akuntabel dan efisien.	Peningkatan kualitas standar bidang kependudukan dan catatan sipil	102	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	94	85	87	89%	90%	91%	92%	92%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				103	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	94	85	87	89%	90%	91%	92%	92%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				104	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase validitas data kependudukan	%	87	85	87	89%	90%	91%	92%	92%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				105	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN	Persentase izin yg diterbitkan sesuai SOP	%	90%	90%	91%	91.5%	92%	92.5%	93%	93%	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP
				106	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persentase pelayanan tepat waktu	%	91%	91%	91%	91%	92%	93%	94%	94%	Administrasi Pemerintahan	Kecamatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Peningkatan kualitas layanan pemerintah bidang pelayanan kecamatan	107	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pembinaan di bidang Pemerintahan , keamanan dan ketertiban kesejahteraan sosial , Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	Administrasi Pemerintahan	Kecamatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM	SAT UAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR 2021	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				¹⁰⁸	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	prosentase kecukupan pelayanan perkantoran	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Seluruh Perangkat Daerah
				¹⁰⁹	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat Partisipasi Perangkat Daerah Dalam Agenda Kota	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Seluruh Perangkat Daerah
				¹¹⁰	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Seluruh Perangkat Daerah
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		Seluruh Perangkat Daerah
			Jumlah program	¹¹⁰													

B A B VIII

7NDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Kota Blitar tahun 2016-2021 berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dalam penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

8.1. Program Prioritas Untuk Pencapaian Visi dan misi

Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan, tiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagaimana diuraikan diatas program-program prioritas terdiri dari program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah dan program untuk pemenuhan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada bagian ini disajikan proram-program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kota Blitar tahun 2016-2021 dimana terdiri dari 6 (enam) misi sebagaimana diuraikan pada bab V.

8.2. Program Prioritas untuk pencapaian Visi, Misi dan Layanan Urusan Pemerintah Daerah

Pada bagian ini disajikan semua program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kota Blitar tahun 2016-2021 maupun untuk pemenuhan layanan di Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Program prioritas pada bagian ini dibuat untuk masa 6 (enam) tahun bagi masing-masing Perangkat Daerah. Masing-masing program dilengkapi dengan target indikator kinerja untuk menunjukkan sejauh mana capaian rencana pembangunan akan dicapai, yang akan disajikan dalam 3 (tiga) bentuk/kelompok tabel sebagai berikut :

- 1) Program prioritas dalam APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dalam tabel 8.1
- 2) Program prioritas dalam APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2017, sebagaimana dalam tabel 8.2
- 3) Indikasi Rencana Program Prioritas beserta kebutuhan pendanaan Kota Blitar Tahun 2018-2021, sebagaimana tabel 8.3

Tabel 8.1
Program Prioritas Dalam APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2016

KODE				BIDANG UMUM PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1				URUSAN WAJIB	519,770,880,759.33	
1	01			PENDIDIKAN	74,082,492,582.53	
1	01	01		Dinas Pendidikan	48,314,768,459.53	Dinas Pendidikan
1	01	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,200,682,000.00	
1	01	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,140,571,500.00	
1	01	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	317,980,000.00	
1	01	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	69,200,000.00	
1	01	01	15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	703,599,550.00	
1	01	01	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	22,328,439,989.65	
1	01	01	17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	17,356,414,629.88	
1	01	01	18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	1,744,224,950.00	
1	01	01	19	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA	54,793,000.00	
1	01	01	20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1,484,683,540.00	
1	01	01	21	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	919,937,250.00	
1	01	01	22	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SEKOLAH GRATIS	994,242,050.00	

1	01	0101		UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul	2,589,348,315.00	UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul
1	01	0101	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	250,767,140.00	
1	01	0101	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	59,564,560.00	
1	01	0101	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25,575,000.00	
1	01	0101	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	4,826,800.00	
1	01	0101	15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	484,733,250.00	
1	01	0101	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	1,748,478,565.00	
1	01	0101	19	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA	9,372,000.00	
1	01	0101	20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6,031,000.00	
1	01	0102		UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo	2,549,335,100.00	UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo
1	01	0102	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	237,552,500.00	
1	01	0102	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	257,213,450.00	
1	01	0102	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20,655,000.00	
1	01	0102	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12,234,800.00	
1	01	0102	15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	602,461,350.00	
1	01	0102	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	1,391,383,000.00	
1	01	0102	19	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA	21,585,000.00	
1	01	0102	20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6,250,000.00	
1	01	0103		UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan	2,817,712,000.00	UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan
1	01	0103	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	281,000,870.00	
1	01	0103	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	107,798,530.00	
1	01	0103	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	43,138,000.00	
1	01	0103	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18,677,000.00	
1	01	0103	15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	450,626,000.00	
1	01	0103	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	1,865,395,100.00	
1	01	0103	19	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA	23,738,500.00	
1	01	0103	20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	27,338,000.00	
1	01	0104		UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1	730,770,000.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
1	01	0104	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	130,113,100.00	
1	01	0104	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	55,091,900.00	
1	01	0104	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25,000,000.00	
1	01	0104	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3,658,000.00	
1	01	0104	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	516,907,000.00	

1	01	0105		UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2	826,702,050.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
1	01	0105	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	89,851,300.00	
1	01	0105	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	21,282,500.00	
1	01	0105	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	27,380,000.00	
1	01	0105	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3,502,000.00	
1	01	0105	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	684,686,250.00	
1	01	0106		UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3	814,003,600.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3
1	01	0106	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	95,333,560.00	
1	01	0106	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	26,854,600.00	
1	01	0106	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	24,175,000.00	
1	01	0106	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1,800,000.00	
1	01	0106	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	665,840,440.00	
1	01	0107		UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4	1,178,922,985.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4
1	01	0107	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	119,837,675.00	
1	01	0107	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	17,902,500.00	
1	01	0107	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25,800,000.00	
1	01	0107	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8,040,000.00	
1	01	0107	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	1,007,342,810.00	
1	01	0108		UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5	723,104,860.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
1	01	0108	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	120,583,460.00	
1	01	0108	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	51,763,300.00	
1	01	0108	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25,000,000.00	
1	01	0108	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3,405,000.00	
1	01	0108	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	522,353,100.00	
1	01	0109		UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6	594,139,850.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6
1	01	0109	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	135,842,100.00	
1	01	0109	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	99,196,500.00	
1	01	0109	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	24,995,000.00	
1	01	0109	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2,431,000.00	
1	01	0109	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	331,675,250.00	

1	01	0110		UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7	645,129,200.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7
1	01	0110	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	110,707,700.00	
1	01	0110	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	96,500,000.00	
1	01	0110	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25,000,000.00	
1	01	0110	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	4,682,000.00	
1	01	0110	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	408,239,500.00	
1	01	0111		UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8	852,341,265.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8
1	01	0111	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	127,090,440.00	
1	01	0111	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	238,964,825.00	
1	01	0111	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25,900,000.00	
1	01	0111	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2,232,000.00	
1	01	0111	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	458,154,000.00	
1	01	0112		UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9	678,259,500.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9
1	01	0112	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	112,075,800.00	
1	01	0112	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	46,183,850.00	
1	01	0112	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	24,982,000.00	
1	01	0112	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	495,017,850.00	
1	01	0113		UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10	388,188,000.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10
1	01	0113	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	144,870,008.00	
1	01	0113	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	89,110,492.00	
1	01	0113	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	24,952,500.00	
1	01	0113	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2,494,000.00	
1	01	0113	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	126,761,000.00	
1	01	0114		UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1	1,424,747,958.00	UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1
1	01	0114	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	216,355,900.00	
1	01	0114	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	38,000,000.00	
1	01	0114	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	22,825,000.00	
1	01	0114	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8,612,400.00	
1	01	0114	17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	1,138,954,658.00	

1	01	0115		UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 2	858,400,000.00	UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 2
1	01	0115	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	184,482,450.00	
1	01	0115	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	176,017,100.00	
1	01	0115	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25,000,000.00	
1	01	0115	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3,013,000.00	
1	01	0115	17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	469,887,450.00	
1	01	0116		UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 3	1,230,428,800.00	UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 3
1	01	0116	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	198,800,850.00	
1	01	0116	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	61,074,800.00	
1	01	0116	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	28,820,000.00	
1	01	0116	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	4,677,600.00	
1	01	0116	17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	937,055,550.00	
1	01	0117		UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 4	2,007,074,050.00	UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 4
1	01	0117	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	326,432,250.00	
1	01	0117	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	241,875,800.00	
1	01	0117	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25,000,000.00	
1	01	0117	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3,600,000.00	
1	01	0117	17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	1,410,166,000.00	
1	01	0118		UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1	2,530,148,450.00	UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1
1	01	0118	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	316,626,750.00	
1	01	0118	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	430,951,300.00	
1	01	0118	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0.00	
1	01	0118	17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	1,782,570,400.00	
1	01	0119		UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2	1,172,542,140.00	UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2
1	01	0119	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	197,381,190.00	
1	01	0119	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	136,570,700.00	
1	01	0119	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	23,200,000.00	
1	01	0119	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6,141,750.00	
1	01	0119	17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	809,248,500.00	
1	01	0120		UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3	1,156,426,000.00	UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3
1	01	0120	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	262,153,350.00	
1	01	0120	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	161,349,000.00	
1	01	0120	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35,200,000.00	

1	01	0120	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5,530,800.00	
1	01	0120	17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	692,192,850.00	
1	02			KESEHATAN	133,126,900,484.00	KESEHATAN
1	02	01		Dinas Kesehatan	33,665,540,687.50	Dinas Kesehatan
1	02	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,073,621,600.00	
1	02	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	411,443,000.00	
1	02	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	86,000,000.00	
1	02	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	53,919,780.00	
1	02	01	15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	3,366,932,600.00	
1	02	01	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20,167,288,757.50	
1	02	01	17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	100,000,000.00	
1	02	01	18	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	520,489,250.00	
1	02	01	19	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	627,543,600.00	
1	02	01	20	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	1,114,820,000.00	
1	02	01	21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	927,478,350.00	
1	02	01	22	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	48,323,900.00	
1	02	01	26	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	5,085,891,000.00	
1	02	01	27	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	81,788,850.00	
1	02	0101		UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul	3,565,064,308.00	UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul
1	02	0101	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	420,127,735.00	
1	02	0101	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	390,585,430.00	
1	02	0101	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	38,665,000.00	
1	02	0101	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8,209,000.00	
1	02	0101	15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	77,340,000.00	
1	02	0101	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	630,048,400.00	
1	02	0101	18	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	86,720,000.00	
1	02	0101	19	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	73,125,000.00	
1	02	0101	20	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	62,275,925.00	
1	02	0101	21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	185,921,500.00	
1	02	0101	22	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	74,998,400.00	
1	02	0101	23	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	92,750,300.00	
1	02	0101	26	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	1,373,976,618.00	
1	02	0101	27	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	50,321,000.00	
1	02	0102		UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo	2,486,599,820.00	UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo
1	02	0102	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	239,857,320.00	
1	02	0102	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	142,641,950.00	
1	02	0102	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	19,580,000.00	

1	02	0102	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5,144,300.00	
1	02	0102	15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	47,826,750.00	
1	02	0102	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	161,362,000.00	
1	02	0102	18	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	78,829,100.00	
1	02	0102	19	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	63,189,250.00	
1	02	0102	20	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	12,904,000.00	
1	02	0102	21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	141,966,500.00	
1	02	0102	22	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	69,630,000.00	
1	02	0102	23	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	27,483,500.00	
1	02	0102	26	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	1,466,712,000.00	
1	02	0102	27	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	9,473,150.00	
1	02	0103		UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan	3,305,520,200.00	UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan
1	02	0103	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	416,050,050.00	
1	02	0103	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	161,734,300.00	
1	02	0103	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	17,914,300.00	
1	02	0103	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7,696,200.00	
1	02	0103	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	518,388,750.00	
1	02	0103	18	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	70,824,150.00	
1	02	0103	19	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	44,430,000.00	
1	02	0103	20	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	44,802,200.00	
1	02	0103	21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	130,370,650.00	
1	02	0103	22	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	47,173,200.00	
1	02	0103	23	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	60,536,200.00	
1	02	0103	26	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	1,785,600,200.00	
1	02	02		Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	90,104,175,468.50	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo
1	02	02	22	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	441,240,000.00	
1	02	02	24	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU	6,989,833,500.00	
1	02	02	29	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	82,673,101,968.50	
1	03			PEKERJAAN UMUM	124,515,064,825.80	
1	03	01		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	124,515,064,825.80	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1	03	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	511,176,150.00	
1	03	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	846,850,000.00	
1	03	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	96,142,500.00	

1	03	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	22,307,000.00	
1	04	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1,559,767,400.00	
1	05	01	15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	472,590,000.00	
1	03	01	16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	8,229,538,000.00	
1	04	01	16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	2,751,805,532.00	
1	05	01	16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	504,793,000.00	
1	03	01	17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	6,877,790,200.00	
1	05	01	17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	108,085,800.00	
1	03	01	18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	68,173,761,033.00	
1	03	01	19	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	35,000,000.00	
1	03	01	20	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	21,025,595,760.80	
1	03	01	21	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	1,930,860,000.00	
1	03	01	23	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KOTA	11,017,629,150.00	
1	03	01	24	PROGRAM STANDARISASI BIDANG PEKERJAAN UMUM	351,373,300.00	
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN	4,365,017,547.00	
1	06	01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,365,017,547.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	334,951,900.00	
1	06	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	433,604,277.00	
1	06	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50,000,000.00	
1	06	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	67,641,460.00	
1	06	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	268,506,890.00	
1	05	01	15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	84,089,800.00	
1	23	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	63,470,250.00	
1	06	01	16	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	30,412,000.00	
1	06	01	19	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	319,209,000.00	
1	06	01	20	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	358,369,000.00	
1	06	01	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,661,898,190.00	
1	06	01	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	413,186,210.00	
1	06	01	23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	200,532,070.00	
1	06	01	24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	79,146,500.00	
1	07			PERHUBUNGAN	18,065,303,761.00	
1	07	01		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18,065,303,761.00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	07	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	806,228,700.00	
1	07	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	918,549,420.00	
1	07	01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	65,812,000.00	
1	07	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	98,337,000.00	
1	07	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17,303,000.00	

1	07	01	15	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	7,492,188,750.00	
1	25	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	1,441,810,935.00	
1	07	01	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	3,615,503,480.00	
1	25	01	16	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	51,199,200.00	
1	25	01	17	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	12,405,500.00	
1	07	01	18	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	3,016,756,226.00	
1	25	01	18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	529,209,550.00	
1	08			LINGKUNGAN HIDUP	34,247,089,842.00	
1	08	01		Badan Lingkungan Hidup	34,247,089,842.00	Badan Lingkungan Hidup
1	08	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	555,716,890.00	
1	08	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,134,664,794.00	
1	08	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	76,700,000.00	
1	08	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH	14,952,388,436.00	
1	08	01	16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	624,719,972.00	
1	08	01	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	457,243,850.00	
1	08	01	18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	528,340,050.00	
1	08	01	19	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	137,909,000.00	
1	04	01	20	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	170,324,000.00	
1	08	01	20	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	15,609,082,850.00	
1	10			KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2,352,611,482.00	
1	10	01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,352,611,482.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	10	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	415,442,900.00	
1	10	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	500,726,372.00	
1	10	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	74,000,000.00	
1	10	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	29,440,500.00	
1	10	01	15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1,333,001,710.00	
1	13			SOSIAL	5,888,779,950.00	
1	13	01		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	5,888,779,950.00	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	13	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	698,785,666.00	
1	13	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	169,021,000.00	
1	13	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	92,087,500.00	
1	13	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	33,932,000.00	
1	13	01	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	564,646,712.00	
1	14	01	15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	899,482,200.00	

1	13	01	16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH	421,712,188.00	
1	13	01	17	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	2,118,883,584.00	
1	14	01	17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	890,229,100.00	
1	15			KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	2,398,760,500.00	
1	15	01		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2,398,760,500.00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1	15	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	401,483,050.00	
1	15	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	128,662,000.00	
1	15	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	93,380,000.00	
1	15	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	82,748,150.00	
1	15	01	15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	544,384,000.00	
1	15	01	16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH	214,360,950.00	
1	15	01	17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	564,972,050.00	
1	15	01	18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	368,770,300.00	
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	9,026,010,648.00	
1	19	01		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana	3,155,353,748.00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggula ngan Bencana
1	19	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	604,713,475.00	
1	19	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	166,689,100.00	
1	19	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	66,240,000.00	
1	19	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	13,044,000.00	
1	19	01	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	346,689,861.00	
1	19	01	17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	283,011,550.00	
1	19	01	18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	297,992,100.00	
1	19	01	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	143,332,955.00	
1	19	01	20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT(PEKAT)	32,604,608.00	
1	19	01	21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	282,091,754.00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	01	22	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	918,944,345.00	
1	19	02		Satuan Polisi Pamong Praja	5,870,656,900.00	
1	19	02	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	232,627,884.00	
1	19	02	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	530,609,016.00	
1	19	02	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	72,587,500.00	
1	19	02	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	54,675,000.00	
1	19	02	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8,819,200.00	
1	19	02	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	402,740,300.00	

1	19	02	16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	4,568,598,000.00	
1	20			OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH DAN PERSANDIAN	104,645,501,544.00	
1	20	03		Sekretariat Daerah	20,860,669,400.00	Sekretariat Daerah
1	20	0301		Bagian Tata Pemerintahan	1,670,206,312.00	Bagian Tata Pemerintahan
1	20	0301	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	34,736,900.00	
1	20	0301	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	30,181,300.00	
1	20	0301	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	44,950,000.00	
1	09	0301	15	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	420,015,662.00	
1	20	0301	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	282,709,400.00	
1	20	0301	24	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	280,532,050.00	
1	20	0301	30	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	577,081,000.00	
1	20	0302		Bagian Hukum	1,508,844,700.00	Bagian Hukum
1	20	0302	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	35,420,500.00	
1	20	0302	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	49,939,300.00	
1	20	0302	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	43,408,000.00	
1	20	0302	25	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1,380,076,900.00	
1	20	0303		Bagian Organisasi dan Tata Laksana	936,520,000.00	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1	20	0303	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	33,935,350.00	
1	20	0303	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	19,592,000.00	
1	20	0303	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20,550,000.00	
1	20	0303	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	194,995,350.00	
1	20	0303	27	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	101,222,122.00	
1	20	0303	28	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	115,817,000.00	
1	20	0303	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	56,464,000.00	
1	20	0303	30	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	393,944,178.00	
1	20	0304		Bagian Perekonomian	668,889,000.00	Bagian Perekonomian
1	20	0304	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	39,324,400.00	
1	20	0304	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8,367,500.00	
1	20	0304	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	48,562,500.00	
1	20	0304	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9,615,100.00	
1	16	0304	15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	62,351,500.00	
1	06	0304	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	250,668,000.00	
1	20	0304	31	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	250,000,000.00	

1	20	0305		Bagian Administrasi Pembangunan	803,778,700.00	Bagian Administrasi Pembangu nan
1	20	0305	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	57,105,400.00	
1	20	0305	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	35,145,000.00	
1	20	0305	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	116,969,000.00	
1	20	0305	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	31,300,000.00	
1	06	0305	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	19,930,000.00	
1	06	0305	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	543,329,300.00	
1	20	0306		Bagian Kesejahteraan Rakyat	1,395,904,400.00	Bagian Kesejahtera an Rakyat
1	20	0306	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	71,595,000.00	
1	20	0306	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	17,570,000.00	
1	20	0306	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	59,000,000.00	
1	20	0306	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11,000,000.00	
1	19	0306	17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	1,147,000,000.00	
1	06	0306	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	89,739,400.00	
1	20	0307		Bagian Umum	13,841,463,565.00	Bagian Umum
1	20	0307	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5,190,055,715.00	
1	20	0307	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3,355,622,150.00	
1	20	0307	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	37,320,000.00	
1	20	0307	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	123,860,000.00	
1	20	0307	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0.00	
1	20	0307	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	4,983,089,575.00	
1	20	0307	18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	60,906,125.00	
1	20	0307	24	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	90,610,000.00	
1	20	0308		Bagian Layanan Pengadaan	895,784,800.00	Bagian Layanan Pengadaan
1	20	0308	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	274,340,800.00	
1	20	0308	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	165,517,200.00	
1	20	0308	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	21,208,000.00	
1	20	0308	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10,915,000.00	
1	20	0308	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	423,803,800.00	
1	20	0309		Bagian Humas dan Protokol	3,817,090,000.00	Bagian Humas dan Protokol
1	20	0309	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	71,244,000.00	
1	20	0309	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	125,556,000.00	
1	20	0309	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	78,195,200.00	
1	06	0309	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	212,399,000.00	

1	25	0309	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	65,088,000.00	
1	20	0309	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	1,899,754,800.00	
1	25	0309	18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	1,049,793,000.00	
1	20	0309	24	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	115,060,000.00	
1	20	0309	31	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	200,000,000.00	
1	20	04		Sekretariat DPRD	10,167,800,550.00	Sekretariat DPRD
1	20	04	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	924,749,750.00	
1	20	04	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,080,310,150.00	
1	20	04	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	143,645,200.00	
1	20	04	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	509,016,600.00	
1	20	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	55,031,600.00	
1	20	04	15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT	7,455,047,250.00	
1	20	05		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7,572,826,525.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1	20	05	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,234,269,000.00	
1	20	05	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	579,405,045.00	
1	20	05	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	65,973,500.00	
1	20	05	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	327,496,650.00	
1	20	05	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3,960,730,910.00	
1	20	05	18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	404,951,420.00	
1	20	06		Inspektorat	2,567,634,620.00	Inspektora t
1	20	06	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	491,484,300.00	
1	20	06	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	527,886,320.00	
1	20	06	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	77,190,000.00	
1	20	06	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	55,951,350.00	
1	20	06	19	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	489,916,200.00	
1	20	06	20	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	885,290,250.00	
1	20	06	21	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	39,916,200.00	
1	20	07		Kecamatan Kepanjenkidul	7,576,583,465.00	Kecamatan Kepanjenk idul
1	20	07	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	554,035,891.00	
1	20	07	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	600,522,470.00	
1	20	07	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	74,506,000.00	
1	20	07	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40,718,900.00	
1	13	07	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	4,263,209,704.00	

1	19	07	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	84,838,300.00	
1	22	07	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	1,223,767,850.00	
1	23	07	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	13,113,200.00	
1	13	07	16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH	0.00	
1	08	07	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	16,174,500.00	
1	17	07	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	117,012,300.00	
1	20	07	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	60,214,500.00	
1	19	07	18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	109,422,600.00	
1	06	07	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	36,611,450.00	
1	06	07	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	42,592,200.00	
1	20	07	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	339,843,600.00	
1	20	0701		Kelurahan Ngadirejo	835,925,300.00	Kelurahan Ngadirejo
1	20	0701	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	59,698,005.00	
1	20	0701	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	57,356,600.00	
1	20	0701	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	40,500,000.00	
1	20	0701	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	13,287,400.00	
1	13	0701	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	37,500,000.00	
1	19	0701	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	11,900,000.00	
1	22	0701	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	482,723,695.00	
1	23	0701	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	4,781,500.00	
1	02	0701	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8,600,000.00	
1	08	0701	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	13,762,500.00	
1	17	0701	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	54,550,000.00	
1	20	0701	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8,540,000.00	
1	06	0701	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12,354,400.00	
1	06	0701	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	2,983,700.00	
1	20	0701	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	27,387,500.00	
1	20	0702		Kelurahan Sentul	848,675,000.00	Kelurahan Sentul
1	20	0702	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	63,257,850.00	
1	20	0702	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	101,514,150.00	
1	20	0702	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35,500,000.00	
1	20	0702	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10,129,200.00	
1	13	0702	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	45,325,000.00	
1	19	0702	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	4,911,000.00	
1	22	0702	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	420,622,000.00	

1	23	0702	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	2,020,000.00	
1	02	0702	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	41,200,000.00	
1	08	0702	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	8,525,000.00	
1	17	0702	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	60,320,000.00	
1	20	0702	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1,440,000.00	
1	06	0702	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18,179,700.00	
1	06	0702	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	3,049,700.00	
1	20	0702	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	32,681,400.00	
1	20	0703		Kelurahan Kauman	850,311,400.00	Kelurahan Kauman
1	20	0703	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	72,203,300.00	
1	20	0703	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	23,628,600.00	
1	20	0703	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	48,100,000.00	
1	20	0703	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8,850,000.00	
1	13	0703	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	59,321,500.00	
1	19	0703	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	16,120,000.00	
1	22	0703	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	435,445,000.00	
1	23	0703	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	4,488,000.00	
1	02	0703	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	68,040,000.00	
1	08	0703	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	13,000,000.00	
1	17	0703	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	29,390,000.00	
1	20	0703	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8,050,000.00	
1	06	0703	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	27,825,000.00	
1	06	0703	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	7,850,000.00	
1	20	0703	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	28,000,000.00	
1	20	0704		Kelurahan Tanggung	745,069,300.00	Kelurahan Tanggung
1	20	0704	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	63,640,400.00	
1	20	0704	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	51,946,000.00	
1	20	0704	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	34,220,000.00	
1	20	0704	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8,280,900.00	
1	13	0704	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	22,500,000.00	
1	19	0704	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	9,264,000.00	
1	22	0704	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	393,301,000.00	
1	23	0704	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	3,917,000.00	
1	02	0704	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	42,576,000.00	
1	08	0704	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	10,277,500.00	

1	17	0704	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	34,530,000.00	Kelurahan Bendo
1	20	0704	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8,906,000.00	
1	06	0704	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21,514,500.00	
1	06	0704	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	4,783,500.00	
1	20	0704	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	35,412,500.00	
1	20	0705		Kelurahan Bendo	647,867,000.00	
1	20	0705	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	52,987,200.00	
1	20	0705	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	40,870,000.00	
1	20	0705	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	32,100,000.00	
1	20	0705	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8,684,600.00	
1	13	0705	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	30,000,000.00	
1	19	0705	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	9,000,000.00	
1	22	0705	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	295,768,700.00	
1	23	0705	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	4,400,000.00	
1	02	0705	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	40,800,000.00	
1	08	0705	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	11,200,000.00	
1	17	0705	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	60,525,000.00	
1	20	0705	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9,150,000.00	
1	06	0705	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15,790,000.00	
1	06	0705	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	12,591,500.00	
1	20	0705	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	24,000,000.00	
1	20	0706		Kelurahan Kepanjenlor	781,490,400.00	Kelurahan Kepanjenlor
1	20	0706	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	56,599,150.00	
1	20	0706	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	65,573,700.00	
1	20	0706	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	38,215,000.00	
1	20	0706	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6,268,050.00	
1	13	0706	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	30,499,900.00	
1	19	0706	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	6,000,000.00	
1	22	0706	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	380,655,000.00	
1	23	0706	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	5,000,000.00	
1	02	0706	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	80,650,000.00	
1	08	0706	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	4,000,000.00	
1	17	0706	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	51,779,600.00	
1	20	0706	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5,000,000.00	
1	06	0706	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16,750,000.00	

1	06	0706	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	5,000,000.00	Kelurahan Kepanjenki dul
1	20	0706	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	29,500,000.00	
1	20	0707		Kelurahan Kepanjenkidul	917,334,472.00	
1	20	0707	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	67,594,200.00	
1	20	0707	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	52,162,500.00	
1	20	0707	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	29,992,000.00	
1	20	0707	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10,523,000.00	
1	13	0707	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	22,810,000.00	
1	19	0707	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	9,800,000.00	
1	22	0707	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	443,044,222.00	
1	23	0707	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	7,396,000.00	
1	02	0707	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	91,080,000.00	
1	08	0707	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	34,360,000.00	
1	17	0707	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	66,688,000.00	
1	20	0707	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5,658,000.00	
1	19	0707	18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	12,685,250.00	
1	06	0707	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24,951,300.00	
1	06	0707	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	6,590,000.00	
1	20	0707	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	32,000,000.00	
1	20	08		Kecamatan Sukorejo	9,069,806,447.00	Kecamatan Sukorejo
1	20	08	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	538,920,005.00	
1	20	08	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	915,912,730.00	
1	20	08	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	86,229,300.00	
1	20	08	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	45,500,300.00	
1	13	08	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	5,588,952,816.00	
1	19	08	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	106,687,400.00	
1	22	08	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	1,121,742,596.00	
1	23	08	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	17,730,100.00	
1	13	08	16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH	0.00	
1	08	08	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	76,191,000.00	
1	17	08	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	74,133,300.00	
1	20	08	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	68,757,200.00	
1	19	08	18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	25,682,700.00	
1	06	08	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	28,523,800.00	
1	06	08	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	33,687,700.00	

1	20	08	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	341,155,500.00	
1	20	0801		Kelurahan Pakunden	894,722,550.00	Kelurahan Pakunden
1	20	0801	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	90,699,750.00	
1	20	0801	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	97,978,400.00	
1	20	0801	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	41,975,000.00	
1	20	0801	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8,200,000.00	
1	19	0801	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	24,728,000.00	
1	22	0801	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	466,902,600.00	
1	23	0801	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	9,680,200.00	
1	02	0801	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4,000,000.00	
1	08	0801	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	11,880,000.00	
1	17	0801	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	41,510,000.00	
1	20	0801	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	12,810,000.00	
1	06	0801	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16,709,000.00	
1	06	0801	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	18,469,600.00	
1	20	0801	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	49,180,000.00	
1	20	0802		Kelurahan Blitar	650,011,600.00	Kelurahan Blitar
1	20	0802	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	57,528,600.00	
1	20	0802	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	16,015,000.00	
1	20	0802	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	31,240,000.00	
1	20	0802	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5,000,000.00	
1	13	0802	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	44,320,000.00	
1	19	0802	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	5,400,000.00	
1	22	0802	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	359,000,000.00	
1	23	0802	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	4,375,000.00	
1	02	0802	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	21,640,000.00	
1	08	0802	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	6,140,000.00	
1	17	0802	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	38,495,000.00	
1	20	0802	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9,758,000.00	
1	06	0802	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13,700,000.00	
1	20	0802	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	37,400,000.00	
1	20	0803		Kelurahan Tlumpu	646,767,000.00	Kelurahan Tlumpu
1	20	0803	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	62,529,750.00	
1	20	0803	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	54,805,600.00	
1	20	0803	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	32,415,000.00	

1	20	0803	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11,078,900.00	
1	13	0803	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	15,390,000.00	
1	19	0803	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	4,806,000.00	
1	22	0803	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	332,784,350.00	
1	23	0803	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	4,059,000.00	
1	02	0803	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	47,700,000.00	
1	08	0803	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	3,572,500.00	
1	17	0803	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	30,997,000.00	
1	20	0803	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7,079,000.00	
1	06	0803	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24,076,000.00	
1	06	0803	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	8,273,900.00	
1	20	0803	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	7,200,000.00	
1	20	0804		Kelurahan Turi	730,000,000.00	Kelurahan Turi
1	20	0804	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	46,239,900.00	
1	20	0804	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	172,322,250.00	
1	20	0804	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35,800,000.00	
1	20	0804	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2,242,800.00	
1	13	0804	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	23,790,000.00	
1	19	0804	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	4,180,000.00	
1	22	0804	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	337,030,650.00	
1	23	0804	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	562,800.00	
1	02	0804	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	26,680,000.00	
1	08	0804	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	3,750,000.00	
1	17	0804	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	30,210,000.00	
1	20	0804	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2,805,000.00	
1	19	0804	18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	16,215,000.00	
1	06	0804	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10,680,400.00	
1	06	0804	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	236,000.00	
1	20	0804	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	17,255,200.00	
1	20	0805		Kelurahan Karangsari	683,926,150.00	Kelurahan Karangsari
1	20	0805	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	66,333,550.00	
1	20	0805	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	71,386,800.00	
1	20	0805	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	32,561,000.00	
1	20	0805	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	13,808,900.00	

1	13	0805	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	55,437,900.00	
1	19	0805	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	15,603,100.00	
1	22	0805	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	265,018,400.00	
1	23	0805	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	4,162,900.00	
1	02	0805	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	41,495,800.00	
1	08	0805	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	14,252,800.00	
1	17	0805	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	31,824,400.00	
1	20	0805	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8,837,800.00	
1	06	0805	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13,329,300.00	
1	06	0805	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	6,640,150.00	
1	20	0805	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	43,233,350.00	
1	20	0806		Kelurahan Sukorejo	1,110,164,400.00	Kelurahan Sukorejo
1	20	0806	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	70,062,200.00	
1	20	0806	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	63,566,000.00	
1	20	0806	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	40,060,000.00	
1	20	0806	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9,100,000.00	
1	13	0806	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	90,695,600.00	
1	19	0806	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	3,000,000.00	
1	22	0806	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	532,642,500.00	
1	23	0806	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	7,245,000.00	
1	02	0806	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	87,687,100.00	
1	08	0806	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	9,750,000.00	
1	17	0806	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	20,580,000.00	
1	20	0806	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14,662,000.00	
1	06	0806	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	27,849,800.00	
1	06	0806	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	19,404,200.00	
1	20	0806	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	113,860,000.00	
1	20	0807		Kelurahan Tanjungsari	857,049,550.00	Kelurahan Tanjungsari
1	20	0807	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	59,320,310.00	
1	20	0807	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	81,704,640.00	
1	20	0807	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	39,462,500.00	
1	20	0807	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7,289,400.00	
1	13	0807	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	57,619,000.00	
1	19	0807	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	4,200,000.00	
1	22	0807	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	477,459,850.00	

1	23	0807	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	1,491,900.00	
1	02	0807	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8,400,000.00	
1	08	0807	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	4,549,000.00	
1	17	0807	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	21,484,500.00	
1	20	0807	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1,900,000.00	
1	19	0807	18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	6,735,000.00	
1	06	0807	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	29,118,450.00	
1	20	0807	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	56,315,000.00	
1	20	09		Kecamatan Sananwetan	7,699,442,080.00	Kecamatan Sananweta n
1	20	09	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	580,840,605.00	
1	20	09	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	780,205,625.00	
1	20	09	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	88,406,100.00	
1	20	09	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	35,947,000.00	
1	13	09	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	4,860,111,700.00	
1	19	09	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	91,728,550.00	
1	22	09	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	620,145,450.00	
1	23	09	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	17,771,300.00	
1	13	09	16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH	0.00	
1	08	09	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	51,141,600.00	
1	17	09	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	104,209,500.00	
1	20	09	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	67,680,100.00	
1	19	09	18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	64,018,100.00	
1	06	09	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	32,755,650.00	
1	06	09	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	16,491,850.00	
1	20	09	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	287,988,950.00	
1	20	0901		Kelurahan Gedog	988,834,300.00	Kelurahan Gedog
1	20	0901	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	68,420,450.00	
1	20	0901	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	82,489,050.00	
1	20	0901	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	36,801,000.00	
1	20	0901	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14,994,500.00	
1	13	0901	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	44,316,500.00	
1	19	0901	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	17,240,800.00	
1	22	0901	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	489,544,100.00	
1	23	0901	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	7,223,400.00	
1	02	0901	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57,723,100.00	

1	08	0901	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	10,832,500.00	
1	17	0901	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	50,389,000.00	
1	20	0901	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7,035,200.00	
1	06	0901	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	34,918,500.00	
1	06	0901	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	3,610,200.00	
1	20	0901	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	63,296,000.00	
1	20	0902		Kelurahan Plosokerep	608,617,000.00	Kelurahan Plosokerep
1	20	0902	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	49,930,000.00	
1	20	0902	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	33,272,000.00	
1	20	0902	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	27,133,000.00	
1	20	0902	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8,205,000.00	
1	13	0902	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	36,000,000.00	
1	19	0902	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	7,020,000.00	
1	22	0902	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	299,512,000.00	
1	23	0902	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	4,000,000.00	
1	02	0902	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	58,975,000.00	
1	08	0902	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	8,600,000.00	
1	17	0902	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	17,370,000.00	
1	20	0902	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5,400,000.00	
1	06	0902	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16,300,000.00	
1	06	0902	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	6,900,000.00	
1	20	0902	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	30,000,000.00	
1	20	0903		Kelurahan Klampok	696,275,000.00	Kelurahan Klampok
1	20	0903	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	74,265,550.00	
1	20	0903	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	49,791,600.00	
1	20	0903	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30,240,000.00	
1	20	0903	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6,048,100.00	
1	13	0903	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	26,248,500.00	
1	19	0903	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	8,400,000.00	
1	22	0903	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	361,874,000.00	
1	23	0903	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	4,437,900.00	
1	08	0903	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	15,309,800.00	
1	17	0903	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	39,300,000.00	
1	06	0903	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17,687,500.00	
1	20	0903	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	62,672,050.00	

1	20	0904		Kelurahan Sananwetan	1,204,159,600.00	Kelurahan Sananwetan
1	20	0904	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	93,375,900.00	
1	20	0904	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	86,962,193.00	
1	20	0904	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	52,190,700.00	
1	20	0904	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14,220,800.00	
1	13	0904	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	33,173,700.00	
1	19	0904	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	8,513,700.00	
1	22	0904	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	539,012,450.00	
1	23	0904	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	9,371,500.00	
1	02	0904	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90,814,700.00	
1	08	0904	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	5,022,550.00	
1	17	0904	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	163,192,300.00	
1	20	0904	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3,916,300.00	
1	06	0904	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	34,093,400.00	
1	06	0904	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	3,757,500.00	
1	20	0904	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	66,541,907.00	
1	20	0905		Kelurahan Rembang	762,339,000.00	Kelurahan Rembang
1	20	0905	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	62,181,450.00	
1	20	0905	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	104,059,950.00	
1	20	0905	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	49,805,000.00	
1	20	0905	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12,445,000.00	
1	13	0905	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	13,945,000.00	
1	19	0905	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	12,325,000.00	
1	22	0905	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	342,838,000.00	
1	23	0905	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	7,163,400.00	
1	02	0905	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	28,150,000.00	
1	08	0905	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	13,436,000.00	
1	17	0905	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	49,910,000.00	
1	20	0905	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9,600,000.00	
1	19	0905	18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	12,450,000.00	
1	06	0905	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12,815,200.00	
1	06	0905	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	3,215,000.00	
1	20	0905	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	28,000,000.00	
1	20	0906		Kelurahan Karangtengah	793,570,000.00	Kelurahan Karangtengah
1	20	0906	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	81,077,850.00	

1	20	0906	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	63,913,800.00	
1	20	0906	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	34,200,000.00	
1	20	0906	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15,332,000.00	
1	13	0906	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	70,698,000.00	
1	19	0906	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	10,080,000.00	
1	22	0906	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	356,198,850.00	
1	23	0906	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	5,472,000.00	
1	02	0906	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	61,560,000.00	
1	08	0906	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	3,600,000.00	
1	17	0906	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	28,160,000.00	
1	20	0906	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5,600,000.00	
1	06	0906	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16,837,500.00	
1	06	0906	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	6,540,000.00	
1	20	0906	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	34,300,000.00	Kelurahan Bendogerit
1	20	0907		Kelurahan Bendogerit	1,082,111,948.00	
1	20	0907	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	57,082,950.00	
1	20	0907	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	200,526,498.00	
1	20	0907	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	34,435,000.00	
1	20	0907	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	4,709,800.00	
1	13	0907	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	39,175,000.00	
1	19	0907	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	9,220,000.00	
1	22	0907	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	545,057,050.00	
1	23	0907	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	5,921,400.00	
1	02	0907	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19,200,000.00	
1	08	0907	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	20,176,150.00	
1	17	0907	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	22,265,000.00	
1	20	0907	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14,647,700.00	Dinas Pendapatan
1	19	0907	18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	9,040,000.00	
1	06	0907	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23,435,000.00	
1	06	0907	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	0.00	
1	20	0907	29	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH	77,220,400.00	
1	20	10		Dinas Pendapatan	4,492,963,645.00	
1	20	10	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	763,084,425.00	
1	20	10	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	358,321,200.00	
1	20	10	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	86,761,000.00	

1	20	10	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	13,321,000.00	
1	20	10	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3,271,476,020.00	
1	20	11	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	449,030,300.00	
1	20	11	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	161,572,000.00	
1	20	11	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	17,500,000.00	
1	20	11	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	66,650,000.00	
1	20	11	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	32,500,000.00	
1	16	11	17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN	246,997,700.00	
1	20	12		Badan Kepegawaian Daerah	11,650,491,765.00	Badan Kepegawaian Daerah
1	20	12	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3,851,642,500.00	
1	20	12	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	152,507,300.00	
1	20	12	04	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS	118,055,600.00	
1	20	12	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	85,962,500.00	
1	20	12	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	27,093,900.00	
1	20	12	27	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1,856,233,284.00	
1	20	12	28	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	5,558,996,681.00	
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5,252,893,147.00	
1	22	01		Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	4,451,868,447.00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1	22	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	359,684,547.00	
1	22	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	201,597,050.00	
1	22	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	127,721,000.00	
1	22	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	26,007,500.00	
1	11	01	15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	95,081,650.00	
1	12	01	15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	951,562,000.00	
1	22	01	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	1,204,486,800.00	
1	11	01	16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	726,184,750.00	
1	12	01	16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	101,978,500.00	
1	11	01	17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	135,616,750.00	
1	12	01	17	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	205,085,000.00	
1	11	01	18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	100,000,000.00	
1	12	01	18	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	216,862,900.00	
1	22	0101		UPT Bapemas dan KB Kecamatan Kepanjenkidul	270,705,050.00	UPT Bapemas dan KB Kecamatan Kepanjenkidul
1	22	0101	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	53,107,790.00	
1	22	0101	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	9,156,000.00	

1	12	0101	15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	155,321,600.00	
1	12	0101	16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	12,639,400.00	
1	12	0101	18	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	32,286,360.00	
1	12	0101	20	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	8,193,900.00	
1	22	0102		UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sukorejo	244,451,800.00	UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sukorejo
1	22	0102	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	49,634,650.00	
1	22	0102	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	11,935,000.00	
1	12	0102	15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	115,053,700.00	
1	12	0102	16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	18,626,000.00	
1	12	0102	18	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	21,609,450.00	UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sananweta n
1	12	0102	20	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	27,593,000.00	
1	22	0103		UPT Bapemas dan KB Kecamatan Sananwetan	285,867,850.00	
1	22	0103	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	44,612,100.00	
1	22	0103	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	11,930,000.00	
1	12	0103	15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	177,714,960.00	
1	12	0103	16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	15,030,800.00	
1	12	0103	18	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	18,873,630.00	
1	12	0103	20	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	17,706,360.00	Kantor Kearsipan dan Perpustaka an
1	24			KEARSIPAN	1,804,454,446.00	
1	24	01		Kantor Kearsipan dan Perpustakaan	138,549,000.00	
1	24	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	288,707,215.00	
1	24	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	363,271,535.00	
1	24	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	121,665,000.00	
1	24	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	26,443,000.00	
1	26	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	571,156,655.00	
1	24	01	15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	94,889,100.00	
1	24	01	16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN BARANG/ARSIP DAERAH	242,980,741.00	
1	24	01	17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	48,257,500.00	
1	24	01	18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	47,083,700.00	
2				URUSAN PILIHAN	34,517,013,150.00	URUSAN PILIHAN
2	01			PERTANIAN	9,376,283,900.00	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
2	01	01		Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	9,051,283,900.00	
2	01	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	461,628,436.00	
2	01	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	278,801,564.00	
2	01	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	82,480,000.00	

2	01	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12,180,000.00	
2	01	01	15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	729,650,300.00	
2	21	01	15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (Pertanian/Perkebunan)	471,800,100.00	
2	05	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	1,438,064,600.00	
2	01	01	16	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	316,237,800.00	
2	01	01	17	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	278,084,200.00	
2	01	01	18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	4,135,073,400.00	
2	01	01	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	40,750,000.00	
2	01	01	20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	83,328,500.00	
2	01	01	21	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	723,205,000.00	
2	01	0101		UPTD BBI dan PIAIH	150,000,000.00	UPTD BBI dan PIAIH
2	01	0101	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	69,095,739.00	
2	01	0101	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	38,635,850.00	
2	05	0101	15	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	42,268,411.00	
2	01	0102		UPTD RPH	175,000,000.00	UPTD RPH
2	01	0102	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	123,093,500.00	
2	01	0102	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	47,131,500.00	
2	01	0102	20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	4,775,000.00	
2	04			PARIWISATA	14,074,808,250.00	
2	04	01		Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	14,074,808,250.00	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2	04	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,375,379,250.00	
2	04	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	921,722,850.00	
2	04	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	37,636,000.00	
2	04	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	113,394,400.00	
2	17	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	481,287,000.00	
2	18	01	15	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	964,364,300.00	
2	04	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	689,044,700.00	
2	04	01	16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	3,640,987,450.00	
2	17	01	16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	737,811,000.00	
2	18	01	16	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	54,913,000.00	
2	04	01	17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	834,029,000.00	
2	17	01	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	1,637,890,000.00	
2	18	01	17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	404,571,000.00	
2	18	01	18	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	1,181,778,300.00	
2	06			PERDAGANGAN	5,782,557,050.00	
2	06	01		Kantor Pengelola Pasar	5,782,557,050.00	Kantor Pengelola Pasar
2	06	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	187,875,300.00	

2	06	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	120,328,000.00	
2	06	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30,000,000.00	
2	06	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8,154,000.00	
2	06	01	16	PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	5,436,199,750.00	
2	07			PERINDUSTRIAN	5,283,363,950.00	
2	07	01		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5,283,363,950.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	299,520,850.00	
2	07	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	224,892,150.00	
2	07	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	87,025,000.00	
2	07	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	28,250,000.00	
2	16	01	15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	2,151,336,650.00	
2	06	01	15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	321,561,700.00	
2	07	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	1,929,088,850.00	
2	06	01	16	PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	82,863,450.00	
2	06	01	17	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	116,905,500.00	
2	07	01	21	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL	41,919,800.00	
				J U M L A H	554,287,893,909.33	

Sumber : APBD Kota Blitar TA. 2016, BPKAD

Tabel 8.2
Program Prioritas Dalam APBD Kota Blitar Tahun 2017

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	5	6
1	URUSAN WAJIB		313,436,004,895.60	
1 01	PENDIDIKAN		55,205,059,979.00	
1 01 01	Dinas Pendidikan		32,526,761,066.00	Dinas Pendidikan
1 01 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	1,066,168,166.00	
1 01 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	804,898,400.00	
1 01 01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	30,000,000.00	
1 01 01 07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	135,735,000.00	
1 01 01 15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	APK PAUD & TK	5,794,768,500.00	
1 01 01 16	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Tercapainya APM SD/MI dan SMP/MTs, Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs, Prosentase lembaga yang melaksanakan pelaporan keuangan penggunaan dana madrasah diniyah secara tertib,	15,780,973,450.00	
1 01 01 17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Tercapainya APM SMA dan SMK,	3,929,612,850.00	
1 01 01 18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Presentase kinerja manajemen pengelolaan lembaga dengan nilai amat baik	1,721,681,000.00	
1 01 01 20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase guru yang berkualifikasi LAYAK	2,361,518,500.00	
1 01 01 21	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Prosentase lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK Prosentase lembaga pendidikan yang memiliki keunggulan lokal	901,405,200.00	
1 01 0101	UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul		2,383,725,938.00	UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul
1 01 0101 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	278,855,490.00	
1 01 0101 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	223,950,348.00	
1 01 0101 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
1 01 0101 07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	30,000,000.00	
1 01 0101 15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	APK PAUD & TK	599,474,200.00	
1 01 0101 16	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Tercapainya APM SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI,	1,237,960,700.00	
1 01 0101 20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase guru yang berkualifikasi LAYAK	7,485,200.00	
1 01 0102	UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo		2,140,181,300.00	UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo
1 01 0102 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	306,063,450.00	
1 01 0102 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	131,540,250.00	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	5	6
1 01 0102 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
1 01 0102 07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	30,000,000.00	
1 01 0102 15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	APK PAUD & TK	592,594,500.00	
1 01 0102 16	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Tercapainya APM SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI,	1,061,471,500.00	
1 01 0102 20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase guru yang berkualifikasi LAYAK	12,511,600.00	
1 01 0103	UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan		2,616,499,850.00	UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan
1 01 0103 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	340,219,170.00	
1 01 0103 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	159,678,580.00	
1 01 0103 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
1 01 0103 07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	30,000,000.00	
1 01 0103 15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	APK PAUD & TK	638,129,000.00	
1 01 0103 16	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Tercapainya APM SD/MI, Angka Kelulusan SD/MI,	1,412,994,600.00	
1 01 0103 20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase guru yang berkualifikasi LAYAK	29,478,500.00	
1 01 0104	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1		889,665,700.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
1 01 0104 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	165,621,700.00	
1 01 0104 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	10,662,000.00	
1 01 0104 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	4,000,000.00	
1 01 0104 07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
1 01 0104 16	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Tercapainya APM SMP/MTs, Angka Kelulusan SMP/MTs,	684,382,000.00	
1 01 0105	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2		977,115,450.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
1 01 0105 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	118,441,585.00	
1 01 0105 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	62,383,000.00	
1 01 0105 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	4,000,000.00	
1 01 0105 07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
1 01 0105 16	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Tercapainya APM SMP/MTs, Angka Kelulusan SMP/MTs,	767,290,865.00	
1 01 0106	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3		872,642,100.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3
1 01 0106 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	85,014,110.00	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	5	6
1 01 0106 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	37,279,890.00	
1 01 0106 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	4,000,000.00	
1 01 0106 07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
1 01 0106 16	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Tercapainya APM SMP/MTs, Angka Kelulusan SMP/MTs,	721,348,100.00	
1 01 0107	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4		784,855,500.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4
1 01 0107 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	93,973,500.00	
1 01 0107 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	78,980,500.00	
1 01 0107 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	4,000,000.00	
1 01 0107 07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
1 01 0107 16	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Tercapainya APM SMP/MTs, Angka Kelulusan SMP/MTs,	582,901,500.00	
1 01 0108	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5		649,304,500.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
1 01 0108 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	120,044,900.00	
1 01 0108 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	9,595,400.00	
1 01 0108 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	4,000,000.00	
1 01 0108 07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
1 01 0108 16	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Tercapainya APM SMP/MTs, Angka Kelulusan SMP/MTs,	490,664,200.00	
1 01 0109	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6		512,413,850.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6
1 01 0109 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	131,681,700.00	
1 01 0109 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	108,244,400.00	
1 01 0109 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	4,000,000.00	
1 01 0109 07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
1 01 0109 16	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Tercapainya APM SMP/MTs, Angka Kelulusan SMP/MTs,	243,487,750.00	
1 01 0110	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7		741,489,500.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7
1 01 0110 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	114,397,500.00	
1 01 0110 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	149,512,700.00	

1	01	0110	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	4,000,000.00	
1	01	0110	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
1	01	0110	16	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Tercapainya APM SMP/MTs, Angka Kelulusan SMP/MTs,	448,579,300.00	
1	01	0111		UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8		716,913,100.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8
1	01	0111	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	124,800,700.00	
1	01	0111	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	51,871,900.00	
1	01	0111	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	4,000,000.00	
1	01	0111	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
1	01	0111	16	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Tercapainya APM SMP/MTs, Angka Kelulusan SMP/MTs,	511,240,500.00	
1	01	0112		UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9		698,554,000.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9
1	01	0112	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	138,521,500.00	
1	01	0112	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	75,304,300.00	
1	01	0112	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	4,000,000.00	
1	01	0112	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
1	01	0112	16	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Tercapainya APM SMP/MTs, Angka Kelulusan SMP/MTs,	455,728,200.00	
1	01	0113		UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10		212,169,500.00	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10
1	01	0113	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	125,994,500.00	
1	01	0113	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	12,275,200.00	
1	01	0113	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	4,000,000.00	
1	01	0113	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
1	01	0113	16	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Tercapainya APM SMP/MTs, Angka Kelulusan SMP/MTs,	44,899,800.00	
1	01	0114		UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1		1,256,214,825.00	UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 1
1	01	0114	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	259,076,500.00	
1	01	0114	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	4,616,250.00	
1	01	0114	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	4,000,000.00	
1	01	0114	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	

1	01	0114	17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	APM SMA dan SMK	963,522,075.00	
1	01	0115		UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 2		1,020,918,000.00	UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 2
1	01	0115	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	178,900,300.00	
1	01	0115	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	16,025,000.00	
1	01	0115	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	4,000,000.00	
1	01	0115	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	24,600,000.00	
1	01	0115	17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	APM SMA dan SMK	797,392,700.00	
1	01	0116		UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 3		1,164,357,500.00	UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 3
1	01	0116	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	204,379,700.00	
1	01	0116	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	24,330,400.00	
1	01	0116	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	4,000,000.00	
1	01	0116	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
1	01	0116	17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	APM SMA dan SMK	906,647,400.00	
1	01	0117		UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 4		1,382,199,000.00	UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri 4
1	01	0117	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	297,043,000.00	
1	01	0117	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	14,628,200.00	
1	01	0117	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	4,000,000.00	
1	01	0117	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
1	01	0117	17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	APM SMA dan SMK	1,041,527,800.00	
1	01	0118		UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1		1,917,208,000.00	UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1
1	01	0118	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	193,621,700.00	
1	01	0118	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	10,902,000.00	
1	01	0118	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	4,000,000.00	
1	01	0118	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
1	01	0118	17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	APM SMA dan SMK	1,683,684,300.00	
1	01	0119		UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2		968,681,800.00	UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2
1	01	0119	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	201,421,940.00	
1	01	0119	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	13,580,000.00	
1	01	0119	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	4,000,000.00	

1	01	0119	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
1	01	0119	17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	APM SMA dan SMK	724,679,860.00	
1	01	0120		UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3		773,189,500.00	UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3
1	01	0120	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	251,198,100.00	
1	01	0120	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	53,884,400.00	
1	01	0120	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	4,000,000.00	
1	01	0120	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
1	01	0120	17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	APM SMA dan SMK	439,107,000.00	
1	02			KESEHATAN		114,103,438,800.00	
1	02	01		Dinas Kesehatan		17,749,688,500.00	
1	02	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	1,249,874,700.00	Dinas Kesehatan
1	02	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	376,234,700.00	
1	02	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	30,000,000.00	
1	02	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	80,000,000.00	
1	02	01	15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Prosentase ketersediaan obat yang memenuhi syarat	1,189,800,050.00	
1	02	01	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Harapan Hidup	6,535,708,900.00	
1	02	01	18	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase kelurahan siaga aktif stara Purnama dan Mandiri (PURI)	1,484,781,200.00	
1	02	01	19	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Prevalensi Gizi buruk pada balita	586,180,950.00	
1	02	01	20	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Prosentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standar kesling	778,116,400.00	
1	02	01	21	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT	Prosentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit dan masalah kesehatan	892,108,900.00	
1	02	01	22	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Prosentase Peningkatan Mutu dan Standart Pelayanan Kesehatan	33,322,900.00	
1	02	01	26	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Prosentase kecukupan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin	3,847,159,800.00	
1	02	01	27	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	Prosentase Peningkatan Pembangunan Kesehatan	112,388,500.00	
1	02	01	28	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Angka Kematian Balita (AKABA)	98,290,100.00	
1	02	01	30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Prosentase Lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	42,166,800.00	
1	02	01	31	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	Prosentase pengawasan keamanan pangan	120,000,000.00	
1	02	01	32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK	Angka Kematian Ibu (AKI)	176,862,500.00	
1	02	01	34	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Prosentase peningkatan kualitas tenaga kesehatan	116,692,100.00	
1	02	0101		UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul		2,954,063,900.00	
1	02	0101	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	228,200,200.00	UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul

1	02	0101	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	195,940,400.00	
1	02	0101	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
1	02	0101	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	24,980,000.00	
1	02	0101	15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Prosentase ketersediaan obat yang memenuhi syarat	51,540,750.00	
1	02	0101	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Harapan Hidup	656,501,300.00	
1	02	0101	18	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase kelurahan siaga aktif stara Purnama dan Mandiri (PURI)	48,749,500.00	
1	02	0101	19	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada balita	125,403,400.00	
1	02	0101	20	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Prosentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standar kesling	45,603,800.00	
1	02	0101	21	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT	Prosentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit dan masalah kesehatan	183,376,250.00	
1	02	0101	22	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Prosentase Peningkatan Mutu dan Standart Pelayanan Kesehatan	16,000,000.00	
1	02	0101	23	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	98,200,300.00	
1	02	0101	26	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Prosentase kecukupan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin	1,224,000,000.00	
1	02	0101	27	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	Prosentase Peningkatan Pembangunan Kesehatan	24,549,500.00	
1	02	0101	32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK	Angka Kematian Ibu (AKI)	25,018,500.00	
1	02	0102		UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo		2,307,260,000.00	UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo
1	02	0102	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	95,538,550.00	
1	02	0102	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	23,322,200.00	
1	02	0102	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
1	02	0102	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
1	02	0102	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Harapan Hidup	517,014,000.00	
1	02	0102	18	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase kelurahan siaga aktif stara Purnama dan Mandiri (PURI)	39,353,000.00	
1	02	0102	19	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada balita	110,272,750.00	
1	02	0102	20	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Prosentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standar kesling	18,778,200.00	
1	02	0102	21	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT	Prosentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit dan masalah kesehatan	143,300,000.00	
1	02	0102	22	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Prosentase Peningkatan Mutu dan Standart Pelayanan Kesehatan	9,000,000.00	
1	02	0102	26	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Prosentase kecukupan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin	1,262,883,800.00	
1	02	0102	32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK	Angka Kematian Ibu (AKI)	56,797,500.00	
1	02	0103		UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan		2,962,426,400.00	UPTD Kesehatan Kecamatan

1	02	0103	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	225,922,700.00	Sananwetan
1	02	0103	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80,448,300.00	
1	02	0103	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
1	02	0103	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
1	02	0103	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Harapan Hidup	897,299,000.00	
1	02	0103	18	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase kelurahan siaga aktif stara Purnama dan Mandiri (PURI)	68,444,100.00	
1	02	0103	19	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk pada balita	98,224,000.00	
1	02	0103	20	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Prosentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standar kesling	56,763,300.00	
1	02	0103	21	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT	Prosentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit dan masalah kesehatan	148,599,000.00	
1	02	0103	22	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Prosentase Peningkatan Mutu dan Standart Pelayanan Kesehatan	20,220,000.00	
1	02	0103	23	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	49,886,400.00	
1	02	0103	26	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Prosentase kecukupan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin	1,250,288,000.00	
1	02	0103	27	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	Prosentase Peningkatan Pembangunan Kesehatan	7,672,500.00	
1	02	0103	32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK	Angka Kematian Ibu (AKI)	27,659,100.00	
1	02	02		Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo		88,130,000,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo
1	02	02	24	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU	Prosentase capaian standar sarana prasarana Rumah Sakit kelas B Non Pendidikan sebagai Rumah Sakit Rujukan	10,130,000,000.00	
1	02	02	29	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	Prosentase elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standart akreditasi RS Versi 2012	75,000,000,000.00	
1	02	02	36	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KESEHATAN)	Persentase peningkatan prporisi kelengkapan alat kesehatan ideal	3,000,000,000.00	
1	03			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		50,571,392,800.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		50,571,392,800.00	
1	03	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	375,079,400.00	
1	03	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	569,783,200.00	
1	03	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,000.00	
1	03	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
1	10	01	15	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Prosentase tanah asset bersertifikat	341,862,900.00	
1	03	01	16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	Prosentase saluran drainase / gorong-gorong terbangun	304,000,000.00	

1	03	01	17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Prosentase Turap/Talud/Bronjong terbangun	1,092,342,100.00	
1	03	01	18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Prosentase jalan dalam kondisi mantap dan berselamatan	21,251,319,900.00	
1	03	01	19	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	35,680,000.00	
1	03	01	20	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik	7,369,215,600.00	
1	03	01	21	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Prosentase masyarakat yang terlayani air bersih, Prosentase masyarakat yang terlayani air limbah	6,240,600,400.00	
1	03	01	23	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KOTA	Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun	10,654,499,000.00	
1	03	01	24	PROGRAM STANDARISASI BIDANG PEKERJAAN UMUM	Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum	589,873,200.00	
1	03	01	33	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan digital di kota dan kecamatan	1,474,808,800.00	
1	03	01	34	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Persentase bangunan ber- IMB	106,031,800.00	
1	03	01	35	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang	86,296,500.00	
1	04			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		7,393,114,630.00	
1	04	01		Dinas Perumahan Rakyat		7,393,114,630.00	Dinas Perumahan Rakyat
1	04	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	245,165,100.00	
1	04	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	364,477,800.00	
1	04	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,000.00	
1	04	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
1	04	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Rumah Layak Huni	1,018,440,130.00	
1	04	01	16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Prosentase lingkungan sehat perumahan	866,995,100.00	
1	04	01	21	PROGRAM PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase penanganan kawasan permukiman prioritas	4,818,036,500.00	
1	05			KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		6,648,291,440.00	
1	05	01		Satuan Polisi Pamong Praja		6,648,291,440.00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	222,301,148.00	
1	05	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	345,316,442.00	
1	05	01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus	75,543,500.00	
1	05	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	15,075,000.00	
1	05	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,000.00	
1	05	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	

1	05	01	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase pos kamling aktif	12,173,700.00	
1	05	01	16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur	4,840,187,900.00	
1	05	01	22	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	Prosentase Penduduk yang mendapatkan Sosialisasi tentang Mitigasi Bencana	765,746,000.00	
1	05	01	23	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Prosentase anggota linmas yang memperoleh peningkatan kapasitas	146,479,900.00	
1	05	01	24	PROGRAM PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH	Prosentase penurunan pelanggaran Peraturan Derah	145,467,850.00	
1	06			SOSIAL		20,917,333,626.00	
1	06	01		Dinas Sosial		20,917,333,626.00	Dinas Sosial
1	06	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	522,401,200.00	
1	06	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	186,906,926.00	
1	06	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,000.00	
1	06	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
1	06	01	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tertangani	17,470,747,100.00	
1	06	01	16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH	Prosentase Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial	460,469,700.00	
1	06	01	17	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Prosentase lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina	1,446,808,700.00	
1	06	01	22	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG SOSIAL)	Prosentase peningkatan PMKS Terlatih	750,000,000.00	
1	08			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		3,866,268,397.00	
1	08	01		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3,866,268,397.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	08	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	387,919,799.00	
1	08	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	193,723,937.00	
1	08	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	8,254,000.00	
1	08	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,000.00	
1	08	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
1	08	01	15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Prosentase peserta sosialisasi/pelatihan yang terkait dengan kesetaraan gender yang memahami pengarusutamaan gender	158,277,500.00	
1	14	01	15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Prosentase Total Fertility Rate (rata-rata anak yang dilahirkan wanita usia subur)	1,722,924,700.00	
1	08	01	16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	Jumlah Penghargaan dalam bidang perempuan dan perlindungan anak yang diraih dalam setahun	246,515,250.00	
1	14	01	16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Prosentase Usia Kawin Pertama wanita kurang dari 20 tahun	16,381,650.00	

1	08	01	17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Mendapatkan Penanganan Oleh Petugas Terlatih	188,140,240.00	
1	14	01	17	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Prosentase Capaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	206,000,000.00	
1	08	01	18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Prosentase wanita yang menjadi anggota organisasi kewanitaan	491,643,521.00	
1	14	01	18	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	166,487,800.00	
1	09			PANGAN		6,711,833,000.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	09	01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		6,381,650,000.00	
1	09	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	449,475,000.00	
1	09	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	412,094,000.00	
1	09	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,000.00	
1	09	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
1	09	01	15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (Pertanian/Perkebunan)	Prosentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah, Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga (kg/kapita/bln), Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur	264,815,000.00	
1	01	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi ikan konsumsi, Produksi ikan hias, Produksi benih ikan, Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH	291,044,000.00	
1	03	01	16	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk)	312,000,000.00	
1	09	01	16	PROGRAM PEMBINAAN KONSUMSI PANGAN	Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan	198,322,000.00	
1	03	01	17	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 tahun	72,400,000.00	
1	09	01	17	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau	49,000,000.00	
1	03	01	18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Produktivitas padi tahun ini (ton/ha), Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam, Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur	2,550,283,400.00	
1	03	01	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Jumlah penyuluh pertanian berkinerja BAIK (sesuai kriteria Permentan No.91/Permentan/OT.14/9/2013)	103,110,000.00	
1	03	01	20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan, Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)	164,800,000.00	
1	03	01	21	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Produksi daging, Produksi susu, Produksi telur	390,186,000.00	

1	03	01	25	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM PETANI DAN LEMBAGA TANI	Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini	340,000,000.00	
1	01	01	25	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan konsumsi ikan	327,500,000.00	
1	03	01	26	PROGRAM PENANGANAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	Jumlah pelaku usaha pertanian yang menghasilkan produk layak dipasarkan	49,300,000.00	
1	01	01	26	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)	Prosentase petani peserta pelatihan yang menjawab post test dengan minimal jawaban 80% benar	51,936,000.00	
1	03	01	27	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN)	Prosentase petani peserta pelatihan yang menjawab post test dengan minimal jawaban 80% benar	275,384,600.00	
1	09	0101		UPTD BBI dan PIAIH		153,500,000.00	UPTD BBI dan PIAIH
1	09	0101	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	60,220,000.00	
1	09	0101	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	32,414,500.00	
1	01	0101	15	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH	49,661,500.00	
1	01	0101	25	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH	11,204,000.00	
1	09	0102		UPTD RPH		176,683,000.00	UPTD RPH
1	09	0102	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	104,907,100.00	
1	09	0102	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	51,352,900.00	
1	03	0102	20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan, Jumlah hewan yang dipotong di RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh & Halal)	20,423,000.00	
1	11			LINGKUNGAN HIDUP		18,142,146,552.00	
1	11	01		Dinas Lingkungan Hidup		18,142,146,552.00	Dinas Lingkungan Hidup
1	11	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	534,865,767.00	
1	11	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	1,022,460,908.00	
1	11	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,050.00	
1	11	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
1	11	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH	Prosentase sampah yang terolah di TPA	9,554,171,264.00	
1	11	01	16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan	331,449,600.00	
1	11	01	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase sumber mata air yang terkonservasi, Prosentase penurunan emisi GRK	498,911,300.00	
1	11	01	18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah akses informasi pengelolaan lingkungan	537,897,500.00	
1	11	01	19	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Prosentase pemenuhan baku mutu lingkungan	137,075,000.00	
1	11	01	20	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah terkelola	5,445,315,163.00	
1	12			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2,418,521,650.00	
1	12	01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2,418,521,650.00	Dinas Kependudukan

1	12	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	461,979,000.00	dan Pencatatan Sipil
1	12	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	337,233,850.00	
1	12	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,000.00	
1	12	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
1	12	01	15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase kepemilikan dokumen kependudukan	827,341,400.00	
1	12	01	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Prosentase kepemilikan akte pencatatan sipil	142,049,400.00	
1	12	01	17	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase Validitas data kependudukan	367,143,000.00	
1	12	01	18	PROGRAM PROFILE KEPENDUDUKAN	Jumlah lembaga yang memanfaatkan profil kependudukan	202,775,000.00	
1	15			PERHUBUNGAN		15,108,692,651.60	
1	15	01		Dinas Perhubungan		15,108,692,651.60	Dinas Perhubungan
1	15	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	537,655,800.00	
1	15	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	575,394,851.60	
1	15	01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus	70,054,000.00	
1	15	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	21,988,000.00	
1	15	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
1	15	01	15	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	Prosentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam keadaan baik	6,407,568,100.00	
1	15	01	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Prosentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	1,540,512,550.00	
1	15	01	18	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	3,759,575,600.00	
1	15	01	19	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	prosentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas	827,272,650.00	
1	15	01	20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Prosentase Kendaraan Yang lulus Uji Kendaraan	518,745,400.00	
1	15	01	21	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN	Prosentase Pelayanan Perparkiran	789,925,700.00	
1	16			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		3,107,088,000.00	
1	16	01		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		3,107,088,000.00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1	16	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	315,351,200.00	
1	16	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	518,572,000.00	
1	16	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,000.00	
1	16	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
1	02	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Persentase ketersediaan data statistik daerah	98,243,900.00	
1	20	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Persentase ketersediaan data statistik daerah	112,126,000.00	

1	16	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	Prosentase peningkatan penyebarluasan informasi melalui pendayagunaan media informasi	810,683,600.00	
1	16	01	16	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika	53,175,000.00	
1	16	01	17	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Prosentase kompetensi TIK aparatur pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan pos telekomunikasi melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok komunikasi sosial	128,734,300.00	
1	16	01	19	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Prosentase pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi dalam layanan pemerintahan dan layanan publik	856,325,500.00	
1	16	01	20	PROGRAM PENINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	Prosentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pembangunan di Kota Blitar	91,628,400.00	
1	21	01	48	PROGRAM PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI MILIK PEMERINTAH ATAU NEGARA	Prosentase informasi milik pemerintah / negara yang diamankan	42,248,100.00	
1	17			KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		1,917,855,460.00	
1	17	01		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		1,917,855,460.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1	17	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	440,079,900.00	
1	17	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	202,606,460.00	
1	17	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,000.00	
1	17	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
1	17	01	18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Prosentase koperasi aktif	215,019,300.00	
1	17	01	19	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KOPERASI DAN UKM)	Persentase UKM terlatih	471,921,600.00	
1	17	01	20	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat, Jumlah Koperasi yang Mendapat Fasilitas Dana Bergulir	432,054,400.00	
1	17	01	21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah LKM yang berbadan hukum koperasi	76,173,800.00	
1	18			PENANAMAN MODAL		2,836,848,650.00	
1	18	01		Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu		2,836,848,650.00	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu
1	18	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	469,295,600.00	
1	18	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	68,857,200.00	
1	18	01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus	22,000,000.00	
1	18	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,000.00	
1	18	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
1	07	01	15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	59,756,400.00	
1	18	01	15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Prosentase peningkatan kerjasama investasi	556,711,000.00	
1	07	01	16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Prosentase Peningkatan Kesempatan Kerja	257,082,200.00	

1	07	01	17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	401,656,050.00	
1	18	01	17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN	Prosentase Realisasi perizinan selesai tepat waktu	171,490,200.00	
1	07	01	18	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG TENAGA KERJA)	Persentase tenaga kerja terlatih	750,000,000.00	
1	19			KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		2,824,587,600.00	
1	19	01		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		2,824,587,600.00	
1	19	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	887,433,950.00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1	19	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	134,859,800.00	
1	19	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	22,725,500.00	
1	19	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
1	19	01	15	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Prosentase organisasi kepemudaan yang dibina	341,533,350.00	
1	19	01	16	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	Prosentase jumlah pemuda trampil	116,285,000.00	
1	19	01	17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam perkembangan olah raga yang ada di masyarakat	480,000,000.00	
1	19	01	18	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dipelihara	781,750,000.00	
1	23			PERPUSTAKAAN		1,663,531,660.00	
1	23	01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		1,663,531,660.00	
1	23	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	363,337,130.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	23	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	117,178,180.00	
1	23	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,000.00	
1	23	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
1	23	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase Pengunjung yang puas atas layanan perpustakaan, Jumlah Pemustaka, Jumlah Judul Koleksi Perperpustakaan, Jumlah SDM Perpustakaan yang mengikuti peningkatan kompetensi perpustakaan sesuai tipologi standart	331,864,350.00	
1	24	01	15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Prosentase jumlah rumusan kebijakan kearsipan yang menjadi kebijakan	239,207,600.00	
1	24	01	16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Prosentase arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	360,623,700.00	
1	24	01	17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Prosentase sarana prasarana kearsipan dalam kondisi baik	49,225,000.00	
1	24	01	18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Prosentase peningkatan SDM pengelola kearsipan	122,095,700.00	
2				URUSAN PILIHAN		19,521,065,755.00	
2	02			PARIWISATA		11,557,346,650.00	
2	02	01		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		11,557,346,650.00	
2	02	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	2,085,436,818.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2	02	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	492,412,177.00	
2	02	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,000.00	
2	02	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
2	22	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah fasilitasi upacara adat masyarakat, Jumlah kerjasama dan dukungan nilai seni budaya	676,770,000.00	
2	02	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase jumlah wisatawan yang menginap, Okupansi Hotel	922,599,000.00	
2	02	01	16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Prosentase jumlah kunjungan wisatawan	3,591,272,855.00	
2	22	01	16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jumlah pengelolaan kekayaan upacara adat budaya dan nilai sejarah Kota Blitar, Fasilitasi Pelestarian Nilai Geografis Sejarah Khas Kota Blitar, Jumlah pengelolaan ragam seni budaya	555,500,000.00	
2	02	01	17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Persentase insan wisata terbina	1,561,355,800.00	
2	22	01	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah pengelolaan ragam seni budaya	1,452,000,000.00	
2	22	01	18	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jumlah kemitraan nilai budaya	140,000,000.00	
2	06			PERDAGANGAN		7,963,719,105.00	
2	06	01		Dinas Perdagangan dan Perindustrian		7,963,719,105.00	
2	06	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	1,372,594,150.00	
2	06	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	108,053,100.00	
2	06	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,000.00	
2	06	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
2	06	01	15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Prosentase barang dan jasa yang diawasi	592,689,900.00	
2	07	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Prosentase peningkatan Kontribusi PDRB dari sektor Industri	1,650,102,500.00	
2	06	01	16	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Prosentase peningkatan Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan	815,118,300.00	
2	06	01	17	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	Prosentase pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	211,751,700.00	
2	06	01	18	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	Prosentase pelanggar barang kena cukai ilegal yang ditindak	41,611,500.00	
2	06	01	20	PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR DAERAH	Prosentase sarana prasarana pasar dalam kondisi baik	1,372,709,195.00	
2	06	01	22	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERDAGANGAN)	Persentase peningkatan PKL terbina		
2	07	01	22	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERINDUSTRIAN)	Persentase peningkatan IKM Terlatih	1,719,088,760.00	
3				PENUNJANG URUSAN		29,970,239,917.00	
3	01			PENGAWAS		1,977,705,340.00	
3	01	01		Inspektorat Daerah		1,977,705,340.00	
3	01	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	475,160,700.00	

3	01	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	273,602,000.00	
3	01	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,000.00	
3	01	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
3	01	01	19	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B), Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah, Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan, Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti, Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti	737,606,040.00	
3	01	01	20	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase Pengawas Pemerintahan/Auditor yang lulus sertifikasi	307,462,900.00	
3	01	01	21	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai	24,261,200.00	
3	01	01	23	PROGRAM PENGAWASAN DALAM RANGKA PERCEPATAN MENUJU GOOD GOVERNANCE, CLEAN GOVERNMENT, DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKPD yang telah menerapkan tahapan SPIP	79,612,500.00	
3	02			PERENCANAAN		3,398,758,000.00	
3	02	01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		3,398,758,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	02	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	296,400,000.00	
3	02	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	181,954,200.00	
3	02	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,000.00	
3	02	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
3	02	01	16	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	188,750,000.00	
3	02	01	20	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Aparat Perencana yang Memiliki Sertifikat Diklat Teknis Perencanaan	210,000,000.00	
3	02	01	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase program yang dilaksanakan sesuai Berita Acara hasil Musrenbang Prosentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan manusia prosentase kesesuaian indikator tujuan Renstra SKPD dengan sasaran RPJMD	1,398,211,500.00	
3	02	01	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan bidang Ekonomi	130,000,000.00	
3	02	01	23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan bidang Sosial dan Budaya	205,742,300.00	
3	02	01	24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah	405,000,000.00	
3	06	01	26	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan	302,700,000.00	
3	03			KEUANGAN		10,730,119,605.00	

3	03	01		Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah		10,730,119,605.00	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
3	03	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	3,044,083,200.00	
3	03	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	361,936,300.00	
3	03	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,000.00	
3	03	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
3	03	01	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Kapasitas Fiskal	3,590,504,800.00	
3	03	01	18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	Prosentase Regulasi bidang keuangan yang dievaluasi	417,506,300.00	
3	03	01	41	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	3,236,089,005.00	
3	04			KEPEGAWAIAN		13,863,656,972.00	
3	04	01		Badan Kepegawaian Daerah		13,863,656,972.00	Badan Kepegawaian Daerah
3	04	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	4,090,762,900.00	
3	04	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	237,512,350.00	
3	04	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	31,231,800.00	
3	04	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
3	04	01	15	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS	Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang pindah / purna tugas	121,749,000.00	
3	04	01	27	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan kompetensi	3,084,567,022.00	
3	05	01	28	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Prosentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	6,237,833,900.00	
4				PENDUKUNG		36,728,400,850.00	
4	01			SEKRETARIAT DAERAH		26,606,619,050.00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	0201		Bagian Umum		12,837,506,550.00	Bagian Umum
4	01	0201	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	4,918,826,200.00	
4	01	0201	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	3,247,747,300.00	
4	01	0201	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus	39,816,000.00	
4	01	0201	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	62,995,900.00	
4	01	0201	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	135,000,000.00	
4	01	0201	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Terciptanya peningkatan mutu pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah	4,433,121,150.00	
4	01	0202		Bagian Humas dan Protokol		3,923,165,500.00	Bagian Humas dan Protokol
4	01	0202	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	517,476,800.00	

4	02	0202	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Persentase Keterisian Data Pendukung Perencanaan Pembangunan	197,000,000.00	
4	16	0202	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	Prosentase peningkatan penyebaran informasi melalui pendayagunaan media informasi	75,000,000.00	
4	01	0202	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Terciptanya peningkatan mutu pelayanan kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah	1,070,688,700.00	
4	16	0202	18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	Prosentase pemberitaan positif di media masa kegiatan pembangunan di Kota Blitar	1,488,000,000.00	
4	01	0202	24	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Prosentase Peningkatan Jumlah dan Kualitas Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	128,000,000.00	
4	05	0202	32	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN		247,000,000.00	
4	01	0202	36	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Prosentase pemberitaan dan publikasi luar ruang tentang kegiatan yang bersumber DBHCHT	200,000,000.00	
4	01	0203		Bagian Hukum dan Organisasi		1,950,624,650.00	Bagian Hukum dan Organisasi
4	01	0203	25	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Prosentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undang	310,689,200.00	
4	05	0203	28	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Prosentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	38,632,500.00	
4	01	0203	30	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN (PEMERINTAH DAERAH)	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran	306,333,950.00	
4	01	0203	33	PROGRAM FASILITASI BANTUAN HUKUM	Prosentase Fasilitasi Bantuan Hukum	628,409,000.00	
4	01	0203	35	PROGRAM PUBLIKASI DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Prosentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan	576,658,500.00	
4	01	0203	39	PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR	Prosentase jabatan yang telah memiliki Standar kompetensi yang dihitung pada tahun ke N	89,901,500.00	
4	01	0204		Bagian Pemerintahan		2,121,368,750.00	Bagian Pemerintahan
4	01	0204	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	121,931,300.00	
4	13	0204	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan	442,419,300.00	
4	01	0204	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Prosentase Fasilitasi Pelaporan kinerja Pemerintahan Daerah	285,666,500.00	
4	01	0204	24	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Prosentase Peningkatan Jumlah dan Kualitas Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	323,425,300.00	
4	01	0204	31	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS OTONOMI DAERAH	Persentase Lembaga yang memperoleh fasilitasi dan asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas Otonomi Daerah	518,155,700.00	
4	01	0204	37	PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (LAKIP KOTA)	Prosentase aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan kompetensi	116,293,050.00	
4	01	0204	38	PROGRAM PENATAAN KETATALAKSAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah SKPD yang berada pada zona kuning dan hijau (Ombudsman), Rata-rata IKM, Persentase SKPD yang memiliki SOP yang dihitung pada tahun ke- n	313,477,600.00	
4	01	0205		Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		4,270,795,100.00	
4	18	0205	19	PROGRAM KOORDINASI, SINKRONISASI, FASILITASI DAN EVALUASI BIDANG PEREKONOMIAN	Prosentase rekomendasi / rumusan kebijakan bidang ekonomi	451,821,350.00	

4	06	0205	23	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat	228,250,000.00	
4	06	0205	24	PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Pelayanan Administrasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat	1,075,209,450.00	
4	06	0205	25	PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN	Prosentase kerukunan dan harmoni antar umat beragama dan kesadaran beragama	2,272,500,000.00	
4	01	0205	36	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT	243,014,300.00	
4	01	0206		Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan		1,503,158,500.00	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
4	01	0206	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	35,668,700.00	
4	01	0206	40	PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan	173,524,200.00	
4	01	0206	42	PROGRAM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Prosentase SKPD kategori tertib administrasi pembangunan	368,270,900.00	
4	01	0206	43	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Prosentase pelaksanaan pengadaan barang / jasa melalui e-procurement	925,694,700.00	
4	02			SEKRETARIAT DPRD		10,121,781,800.00	
4	02	02		Sekretariat DPRD		10,121,781,800.00	Sekretariat DPRD
4	02	02	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	984,288,727.00	
4	02	02	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	1,478,478,873.00	
4	02	02	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase Aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus	139,960,000.00	
4	02	02	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	219,312,000.00	
4	02	02	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	19,918,300.00	
4	02	02	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	89,795,000.00	
4	02	02	15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT	Prosentase Hasil Reses yang ditindaklanjuti	7,190,028,900.00	
5				URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		2,757,546,000.00	
5	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		2,757,546,000.00	
5	01	01		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana		2,757,546,000.00	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana
5	01	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	401,124,000.00	
5	01	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	229,105,500.00	
5	01	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	20,000,000.00	
5	01	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	60,000,000.00	
5	05	01	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase pos kamling aktif	98,525,000.00	
5	01	01	17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kasus kerusakan bernuansa SARA	448,923,000.00	
5	01	01	18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase Penduduk usia 15 - 49 tahun mengikuti Agenda Peningkatan Wawasan Kebangsaan	298,333,800.00	

5	05	01	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Prosentase siswa SMU dan sederajat yang mengikuti pendidikan bela negara	558,799,000.00	
5	05	01	20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT(PEKAT)	Prosentase penanganan penyakit masyarakat	34,301,800.00	
5	01	01	21	PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN KEGIATAN PENINGKATAN DEMOKRASI	Prosentase kinerja baik bagi ormas terdaftar	405,062,000.00	
5	05	01	22	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	Prosentase Penduduk yang mendapatkan Sosialisasi tentang Mitigasi Bencana	203,371,900.00	
6				KEWILAYAHAN		24,612,243,440.00	
6	01			KECAMATAN		24,612,243,440.00	
6	01	01		Kecamatan Kepanjenkidul		2,560,644,915.00	Kecamatan Kepanjenkidul
6	01	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	569,909,535.00	
6	01	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	196,637,780.00	
6	01	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	30,000,000.00	
6	01	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	50,000,000.00	
6	01	01	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	353,748,300.00	
6	01	01	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	1,360,349,300.00	
6	01	0101		Kelurahan Ngadirejo		722,783,700.00	Kelurahan Ngadirejo
6	01	0101	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	63,317,540.00	
6	01	0101	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	51,655,000.00	
6	01	0101	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
6	01	0101	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
6	01	0101	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	39,337,060.00	
6	01	0101	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	537,474,100.00	
6	01	0102		Kelurahan Sentul		762,869,200.00	Kelurahan Sentul
6	01	0102	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	90,225,800.00	
6	01	0102	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	30,327,200.00	
6	01	0102	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
6	01	0102	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
6	01	0102	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	69,052,300.00	

6	01	0102	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	542,263,900.00	
6	01	0103		Kelurahan Kauman		807,681,000.00	Kelurahan Kauman
6	01	0103	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	92,442,800.00	
6	01	0103	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	40,735,700.00	
6	01	0103	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
6	01	0103	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
6	01	0103	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	28,000,000.00	
6	01	0103	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	615,502,500.00	
6	01	0104		Kelurahan Tanggung		726,346,200.00	Kelurahan Tanggung
6	01	0104	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	65,382,900.00	
6	01	0104	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	27,677,000.00	
6	01	0104	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	5,999,800.00	
6	01	0104	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	24,958,900.00	
6	01	0104	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	26,988,000.00	
6	01	0104	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	575,339,600.00	
6	01	0105		Kelurahan Bendo		687,232,800.00	Kelurahan Bendo
6	01	0105	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	57,418,800.00	
6	01	0105	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	29,043,600.00	
6	01	0105	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
6	01	0105	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
6	01	0105	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	36,000,000.00	
6	01	0105	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	533,770,400.00	
6	01	0106		Kelurahan Kepanjenlor		787,618,200.00	Kelurahan Kepanjenlor
6	01	0106	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	59,616,400.00	

6	01	0106	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	39,173,000.00	
6	01	0106	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
6	01	0106	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	24,430,000.00	
6	01	0106	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	27,896,800.00	
6	01	0106	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	630,502,000.00	
6	01	0107		Kelurahan Kepanjenkidul		885,615,100.00	Kelurahan Kepanjenkidul
6	01	0107	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	71,530,018.00	
6	01	0107	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	63,770,000.00	
6	01	0107	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	7,759,000.00	
6	01	0107	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
6	01	0107	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	43,616,500.00	
6	01	0107	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	673,939,582.00	
6	01	02		Kecamatan Sukorejo		2,630,697,003.00	Kecamatan Sukorejo
6	01	02	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	571,053,050.00	
6	01	02	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	224,645,553.00	
6	01	02	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	30,000,000.00	
6	01	02	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	50,000,000.00	
6	01	02	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	542,407,200.00	
6	01	02	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	1,212,591,200.00	
6	01	0201		Kelurahan Pakunden		846,108,450.00	
6	01	0201	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	70,564,050.00	Kelurahan Pakunden
6	01	0201	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	53,355,600.00	
6	01	0201	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
6	01	0201	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	

6	01	0201	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	69,040,500.00	
6	01	0201	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	622,148,300.00	
6	01	0202		Kelurahan Blitar		618,991,993.00	Kelurahan Blitar
6	01	0202	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	52,820,100.00	
6	01	0202	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	33,027,900.00	
6	01	0202	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	5,982,500.00	
6	01	0202	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	24,990,500.00	
6	01	0202	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	33,650,000.00	
6	01	0202	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	468,520,993.00	
6	01	0203		Kelurahan Tlumpu		633,261,293.00	Kelurahan Tlumpu
6	01	0203	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	65,353,725.00	
6	01	0203	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	24,553,400.00	
6	01	0203	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
6	01	0203	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
6	01	0203	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	21,900,000.00	
6	01	0203	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	490,454,168.00	
6	01	0204		Kelurahan Turi		646,089,500.00	Kelurahan Turi
6	01	0204	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	40,720,800.00	
6	01	0204	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	191,056,800.00	
6	01	0204	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
6	01	0204	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
6	01	0204	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	29,570,400.00	
6	01	0204	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	353,741,500.00	

6	01	0205	Kelurahan Karangsari		667,928,750.00	Kelurahan Karangsari
6	01	0205 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	68,991,550.00	
6	01	0205 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	91,618,300.00	
6	01	0205 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
6	01	0205 07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	20,483,000.00	
6	01	0205 46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	48,248,200.00	
6	01	0205 47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	432,587,700.00	
6	01	0206	Kelurahan Sukorejo		968,195,193.00	Kelurahan Sukorejo
6	01	0206 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	66,030,250.00	
6	01	0206 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	23,417,100.00	
6	01	0206 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	7,532,500.00	
6	01	0206 07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	23,085,500.00	
6	01	0206 46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	110,276,600.00	
6	01	0206 47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	737,853,243.00	
6	01	0207	Kelurahan Tanjungsari		821,323,843.00	Kelurahan Tanjungsari
6	01	0207 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	65,018,443.00	
6	01	0207 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	81,188,300.00	
6	01	0207 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
6	01	0207 07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
6	01	0207 46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	71,745,000.00	
6	01	0207 47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	572,372,100.00	
6	01	03	Kecamatan Sananwetan		2,974,736,100.00	Kecamatan Sananwetan
6	01	03 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	546,838,900.00	

6	01	03	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	173,910,700.00	
6	01	03	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	30,000,000.00	
6	01	03	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	50,000,000.00	
6	01	03	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	384,064,300.00	
6	01	03	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	1,789,922,200.00	
6	01	0301		Kelurahan Gedog		961,842,000.00	Kelurahan Gedog
6	01	0301	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	79,057,950.00	
6	01	0301	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80,365,850.00	
6	01	0301	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
6	01	0301	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
6	01	0301	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	63,101,800.00	
6	01	0301	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	708,316,400.00	
6	01	0302		Kelurahan Plosokerep		646,860,500.00	Kelurahan Plosokerep
6	01	0302	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	59,082,000.00	
6	01	0302	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	54,792,000.00	
6	01	0302	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
6	01	0302	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
6	01	0302	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	35,500,000.00	
6	01	0302	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	466,486,500.00	
6	01	0303		Kelurahan Klampok		682,303,300.00	Kelurahan Klampok
6	01	0303	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	74,469,490.00	
6	01	0303	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	53,609,900.00	
6	01	0303	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
6	01	0303	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	

6	01	0303	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	27,841,200.00	
6	01	0303	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	495,382,710.00	
6	01	0304		Kelurahan Sananwetan		1,151,283,300.00	Kelurahan Sananwetan
6	01	0304	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	104,193,450.00	
6	01	0304	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	105,004,130.00	
6	01	0304	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	5,787,500.00	
6	01	0304	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
6	01	0304	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	38,987,971.00	
6	01	0304	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	872,310,249.00	
6	01	0305		Kelurahan Rembang		737,338,200.00	Kelurahan Rembang
6	01	0305	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	70,963,700.00	
6	01	0305	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	76,334,300.00	
6	01	0305	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
6	01	0305	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
6	01	0305	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	35,500,000.00	
6	01	0305	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	523,540,200.00	
6	01	0306		Kelurahan Karangtengah		754,828,100.00	
6	01	0306	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	88,467,450.00	Kelurahan Karangtengah
6	01	0306	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	65,247,800.00	
6	01	0306	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
6	01	0306	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	25,000,000.00	
6	01	0306	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	40,379,500.00	
6	01	0306	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	529,733,350.00	

6	01	0307		Kelurahan Bendogerit		929,664,800.00	Kelurahan Bendogerit
6	01	0307	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	69,000,000.00	
6	01	0307	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	36,936,800.00	
6	01	0307	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	6,000,000.00	
6	01	0307	07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah	24,975,000.00	
6	01	0307	46	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Nilai IKM	83,811,000.00	
6	01	0307	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah	708,942,000.00	
Jumlah						427,025,500,857.60	

Sumber : RKPD Kota Blitar Tahun 2017

Tabel 8.3
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kebutuhan Pendanaan Kota Blitar Tahun 2018-2021

Tabel 8.3
Indikasi Rencana Program Prioritas Beserta Kebutuhan Pendanaan Kota Blitar 2018-2021

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)		
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17		
1	YANAN DASAR										313,796,372,639.00		320,697,022,561.63		322,363,840,176.92		336,083,733,194.08		1,292,940,968,571.62
1	01			Pendidikan							66,144,906,491.00		67,568,829,684.96		67,920,017,590.18		70,810,742,075.49		272,414,465,844.63
1	01	01																	
1	01	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100	5,752,755,769.00	100	5,879,263,775.83	100	5,909,821,154.71	100	6,161,344,755.96	100	23,703,185,455.50	
1	01	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	100	100	474,858,500.00	100	485,301,043.50	100	487,823,387.87	100	508,585,284.39	100	1,956,568,215.75	
1	01	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	100	100	88,739,000.00	100	90,690,446.31	100	91,161,808.45	100	95,041,679.89	100	365,632,934.65	
1	01	01	05	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Persentase APK PAUD	%	91	92	93.06	117,259,891.00	92	119,838,536.03	92	120,461,394.90	92	125,588,264.74	92.37	483,148,086.67	
1	01	01	06	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	%	100	100	100	54,481,620,231.00	100	55,679,717,536.17	100	55,969,111,972.27	100	58,351,172,652.85	100	224,481,622,392.30	
					Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	%	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
					Jumlah siswa yang tertampung jenjang SD sesuai SPM	%	55.5	68.87	68.57	-	68.27	-	67.97	-	67.37	-	67.67	-	
					Jumlah siswa yang tertampung jenjang SMP sesuai SPM	%	49.2	62.32	62.12	-	61.92	-	61.72	-	61.52	-	61.32	-	
					Persentase nilai UN/UASBN siswa SD diatas 70	%	7.01	7.57	7.87	-	8.17	-	8.47	-	8.77	-	9.07	-	

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)		
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17		
					Persentase nilai UN/UASBN siswa SMP diatas 70	%	7.67	7.86	7.94	-	8.02	-	8.1	-	8.18	-	8.26	-	
1	01	01	07	PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	95.92	96.57	97.87	4,305,267,900.00	97.44	4,399,944,413.79	97.73	4,422,813,054.09	98.03	4,611,049,184.74	98.03	17,739,074,552.62	
1	01	01			PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B untuk TK	%	68.5	69.57	70.01	894,405,200.00	71.01	914,073,933.33	72.01	918,824,817.90	73.01	957,930,252.91	74.01	3,685,234,204.14
						Persentase lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B untuk SD/MI	%	93.2	93.2	94.2	-	95.2	-	96.2	-	97.2	-	98.2	-
						Persentase lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B untuk SMP/MTs	%	72.03	72.03	73.03	-	74.03	-	75.03	-	76.03	-	77.03	-
1	02	Kesehatan								140,518,949,200.00		143,609,080,764.53		144,355,486,651.37		150,499,295,560.61		578,982,812,176.51	
1	02	01																	
1	02	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100		100	2,584,263,950.00		2,641,094,118.80		2,654,821,162.99		2,767,811,076.24	100	10,647,990,308.04	
1	02	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100		100	180,000,000.00		183,958,353.55		184,914,474.13		192,784,484.62	100	741,657,312.31	

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
1	02	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100		100	154,980,000.00		158,388,142.41		159,211,362.23		165,987,441.26	100	638,566,945.90
1	02	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Angka Kematian Balita (AKBAL) per-1.000 KH	indeks	9.27	10.39	10.39	1,619,877,200.00	10.20	1,655,499,681.49	8.70	1,664,104,114.45	8.20	1,734,928,839.72	8.2	6,674,409,835.66
					Prevalensi balita gizi buruk	%	0.08	0.07	0.07	-	0.10	-	0.1	-	0.1	-	0.10	-
					Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	%	85.56	85.56	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
1	02	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase puskesmas yang terakreditasi	unit	-	-	2	23,681,854,400.00	2	24,202,638,580.39	2	24,328,431,405.03	2	25,363,856,085.32	2	97,576,780,470.73
1	02	01	07	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA PENYEHATAN LINGKUNGAN	Persentase kelurahan siaga aktif stara Purnama dan Mandiri (PURI)	%	80.9	71.42	80.95	2,660,589,500.00	71.42	2,719,098,132.76	85.71	2,733,230,601.56	90.48	2,849,557,641.91	90.48	10,962,475,876.22
1	02	01	08	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT	Presentase Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	%		57.14	90	1,367,384,150.00	90	1,397,454,093.92	90	1,404,717,339.09	90	1,464,502,492.42	90	5,634,058,075.44

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
					Presentase Warga Negara Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%		-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
1	02	02																
1	02	02	09	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU	Persentase peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	%	70	75	90	25,270,000,000.00	90	25,825,708,856.92	100	25,959,937,563.21	100	27,064,799,590.86	100	104,120,446,011.00
1	02	02	10	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	Persentase peningkatan PAD BLUD	%	90	80	90	80,000,000,000.00	90	81,759,268,245.10	100	82,184,210,726.43	100	85,681,993,164.58	100	329,625,472,136.11
1	02	02	11	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KESEHATAN)	Persentase peningkatan jenis Alat-alat kesehatan Kedokteran paru dan jantung	%	80	85	85	3,000,000,000.00	90	3,065,972,559.19	100	3,081,907,902.24	100	3,213,074,743.67	100	12,360,955,205.10
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						66,962,682,000.00		68,435,248,500.62		68,790,939,609.69		71,718,700,767.58		275,907,570,871.88
1	03	01																
1	03	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	927,706,200.00	100	948,107,250.73	100	953,035,022.91	100	993,596,453.59	100	3,822,444,927.23
1	03	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	60,000,000.00	100	61,319,451.18	100	61,638,158.04	100	64,261,494.87	100	247,219,104.10

Urusan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
1	03	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	20,000,000.00	100	20,439,817.06	100	20,546,052.68	100	21,420,498.29	100	82,406,368.03
1	03	01	05	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	98.95	99.80	99.90	24,251,319,900.00	100	24,784,627,112.52	100	24,913,444,813.20	100	25,973,767,823.80	100	99,923,159,649.52
1	03	01	06	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Persentase luas layanan jaringan pengairan	%	-	60.42	85	16,306,500,700.00	90	16,665,094,560.88	95	16,751,711,121.74	100	17,464,668,518.95	100	67,187,974,901.57
1	03	01	07	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KECIPTAKARYAAN	Persentase gedung Pemerintah yang dibangun dan dipelihara	%	-	4.17	33.33	23,660,000,000.00	50.00	24,180,303,583.49	66.67	24,305,980,322.34	83.33	25,340,449,478.43	100	97,486,733,384.26
					Persentase jaringan air minum yang terbangun	%	43.33	50.00	66.67	-	83.33	-	100	-	100	-	100	-
					Persentase jaringan air limbah yang terbangun	%	77.14	80.00	87.14	-	94.28	-	100	-	100	-	100	-
					Persentase sakuran drainase yang dipelihara	%	18.60	27.32	36.03	-	40.39	-	44.75	-	49.10	-	49.00	-
1	03	01	08	PROGRAM STANDARISASI BIDANG PEKERJAAN UMUM	Persentase dokumen perencanaan teknis bidang pekerjaan umum yang sesuai standar	%	-	16.67	50	587,538,800.00	66.67	600,459,279.42	83.33	603,580,156.86	100	629,268,693.07	100	2,420,846,929.35
					Prosetase ketersediaan data bidang ke-Puan	%	-	20	60	-	80	-	100	-	100	-	100	-

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
1	03	01	09	PROGRAM PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	%	60	75	85	1,149,616,400.00	90	1,174,897,445.33	100	1,181,003,955.90	100	1,231,267,806.58	100	4,736,785,607.82
1	04			Perumahan Rakyat					7,648,194,350.00		7,816,382,668.15		7,857,810,201.74		8,191,406,700.23		31,512,995,928.09	
1	04	01																
1	04	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	596,010,900.00	100	609,117,688.13	100	612,283,567.51	100	638,342,523.25	100	2,455,754,678.88
1	04	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	20,000,000.00	100	20,439,817.06	100	20,546,052.68	100	21,420,498.29	100	82,406,368.03
1	04	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	60,000,000.00	100	61,319,451.18	100	61,638,158.04	100	64,261,494.87	100	247,219,104.10
1	04	01	05	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	-	-	19.08	1,289,627,850.00	38.46	1,317,987,866.56	66.15	1,324,838,087.29	100	1,381,223,557.86	100	5,313,677,361.70
					Persentase sarana dan prasarana perumahan dalam kondisi baik	%	-	-	65	-	75	-	85	-	90	-	90	-
					Persentase tingkat hunian rusunawa	%	-	-	85	-	95	-	100	-	100	-	100	-
1	04	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman prioritas yang tertangani	%	-	0.80	30.40	5,682,555,600.00	45.20	5,807,519,845.23	60	5,837,704,336.19	60	6,086,158,625.96	60	23,413,938,407.37
1	05			Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					7,289,159,822		7,449,454,865		7,488,173,085		7,806,871,776		30,033,659,347.53	
1	05	01																
1	05	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	585,740,992.00	100	598,621,936.09	100	601,733,263.97	100	627,343,195.91	100	2,413,439,387.97

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
1	05	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	180,000,000.00	100	183,958,353.55	100	184,914,474.13	100	192,784,484.62	100	741,657,312.31
1	05	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	20,000,000.00	100	20,439,817.06	100	20,546,052.68	100	21,420,498.29	100	82,406,368.03
1	05	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur	%	94.8	55.02	78.08	5,445,731,180.00	80.82	5,565,487,454.20	84.60	5,594,413,985.71	86.34	5,832,513,771.76	86.34	22,438,146,391.67
					Persentase poskamling aktif	%	70.8	71.06	72.15		73.01		73.87		75.01		75.01	
1	05	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENCEGAHAN dan PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	Persentase korban kebakaran yang tertangani	%	80	88.89	100	765,746,000.00	100	782,585,407.77	100	786,652,882.84	100	820,133,044.22	100	3,155,117,334.83
1	05	01	07	PROGRAM PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH	Jumlah pelanggaran Peraturan Derah	pelagaran	811	639	477	291,941,650.00	458	298,361,695.93	451	299,912,426.04	448	312,676,780.75	448	1,202,892,552.72
1	06			Sosial						25,262,480,776.00		25,818,024,278.77		25,852,213,044.59		27,058,746,314.62		104,089,464,413.88
1	06	01																
1	06	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	686,269,126.00	100	701,360,769.51	100	705,006,080.83	100	735,011,332.04	100	2,827,647,308.38
1	06	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	60,000,000.00	100	61,319,451.18	100	61,638,158.04	100	64,261,494.87	100	247,219,104.10

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
1	06	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	20,000,000.00	100	20,439,817.06	100	20,546,052.68	100	21,420,498.29	100	82,406,368.03
1	06	01	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Warga Miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	94.4	100	100	19,896,984,550.00	100	20,334,536,213.65	100	20,440,224,638.47	100	21,310,166,177.61	100	81,981,911,579.73
1	06	01	06	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH	Persentase PMKS ysng mendapatkan pelayanan dan pembinaan Kesejahteraan sosial	%	80	75	80	2,607,665,200.00	82	2,665,009,982.25	85	2,678,861,328.76	90	2,792,874,398.02	90	10,744,410,909.04
1	06	01	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial	%	63	65	72	1,241,561,900.00	75	1,268,864,905.31	77	1,275,459,810.24	80	1,329,743,727.87	80	5,115,630,343.42
1	06	01	08	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG SOSIAL)	Persentase PMKS Terlatih	%	10	15	25	750,000,000.00	30	766,493,139.80	35	770,476,975.56	35	803,268,685.92	40	3,090,238,801.28
2	01			ANAN NON DASAR						67,237,393,447.00		68,716,003,130.68		69,073,153,451.41		72,012,925,713.68		277,039,477,742.75
2	01			Tenaga Kerja						1,078,281,900.00		1,101,994,238.82		1,107,721,836.15		1,154,886,778.82		4,442,864,754.79
2	01	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	72	72	71.2	328,281,900.00	71.5	335,501,099.03	72	337,244,860.59	72.5	351,598,093.90	73	1,352,625,953.52
					Persentase fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan	%	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-

Urusan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
2	01	01	06	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG TENAGA KERJA)	Persentase tenaga kerja terlatih	%	93	92.72	93.8	750,000,000.00	94.2	766,493,139.80	94.6	770,476,975.56	94.8	803,268,685.92	95	3,090,238,801.28
2	02			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						2,001,428,726.00		2,045,135,253.78		2,053,764,814.36		2,143,258,722.78		8,245,287,518.91
2	02	01																
2	02	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	671,141,736.00	100	685,900,715.30	100	689,465,673.23	100	718,809,520.46	100	2,765,317,644.99
2	02	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	68,254,000.00	100	69,754,963.69	100	70,117,513.99	100	73,101,734.52	100	281,228,212.19
2	02	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	20,000,000.00	100	20,439,817.06	100	20,546,052.68	100	21,420,498.29	100	82,406,368.03
2	02	01	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang aktif pada organisasi atau lembaga kemasyarakatan	%	-	15.76	15.76	895,315,250	15.88	915,003,996.11	16.00	919,759,714.66	16.12	958,904,939.13	16.12	3,688,983,899.90
					Jumlah perangkat daerah yang menyusun dokumen PPRG		-	7	9	-	10	-	11	-	12	-	-	-

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
2	02	01	06	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Mendapatkan Penanganan Oleh Petugas Terlatih	%	100	100	100	346,417,740.00	100	354,035,761.62	100	355,875,856.79	100	371,022,030.38	100	1,427,351,388.80
2					Persentase OPD yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	%	NA	NA	80		80		90		100		100	
2	03			Pangan					1,490,830,900.00		1,523,615,543.26		1,531,534,510.54		1,596,717,037.29		6,142,697,991.16	
2	03	01																
2	03	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	1,110,463,500.00	100	1,134,883,539.66	100	1,140,782,078.60	100	1,189,334,075.21	100	4,575,463,193.47
2	03	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	60,000,000.00	100	61,319,451.18	100	61,638,158.04	100	64,261,494.87	100	247,219,104.10
2	03	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	20,000,000.00	100	20,439,817.06	100	20,546,052.68	100	21,420,498.29	100	82,406,368.03
2	03	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Angka konsumsi energi	kkal/kapita/hari	-	1789	1799	300,367,400.00	1809	306,972,735.36	1819	308,568,221.21	1829	321,700,968.92	1829	1,237,609,325.49
					Angka konsumsi protein	gram/kapita/hari	-	60.39	60.47		60.9		61.1		61.3		61.3	
2	04			Pertanahan					329,412,900.00		336,656,970.68		338,406,739.87		352,809,429.08		1,357,286,033.63	

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
2	04	01	05	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Prosetase tanah asset bersertifikat	0	89	95.1	97	329,412,900.00	98	336,656,970.68	99	338,406,739.87	100	352,809,423.08	100	1,357,286,033.63
2	05			Lingkungan Hidup						24,993,558,806.00		25,543,188,485.24		25,675,948,796.45		26,768,724,184.68		102,981,420,272.37
2	05	01																
2	05	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	1,832,286,875.00	100	1,872,580,426.44	100	1,882,313,133.08	100	1,962,424,893.74	100	7,549,605,328.26
2	05	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	80,000,000.00	100	81,759,268.25	100	82,184,210.73	100	85,681,993.16	100	329,625,472.14
2	05	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	18,000,000.00	100	18,395,835.36	100	18,491,447.41	100	19,278,448.46	100	74,165,731.23
2	05	01	05	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH	Volume sampah terolah di TPA	M3	45	53	52	14,100,000,000.00	52	14,410,071,028.20	52	14,484,967,140.53	52	15,101,451,295.26	52	58,096,489,463.99
2	05	01	06	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan	%	58	60	65	296,000,000.00	67.5	302,509,292.51	68	304,081,579.69	75	317,023,374.71	75	1,219,614,246.90
2	05	01	07	PROGRAM KONSERVASI DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN	Luas RTH yang dikelola	m2	126.75	127.33	166.54	8,530,196,931.00	185.61	8,717,783,238.31	202.09	8,763,093,776.44	228.09	9,136,053,439.18	228.09	35,147,127,384.94
					Jumlah aksi mitigasi RAD yang terlaksana	Aksi	32	32	34	-	35	-	36	-	36	-	36	-

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
					Jumlah mata air yang dilindungi	Titik	13	13	19	-	25	-	31	-	31	-	31	-
					Jumlah kelurahan yang masuk kriteria kelurahan bersih dan lestari (berseri)	Kelurahan	5	5	16	-	22	-	28	-	34	-	34	-
					Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	Sekolah	6	29	99	-	137	-	175	-	215	-	215	-
2	05	01	08	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu		82.5	86	86	137,075,000.00	86	140,089,396.18	87	140,817,508.57	87	146,810,740.16	87	564,792,644.91
					Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu		100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						2,503,001,300.00		2,558,044,433.81		2,571,339,828.60		2,680,776,753.47		10,313,162,315.87
2	06	01																
2	06	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	513,285,500.00	100	524,573,086.01	100	527,299,546.19	100	549,741,558.78	100	2,114,899,690.98
2	06	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	60,000,000.00	100	61,319,451.18	100	61,638,158.04	100	64,261,494.87	100	247,219,104.10
2	06	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	20,000,000.00	100	20,439,817.06	100	20,546,052.68	100	21,420,498.29	100	82,406,368.03
2	06	01	05	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	94	85	89	1,127,341,400.00	90	1,152,132,599.08	91	1,158,120,789.73	92	1,207,410,726.61	92	4,645,005,515.42

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)		
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17		
2	06	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta pencatatan sipil	%	94	85	89	142,374,400.00	90	145,505,334.51	91	146,261,596.15	92	152,486,529.60	92	586,627,860.25	
2	06	01	07	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas data kependudukan	%	-	97	100	640,000,000.00	100	654,074,145.96	100	657,473,685.81	100	685,455,945.32	100	2,637,003,777.09	
2	08			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							2,319,044,150.00		2,360,843,991.47		2,373,114,440.14		2,474,114,838.38		9,518,117,419.99
2	08	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase angka kesertaan ber KB atau CPR (contraceptive prevalence rate)	%	76.23	74.77	74.77	1,822,924,700.00	75.00	1,863,012,369.22	75.15	1,872,695,346.04	75.25	1,952,397,771.06	75.25	7,511,030,186.33	
					Capaian median usia nikah pertama wanita	%	NA	21,44	21,44	-	20,80	-	21	-	21	-	21	-	
2	08	01	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Persentase anggota Tribina dan UPPKS yang menjadi peserta KB	%	-	86.49	86.49	487,119,450.00	89.19	497,831,622.25	91.89	500,419,094.10	94.59	521,717,067.32	94.59	2,007,087,233.66	
2	09			Perhubungan							15,231,588,351.00		15,566,543,972.35		15,647,450,834.21		16,313,410,612.20		62,758,993,769.77
2	09	01																	
2	09	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100		100	1,113,096,651.00	100	1,137,574,595.90	100	1,143,487,121.56	100	1,192,154,245.53	100	4,586,312,613.99	
2	09	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100		100	130,439,000.00	100	133,307,464.88	100	134,000,328.29	100	139,703,418.83	100	537,450,212.00	
2	09	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100		100	22,138,000.00	100	22,624,833.51	100	22,742,425.71	100	23,710,349.56	100	91,215,608.78	

Urusan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
2	09	01	05	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan	%	75	75	84	7,268,377,650.00	87	7,428,215,474.91	90	7,466,823,505.34	93	7,784,613,551.56	93	29,948,030,181.81
2	09	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Persentase prasarana dan fasilitas angkutan sekolah dalam kondisi baik	%	45	45	70	1,756,220,050.00	80	1,794,840,827.07	95	1,804,169,483.39	100	1,880,955,429.00	100	7,236,185,789.45
					Persentase prasarana dan fasilitas terminal barang/cargo dalam kondisi baik	5	30	30	34		36	0.00	38	0.00	40	0.00	40	-
2	09	01	07	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Persentase penurunan angka pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	%	18.78	18.78	13.63	3,759,571,600.00	14.77	3,842,247,786.64	15.64	3,862,217,807.69	11.30	4,026,594,851.66	11.30	15,490,632,045.99
2	09	01	08	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	%	90	90	93	518,745,400.00	94	530,153,053.87	95	532,908,515.84	96	555,589,247.71	96	2,137,396,217.42
2	09	01	09	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perparkiran	Predikat indeks	-		cukup	663,000,000.00	cukup	677,579,935.58	baik	681,101,646.40	baik	710,089,518.35	baik	2,731,771,100.33
2	10			Komunikasi dan Informatika						4,765,839,400.00		4,870,644,273.97		4,895,959,369.22		5,104,332,736.18		19,636,775,779.37
2	10	01																
2	10	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100		100	2,098,700,000.00	100	2,144,852,203.32	100	2,156,000,038.14	100	2,247,759,988.18	100	8,647,312,229.65
2	10	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	60,000,000.00	100	61,319,451.18	100	61,638,158.04	100	64,261,494.87	100	247,219,104.10

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
2	10	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	20,000,000.00	100	20,439,817.06	100	20,546,052.68	100	21,420,498.29	100	82,406,368.03
2	10	01	05	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase PPID aktif	%	-	-	70	1,082,592,900.00	100	1,106,400,041.39	100	1,112,150,537.81	100	1,159,483,968.22	100	4,460,627,447.42
2	10	01	06	PROGRAM PENYELENGGARAAN E- GOVERNANCE	Persentase aplikasi yang terintegrasi	%	-	-	30	1,504,546,500.00	40	1,537,632,761.01	50	1,545,624,582.55	60	1,611,406,786.61	60	6,199,210,630.17
2	11			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						1,866,137,500.00		1,907,175,455.56		1,917,087,969.31		1,998,679,756.49		7,689,080,681.36
2	11	01																
2	11	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	462,890,000.00	100	473,069,345.97	100	475,528,116.29	100	495,766,722.70	100	1,907,254,184.96
2	11	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	60,000,000.00	100	61,319,451.18	100	61,638,158.04	100	64,261,494.87	100	247,219,104.10
2	11	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	20,000,000.00	100	20,439,817.06	100	20,546,052.68	100	21,420,498.29	100	82,406,368.03
2	11	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	Jumlah Usaha Mikro yang aktif	%	-	52	57	176,173,800.00	62	180,048,012.15	67	180,983,808.80	72	188,686,529.09	72	725,892,150.04
2	11	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina	%	35	35	50	647,073,700.00	65	661,303,402.66	70	664,740,516.45	85	693,032,054.25	85	2,666,149,673.37

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
2	11	01	07	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO)	Persentase usaha mikro yang dibina	%	-	15	20	500,000,000.00	25	510,995,426.53	30	513,651,317.04	35	535,512,457.28	35	2,060,159,200.85
2	12			Penanaman Modal						1,691,998,800.00		1,729,207,296.99		1,738,194,824.10		1,812,172,870.20		6,971,573,791.38
2	12	01																
2	12	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100		100	513,508,600.00	100	524,801,092.17	100	527,528,737.40	100	549,980,504.44	100	2,115,818,934.01
2	12	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	82,000,000.00	100	83,803,249.95	100	84,238,815.99	100	87,824,042.99	100	337,866,108.94
2	12	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	20,000,000.00	100	20,439,817.06	100	20,546,052.68	100	21,420,498.29	100	82,406,368.03
2	12	01	05	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Jumlah PMA/PMDN	Unit	454	440	462	905,000,000.00	473	924,901,722.02	484	929,708,883.84	496	969,277,547.67	2366	3,728,888,153.54
2	12	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN	Persentase penerbitan izin yang sesuai SOP	%	90	90	91.5	171,490,200.00	92	175,261,415.79	92.5	176,172,334.18	93	183,670,276.80	93	706,594,226.77
2	13			Kepemudaan dan Olahraga						3,717,483,250.00		3,799,235,921.90		3,818,982,389.48		3,981,519,322.25		15,817,222,889.63

Urusan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
2	13	01																
2	13	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	978,184,750.00	100	999,695,867.11	100	1,004,891,770.29	100	1,047,660,238.29	100	4,030,432,625.69
2	13	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	60,000,000.00	100	61,319,451.18	100	61,638,158.04	100	64,261,494.87	100	247,219,104.10
2	13	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	22,550,500.00	100	23,046,404.73	100	23,166,188.05	100	24,152,147.34	100	92,915,240.12
2	13	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang aktif	%	15	15%	15	695,000,000.00	15	710,283,642.88	20	713,975,330.69	20	744,362,315.62	20	2,863,621,289.18
2	13	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga yang dibina	%		38%	46	1,961,750,000.00	51	2,004,890,556.00	92	2,015,310,942.41	92	2,101,083,126.13	92	8,083,034,624.54
2	14			Statistik						519,882,000.00		531,314,648.67		534,076,148.01		556,806,574.63		2,142,079,371.31
2	14	01	05	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA, INFORMASI DAN STATISTIK DAERAH	Persentase Ketersediaan Data/ Informasi Statistik Sektoral	%	80	-	100	519,882,000.00	100	531,314,648.67	100	534,076,148.01	100	556,806,574.63	100	2,142,079,371.31
2	15			Persediaan						165,745,100.00		169,389,976.14		170,270,377.82		177,517,131.57		682,922,585.52
2	15	01	05	PROGRAM PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI MILIK PEMERINTAH ATAU NEGARA	Persentase dokumen dan sarana komunikasi pemerintah yang diamankan	%	100	100	100	165,745,100.00	100	169,389,976.14	100	170,270,377.82	100	177,517,131.57	100	682,922,585.52
2	16			Kebudayaan						2,824,270,000.00		2,886,378,106.58		2,901,380,010.35		3,024,863,535.44		11,636,891,652.37

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
2	16	01	05	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Persentase Pagelaran Budaya/ Sejarah Yang Dilestarikan	%	65	75	75	2,824,270,000.00	75	2,886,378,106.58	75	2,901,380,010.35	75	3,024,863,535.44	75	11,636,891,652.37
2	17			Petpustakaan						1,031,557,360.00		1,054,242,186.93		1,059,721,593.13		1,104,823,633.35		4,250,344,772.82
2	17	01																
2	17	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	497,597,310.00	100	508,539,899.33	100	511,183,027.27	100	532,939,116.43	100	2,050,259,353.03
2	17	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	60,000,000.00	100	61,319,451.18	100	61,638,158.04	100	64,261,494.87	100	247,219,104.10
2	17	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	20,000,000.00	100	20,439,817.06	100	20,546,052.68	100	21,420,498.29	100	82,406,368.03
2	17	01	05	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan pemustaka	%	-	30 (11.540 lbr)	40	453,960,050.00	45	463,943,018.76	50	466,354,355.13	55	486,202,523.76	55	1,870,459,947.65
2	18			Kearsipan						716,633,004.00		732,392,375.09		736,198,972.68		767,531,801.88		2,952,756,153.65
2	18	01	05	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Persentase peningkatan dokumen/arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	%	-	61,91 (42.327 lbr)	47.25	716,633,004.00	47.25	732,392,375.09	47.25	736,198,972.68	65.37	767,531,801.88	65.37	2,952,756,153.65
3	LIHAN									28,884,229,205.00		29,519,418,045.31		29,672,844,745.68		30,935,729,116.34		119,012,221,112.32
3	01			Kelautan dan Perikanan						769,679,200.00		786,605,102.19		790,693,469.56		824,345,599.42		3,171,323,371.37
3	01	01	05	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERIKANAN	Produksi ikan konsumsi	ton		188	188	672,017,500.00	218	686,795,738.10	229	690,365,347.90	240	719,747,485.52	240	2,768,926,071.52
					Produksi ikan hias	ekor		4,237,524	4,343,462		4,452,049		4,563,350		4,677,434		4,677,434	
					Produksi benih ikan	ekot		8,311,690	8,477,921		8,647,482		8,820,432		8,996,841		8,996,841	

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
3	01	01	06	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)	Persentase peserta pelatihan yang memperoleh nilai minimal 80	%		50	90	97,661,700.00	90	99,809,364.09	95	100,328,121.66	95	104,598,113.90	95	402,397,299.65
3	02			Pariwisata						8,869,670,395.00		9,054,399,905.76		9,101,460,003.60		9,488,820,625.32		36,504,250,929.69
3	02	01																
3	02	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	2,556,395,395.00	100	2,612,612,710.50	100	2,626,191,723.03	100	2,737,963,159.50	100	10,533,162,988.04
3	02	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	60,000,000.00	100	61,319,451.18	100	61,638,158.04	100	64,261,494.87	100	247,219,104.10
3	02	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	20,000,000.00	100	20,439,817.06	100	20,546,052.68	100	21,420,498.29	100	82,406,368.03
3	02	01	05	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase jumlah wisatawan yang menginap	%	4.51	4.55	4.64	1,723,175,000.00	4.77	1,761,069,088.23	4.78	1,770,222,216.48	4.78	1,845,563,357.14	4.78	7,100,029,661.85
					Jumlah pelaku usaha berbasis ekonomi kreatif	pelaku	1162	1162	1245	-	1249	-	1346	-	1400	-	455	-
3	02	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan		10	11	13	4,500,000,000.00	14	4,598,958,838.79	15	4,622,861,853.36	16	4,819,612,115.51	16	18,541,432,807.66
3	03			Pertanian						2,136,659,600.00		2,183,646,567.31		2,194,996,035.21		2,288,415,665.53		8,803,717,868.05
3	03	01	05	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTANIAN	Produktivitas padi (ton/ha)	ton/ha		8.05	8.12	1,052,679,700.00	8.16	1,075,829,024.61	8.2	1,081,420,628.65	8.24	1,127,446,185.75	8.24	4,337,375,539.01
					Produktivitas jagung (ton/ha)	ton/ha		6.72	6.76		6.78		6.8		7		7	

Urusan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
3	03	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN	Produksi daging (ton)	ton		3289.8	3290	528,535,000.00	3534	540,157,935.52	3605	542,965,397.70	3677	566,074,153.22	3677	2,177,732,486.44
					Produksi telur (ton)	ton		2662.6	2663		2760		2793		2826		2826	
					Produksi susu (liter)	liter		500.6	500.6		529		539		549		549	
3	03	01	07	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU (DBHCHT)	Persentase produksi tembakau yang berkualitas	%	-	-	50	150,000,000.00	55	153,298,627.96	60	154,095,395.11	65	160,653,737.18	65	618,047,760.26
3	03	01	08	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN)	Persentase peserta pelatihan yang memperoleh nilai minimal 80	%	-	60	90	333,685,000.00	95	341,023,017.80	95	342,795,479.45	95	357,384,948.61	95	1,374,888,445.87
3	03	01	09	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTERNAKAN)	Persentase peserta pelatihan yang memperoleh nilai minimal 80	%		-	15	71,759,900.00	15	73,337,961.42	20	73,719,134.29	20	76,856,640.77	35	295,673,636.47
3	06			Perdagangan						13,749,128,750.00		14,051,488,820.10		14,124,516,181.19		14,725,659,444.74		56,650,788,195.99
3	06	01																
3	06	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	1,480,647,250.00	100	1,513,207,946.11	100	1,521,072,820.07	100	1,585,810,094.42	100	6,100,738,110.60
3	06	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	60,000,000.00	100	61,319,451.18	100	61,638,158.04	100	64,261,494.87	100	247,219,104.10
3	06	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	20,000,000.00	100	20,439,817.06	100	20,546,052.68	100	21,420,498.29	100	82,406,368.03
3	06	01	05	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang	%	34.2	35.34	30	5,620,000,000.00	40	5,743,588,594.22	50	5,773,440,803.53	60	6,019,160,019.81	60	23,156,189,417.56

Urusan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
3	06	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERDAGANGAN	Persentase Usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas	%	-	5	5	1,026,870,000.00	5.2	1,049,451,747.29	5.5	1,054,906,255.86	6	1,099,803,354.01	6	4,231,031,357.16
3	06	01	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISONAL	Persentase pasar dalam kondisi baik	%	-	55	60	5,000,000,000.00	65	5,109,954,265.32	70	5,136,513,170.40	75	5,355,124,572.79	75	20,601,592,008.51
3	06	01	08	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	Persentase pelanggar barang kena cukai ilegal	%	-	0	0	41,611,500.00	0	42,526,572.38	0	42,747,603.56	0	44,566,953.23	0	171,452,629.17
3	06	01	09	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERDAGANGAN)	Jumlah Kontak Dagang dengan Daerah Lain		-	1	4	500,000,000.00	5	510,995,426.53	6	513,651,317.04	7	535,512,457.28	20	2,060,159,200.85

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
3	07			Perindustrian					3,369,191,260.00		3,443,282,649.94		3,461,179,056.12		3,606,487,781.37		3,882,140,747.43	
3	07	01	05	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	%	2.37	1.75	2.25	1,650,102,500.00	2.5	1,686,389,661.62	2.75	1,695,154,644.75	3	1,767,300,889.07	13	6,798,947,695.44
3	07	01	06	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBHCHT)	Persentase industri hasil tembakau yang menerapkan GMP	%	-		50		60	0.00	70	0.00	75	0.00	75	
3	07	01	07	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERINDUSTRIAN)	Persentase Industri Kecil Terlatih	%	17.43	6.01	6.25	1,719,088,760.00	6.4	1,756,892,988.32	6.6	1,766,024,411.37	6.9	1,841,186,892.30	6.9	7,083,193,051.99
4				URUSAN PENUNJANG					103,059,496,867.87		105,325,863,120.31		105,873,292,599.36		110,379,288,827.23		148,378,046,382.50	
4	01			Administrasi Pemerintahan					72,658,560,098.00		74,256,383,816.94		74,642,330,177.16		77,819,128,120.82		23,116,507,180.64	
4	01	02																
4	01	02	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	8,539,253,450.00	100	8,727,038,917.89	100	8,772,397,562.26	100	9,145,753,196.67	100	35,184,443,126.83
4	01	02	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	174,836,000.00	100	178,680,792.79	100	179,609,483.33	100	187,253,711.96	100	720,379,988.08
4	01	02	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	66,651,400.00	100	68,117,121.14	100	68,471,158.79	100	71,385,309.99	100	274,624,989.92
4	01	02 01																

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
4	01	02 01	05	PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	Persentase pelaporan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tepat waktu/Persentase fasilitasi pelaporan kinerja daerah	%	-	100	100	2,098,328,750.00	100	2,144,472,789.22	100	2,155,618,652.04	100	2,247,362,370.18	100	8,645,782,561.44
					Persentase OPD yang menyusun LKjiP sesuai aturan yang berlaku	%	17	28.0	64		79		89		100		100	
					Persentase kader/pengurus yang aktif dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan	%	95	80.0	92	-	93	-	94	-	95	-	95	-
					Persentase OPD yang berada pada zona hijau terkait pelayanan publik berdasarkan penilaian Ombustmen	unit	0	8.3	50	-	66.67	-	83.33	-	100	-	100	-
4	01	02 02																
4	01	02 02	06	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	Presentase fasilitasi Bantuan Hukum	%	100	100	100	313,227,285.00	100	320,115,420.20	100	321,779,214.95	100	335,474,226.15	100	1,290,596,146.30
					Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	%	100	100	100		100		100		100		100	
					Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	100	100		100		100		100		100	

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
4	01	02 03																
4	01	02 03	07	PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase fasilitasi pelayanan administrasi di bidang perekonomian dan kesra	%	100	100	100	988,427,850.00	100	1,010,164,221.61		1,015,414,533.90		1,058,630,853.59	100	4,072,637,459.11
4	01	02 03	13	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Persentase jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai	%	100	100	100	443,014,300.00	100	452,756,562.38	100	455,109,757.33	100	474,479,352.81	100	1,825,359,972.51
					Persentase jumlah OPD di kota Blitar yang melaksanakan kegiatan dari DBHCHT sesuai ketentuan	%	97	92	100		100		100		100		100	
					Persentase penyerapan anggaran DBHCHT oleh OPD-OPD	%	100	100	100		100		100		100		100	
					Persentase media di Kota Blitar yang melaksanakan sosialisasi ketentuan umum bidang cukai	%	52.20	47.90	65		70		75		78		80	
4	01	02 03	11	PROGRAM PENINGKATAN NILAI- NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN	Persentase tempat ibadah yang representatif bagi pemeluknya	%	73	82	87	5,750,000,000.00	90	5,876,447,405.12	93	5,906,990,145.96	95	6,158,393,258.70	95	23,691,830,809.78
4	01	02 04																
4	01	02 04	08	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase peingkatan mutu pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah	%	95	100	100	5,000,000,000.00	100	5,109,954,265.32	100	5,136,513,170.40	100	5,355,124,572.79	100	20,601,592,008.51

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
4	01	02 05																
4	01	02 05	09	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	Persentase Pemberitaan Kegiatan Pembangunan di Media Massa	%	70	70	75	4,602,561,300.00	78	4,703,775,549.27	80	4,728,223,347.01	80	4,929,457,823.08	80	18,964,018,019.35
					Persentase kegiatan Kedinasan yag sesuai	%	65	65	70		73		75		78		78	
4	01	02 06																
4	01	02 06	10	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase OPD Kategori tertib administrasi pembangunan	%	-	25	60	600,000,000.00	70	613,194,511.84	80	616,381,580.45	90	642,614,948.73	90	2,472,191,041.02
4	01	02 06	12	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	%	90	96	97	880,694,700.00	98	900,061,927.74	99	904,739,985.13	100	943,245,965.82	100	3,628,742,578.69
4	01	04																
4	01	04	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100		100	3,226,761,027.00	100	3,297,720,254.62	100	3,314,860,102.59	100	3,455,941,453.24	100	13,295,282,837.44
4	01	04	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100		100	449,067,000.00	100	458,942,366.41	100	461,327,711.98	100	480,961,945.31	100	1,850,299,023.70
4	01	04	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	19,918,300.00	100	20,356,320.41	100	20,462,122.06	100	21,332,995.56	100	82,069,738.02

Urusan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
4	01	04	13	PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA	Persentase fasilitasi rapat-rapat DPRD	%	0	-	100	2,882,625,960.00	100	2,946,017,363.92	100	2,961,329,241.78	100	3,087,364,222.51	100	11,877,336,788.21
					Persentase fasilitasi penigkatan kapasitas Anggota DPRD	%	0	-	100		100		100		100		100	
4	01	04	14	PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI FUNGSI PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN DPRD	Persentase fasilitasi tindak lanjut hasil rapat - rapat alat kelengkapan DPRD	%	0	-	100	4,323,938,940.00	100	4,419,026,045.89	100	4,441,993,862.66	100	4,631,046,333.76	100	17,816,005,182.32
4	01	05																
4	01	05 01																
4	01	05 01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100		100	1,546,927,073.00	100	1,580,945,318.96	100	1,589,162,256.82	100	1,656,797,436.19	100	6,373,832,084.97
4	01	05 01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	224,388,900.00	100	229,323,403.33	100	230,515,308.03	100	240,326,102.45	100	924,553,713.81
4	01	05 01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	71,914,800.00	100	73,496,267.80	100	73,878,263.47	100	77,022,542.53	100	296,311,873.79
4	01	05 01	15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persentase pelayanan tepat waktu	%	91	91	91	552,565,550	92	564,716,937.82	93	567,652,045.02	94	591,811,470.98	94	2,276,746,003.81

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
4	01	05 01	16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	5,957,758,721.00	100	6,088,774,917.62	100	6,120,421,227.30	100	6,380,908,025.11	100	24,547,862,891.03
4	01	05 02																
4	01	05 02	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	1,734,725,222.00	100	1,772,873,309.46	100	1,782,087,789.97	100	1,857,933,932.67	100	7,147,620,254.10
4	01	05 02	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	222,401,500.00	100	227,292,298.71	100	228,473,646.77	100	238,197,547.53	100	916,364,993.02
4	01	05 02	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	69,229,500.00	100	70,751,915.76	100	71,119,647.71	100	74,146,519.32	100	285,247,582.79
4	01	05 02	15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persentase pelayanan tepat waktu	%	91	91	91	715,874,100.00	92	731,616,782.15	93	735,419,348.60	94	766,718,996.79	94	2,949,629,227.53

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
4	01	05 02	16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	%	-	100	100	5,322,871,860.00	100	5,439,926,352.95	100	5,468,200,282.65	100	5,700,928,379.06	100	21,931,926,874.66
4	01	05 03																
4	01	05 03	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100		100	1,729,127,010.00	100	1,767,151,988.01	100	1,776,336,732.03	100	1,851,938,108.14	100	7,124,553,838.18
4	01	05 03	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100		100	220,209,000.00	100	225,051,583.76	100	226,221,285.75	100	235,849,325.41	100	907,331,194.92
4	01	05 03	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100		100	71,787,500.00	100	73,366,168.36	100	73,747,487.84	100	76,886,201.05	100	295,787,357.26
4	01	05 03	15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	Persentase pelayanan tepat waktu	%	91	91	91	635,094,400.00	92	649,060,667.63	93	652,434,150.01	94	680,201,925.50	94	2,616,791,143.14

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
4	01	05 03	16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	6,921,450,000.00	100	7,073,658,589.94	100	7,110,423,816.66	100	7,413,045,394.86	100	28,518,577,801.46
4	01	06																
4	01	06	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	2,586,913,000.00	100	2,643,801,423.67	100	2,657,542,539.04	100	2,770,648,274.79	100	10,658,905,237.50
4	01	06	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	60,000,000.00	100	61,319,451.18	100	61,638,158.04	100	64,261,494.87	100	247,219,104.10
4	01	06	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	20,000,000.00	100	20,439,817.06	100	20,546,052.68	100	21,420,498.29	100	82,406,368.03
4	01	06	17	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	Persentase penanganan kejadian bencana	%	100	100	100	203,371,900.00	100	207,844,221.57	100	208,924,488.57	100	217,816,371.82	100	837,956,981.96
4	01	06	18	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT	Persentase potensi konflik terdeteksi yang ditangani	%	100	100	100	547,531,000.00	100	559,571,673.77	100	562,480,038.54	100	586,419,342.49	100	2,256,002,054.80

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
					2.Persentase penanganan penyakit masyarakat	%	100	100	100	85,488,000.00	100	87,367,954.05	100	87,822,047.58	100	91,559,777.90	100	352,237,779.52
4	01	06	19	PROGRAM PEMBAURAN DAN PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase penduduk usia 14-59 tahun yang mengikuti peningkatan wasbang	%	50	60%	70	743,624,800	80	759,977,743.71	90	763,927,715.81	100	796,440,687.88	100	3,063,970,947.40
4	01	06	20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK DAN PENGUATAN DEMOKRASI	Persentase penduduk pemilih yang menggunakan hak pilih	%	79	79	80	1,511,000,000.00	81	1,544,228,178.98	81	1,552,254,280.10	82	1,618,318,645.90	82	6,225,801,104.97
					Persentase ormas/orpol yang dibina sesuai aturan	%	70	72	74	545,000,000.00	76	556,985,014.92	78	559,879,935.57	80	583,708,578.43	80	2,245,573,528.93
4	02			Pengawasan						1,884,732,900.00		1,926,170,784.27		1,956,191,072.71		2,018,595,893.18		7,765,499,650.16
4	02	01																
4	02	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100		100	743,793,900.00	100	760,150,562.36	100	764,101,432.68	100	796,621,798.20	100	3,064,667,693.24
4	02	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100		100	60,000,000.00	100	61,319,451.18	100	61,638,158.04	100	64,261,494.87	100	247,219,104.10
4	02	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100		100	20,000,000.00	100	20,439,817.06	100	20,546,052.68	100	21,420,498.29	100	82,406,368.03
4	02	01	06	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan yang berindikasi kerugian daerah	%	83	90	82	1,060,939,000.00	83	1,084,269,953.66	85	1,089,905,429.30	87	1,136,292,101.83	87	4,371,406,484.78

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
					Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditangani	%	100	95	95	-	96	-	98	-	100	-	85	-
					Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	78%	75,34%	90%	-	90	-	90	-	90	-	90	-
					Persentase hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	57,04%	80,12%	85%	-	87,5	-	87,5	-	87,5	-	87,5	-
					Persentase SPIP OPD yang telah dievaluasi	%	0	0	40	-	60	-	80	-	100	-	100	-
					Persentase OPD yang telah diusulkan sebagai zona integritas	%	0	0	7	-	14	-	21	-	28	-	28	-
					Persentase SAKIP OPD yang telah dievaluasi	%	21.74	56,25	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
4	03			Perencanaan						3,199,169,600.00		3,269,460,749.15		3,286,453,718.79		3,426,326,086.00		43,181,350,153.94
4	03	01																
4	03	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	600,500,000.00	100	613,705,507.26	100	616,895,231.77	100	643,150,461.19	100	2,474,251,200.22
4	03	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	405,000,000.00	100	413,906,295.49	100	416,057,566.80	100	433,765,090.40	100	1,668,728,952.69
4	03	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	61,000,000.00	100	62,341,442.04	100	62,665,460.68	100	65,332,519.79	100	251,339,422.50
4	03	01	07	PROGRAM PENDUKUNG PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Peserta musrenbang aktif	%	-	-	7	428,609,600.00	8	438,035,090.74	9	440,311,771.07	10	459,051,560.22	10	1,766,008,022.03

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
4	03	01	05	PROGRAM PERENCANAAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Persentase kesesuaian indikator tujuan Renstra SKPD dengan sasaran RPJMD	%	-	100	100	965,000,000.00	100	986,221,173.21	100	991,347,041.89	100	1,033,539,042.55	100	3,976,107,257.64
					Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan infrastruktur	%	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
					Persentase pemanfaatan dokumen perenc. ekonomi		100	96%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
4	03	01	06	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	100	100%	100	739,000,000.00	100	755,251,240.41	100	759,176,646.59	100	791,487,411.86	100	3,044,915,298.86
					Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sosial budaya yang ditindaklanjuti	%	100	96%	55	-	65		75		85		85	
4	04			Keuangan						10,948,358,145.00		11,189,124,880.26		11,247,277,161.21		11,725,964,346.79		45,110,721,533.26
4	04	01																
4	04	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	3,407,277,940.00	100	3,482,206,888.53	100	3,500,305,602.81	100	3,649,279,564.56	100	14,039,069,995.89
4	04	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	60,000,000.00	100	61,319,451.18	100	61,638,158.04	100	64,261,494.87	100	247,219,104.10

Urusan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
4	04	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	20,000,000.00	100	20,439,817.06	100	20,546,052.68	100	21,420,498.29	100	82,406,368.03
4	04	01	06	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan target Pajak Daerah	%	-	7.75	21	989,064,675.00	30	1,010,815,050.94	38	1,016,068,745.90	48	1,059,312,909.03	48	4,075,261,380.88
4	04	01	07	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	-	7.75	21	1,838,684,330.00	30	1,879,118,566.93	38	1,888,885,255.45	48	1,969,276,727.44	48	7,575,964,879.82
4	04	01	10	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang tertib laporan keuangan daearh	%	100	100	100	1,162,083,700.00	100	1,187,638,911.89	100	1,193,811,646.03	100	1,244,620,595.50	100	4,788,154,853.43
					Persentase peingkatan tertib pegelolaan Akuntansi keuangan Daerah	%	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	
					Persentase perangkat Daerah yang tertib laporan semesteran dan	%	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	
4	04	01	09	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase peningkatan tertib perencanaan keuanngan daerah	%	100	100	100	1,468,092,400.00	100	1,500,377,004.25	100	1,508,175,189.59	100	1,572,363,537.27	100	6,049,008,131.12

Urutan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
4	04	01	05	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN DAERAH	Persentase peningkatan tertib penatausahaan keuangan daerah	%	90	90	92	583,924,800.00	93	596,765,804.48	94	599,867,485.14	95	625,398,009.03	95	2,405,956,098.65
4	04	01	08	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Persentase penyajian data keuangan dan Aset Daerah	%	90	90	92	1,419,230,300.00	93	1,450,440,384.99	94	1,457,979,025.56	95	1,520,031,010.79	95	5,847,680,721.34
4	05			Keppegawajan						7,188,930,125.00		7,295,921,288.41		7,333,841,721.98		7,645,972,027.16		29,414,665,182.56
4	05	01																
4	05	01	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	%	100	-	100	4,215,750,000.00	100	4,308,457,938.80	100	4,330,851,079.62	100	4,515,173,283.54	100	17,370,232,301.97
4	05	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	%	100	-	100	109,000,000.00	100	111,397,002.98	100	111,975,987.11	100	116,741,715.69	100	449,114,705.79
4	05	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun, tepat waktu dan sesuai aturan	%	100	-	100	29,250,000.00	100	29,893,232.45	100	30,048,602.05	100	31,327,478.75	100	120,519,313.25

Urusan	Bidang	OPD	Program	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program(outcome)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2015	2016	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8		9		11	12	13	14	15	16	17	
4	05	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	%	-	87	92	2,662,231,225.00	95	2,720,775,960.69	97	2,734,917,149.97	99	2,851,315,970.29	100	10,969,240,305.95
4	05	01	06	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian aparatur yg pindah/purna tugas	%	-	100	100	122,698,900.00	100	125,397,153.48	100	126,048,903.17	100	131,413,578.89	100	505,558,535.54
4	06			Pendidikan dan Pelatihan						6,924,805,999.87		7,077,088,391.11		7,113,871,444.16		7,416,639,754.34		28,532,405,589.48
4	06	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	25	35%	55	6,924,805,999.87	65	7,077,088,391.11	75	7,113,871,444.16	85	7,416,639,754.34	85	28,532,405,589.48
4	07			Penelitian dan Pengembangan						305,000,000.00		311,707,210.18		313,327,303.39		326,662,598.94		1,256,697,112.52
4	07	01	05	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan	%	100	87	92	305,000,000.00	95	311,707,210.18	97	313,327,303.39	99	326,662,598.94	100	1,256,697,112.52
										512,977,494,158.87		524,258,306,857.91		526,983,130,973.36		549,411,676,851.32		1,837,370,713,809.19

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18
Dinas Pendidikan

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18
Dinas Sosial

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Lingkungan Hidup

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sekretariat Daerah
Bagian Tata Pemerintahan

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18
Bagian Hukum dan Organisasi

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18
Bagian Humas dan Protokol
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Sekretariat DPRD

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18
Kecamatan
Kecamatan Kepanjenkidul

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18
Kecamatan Sukorejo

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18
Kecamatan Sananwetan

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18
BaKesaBangPol dan PD

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

18

Inspektorat

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18

B A B IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Salah satu cara mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah (kabupaten/kota) adalah dengan melihat indikator kinerja daerah yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Tingkat akurasi untuk mendapatkan hasil pengukuran sangat tergantung pada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil dan capaian pembangunan, sehingga mampu menggambarkan perbandingan antara kondisi awal/sebelumnya dengan kondisi setelah adanya program dan kegiatan pembangunan. Disamping itu, indikator kinerja ini merupakan salah satu perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar pada akhir periode masa jabatan tahun 2021. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kota Blitar tahun 2016-2021 yang telah direncanakan.

Guna memberikan gambaran target pembangunan sekaligus target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Blitar, maka disajikan indikator kinerja daerah. Target Capaian Indikator Tujuan RPJMD Kota Blitar 2016-2021, kemudian menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Blitar ditunjukkan pada tabel 9.1 dan target capaian indikator sasaran RPJMD yang menjadi indikator kinerja daerah yang meliputi 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing (tabel 9.2).

TABEL 9.1

Penetapan Target Capaian Indikator Kinerja Utama (Indikator Kinerja Tujuan RPJMD Kota Blitar 2016-2021)

NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET CAPAIAN					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	NA	NA	80	80	80	80	80	80
2	Indeks Pendidikan	0,70	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,78	0,78
3	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	5.68	5.76	5,81	5,86	5,90	5,95	6,00	6,00
4	Nilai PDRB per kapita ADHB (Rp. 000)	34,944.23	37,719.22	40,494.22	43,269.21	46,044.20	48,819.19	51,594.19	51,594.19
5	Nilai PDRB per kapita ADHK (Rp. 000)	27,967.84	29,269.50	30,571.17	31,872.83	33,174.49	34,476.15	35,777.82	35,777.82
6	Nilai kontribusi pariwisata terhadap PDRB (ADHB) (Rp. Juta)	240,316.20	264,865.88	289,415.61	313,965.33	338,515.06	363,064.78	387,614.51	387,614.51
7	Angka kemiskinan	7.29	6.72*)	6,72	6,61	6,49	6,39	6,28	6,28
8	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.8	-	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57.94	59.65	61.90	62.20	62.54	63.14	63,48	63,48

NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET CAPAIAN					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	NA	79,40	86.96	88.96	91.01	93.01	95.00	95.00
11	Indeks Kesehatan	0.81	0.82	0.81	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
12	Persentase rumah layak huni	95.00	95.64	96.28	96.92	97.56	98.20	98.85	98.85
13	Persentase kasus kriminalitas yang tertangani	55.19	55.20	55.22	55.23	55.24	55.26	55.27	55.27
14	Indeks Reformasi Birokrasi	61.26	62.71	64.00	65.50	67.50	68.50	70.00	70.00
15	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Tabel 9.2
 Penetapan Target Capaian Indikator Kinerja Daerah (Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Blitar 2016-2021)

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun RPJMD (2021)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	PDRB ADHB (Rp.000.000)	4.819.089	5.332.286,72	5.929.670	6.577.538	7.296.191	8.093.363	8.977.633	8.977.633
2	PDRB ADHK(Rp.000.000)	3.856.989	4.079.258,84	4.345.630	4.612.697	4.896.177	5.197.078	5.516.473	5.516.473
3	Nilai Kontribusi PDRB ADHB Sektor Perdagangan (Rp.000.000)	975.943	1.109.313,45	11,44 (1,212,005)	11,44 (1,350,655)	11,44 (1,505,166)	11,44 (1,677,352)	11,44 (1,869,237)	11,44 (1,869,237)
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.68	5.76	5.81	5.86	5.90	5.95	6.00	6.00
5	PDRB Perkapita ADHB (Rp.000)	34,944.23	38.329,51	40,494.22	43,269.21	46,044.20	48,819.19	51,594.19	51,594.19
6	PDRB Perkapita ADHK (Rp.000)	27,967.84	29.322,50	30,571.17	31,872.83	33,174.49	34,476.15	35,777.82	35,777.82
7	Indeks Gini	0,34	0,34*)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
8	Angka Kemiskinan (%)	6,82	6,72*)	6,72	6,61	6,49	6,39	6,28	6,28
9	IPM	76,00	76,71	77,88	78,64	79,40	80,16	81,32	81,32
10	Indeks Pendidikan	0,705	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,78	0,78
11	Indeks Kesehatan	0.815	0,82	0.81	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun RPJMD (2021)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
12	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,87	9,88	10,05	10,14	10,23	10,32	10,41	10,41
13	Angka Partisipasi Murni SD (SD/SDLB/MI)	95,89%	96,28%	96,47%	96,65%	96,84%	97,02%	97,21%	97,21%
14	Angka Partisipasi Murni SMP (SMP/SMPLB/MTs)	90,31%	92,33%	93,52%	93,70%	93,89%	94,07%	94,26%	94,26%
15	Angka Kematian Bayi (%)	8,30	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92
16	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,00	73,09	73,82	74,05	74,28	74,51	74,65	74,65
II.	ASPEK PELAYANAN UMUM								
a.	Wajib Pelayanan Dasar								
1	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS	90,31%	93,33%	93,52%	93,70%	93,89%	94,07%	94,26%	94,26%
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Angka Kelulusan SMP/MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Angka Kematian Ibu (/100.000 kelahiran hidup)	48,8	236,18	188,94	188,94	141,71	141,71	94,50	94,50
5	Angka kematian bayi (/1.000 kelahiran hidup)	8,30	9,92	8,88	8,68	8,48	8,28	8,08	8,08
6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakir Mardi Waluyo	75,70	77,14	77,14	77,14	77,50	77,50	78,00	78,00
7	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	71,97%	73,84%	75,71%	77,58%	79,45%	81,32%	83,18%	83,18%

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun RPJMD (2021)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	27,63%	32,10%	37,92%	42,75%	47,94%	52,19%	58,91%	58,91%
9	Persentase Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dalam kondisi baik	NA	79.4%	79.60%	79.80%	80.00%	80.20%	80.40%	80.40%
10	Indeks Gini	0,34	0,34*)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
11	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	NA	NA	84%	85%	86%	87%	88%	88%
12	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	NA	NA	2%	4%	6%	8%	10%	10%
13	Persentase Penanganan Potensi Kasus SARA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b.	Wajib Non Pelayanan Dasar								
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,46	72,00	72,00	73,10	73,65	74,20	74,76	74,76
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,23	98,23*)	9823	98,23	98,23	98,23	98,24	98,24
16	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,22	67,22*)	67,57	67,57	67,57	67,57	67,57	67,58
17	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	79,91	80,40	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00
19	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	79,80	81,30	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun RPJMD (2021)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Indeks Pencemaran Udara	88,31	99,00	98,00	98,00	98,00	99,00	99,00	99,00
21	Indeks Tutupan Vegetasi	41.13	41,13	41,50	41,50	41,60	41,60	41,70	41,70
22	Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2 eq)	209,912	208.262	208.031	207.801	207.571	207.111	206.651	206.651
23	Persentase Mata Air yang berfungsi	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%
24	Predikat Pengelolaan Lingkungan	Adipura	Adipura Buana	Adipura Buana	Adipura buana	Adipura buana	Adipura kirana	Adipura kirana	Adipura kirana
25	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani IPAL Komunal	4,7%	4,9 %	5,5%	5,6 %	5,6 %	5,7 %	5,8 %	5,8%
26	Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan	90,00%	93,49%	93,80%	94,00%	94,40%	94,60%	95,00%	95,00%
27	Indeks Minat Baca	NA	NA	40	42	44	46	48	48
28	Persentase tempat ibadah aktif	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
29	Rasio Pengajar Ilmu Agama dengan Jumlah Penduduk	1:110	1:100	1:90	1:80	1:70	1:60	1:50	1:50
30	Survey Kepuasan Masyarakat bidang kependudukan dan capil	NA	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun RPJMD (2021)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Persentase Pertumbuhan Penduduk	146.155	152.097	1,22% (153,957)	1,22% (155,841)	1,22% (157,748)	1,22% (159,678)	1,22% (161,632)	1,22% (161,632)
32	Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik	75,00%	77,75%	80,50%	83,75%	87,00%	89,75%	93,00%	93,00%
33	Persentase Peningkatan PDRB Usaha Mikro	19,31% (177.564 juta rupiah)	16,04% (206.056 juta rupiah)	15,84% (238.262 juta rupiah)	15,84% (275.997 juta rupiah)	15,84% (319.709 juta rupiah)	15,84% (370.343 juta rupiah)	15,84% (428.997 juta rupiah)	15,84% (428.997 juta rupiah)
34	Nilai investasi (Milyar Rupiah)	158,73	160,77	161,60	163,20	164,80	166,40	166,67	166,67
35	Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perijinan	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik
36	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	NA	50%	50%	58%	58%	66%	66%	66%
37	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	NA	50%	50%	58%	58%	66%	66%	66%
38	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	65%	65%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
39	Indeks Minat Baca	NA	NA	40	42	44	46	48	48
40	Persentase Arsip Daerah yang dilakukan Penyelamatan dan Pelestarian	NA	22,75 (11.373 lbr)	38,75 (19.373 lbr)	54,75 (27.373 lbr)	74,75 (35.373 lbr)	86,75 (43.373 lbr)	100 (50.000 lbr)	100 (50.000 lbr)

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun RPJMD (2021)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan	2,97% (2.804.244)	3,4%	5,2%	6,6%	7,7%	8,6%	9,2%	9,2%
42	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Hotel dan Restoran	240.316	14,88% (240.316 juta rp)	15,26% (277.001 juta rp)	14,05% (356.460 juta rp)	14,05% (406.525 juta rp)	14,05% (463.622 juta rp)	14,05% (528.738 juta rp)	14,05% (528.738 juta rp)
43	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif Unggul	1.162 pelaku	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
c.	Urusan Pilihan								
44	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	12,41% (975.943 juta rp)	13,66% (1.109.313 juta rp)	11,44% (1.212.005 juta rp)	11,44% (1.350.655 juta rp)	11,44% (1.505.166 juta rp)	11,44% (1.677.352 juta rp)	11,50% (1.869.237 juta rp)	11,50% (1.869.237 juta rp)
45	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri	12,39% (457.012 juta rp)	9,92% (502.362 juta rp)	11,36% (566.707 juta rp)	11,36% (631.067 juta rp)	11,36% (702.735 juta rp)	11,36% (782.542 juta rp)	11,70% (871.413 juta rp)	11,70% (871.413 juta rp)
46	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Perencanaan Baik	60%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
47	Pesentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	15,74%	15,79%	15,84%	15,9%	15,95%	16,00%	16,00%	16,00%
48	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	NA	NA	70	73	75	78	80	80
49	Nilai Evaluasi SAKIP	C	B	B	BB	BB	BB	A	A

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun RPJMD (2021)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
51	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai minimal “Baik” (B)	30%	30%	50%	75%	100%	100%	100%	100%
52	Persentase Penerapan Layanan Pemerintahah dan Layanan Publik berbasis TIK yang terintegrasi	22%	24%	27%	31%	42%	58%	73%	73%
53	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
54	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
55	Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	NA	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik
III.	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA)	374	70,85	18,00	8,97	3,98	1,53	0,67	0,67
2	Indeks Demokrasi Indonesia	NA	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6	73,6

B A B X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 merupakan arah pembangunan daerah yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Blitar masa bhakti tahun 2016-2021. Dalam penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 ini mempertimbangkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur guna menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan Kota Blitar sampai dengan tahun 2021.

Untuk mencapai keterpaduan dan keberlanjutan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Blitar wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu *efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi* dalam melaksanakan kegiatan guna mewujudkan pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021.

10.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan wujud regulasi dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2021, sehingga kegiatan Pemilihan Kepala Daerah tidak boleh memutuskan proses pemerintahan dan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan semula. Oleh karena itu dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dimaksud, pemerintah Kota Blitar tetap menyusun RKPD Kota Blitar Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2016-2021 sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan urusan pembangunan, Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD yang disusun dan ditetapkan dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.
2. Perubahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, mulai Tahun 2018 sampai tahun 2021. Sedangkan capaian program dan kegiatan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2016 menjadi data/kondisi awal untuk menetapkan target-target capaian program tahun 2018-2021, dan posisi RKPD Kota Blitar Tahun 2017 sebagai tahun pelaksanaan perubahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 sehingga potret APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2017 sebagai turunan dan penjabaran program/kegiatan RKPD Tahun 2017 akan disajikan secara terpisah dari Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan, tetapi tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016-2021, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

3. RPJMD Kota Blitar digunakan dalam penyusunan RKPD

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar mulai tahun 2018 sampai tahun 2021 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan RAPBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2021. RKPD merupakan implementasi RPJMD yang berisi rencana program dan kegiatan SKPD berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah.

4. Penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan RPJMD

Perubahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 dalam penyusunannya telah melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan dalam upaya menghasilkan RPJMD Kota Blitar yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021

RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 merupakan dasar untuk mengevaluasi laporan kinerja Walikota dan Wakil Walikota Blitar terpilih untuk jangka menengah dan tahunan, dimana visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai selaras dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Blitar terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021;

6. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah indikator dan target kinerja Kota. Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut. Selain itu, Perangkat Daerah juga wajib menetapkan indikator dan target kinerja bagi kepentingan masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya;

7. Walikota Blitar berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 kepada masyarakat.
8. Dalam hal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.